PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPD
KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2023 – 2026

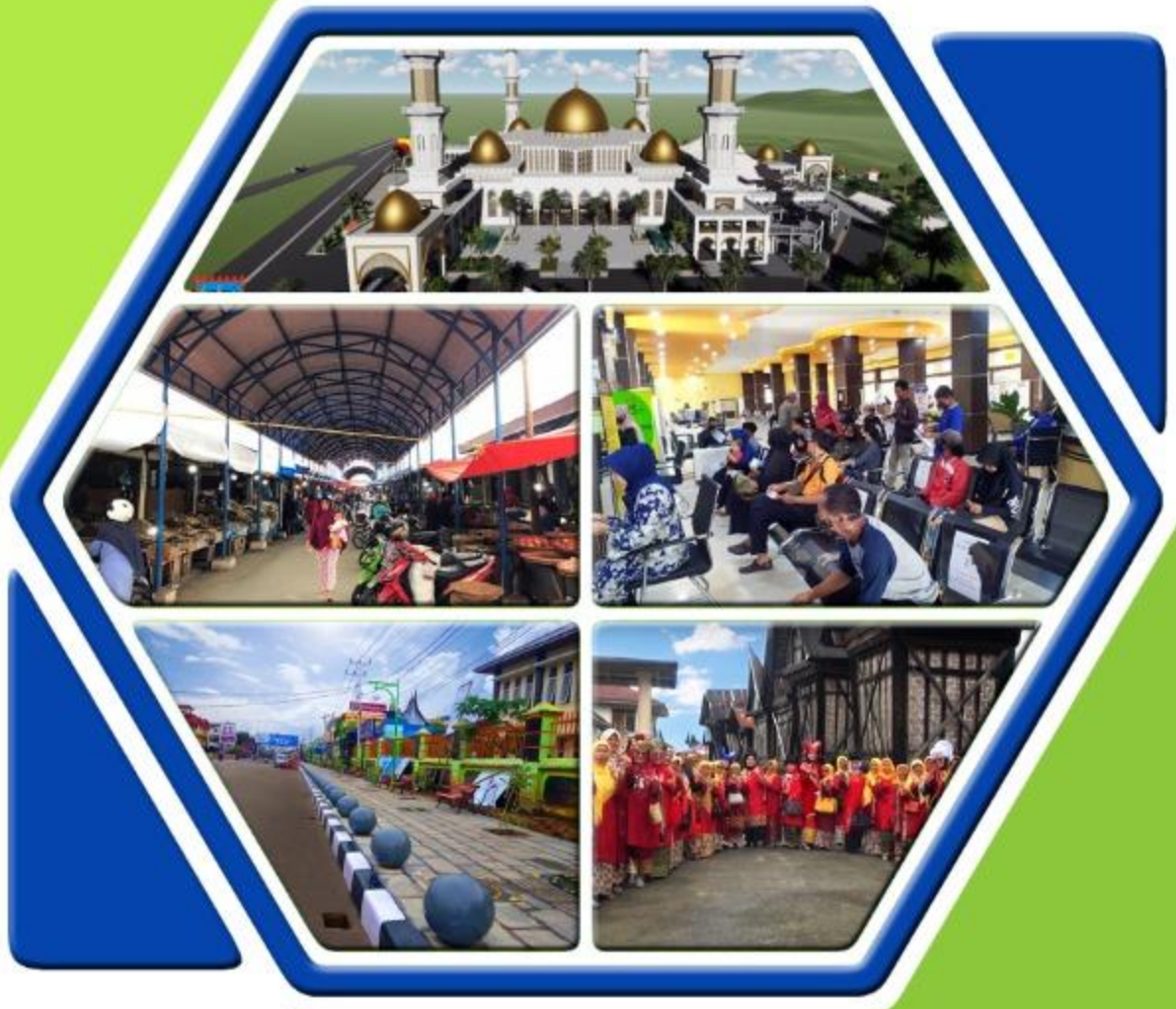

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 menjadikan daerah harus dipimpin oleh Penjabat kepala daerah karena masa jabatan dan juga periodesasi dokumen perencanaan menengah daerah berakhir;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penjabat (Pj.) kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang□Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang□Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (Empat) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (Empat) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka menengah dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat Kota Payakumbuh.

17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
18. Sasaran adalah terget atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

1) RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
2) RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam RKPD;
3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan

dan belanja Daerah.

Pasal 3

RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
b. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2040;
c. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 - 2025;
d. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 -2022;
e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
f. Isu strategis dan kebijakan nasional; dan
g. Peraturan perundang -undangan.

Pasal 4

1) Maksud RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
2) RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi:
    a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan

program prioritas pembangunan selama empat tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Pasal 5

RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berakhir.

Pasal 6

(1) RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I Pendahuluan
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
   c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
   d. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
   e. BAB V Tujuan dan Sasaran
   f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
   g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
   h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
   i. BAB IX : Penutup

(2) RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perubahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

Pasal 10

Perubahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR DIAGRAM ..... **xii**
BAB I. PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang **I-1**
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-6
1.4 Tahapan Penyusunan Perencanaan I-6
1.5 Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ..... I-11
BAB II. GAMBARAN UMUM **II-1**
2.1 Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi II-1
2.1.1.2 Aspek Geologi II-8
2.1.1.3 Potensi Sumber Daya II-9
2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana II-13
2.1.1.5 Demografi II-14
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-18
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-19
2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial II-24
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-29
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-31
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-31
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-99
2.1.3.3 Unsur Pendukung II-111
2.1.3.4 Unsur Penunjang II-112
2.1.3.5 Unsur Pengawasan II-116
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-117
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-117
2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur II-119
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-120
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-123
2.1.5 Gambaran Wabah Covid-19 di Kota Payakumbuh II-125
2.1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-127
2.1.7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-205
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-11

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-12
3.1.2 Neraca Daerah III-24
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-26
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-28
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-29
3.3 Kerangka Pendanaan III-31
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah III-36
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-36
3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah III-37
3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah III-38
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-39
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Secara Makro IV-1
4.1.2 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan IV-14
4.2 Isu Steategis IV-21
4.2.1 Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global IV-22
4.2.2 Penentuan Isu Strategis IV-50
BAB V. TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Tujuan V-2
5.2 Sasaran V-2
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.1.1 Strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran VI-1
6.1.2 Strategi Untuk Mendukung Penanganan Covid-19 ..... VI-3
6.2 Arah Kebijakan VI-4
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Makro VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama VIII-1
8.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci VIII-3
BAB IX. PENUTUP IX-1

LAMPIRAN I Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

LAMPIRAN II Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota

Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daerah Yang Berakhir Masa Kepemimpinan Kepala Daerahnya di Tahun 2022-2024	I-1
Tabel I.2	Variasi Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2022,2023 dan 2024	I-2
Tabel II-1	Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh	II-2
Tabel II-2	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-3
Tabel II-3	Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-5
Tabel II-4	Luas Penggunaan Lahan menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-7
Tabel II-5	Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Ha)	II-7
Tabel II-6	Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-8
Tabel II-7	Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-8
Tabel II-8	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021	II-10
Tabel II-9	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017-2021	II-11
Tabel II-10	Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2017-2021	II-12
Tabel II-11	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021	II-13
Tabel II-12	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017-2021	II-14
Tabel II-13	Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-14
TAbel II-14	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-16
Tabel II-15	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-17
Tabel II-16	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-18
Tabel II-17	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-19
Tabel II-18	Capaian Indikator HDI Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-21
Tabel II-19	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-22
Tabel II-20	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-23
Tabel II-21	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021	II-24
Tabel II-22	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-25
Tabel II-23	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-26
Tabel II-24	Rasio Penduduk Bekerja Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-27
Tabel II-25	Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-27
Tabel II-26	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-29
Tabel II-27	Prestasi Olahraga Tahun 2017 - 2021	II-30
Tabel II-28	Sarana Prasarana olahraga Tahun 2021	II-31
Tabel II-29	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2017-2021 Kota Payakumbuh	II-32
Tabel II-30	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-33

Tabel II-31	Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021	II-35
Tabel II-32	Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021	II-35
Tabel II-33	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021	II-36
Tabel II-34	Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2021	II-36
Tabel II-35	Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-37
Tabel II-36	Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	II-37
Tabel II-37	Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	II-39
Tabel II-38	Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-40
Tabel II-39	Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh	II-41
Tabel II-40	Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Berkategori Baik Tahun 2021	II-42
Tabel II-41	Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Tahun 2017-2021	II-44
Tabel II-42	Jumlah Posyandu dan Balita Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-44
Tabel II-43	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanKota Payakumbuh Tahun 2021	II-44
Tabel II-44	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-45
Tabel II-45	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-45
Tabel II-46	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawatan di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-46
Tabel II-47	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-46
Tabel II-48	Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-47
Tabel II-49	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-47
Tabel II-50	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021	II-47
Tabel II-51	Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-48
Tabel II-52	Cakupan Puskesmas Per kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-48
Tabel II-53	Cakupan Pustu Per kelurahanKota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-48
Tabel II-54	10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-49
Tabel II-55	Data Prevalensi HIV/ AIDS Tahun 2017-2021	II-50
Tabel II-56	Jumlah Penyakit Menular Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-50
Tabel II-57	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-50
Tabel II-58	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-51
Tabel II-59	Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase Tahun 2017-2021	II-52
Tabel II-60	Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh yang Memiliki Trotoar Tahun 2017-2021	II-52
Tabel II-61	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-52

Tabel II-62	Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-53
Tabel II-63	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-53
Tabel II-64	Persentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-54
Tabel II-65	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2017 - 2021	II-54
Tabel II-66	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-55
Tabel II-67	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-55
Tabel II-68	Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-56
Tabel II-69	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2021	II-57
Tabel II-70	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-57
Tabel II-71	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-58
Tabel II-72	Luas Kawasan Kumuh Kota PayakumbuhTahun 2021	II-59
Tabel II-73	Backlog Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-59
Tabel II-74	Backlog Kepemilikan Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-60
Tabel II-75	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-60
Tabel II-76	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-61
Tabel II-77	Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2017-2021	II-61
Tabel II-78	Data Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK) Tahun 2017 - 2020	II-61
Tabel II-79	Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2017-2021	II-62
Tabel II-80	Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Payakumbuh tahun 2017-2021	II-62
Tabel II-81	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-63
Tabel II-82	Data Keluarga Penerima Manfaat Memperoleh program Sembako Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-63
Tabel II-83	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2021	II-64
Tabel II-84	Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2017-2020	II-65
Tabel II-85	Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-65
Tabel II-86	Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-66
Tabel II-87	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017-2021	II-67
Tabel II-88	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran tahun 2017-2021	II-68
Tabel II-89	Capaian terkait Kota Layak Anak tahun 2017-2021	II-69
Tabel II-90	Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat	II-70
Tabel II-91	Data Keamanan Pangan selama PeriodeTahun 2017-2021	II-71
Tabel II-92	Data Capaian Urusan Pertanahan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021	II-71
Tabel II-93	Data Baku Mutu Sungai Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-72

Tabel II-94	Data Baku Mutu Sungai Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-73
Tabel II-95	Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-76
Tabel II-96	Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-76
Tabel II-97	Volume dan Produksi Sampah Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021	II-77
Tabel II-98	Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-77
Tabel II-99	Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-78
Tabel II-100	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-75
Tabel II-101	Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2021	II-79
Tabel II-102	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-80
Tabel II-103	Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2021	II-81
Tabel II-104	Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per KecamatanTahun 2022	II-82
Tabel II-105	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-83
Tabel II-106	Tingkat Kepesertaan KB Aktif tahun 2017 - 2021	II-83
Tabel II-107	Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-84
Tabel II-108	Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-84
Tabel II-109	Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2021	II-85
Tabel II-110	Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-85
Tabel II-111	Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-86
Tabel II-112	Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-86
Tabel II-113	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-87
Tabel II-114	Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2017–2021	II-88
Tabel II-115	Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021	II-88
Tabel II-116	Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-89
Tabel II-117	Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-90
Tabel II-118	Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-91
Tabel II-119	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2021	II-92
Tabel II-120	Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021	II-92
Tabel II-121	Prestasi Olahraga Tahun 2017 - 2021	II-93
Tabel II-122	Sarana Prasarana olahraga Tahun 2021	II-95
Tabel II-123	Perkembangan Kinerja Persandian di Kota Payakumbuh tahun 2020 – 2021	II-96
Tabel II-124	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021	II-97
Tabel II-125	Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-98
Tabel II-126	Perkembangan Kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-98
Tabel II-127	Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017 - 2021	II-99
Tabel II-128	Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-100
Tabel II-129	Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-100
Tabel II-130	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-101
Tabel II-131	Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-102

Tabel II-132	Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-102
Tabel II-133	Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-103
Tabel II-134	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2017 - 2021.....	II-103
Tabel II-135	Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat KesuburanTahun 2017 – 2021.....	II-103
Tabel II-136	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021 (ton dan ton/ha).....	II-104
Tabel II-137	Produktifitas Peternakan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-105
Tabel II-138	Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2017 - 2021.....	II-106
Tabel II-139	Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-106
Tabel II-140	Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2017 - 2021.....	II-107
Tabel II-141	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2017 - 2021.....	II-108
Tabel II-142	Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-108
Tabel II-143	Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-109
Tabel II-144	Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2021.....	II-110
Tabel II-145	Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah.....	II-112
Tabel II-146	Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD	II-112
Tabel II-147	Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 - 2021	II-113
Tabel II-148	Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Tahun 2017 - 2021.....	II-113
Tabel II-149	Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2017 - 2021	II-114
Tabel II-150	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional TertentuTahun 2017 - 2021.....	II-114
Tabel II-151	Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021.....	II-115
Tabel II-152	Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-116
Tabel II-153	Data capaian TLHP Inspektorat tahun 2017 - 2021 Uraian 2017 2018 2019 202.....	II-117
Tabel II-154	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-117
Tabel II-155	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-118
Tabel II-156	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021 ...	II-119
Tabel II-157	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-119
Tabel II-158	Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-119
Tabel II-159	Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2017 - 2021 Kota Payakumbuh.....	II-120
Tabel II-160	Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-120
Tabel II-161	Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-121
Tabel II-162	Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-121
Tabel II-163	Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2021.....	II-122
Tabel II-164	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2017 – 2021.....	II-124
Tabel II-165	Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	II-124
Tabel II-166	Data Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh 2020 -2021.....	II-125

Tabel II-167	Karakteristik Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-126
Tabel II-168	Jumlah penerima vaksin covid Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-127
Tabel II-169	Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Tahun 2017-2021 RPJMD Kota Payakumbuh	II-128
Tabel II-170	Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan Tahun 2017-2021 RPJMD Kota Payakumbuh	II-129
Tabel II-171	Evaluasi Program RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022	II-138
Tabel II-172	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020	II-201
Tabel III-1	Komposisi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2021	III-13
Tabel III.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-14
Tabel III.3	Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021	III-16
Tabel III-4	Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021	III-17
Tabel III-5	Komposisi Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d Bulan 2020	III-18
Tabel III-6	Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 -2020	III-19
Tabel III-7	Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	III-19
Tabel III-8	Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021	III-21
Tabel III-9	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021 (dalam Milyar Rupiah)	III-21
Tabel III-10	APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan 2022	III-23
Tabel III-11	Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2020	III-25
Tabel III-12	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2020	III-25
Tabel III-13	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)	III-28
Tabel III-14	Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	III-29
Tabel III-15	Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	III-29
Tabel III-16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	III-30
Tabel III-17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021	III-31
Tabel III-18	Realisasi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	III-33
Tabel III-19	Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2021	III-36
Tabel III-20	Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026	III-37
Tabel III-21	Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	III-37
Tabel III-22	Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026	III-38

Tabel III-23	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	III-39
Tabel III-24	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	III-40
Tabel IV-1	Perbandingan Nilai IPM Kota Payakumbuh Tahun 2020 dengan 2019 dan Tahun 2021 dengan 2020.....	IV-6
Tabel IV-2	Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021.....	IV-8
Tabel IV-3	Perkembangan Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021.....	IV-9
Tabel IV-4	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2021	IV-10
Tabel IV-5	Perkembangan Prasarana dan Sarana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	IV-11
Tabel IV-6	Tingkat Pelanggaran Asusila Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021.....	IV-13
Tabel IV-7	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	IV-13
Tabel IV.8	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Kota Payakumbuh Tahun 2030	IV-38
Tabel IV.9	Proyeksi Kebutuhan Jaringan telepon (Kabel) di Kota Payakumbuh Tahun 2030.....	IV-39
Tabel IV.10	Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat.....	IV-43
Tabel IV.11	Kawasan Pertanian Holtikultura di Provinsi Sumatera Barat.....	IV-44
Tabel IV.12	Kawasan Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sumatera Barat	IV-45
Tabel IV.13	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat ..	IV-45
Tabel IV.14	Wilayah Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.....	IV-46
Tabel IV.15	Daya Tarik Wisata Unggulan	IV-47
Tabel IV.16	Kawasan Pengembangan dan komoditi Perikanan Budidaya	IV-48
Tabel IV-17	Rencana Penumbuhan Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur .	IV-49
Tabel IV-18	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 di Kota Payakumbuh	IV-49
Tabel IV-19	Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	IV-50
Tabel IV-20	Persandingan Keselarasan Isu Strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPD Kota Payakumbuh	IV-63
Tabel V.1	Keselarasan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005–2025.....	V-1
Tabel V.2	Tabel V.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	V-10
Tabel VI.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	VI-2
Tabel VI.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	VI-4
Tabel VI-3	Keterkaitan Strategi dan Program Pembangunan Daerah pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	VI-10
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026.....	VII-3
Tabel VII.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	VII-4
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026	VIII-1
Tabel VIII.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026.....	VIII-2

Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 ..... VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Tahapan penyusunan Dokumen RPD	I-7
Gambar II-1	Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh	II-2
Gambar II-2	Batas Administrasi Kota Payakumbuh	II-3
Gambar II-3	Peta Hidrologi Kota Payakumbuh	II-5
Gambar II-4	Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh	II-14
Gambar II-5	Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh	II-15
Gambar II-6	*Water Treatment Plant* (WTP)Kota Payakumbuh	II-55
Gambar II-7	RTH Ratapan Ibu Kota Payakumbuh	II-56
Gambar II-8	TPA Regional Payakumbuh	II-78
Gambar II-9	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh	II-89
Gambar II-10	Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD	II-90
Gambar II-11	Gelanggang Olah Raga Payakumbuh Bugar di Kelurahan Tigo Koto Diate Kota Payakumbuh	II-95
Gambar II-12	Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kota Payakumbuh	II-115
Gambar II-13	Aplikasi Sistim Informasi Kota Payakumbuh	II-116
Gambar IV-1	Nawacita Kedua RPJMN 2020-2024	IV-26
Gambar IV-2	5 Arahan Utama Presiden	IV-27
Gambar IV-3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-32
Gambar V-1	Pencapaian Tujuan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	V-3
Gambar V-2	Pencapaian Tujuan Terwujudnya Perekonomian Yang Berkualitas	V-5
Gambar V-3	Pencapaian Tujuan Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	V-6
Gambar V-4	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	V-8
Gambar V-5	Pencapaian Tujuan Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya	V-9

DAFTAR DIAGRAM

Diagram II-1	Curah Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-6
Diagram II-2	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-16
Diagram II-3	Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-17
Diagram II-4	Perbandingan Angka Inflasi	II-22
Diagram II-5	Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-24
Diagram II-6	Balita Gizi Buruk Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-26
Diagram II-7	Perbandingan Fluktuasi Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-28
Diagram II-8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-28
Diagram II-9	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (dalam %)	II-33
Diagram II-10	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-34
Diagram II-11	Angka Partisipasi Sekolah Kota Payakumbuh 2017-2021	II-34
Diagram II-12	Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2021	II-37
Diagram II-13	Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang PendidikanTahun 2017-2021	II-38
Diagram II-14	Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	II-39
Diagram II-15	Rasio SekolahTerakreditasi A di Kota PayakumbuhTahun 2017-2021	II-40
Diagram II-16	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-49
Diagram II-17	Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021	II-53
Diagram II-18	Persentase Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	II-68
Diagram II-19	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) Tahun 2017-2021	II-83
Diagram II-20	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021	II-101

Diagram IV-1	Pertumbuhan Ekonomi Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional	IV-2
Diagram IV-2	Tingkat Inflasi Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional	IV-3
Diagram IV-3	PDRB Perkapita (ADHB) Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional (Rp. Juta/jiwa)	IV-4
Diagram IV-4	Indeks Gini Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional	IV-4
Diagram IV-5	Tingkat Kemiskinan Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional	IV-5
Diagram IV-6	Nilai IPM Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional.....	IV-6
Diagram IV-7	Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021.....	IV-8

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Payakumbuh. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD". Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir. Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Tabel I-1
Daerah Yang Berakhir Masa Kepemimpinan Kepala Daerahnya di Tahun 2022-2024

No	Wilayah	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota
1	Sumatera	2	36	2	24	2	11
2	Jawa-Bali	2	14	3	35	1	12
3	Kalimantan-Sulawesi	2	19	4	35	0	14
4	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	1	25	3	11	2	11
Sub Total		**7**	**94**	**12**	**105**	**5**	**48**
Total		**101**		**117**		**53**	

Sumber; Kementerian Dalam Negeri 2021

Menurut pasal 201 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, ayat 8 Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. selanjutnya pada ayat 9 dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Tabel I-2
Variasi Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2022,2023 dan 2024

NO	DAERAH	2022	2023	2024	
1.	PROVINSI				
	Bulan Mei	5 Provinsi	Nihil	Bulan Januari	1 Provinsi
	Bulan Juli	1 Provinsi	Nihil	Bulan Februari	1 Provinsi
	Bulan September	Nihil	10 Provinsi	Bulan Maret	1 Provinsi
	Bulan Oktober	1 Provinsi	2 Provinsi	Bulan Mei	1 Provinsi
				Bulan Juni	1 Provinsi
2.	KABUPATEN/KOTA				
	Bulan Mei	43 Kab/Kota	Nihil	Bulan Januari	10 Kab/Kota
	Bulan Juli	10 Kab/Kota	Nihil	Bulan Februari	14 Kab/Kota
	Bulan Agustus	12 Kab/Kota	Nihil	Bulan Maret	8 Kab Kota
	Bulan September	3 Kab/Kota	72 Kab/Kota	Bulan April	9 Kab/ Kota
	Bulan Oktober	10 Kab/Kota	6 Kab/Kota	Bulan Mei	3 Kab/Kota
	Bulan November	3 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Bulan Juni	2 Kab/Kota
	Bulan Desember	13 Kab/Kota	20 Kab/Kota	Bulan September	2 Kab/Kota
3.	JUMLAH PROV/ KAB/KOTA	101	117	53	

Ket :
Variasi ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, Pasal 47 (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Kota Payakumbuh yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dan renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan peraturan Kepala daerah. Skema waktu penetapan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 adalah:

a. Minggu II Maret 2022 : Penetapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
b. Minggu III Maret 2022 : Penyampaian Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ke DPRD Kota Payakumbuh
c. Minggu IV Maret 2022 : Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh

Jadwal pelaksanaan pilkada dan pelantikan Kepala Daerah sangat berdampak kepada proses penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan. Usulan Pemerintah adalah Pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif pada 15 Mei 2024, pemilihan kepala daerah 27 November 2024, Jadwal pilkada usulan pemerintah berpotensi mundur karena waktu yang sangat dekat antara pelantikan DPRD yang merupakan basis pencalonan Kepala Daerah dengan penetapan pasangan calon Kepala Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Renstra bagi daerah yang tidak mempunyai kepala daerah pada tahun 2022.

Suatu perencanaan yang tepat dilakukan dengan mendasarkan pada data dan informasi yang akurat dan faktual, valid dan akuntabel, yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Di dalam proses penyusunan perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai indikator perkembangan di daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya dan yang paling penting adalah kondisi keuangan daerah. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Sebab capaian tujuan pembangunan daerah harus mempunyai sifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh sehingga dapat dipastikan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk membangun daerah yang lebih baik dengan tetap memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam daerah dengan begitu semua sumber daya yang ada akan dapat di manfaatkan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 memperhatikan;

(1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
(2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
(3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022;
(4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
(5) Isu-isu strategis yang berkembang;
(6) Kebijakan nasional;
(7) Regulasi yang berlaku;

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan teknokratis dengan memperhatikan input perencanaan

yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan nasional dan daerah serta isu global yang tertuang dalam isu strategis daerah selanjutnya disempurnakan dengan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan pengayaan terhadap isu-isu dan permasalahan daerah. Forum Konsultasi publik melibatkan DPRD menghasilkan berita acara Forum Konsultasi publik. Tahapan selanjutnya adalah Evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 oleh Gubernur, kemudian Penetapan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD Kota Payakumbuh.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030;

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22)
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
2. Merupakan panduan umum bagi perencanaan sektoral dan kewilayahan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja;
4. Menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana strategis tahun 2023-2026.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
6. Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat

1.4 Tahapan Penyusunan Perencanaan

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Manteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, RPJMD Propinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026 dan RKPD Propinsi Tahun 2023. Tahapan penyusunan dokumen dapat dilihat pada Gambar I-1.

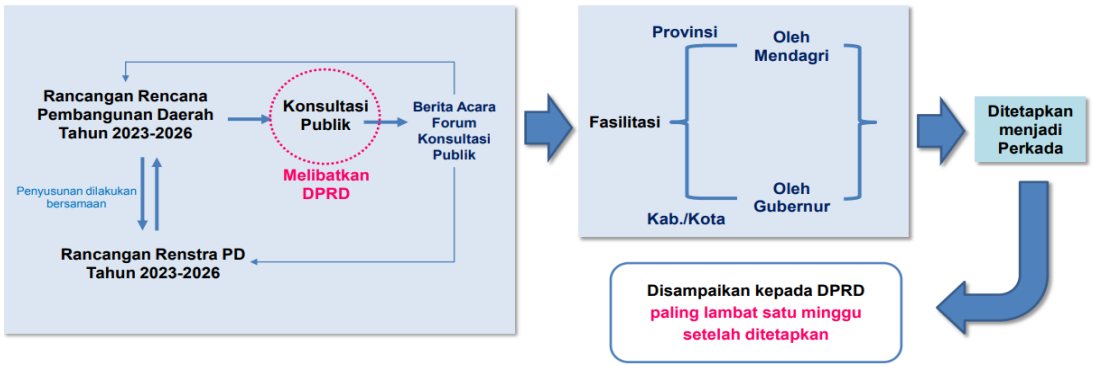

Gambar I-1
Tahapan penyusunan Dokumen RPD

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dilakukan secara bertahap dan simultan. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan meliputi:
   a. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026;
      Tim penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 terdiri dari Walikota sebagai penanggungjawab, Wakil Walikota sebagai wakil penanggungjawab, Sekretaris Daerah sebagai ketua tim, Kepala Bappeda sebagai wakil ketua dan Sekretaris Bappeda sebagai sekretaris tim. Anggota tim terdiri dari unsur Asisten dan Bagian pada Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda. Tim penyusunan RPD bertugas menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.
   b. Orientasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026;
      Orientasi mengenai Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, teknis penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

c. Penyusunan agenda kerja;
Penyusunan agenda kerja dalam bentuk *time schedulle* penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ditujukan untuk memenuhi jangka waktu penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 yang sangat ketat dan padat. Agenda kerja merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyusunan rancangan yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi ;
Pengolahan data dan informasi merupakan penyajian seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white* paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah Kota Payakumbuh mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, yang dilengkapi dengan analisis.

c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
Analisis ekonomi daerah Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan

perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah Kota Payakumbuh adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam analisis kondisi ekonomi daerah Kota Payakumbuh, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh terdiri dari data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

d. Evaluasi kinerja RPJMD;

Evaluasi kinerja tahun lalu di Kota Payakumbuh dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD antara lain untuk menilai/mengidentifikasi apakah sasaran strategis daerah telah tercapai atau belum dan pilihan alternative program yang efektif untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional/provinsi;

Untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun dalam RPJPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan rencana Kota Payakumbuh yang direncanakan. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, masing-masing Perangkat Daerah harus memiliki program yang responsif gender.

f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

g. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah.

h. Perumusan prioritas, sasaran pembangunan daerah dan program prioritas beserta pagu indikatif;

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 secara simultan dilakukan bersamaan dan didasarkan atas masukan dari rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan mengharmoniskan serta mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi/nasional. Pada tahap ini dilakukan Penajaman dan verifikasi terhadap renstra Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. Forum Konsultasi public disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

4. Penyusunan Rancangan Akhir.
Berita acara forum konsultasi publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan rancangan renstra sebelum diajukan untuk fasilitasi. Fasilitasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tujuan evaluasi dilakukan untuk memastikan: 1) Kepentingan umum; 2) Akuntabilitas;

3) Rasionalitas; 4) Efektivitas; 5) Efisiensi; 6) Partisipatif; 7) Kesinambungan; 8) Keselarasan; dan 9) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi Rankhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan melampirkan:

1. Surat permohonan evaluasi
2. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026
3. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022
4. Berita Acara Forum Konsultasi Publik
5. Hasil reviu APIP

Dengan hasil fasilitasi berupa rekomendasi gubernur sebagai wakil pemerintah

5. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.
   Hasil Rekomendasi Gubernur terhadap proses fasilitasi merupakan pedoman dalam penyempurnaan rencangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan Kepala daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Tahapan Penyusunan Perencanaan
1.5 Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Daerah

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan masa lalu

3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan

5.2 Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi

6.2 Arah Kebijakan

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Makro

8.2 Indikator Kinerja Utama

8.3 Indikator Kinerja Daerah

BAB IX. PENUTUP

Lampiran I : Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024;

Lampiran II : Penyelarasan Program Prioritas yang termuat dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

BAB 2
GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Payakumbuh. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari 3 (tiga), yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah merupakan dasar dalam membuat perencanaan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan sebagai sumber informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Payakumbuh yang berupa data yang tersedia secara series kurun waktu beberapa tahun terakhir.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Payakumbuh menampilkan karakteristik lokasi dan wilayah serta potensi pengembangan wilayah yang ada di Kota Payakumbuh. Sedangkan gambaran kondisi demografi akan menampilkan cakupan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kota Payakumbuh.

2.1.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada $00^0$10’sampai dengan $00^0$17’ LS dan $100^0$35’ sampai dengan $100^0$45’ BT pada ketinggian 514 m dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah $\pm$ 80,43 Km^2 atau ± 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak $\pm$120km dari Kota Padang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh dataran dengan kemiringan <2,00% seluas 6.601,7 Ha atau 82,08% dari total luas Kota Payakumbuh, selebihnya merupakan dataran dengan kemiringan >2,00% seluas 1.441,3 Ha atau 17,92% dari luas wilayah Kota Payakumbuh yang berlokasi di wilayah selatan dan barat daya Kota Payakumbuh.

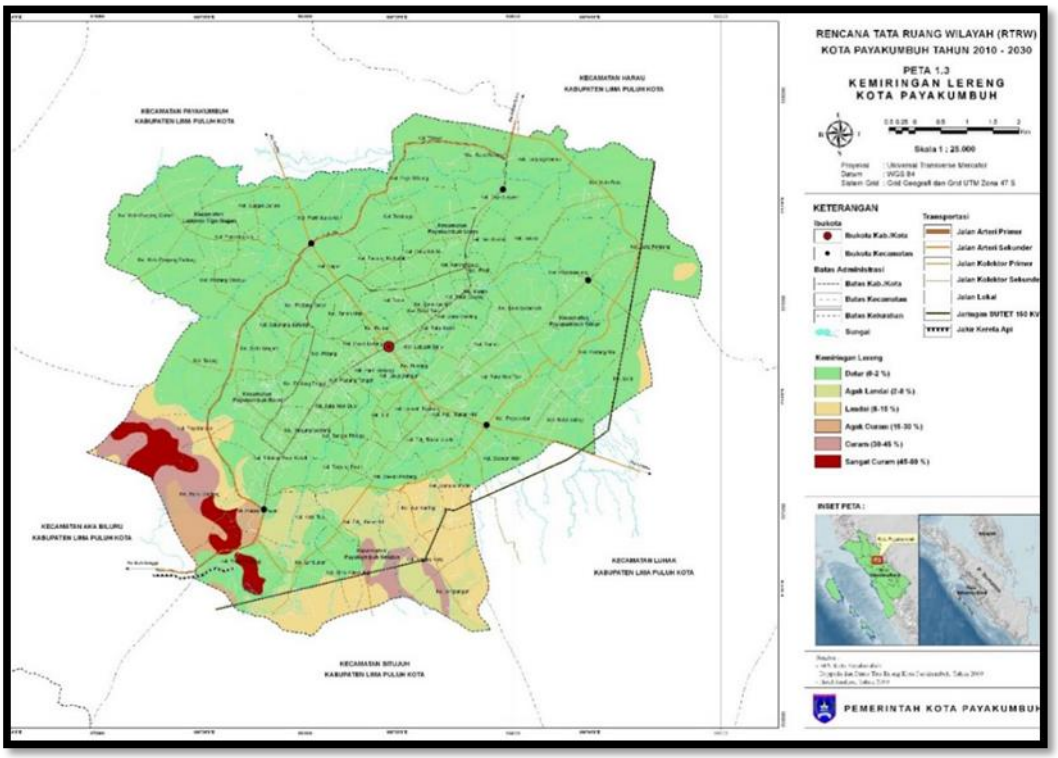

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Gambar II-1
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh

Tabel II-1
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng (%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601.7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
			Luas	**8.043,0**	**100,00**

sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, maka terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 (lima) kecamatan yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) kecamatan. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Luhak Nan Bungsu yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah
c. Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
d. Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau

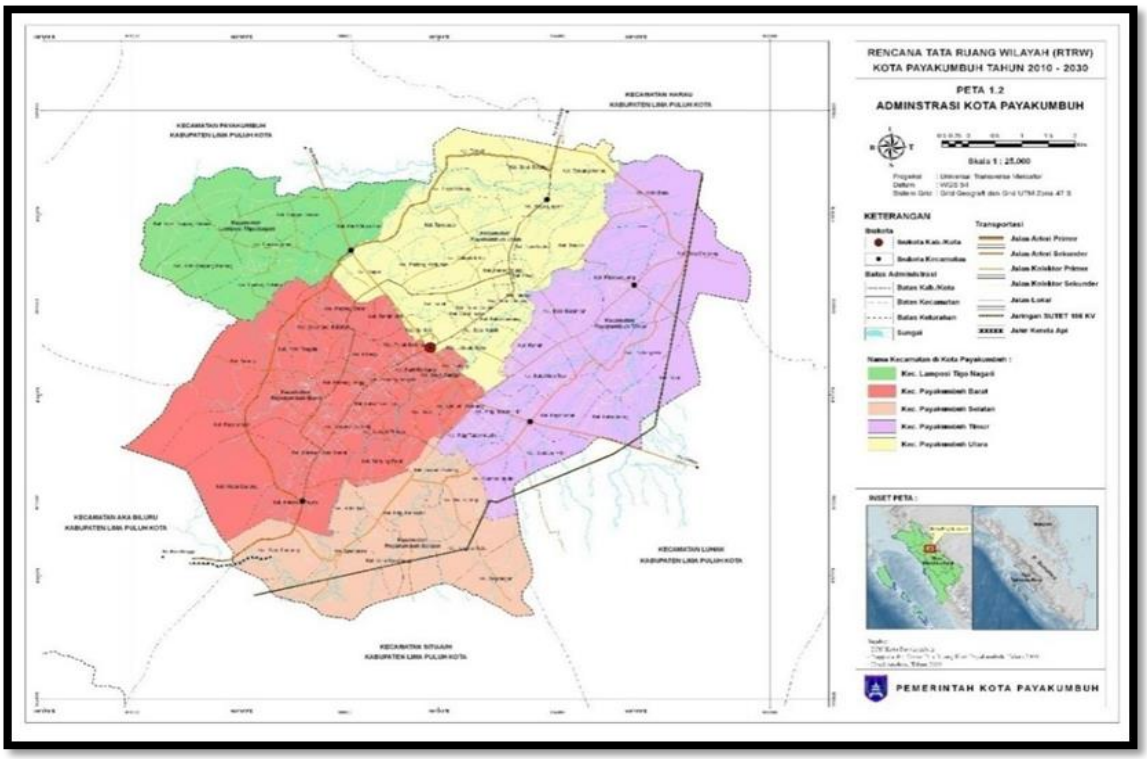

Gambar II-2
Batas Administrasi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel II-2
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,064	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Pdg. Kaduduak	14,528	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,730	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang	14,683	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	9,425	6	14	50
		Total	**80,43**	**47**	**156**	**481**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2022

Posisi Kota Payakumbuh yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, membuat beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melalui wilayah Kota Payakumbuh. Terdapat 8 (delapan) sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata, diantaranya :

1. **Sungai Batang Agam**
   Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, sungai batang agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai batang agam tersebut dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m^3/detik.

2. **Sungai Batang Lampasi**
   Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m^3/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

3. **Sungai Batang Sinamar**
   Sungai Batang Sinamar mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah sepanjang 4,5 km dan lebar 15 meter. Pemanfaatan air dari sungai ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

4. **Sungai Batang Pulau**
   Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengaliri lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

5. **Sungai Talang**
   Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

6. **Sungai Baih**
   Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

7. **Sungai Batang Sikali**
   Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini 0,51 m^3/detikdan panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur

8. **Sungai Tembok Jua**
   Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 km yang melewati Payakumbuh Utara.Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.

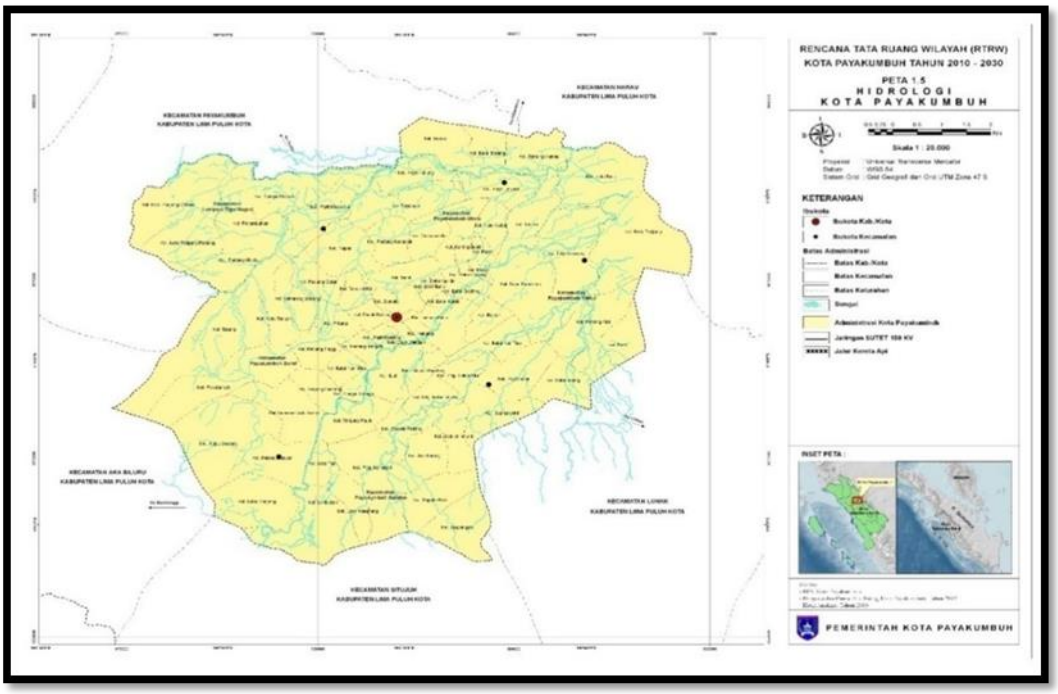

Gambar II-3
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Selain dengan dukungan dari aliran sungai yang melewati Kota Payakumbuh, sektor pertanian di Kota Payakumbuh juga akan diuntungkan dengan rata-rata curah hujan yang baik dalam setiap bulan dengan intensitas curah hujan diatas 50 mm/hari yang dapat dilihat pada Tabel II-3.

Tabel II-3
Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	107,0	10	41,0	10	282,0	19	317,0	19	317,0	19
2.	Februari	131,0	9	285,3	16	255,0	13	175,5	12	175,5	12
3.	Maret	379,0	15	327,2	18	149,0	11	228,0	13	228,0	13
4.	April	252,0	18	314,4	18	187,0	15	265,5	16	265,5	16
5.	Mei	224,0	15	190,0	13	165,5	10	68,5	12	68,5	12
6.	Juni	96,0	11	167,0	14	181,0	15	118,0	13	118,0	13
7.	Juli	53,0	7	148,0	12	151,5	11	186,5	13	186,5	13
8.	Agustus	191,0	14	130,0	10	77,0	4	103,0	11	103,0	11
9.	September	223,0	16	149,0	15	152,5	9	228,0	14	228,0	14
10.	Oktober	66,0	7	237,0	20	192,0	16	66,0	11	66,0	11
11.	November	284,0	22	407,0	22	198,5	13	196,0	15	196,0	15
12.	Desember	244,0	17	239,0	13	451,5	22	78,0	11	78,0	11

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

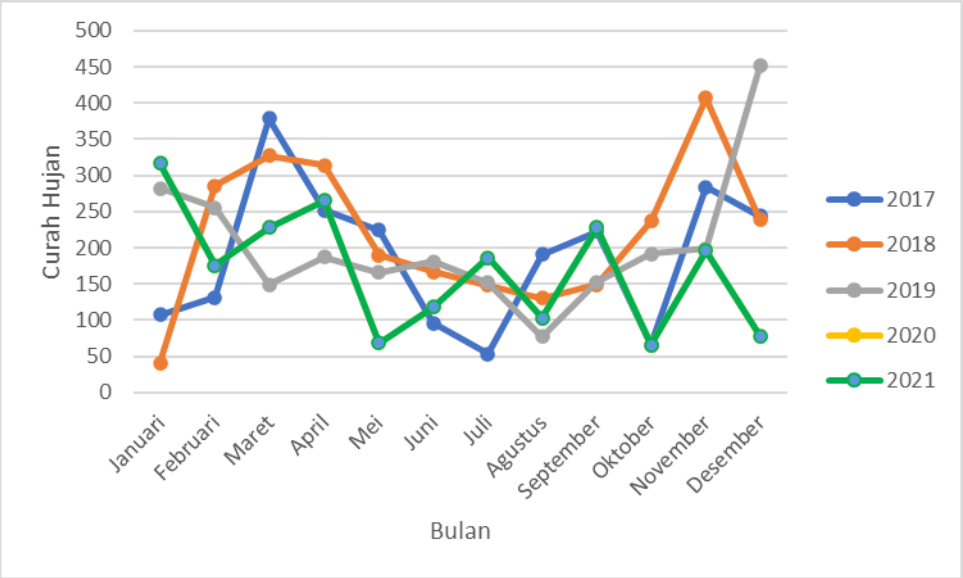

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Diagram II-1
Curah Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menggunakan ambang batas untuk menentukan intensitas curah hujan ke dalam 6 kategori :

a. 0 mm/hari (abu-abu) : berawan
b. 0,5 – 20 mm/hari (hijau) : hujan ringan
c. 20 – 50 mm/hari (kuning) : hujan sedang
d. 50 – 100 mm/hari (orange) : hujan lebat
e. 100 – 150 mm/hari (merah) : hujan sangat lebat
f. >150 mm/hari (ungu) : hujan ekstrem

Jika dilihat dari ambang batas di atas, kondisi yang dapat dinyatakan hujan apabila intensitas curah hujan ≥0,5 mm/hari. Dari tampilan data di atas, dapat kita ketahui, Kota Payakumbuh mendapatkan hujan dengan intensitas dari hujan sedang sampai dengan hujan ekstremdengan distribusi hujan yang ada setiap bulannya. Dengan adanya curah hujan yang cukup bahkan cukup tinggi pada bulan tertentu dimana curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih dan didukung oleh temperatur yang berkisar diantara 20°C - 32°C dan kelembaban udara pada rentang 82%-86%akan sangat mendukung untuk kegiatan pertanian di Kota Payakumbuh serta pertumbuhan vegetasi lainnya. Selian itu untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 embung, diantaranya :

1. **Mata Air Bulakan/ Embung Bulakan**
   Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN. Embung Bulakan memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

2. **Embung Lurah Rawang**
   Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan. Debit air pada embung ini sebesar 7 liter/detik.

Pemanfaataan ruang wilayah di Kota Payakumbuh lebih didominasi untuk areal pertanian seperti lahan persawahan dan kebun/ ladang. Pemanfaatan ruang wilayah merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Berikut dapat dilihat pada tabel II-4, perihal pemanfaatan ruang wilayah berupa pemanfaatan lahan di Kota Payakumbuh beserta sebarannya pada tabel II-5.

Tabel II-4
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1.	Sawah	2.751	34,20	2.749	34,18	2.749	34,18	2.751	34,20	2.733,1	34,20
2.	Tanah utk Bangu-nan & Sekitarnya	2.970	36,92	2.968	36,90	2.970	36,92	2.543	31,62	2.543	31,62
3.	Kebun/ Ladang	1.380	17,16	1.450	18,03	1.450	18,03	1.320	16,41	1.320	16,41
4.	Kolam	14	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Hutan	358	4,45	283	3,52	283	3,52	283	3,52	283	3,52
6.	Padang Rumput	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05
7.	Lainnya	566	7,04	589	7,32	587	7,30	1.142	14,20	1.142	14,20
Jumlah		**8.043**	**100,00**	**8.043**	**100,00**	**8.043**	**100,00**	**8.043**	**100,00**	**8.043**	**100,00**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Adanya perubahan data luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh sesuai dengan hasil kajian revisi RTRW Perda No 5 Tahun 2020 dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh No 1 tahun 2021. Dari Perda LP2B tersebut luas sawah Kota Payakumbuh menjadi 2.733,16 Ha yang terdiri dari : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 1.745,39 Ha, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 1.719,22 Ha, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 26,17 Ha.

Tabel II-5
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Daerah	2017		2018		2019		2020		2021	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	529	577	527	577	527	577	529	577	414,23	567
2	Payakumbuh Timur	2.273	663	772	663	772	663	772	663	772	847,57	772
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	225	745	191	745	191	745	191	713,45	191
4	Payakumbuh Selatan	1.409	378	491	378	491	378	491	378	491	397,04	491
5	Lamposi Tigo Nagori	942	436	293	436	293	436	293	436	293	360,87	293
Jumlah		**8.043**	**2.751**	**2.358**	**2.749**	**2.324**	**2.749**	**2.324**	**2.751**	**2.324**	**2.733,16**	**2.314**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Penggunaan lahan untuk lahan pertanian lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur dengan total luas lahan pertanian sebesar 1619,57 Ha atau 71,25% dari luas wilayahnya, dan lebih ditujukan untuk lahan sawah sebesar 37,29% dari luas wilayah, yang hampir sama luasnya dengan lahan bukan sawah sebanyak 33,96%. Sedangkan lahan yang lebih banyak digunakan sebagai lahan persawahan lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar 713,45 Ha atau 49,10% dari luas wilayahnya. Jika dilihat dari rata-rata penggunaan lahan dari masing-masing wilayah kecamatan, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh penggunaan lahannya ditujukan untuk lahan pertanian yaitu >50,00% dari luas masing-masing wilayah, seperti terinci dapat dilihat pada tabel II-6.

Tabel II-6
Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (ha)	Sawah (Ha)	Bukan Sawah (Ha)	Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah (%)	Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah (%)	Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah (%)
1.	Payakumbuh Barat	1.966	414,23	567	21,07	28,84	49,91
2.	PayakumbuhTimur	2.273	847,57	772	37,29	33,96	71,25
3.	Payakumbuh Utara	1.453	713,45	191	49,10	13,15	62,25
4.	Payakumbuh Selatan	1.409	397,04	491	28,18	34,85	63,03
5.	LamposiTigoNagori	942	360,87	293	38,31	31,10	69,41
Total		**8.043**	**2.733,16**	**2.314**	**33,98**	**28,77**	62,75

Sumber :Dinas Pertanian, 2021 (data diolah)

2.1.1.2. Aspek Geologi

Material padat pembentuk permukaan Kota Payakumbuh terdiri dari: humus, soil (tanah), aluvial (sungai dari farmasi sedimen), metamorphosis (malihan), vulkanik dan intrusi (terobosan).Pembentukan dan penyebaran material tersebut merupakan hasil dari berbagai proses yang berasal dari dalam bumi (endogen) dan dari luar (exogen). Berbagai proses dalam (endogen) mencakup tektonik dan vulkanisme (kegunungapian). Berbagai proses dari luar terdiri dari : pelapukan, erosi, transportasi dan sedimentasi.

Urutan tataletak material padat penyusun bentang alam Kota Payakumbuh secara stratigrafis adalah sebagai berikut:

1) Humus dan *Soil* (tanah): dengan ketebalan beragam dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter.
2) Aluvial sungai (Q al) terdiri dari ; lempung, pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kwansit,vdiendapkan disepanjang dataran banjir. Ketebalan bervariasi dapat mencapai puluhan meter.
3) Sedimen Formasi Brani (Tob) : Konglomerat kasar beraneka ragam dengan sisipan batu pasir. Komponen dari konglomerat kasar terdiri dari : kwarsit, granit, filit dan batu gamping. Tersementasi dengan baik, dan secara lokal ada yang terbersikkan. Ketebalan formasi brani 600 m, berumur oligosen dan hubungan secara manjari-jemari (*Intenfingering*) dengan sedimen Formasi Sangkarewang.
4) Malihan, anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) : mayoritas terdiri dari serpih dan filit kemerahan sampai coklat tua mengandung sisipan tipis batusabak kelabu, kwarsit, batu lanan, rijang kelabu dan lava andesit sampai basalt. Pada kontak dengan batuan intrusi, PCks bermalih menjadi sekis, genes dan batu tanduk.PCks berhubungan secara menjari-jemari (*Interfingering*) dengan PCkl dan PCkg, dengan tebal keseluruhan mencapai 5000 m, berumur Permo-Karbon.
5) Malihan, anggota batu gamping Formasi Kuantan (PCkl) : Batu gamping pejal, berongga, putih kelabu hingga kemerahan. Mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkensikkan dan kwansit. Umumnya membentuk topografi kasar, berumur karbon. Di Kota Payakumbuh, material PCks dan PCkl, tersingkap (exposed) di batas barat daya kota, dan menjadi salah satu objek wisata di gua Nagalau Indah.
6) Vulkanik : Tufa batuapung (Qpt) ; terdiri dari batuapung putih kekuningan, berdiameter ½ s/d 10 cm didalam massa dasar kaca kelaran bekomposisi riolit. Secara lokal, dibagian bawah Qpt mencapai ratusan meter, berumur kwaiter, dan merupakan mayoritas material penyusun permukaan Kota Payakumbuh.
7) Volkanik : Andesit Gunung Malintang (Qamg) : Breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahan dan lava. Merupakan material dan kegiatan gunung api malintang, diselatan Kota Payakumbuh berumur Kwaiter.

8) Vulkanik : Andesit sampai basalt (Ta) : aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal berkomposisi andesit sampai basalt. Berumur miosen (Tersier atas).Tersingkap dibarat daya perbukitan batugamping (PCkl) dibatas barat daya Kota Payakumbuh.

Data struktur geologi yang ada di Kota Payakumbuh, hanya satu kedudukan struktur lapisan pada sedimen formasi brani yaitu sudut kemiringan (dip) lapisan 250 dengan arah kemiringan (dip direction) kearah selatan dilereng utara Gunung Malintang . Data perihal kehadiran struktur patahan (sesar) maupun kekar (joint), nihil.

Namun, data regional memperlihatkan bahwa Kota Payakumbuh di kelilingi oleh tiga zona patahan besar yaitu :

a. Zona Patahan Mangani ; 12 km di barat laut Kota Payakumbuh
b. Zona Patahan Sungai Takung ; 15 km di tenggara di balik gunning malintang
c. Zona Patahan Sungai Pakis ; 35 km di timur laut Kota Payakumbuh.

Ketiga zona patahan tersebut, diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh, namun hal tersebut diatas perlu diantisipasi sebagai kawasan yang akan terkena dampak sebagai kawasan evakuasi bencana alam, dari wilayah sekitarnya.

2.1.1.3. Potensi Sumber Daya

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ).

Location Quotient adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas.Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. LQ dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Harga Konstan (Tahun 2010) pada rentang waktu tahun 2017-2021, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar pada tabel II-7.

Tabel II-7
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
C	Industri Pengolahan	0,53	0,56	0,58	0,58	0,56	0,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,60	0,59	0,58	0,60	0,58	0,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,39	3,33	3,19	3,25	3,09	3,25
F	Konstruksi	1,44	1,43	1,40	1,39	1,34	1,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	1,48	1,46	1,50	1,44	1,48
H	Transportasi dan Pergudangan	1,12	1,11	1,12	1,24	1,24	1,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,43	2,41	2,60	2,56	2,49
J	Informasi dan Komunikasi	1,32	1,32	1,31	1,35	1,31	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	2,07	2,04	2,09	1,99	2,06
L	Real Estate	1,45	1,43	1,39	1,43	1,38	1,42
M,N	Jasa Perusahaan	0,62	0,61	0,59	0,61	0,59	0,60

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	Rerata
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,24	1,22	1,18	1,21	1,18	1,21
P	Jasa Pendidikan	1,05	1,04	1,04	1,08	1,07	1,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,10	1,09	1,12	1,09	1,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,97	1,95	1,95	2,00	1,89	1,95
Produk Domestik Regional Bruto		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Sumber : *Website* Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, terlihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada lapangan usaha di Kota Payakumbuh. Berdasarkan nilai rerata LQ dalam hal penentuan sektor basis dan sektor unggulan, dimana nilai tersebut harus lebih besar dari satu (LQ>1), maka dapat diketahui dari hasil pengolahan data bahwa sektor basis dan sektor unggulan di Kota Payakumbuh diantaranya terlihat bahwa sektor yang menjadi basis dan menjadi sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang(3,25); sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,49); sektor Jasa Keuangan dan Asuransi(2,06); sektor Jasa Lainnya (1,95); sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,48); sektor Real Estate (1,42); sektor Konstruksi (1,4); sektor Informasi dan Komunikasi (1,32); sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,21); sektor Transportasi dan Pergudangan (1,17); sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,10); sektor Jasa Pendidikan (1,06).
Sektor pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa perusahaan merupakan sektor non basis tapi meskipun dianggap kurang potensial tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena bisa jadi dengan adanya bantuan dari sektor basis maka dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi daerah referensinya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Analisis *Shift Share* menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB dengan Harga Konstan (Tahun 2010) pada rentang waktu tahun 2017-2021 untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.

Tabel II-8
Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		*Provincial Share*	*Proportional Shift*	*Differential Shift*	Total perubahan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,922.75	3,181.64	(17,571.16)	18,533.23
B	Pertambangan dan Penggalian	2,627.72	234.77	(685.54)	2,176.95
C	Industri Pengolahan	27,601.63	134.23	14,286.99	42,022.85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.28	13.45	(39.11)	289.62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,659.65	220.45	(1,082.31)	797.79
F	Konstruksi	63,238.14	9,543.93	(29,890.36)	42,891.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113,498.90	21,893.24	(20,346.97)	115,045.16
H	Transportasi dan Pergudangan	65,604.18	(2,659.86)	65,458.47	128,402.79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,980.59	503.81	6,999.24	20,483.64
J	Informasi dan Komunikasi	44,657.59	16,773.47	3,304.38	64,735.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,151.60	4,080.36	(7,504.12)	26,727.84
L	Real Estate	13,669.94	2,009.90	(3,449.98)	12,229.86
M,N	Jasa Perusahaan	1,329.43	116.38	(374.04)	1,071.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	33,609.00	4,585.35	(10,449.13)	27,745.22

Lapangan Usaha		*Provincial Share*	*Proportional Shift*	*Differential Shift*	Total perubahan
	dan Jaminan Sosial Wajib				
P	Jasa Pendidikan	19,463.46	4,622.71	7,684.11	31,770.29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,467.34	2,459.93	(226.02)	9,701.26
R,S, T,U	Jasa lainnya	16,469.59	1,914.93	(3,320.99)	15,063.53

Sumber : *BPS Kota Payakumbuh, 2022* (data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, sektor yang memiliki *Provincial share* terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan yang terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. pertumbuhan komponen Proportional (P) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021 ternyata ada yang bernilai positif dan ada yang negatif. Nilai P positif berarti produktivitas Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya apabila nilai P negatif, berarti produktivitas Kota Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih rendah dibandingkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Sektor- sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proportional positif yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor bangunan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai negatif adalah sektor Transportasi dan Pergudangan.

Terdapat 5 (lima) sektor dalam perekonomian Kota Payakumbuh dengan nilai *Differential* (D) positif, yaitu sektor industri pengolahan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa Pendidikan. Kelima sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan (memiliki keunggulan kompetitif) dalam memacu pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh. Sedangkan 12 (dua belas) sektor lainnya memiliki nilai D yang negatif sehinggga sektor - sektor tersebut pertumbuhannya lambat. Sektor-sektor tersebut bisa diamati di dalam Tabel II.8. Dilihat dari total perubahan, semua sektor positif artinya pergeseran sektor-sektor PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat kurun waktu tahun 2017-2021 memiliki nilai positif.

Klassen tipologi (*Typologi Klassen*) digunakan untuk mengetahui pengelompokkan sektor ekonomi Kota Payakumbuh menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan Matrik Klassen maka dapat dilakukan empat pengelompokkan struktur dengan melihat laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.

Tabel II-9
Klasifikasi Sektor PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021
Berdasarkan *Typologi Klassen*

Kontribusi / Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kota Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi	Kontribusi Kota Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi
Laju Pertumbuhan Kota Lebih besar daripada Provinsi	**Maju dan Tumbuh cepat :** - Transportasi dan Pergudangan - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**Maju dan Tumbuh lambat :** - Industri Pengolahan

Kontribusi / Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kota Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi	Kontribusi Kota Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi
	- Informasi dan Komunikasi - Jasa Keuangan dan Asuransi - Jasa Pendidikan	
Laju Pertumbuhan Kota Lebih kecil daripada Provinsi	**Potensial dan berkembang :** - Real Estate - Konstruksi - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Pengadaan Air; Pengelolaan sampah, limbang dan daur ulang - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Jasa lainnya	**Relatif Tertinggal :** - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Pertambangan dan Penggalian - Pengadaan Listrik dan Gas - Jasa Perusahaan

Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 5 (lima) sektor yang masuk dalam kategori maju dan tumbuh dengan cepat. Kelima sektor itu adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Jasa Pendidikan. Sementara itu sektor Industri Pengolahan termasuk dalam sektor yang maju tapi tertekan (tumbuh lambat). Sedangkan untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Real Estate; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya merupakan sektor yang potensial dan berkembang. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang relatif tertinggal.

Sektor Ekonomi unggulan Kota Payakumbuh

Untuk melihat sektor unggulan dengan mengacu kepada tiga alat analisis yang telah dilakukan yaitu dari hasil perhitungan LQ, *Shift Share* dan *Tipology Klassen* maka dapat dilakukan dengan melihat *overlay* (gabungan) ketiga analisis tersebut. Koefisien dari ketiga komponen tersebut juga harus disamakan dimana disini diberi tanda positif (+) dan negatif (-). LQ positif artinya nilainya lebih dari 1 dan negatif kurang dari 1. Sedangkan untuk *Shift Share* bernilai positif artinya nilai *Proportional* dan *Differential Shift* keduanya positif dan negatif jika salah satu atau keduanya negatif. Dan untuk Tipologi Klassen nilai positif jika sektor tersebut berada di kuadran 1 dan negatif jika bukan dikuadran 1.

Tabel II-10
Overlay LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen Perekonomian Kota Payakumbuh

Lapangan Usaha/Sektor		LQ	*Shift Share*	Tipologi Klassen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-

C	Industri Pengolahan	-	+	-
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	-	-
	Lapangan Usaha/Sektor	**LQ**	***Shift Share***	**Tipologi Klassen**
F	Konstruksi	+	-	-
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-	-
H	Transportasi dan Pergudangan	+	-	+
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	+	+
J	Informasi dan Komunikasi	+	+	+
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	+	-	+
L	Real Estate	+	-	-
M,N	Jasa Perusahaan	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	+	-	-
P	Jasa Pendidikan	+	+	-
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	-	-
R,S, T,U	Jasa lainnya	+	-	-

Sumber : *Hasil Olahan Data, 2022*

Identifikasi *overlay* tersebut jika ketiganya positif (+++) maka dikatakan bahwa sektor tersebut adalah merupakan sektor unggulan di Kota Payakumbuh, dimana merupakan sektor basis, sektor yang produktivitasnya tinggi, maju dan tumbuh dengan cepat dibandingkan provinsi Sumatera Barat. Melihat hasil *overlay* ternyata sektor yang merupakan sektor unggulan Kota Payakumbuh adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Informasi dan Komunikasi dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Kota Payakumbuh, membuka lapangan kerja yang bisa memberikan kesempatan kerja baru kepada masyarakat yang belum bekerja. Sementara itu sektor-sektor lain yang bukan unggulan perlu juga mendapat perhatian untuk dikembangkan.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Merujuk data topografi lahan di Kota Payakumbuh, dimana didominasi lahan yang berada pada kemiringan <2,00% atau datar dan curah hujan yang cukup tinggi, maka bencana yang cukup rawan terjadi di Kota Payakumbuh dan harus menjadi perhatian adalah bencana angin puting beliung baik itu disertai oleh hujan deras maupun tidak. Selain itu potensi bencana tanah longsor dapat terjadi di beberapa kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Sedangkan ancaman bencana alam gempa bumi, Kota Payakumbuh relatif aman karena payakumbuh tidak terletak pada zona patahan, begitu juga bencana alam banjir, dan letusan gunung api.

Dengan mengetahui potensi bencana tersebut, peruntukan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan lokasi pembangunan seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya; serta pengawasan dan pengendalian dari izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan untuk meminimalkan penyelewengan pembangunan dan resiko yang muncul apabila bencana terjadi. Gambar II.4 dibawah menunjukan potensi rawan bencana yang ada di Kota Payakumbuh.

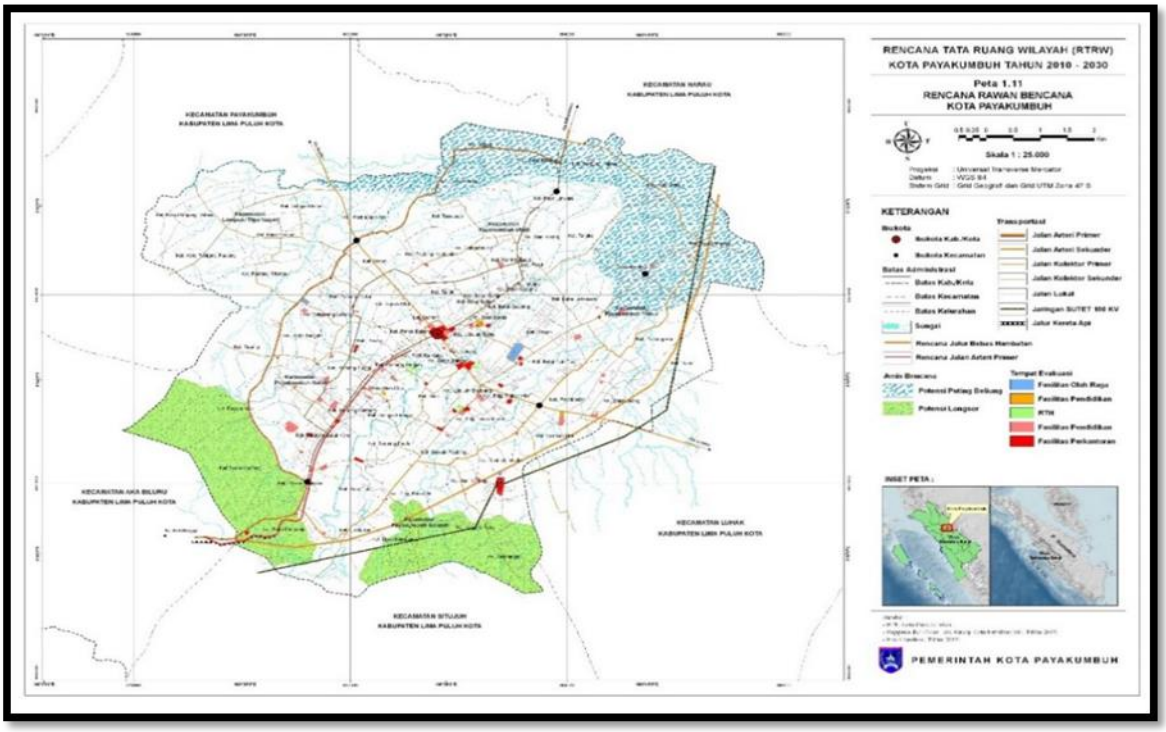

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Gambar II-4
Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh

2.1.1.5. Demografi

Demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan dari jumlah penduduk. Secara demografi, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 141.184 jiwa yang terdiri dari 71.018 jiwa laki-laki dan 70.166 jiwa perempuan yang didominasi oleh usia kerja (≥15 tahun) sebanyak 103.582 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71.73%.

a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% pada tahun 2021. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel II-11 berikut.

Tabel II-11
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Luas (Km^2)	2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km^2)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km^2)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km^2)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km^2)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km^2)
1.	Payakumbuh Barat	19,064	51.435	2.699	52.449	2.754	53.266	2.709	54.532	2.861	55.133	2.893
2.	Payakumbuh Timur	22,730	28.253	1.234	28.274	1.244	28.477	1.253	29.325	1.290	29.669	1.305
3.	Payakumbuh Utara	14,528	31.359	2.158	31.883	2.194	32.269	2.221	32.242	2,219	32.443	2.233
4.	Payakumbuh Selatan	14,683	10.775	734	11.032	751	11.406	810	11.990	817	12.205	831
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,425	9.997	1.061	10.015	1.062	10.155	1.078	11.487	1.218	11.734	1.244
	Total	**80,43**	**131.819**	**1.639**	**133.703**	**1.662**	**135.573**	**1.686**	**139.576**	**1.735**	**141.184**	**1.755**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Data diatas menunjukan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.893jiwa/km^2 diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.233 jiwa/km^2. Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/ preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding Kecamatan Payakumbuh Selatan.

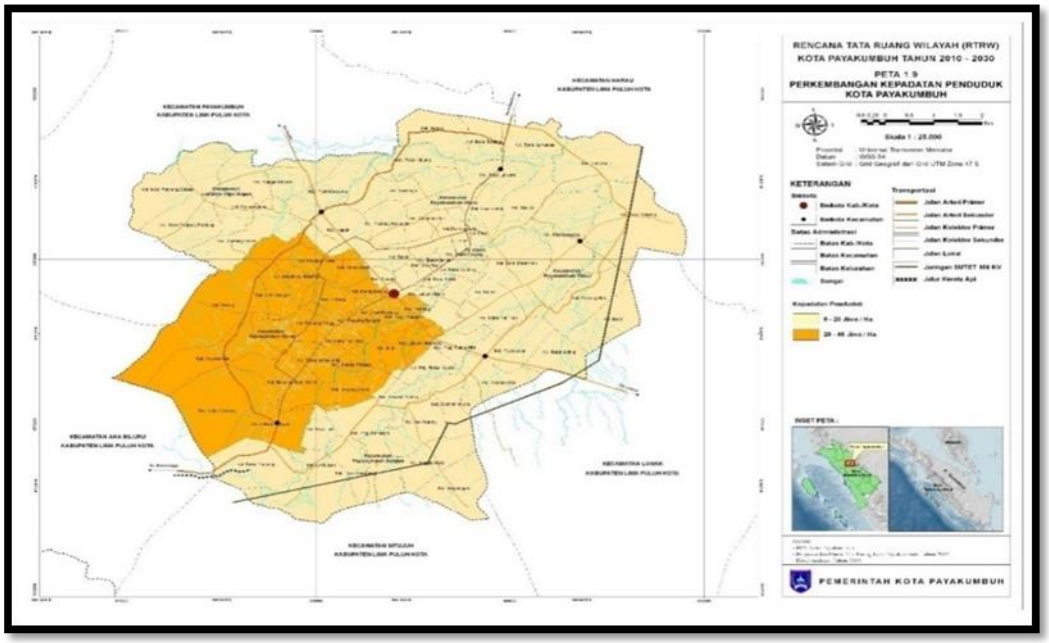

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Gambar II-5
Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh

b. Struktur dan Karakteristik Penduduk

1. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktifdengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel II-12, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-13).

Tabel II-12
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017-2021

No	Kelompok Usia	2017	2018	2019	2020	2021
1.	0-4	13 898	13.858	13.825	12.682	12.728
2.	5 -9	12.927	13.041	13.126	11.521	11.467
3.	10 -14	11.730	11.912	12.104	12.392	12.284
4.	15-19	11.598	11.646	11.771	11.761	11.777
5.	20-24	9.481	9.598	9.775	11.357	11.338
6.	25-29	10.549	10.549	10.589	11.406	11.493
7.	30-34	10.350	10.535	10.705	10.459	10.606
8.	35-39	9.529	9.601	9.692	10.417	10.582
9.	40-44	9.016	9.185	9.276	9.879	10.032

No	Kelompok Usia	2017	2018	2019	2020	2021
10.	45-49	7.846	8.034	8.226	9.019	9.202
11.	50-54	6.997	7.128	7.269	7.758	7.923
12.	55-59	5.886	5.994	6.087	6.664	6.843
13.	60-64	4.382	4.631	4.812	5.385	5.549
14.	65+	7.630	7.991	8.316	8.876	9.360
	Jumlah	**131.819**	**133.703**	**135.573**	**139.576**	**141.184**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram II-2 yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

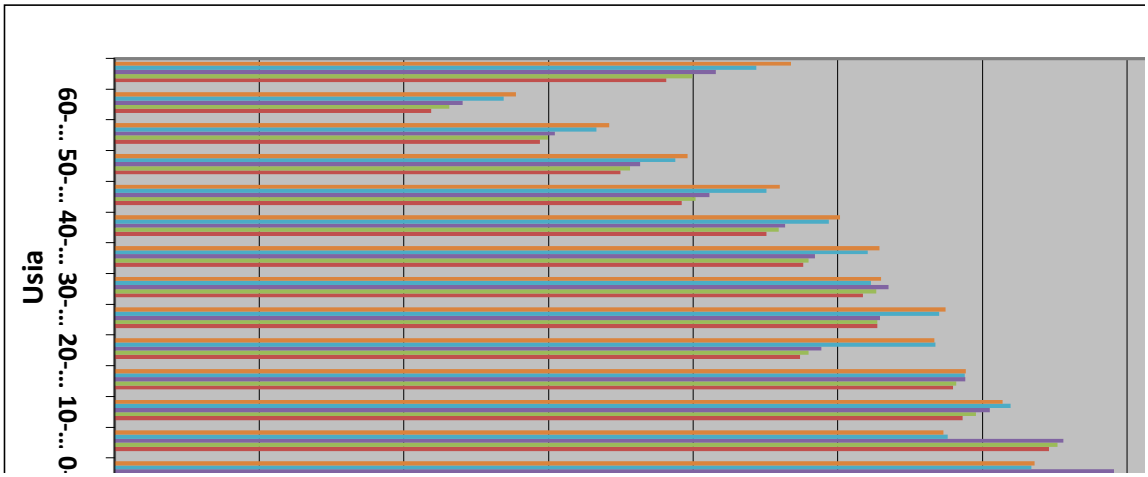

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Diagram II-2
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

,

Jika memperhatikan tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia diatas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasion beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel II-13.

Tabel II-13
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2017– 2021

No	Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok Umur Non-Produktif	46.185	46.802	47.371	45.471	45.839
2	Kelompok Umur Produktif	85.634	86.901	88.202	94.105	95.345
3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	54	54	54	48	48

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

Rasio yang dihasilkan pada tabel di atas menunjukkan ada penurunan rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif dimana pada tahun 2021 rasionya 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

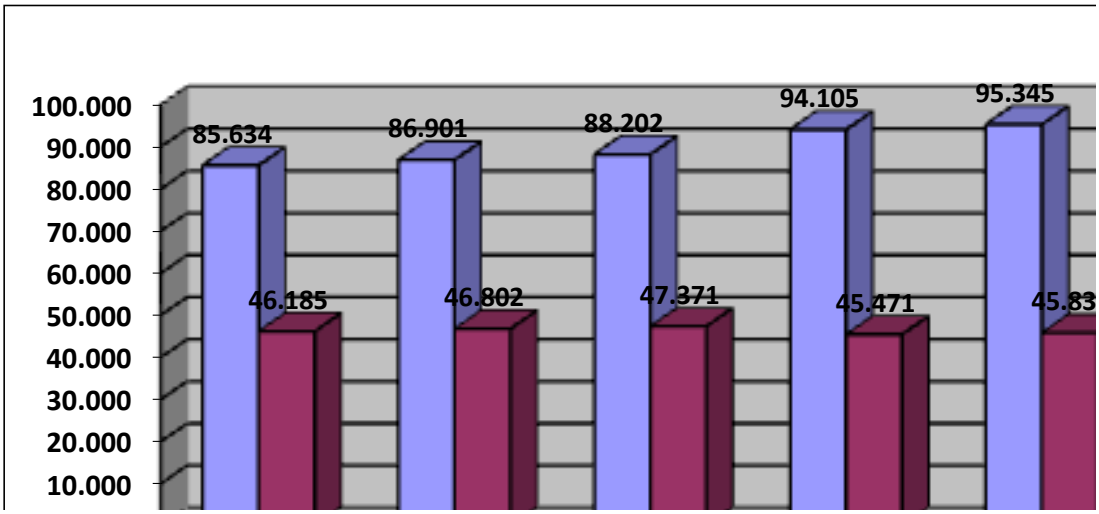

Sumber : Payakumbuh DalamAngka 2018-2022 (data diolah)

Diagram II-3
Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Untuk Kota Payakumbuh, tahun 2021 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan sebanyak adalah 101 yang komposisinya ini dapat dilihat pada tabel II-14.

Tabel II-14
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	25.562	25.873	26.116	26.383	26.515	26.751	27.330	27.204	27.567	27.566
2.	Payakumbuh Timur	14.041	14.212	14.065	14.209	14.175	14.302	14.825	14.500	15.001	14.668
3.	Payakumbuh Utara	15.585	15.744	15.861	16.022	16.063	16.206	16.247	15.995	16.403	16.040
4.	Payakumbuh Selatan	5.355	5.420	5.488	5.544	5.678	5.728	6.044	5.946	6.175	6.030
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.968	5.029	4.982	5.033	5.055	5.100	5.804	5.681	5.938	5.796
	Total	**65.511**	**66.308**	**66.512**	**67.191**	**67.486**	**68.087**	**70.250**	**69.326**	**71.084**	**70.100**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 adalah 74.303 jiwa, dimana 69.498 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 93,53% dari angkatan kerja. Berdasarkan tabel II-15, sektor perdagangan masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk tahun 2021 sektor perdagangan menyerap 64,57% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi setengah dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Untuk data tahun 2021 diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya

Tabel II-15
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan	7.641	8.881	6.290	6.259	7.100
2.	Industri Pengolahan	8.598	7.687	13.682	13.891	14.419
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	26.091	27.633	43.210	44.994	47.979
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	14.082	11.143	-	-	-
5.	Lainnya	8.200	9.201	-	-	-
Jumlah yang Bekerja		**64.612**	**64.545**	**63.182**	**65.144**	**69.498**
Jumlah Pengangguran/ yang Mencari Kerja		**2.307**	**2.538**	**2.710**	**4.664**	**4.805**
Total		**66.919**	**67.083**	**65.892**	**69.808**	**74.303**

Sumber :Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel II-16 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel II-16
Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2017	2018	2019	2020	2021
1.	TK	5-6	5.326	5.371	5.347	5.389	2.805
2.	SD	7-12	14.675	14.853	15.097	14.528	17.185
3.	SLTP	13-15	7.026	7.118	7.205	7.166	11.591
4.	SLTA	16-18	7.058	7.105	7.150	7.171	14.435
		Total	**34.085**	**34.447**	**34.799**	**35.183**	**46.016**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKPD. aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari :

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, yang meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB Perkapita

b. Fokus Kesejahteraan Sosial , yang meliputi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

c. Fokus Seni Budaya, yang meliputi indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi sekarang ini ditambah lagi dengan masih mewabahnya COVID-19, Pemerintah Kota Payakumbuh harus berusaha untuk melaksanakan pembangunan dan menggerakan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Indikator-indikator dari aspek kesejahteraan masyarakat yang sudah dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 akan diuraikan secara umum sebagai berikut :

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (*residen*) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar dimana penghitungannya menggunakan tahun dasar 2010.

Fluktuasi PDRB dapat terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, berikut ditampilkan perkembangan PDRB Kota Payakumbuh periode tahun 2017-2021 menurut kelompok lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010) pada tabel II-17 dan II-18.

Tabel II-17
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Lapangan usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	397.080,3	7,04	413.827,66	6,75	433.472,70	6,35	438.673,94	6,43	442.230,91	6,07
2	Pertambangan & penggalian	32.991,6	0,58	34.498,78	0,56	35.570,90	0,52	35.410,17	0,52	37.365,64	0,51
3	Industri Pengolahan	296.555,5	5,26	314.831,47	5,13	327.323,08	4,80	331.871,95	4,86	367.277,74	5,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.626,4	0,06	3.922,55	0,06	4.380,00	0,06	4.155,66	0,06	4.290,14	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.552,1	0,26	15.109,51	0,25	16.534,87	0,24	16.278,59	0,24	17.013,56	0,23
6	Konstruksi	761.083,2	13,50	832.699,94	13,57	939.219,58	13,76	932.935,71	13,67	991.944,12	13,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.380.679,2	24,48	1.542.874,45	25,15	1.714.777,49	25,13	1.673.597,29	24,53	1.750.503,67	24,01
8	Transportasi dan Pergudangan	706.098,3	12,52	766.254,57	12,49	860.457,53	12,61	799.911,39	11,72	866.755,82	11,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	176.721,3	3,13	198.504,76	3,24	228.069,39	3,34	206.615,13	3,03	226.915,99	3,11
10	Informasi dan Komunikasi	403.003,2	7,15	448.958,59	7,32	515.756,13	7,56	563.204,22	8,25	614.019,09	8,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	354.380,9	6,28	366.749,63	5,98	390.511,01	5,72	403.016,34	5,91	449.555,51	6,17
12	Real Estate	164.408,6	2,92	173.380,72	2,83	191.572,00	2,81	198.156,20	2,90	208.532,48	2,86
13	Jasa Perusahaan	14.436,6	0,26	15.271,11	0,25	16.719,91	0,25	16.225,36	0,24	16.612,80	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	400.759,9	7,11	422.546,36	6,89	477.456,65	7,00	517.029,81	7,58	567.209,12	7,78
15	Jasa Pendidikan	254.316,7	4,51	277.385,68	4,52	316.858,00	4,64	337.224,44	4,94	358.503,45	4,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.834,6	1,43	87.625,70	1,43	100.290,95	1,47	111.389,13	1,63	119.615,80	1,64
17	Jasa Lainnya	198.155,3	3,51	220.258,83	3,59	255.460,00	3,74	237.946,55	3,49	252.504,93	3,46
Total		5.639.684,4	100,0	6.134.700,30	100,00	6.824.430,16	100,00	6.823.641,86	100,00	7.290.850,77	100,00

Sumber : payakumbuhkota.bps.go.id, 2022

Tabel II-18
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Lapanganusaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	270.119,72	6,76	270.766,04	6,39	270.129,44	6,02	274.034,54	6,21	278.652,79	6,09
2	Pertambangan & penggalian	21.559,51	0,54	22.342,67	0,53	22.380,83	0,50	21.913,82	0,50	22.800,16	0,50
3	Industri Pengolahan	226.461,78	5,66	236.689,86	5,58	243.377,81	5,42	235.577,09	5,34	241.850,10	5,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.586,74	0,06	2.691,94	0,06	2.757,49	0,06	2.586,43	0,06	2.658,00	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.616,81	0,34	13.791,64	0,33	14.115,63	0,31	13.858,87	0,31	14.343,21	0,31
6	Konstruksi	518.846,91	12,98	557.007,14	13,14	594.976,20	13,26	559.385,32	12,67	567.261,17	12,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	931.218,92	23,29	997.108,76	23,52	1.063.641,99	23,70	1.052.808,55	23,85	1.090.498,33	23,85
8	Transportasi dan Pergudangan	538.259,46	13,46	574.307,71	13,55	610.878,26	13,61	553.472,48	12,54	581.894,67	12,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	106.501,19	2,66	115.108,13	2,72	124.379,16	2,77	109.928,27	2,49	117.634,05	2,57
10	Informasi dan Komunikasi	366.399,99	9,16	398.920,19	9,41	435.873,42	9,71	480.567,25	10,89	507.324,82	11,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	247.383,34	6,19	249.665,64	5,89	254.189,68	5,66	257.470,63	5,83	273.357,19	5,98
12	Real Estate	112.157,10	2,81	116.639,26	2,75	122.844,50	2,74	123.081,43	2,79	125.197,65	2,74
13	Jasa Perusahaan	10.907,55	0,27	11.348,74	0,27	11.864,84	0,26	11.372,72	0,26	11.488,38	0,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	275.750,18	6,90	288.594,14	6,81	302.399,80	6,74	300.955,65	6,82	302.922,24	6,63
15	Jasa Pendidikan	159.690,91	3,99	172.286,69	4,06	186.495,55	4,16	198.099,26	4,49	205.302,76	4,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.266,96	1,53	65.708,47	1,55	70.657,57	1,57	76.923,91	1,74	81.223,84	1,78
17	Jasa Lainnya	135.127,27	3,38	145.685,73	3,44	157.242,32	3,50	141.588,85	3,21	147.517,60	3,23
	Total	**3.997.854,36**	**100**	**4.238.662,76**	**100**	**4.488.204,49**	**100**	**4.413.625,08**	**100**	**4.571.926,96**	**100,00**

Sumber : payakumbuhkota.bps.go.id, 2022

Jumlah PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.571.926,96 Juta, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,58 %. Sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 23.85%, kemudian sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,73%. Selanjutnya sektor kontruksi memberikan kontribusi terhadap produktivitas daerah sebesar 12.41%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,10%. Untuk sektor lainnya, kontribusi terhadap PDRB di bawah 10%, dan sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0.06%.

b) Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan (kontinu) yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat terjadi disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kota Payakumbuh mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang. Perbandingan tingkat inflasi Kota Payakumbuh tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel II-19.

Tabel II-19

Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Payakumbuh	Sumbar	Indonesia
2017	2,11	2,02	3,61
2018	2,55	2,60	3,13
2019	1,72	1,66	2,72
2020	2,12	2,11	1,68
2021	1,69	1,40	1,87
Rata-rata	**2,038**	**1.95**	**2.60**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel II-19 terlihat bahwa angka inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2017-2021 cenderung hampir sama dengan Provinsi Sumatera Barat walaupun rata-rata tingkat inflasi masih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi. Akan tetapi, masih rendah jika dilihat dari tingkat inflasi nasional.

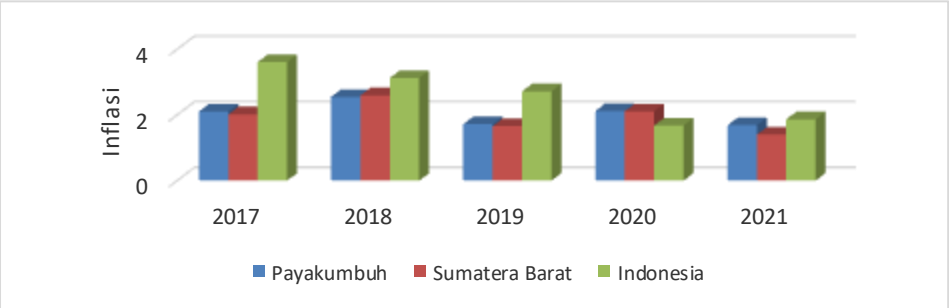

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Diagram II-4

Perbandingan Angka Inflasi

c) PDRB Perkapita

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel II-20
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB (juta rupiah)		Jumlah penduduk	PDRB per kapita (juta rupiah)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2017	5.639.684,44	3.997.854,36	131.819	42,78	30,33
2	2018	6.134.700,30	4.238.662,76	133.703	45,88	31,70
3	2019	6.824.430,16	4.488.204,49	135.573	50,34	33,11
4	2020	6.823.641,86	4.413.625,08	139.576	48,89	31,62
5	2021	7.290.850,77	4.571.926,96	141.184	51,64	32,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2021

Data Tabel II-20 menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada PDRB juga akan mempengaruhi angka PDRB perkapita, dimana pada tahun 2021 terjadi proyeksi kenaikan PDRB perkapita di Kota Payakumbuh. Hal ini terjadi dikarenakan mulai normalnya aktivitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi yang disebabkan merebaknya menurunnya kasus akibat pandemi COVID-19. Namun PDRB Perkapita atas harga konstan Kota Payakumbuh menurun dari tahun 2019 menjadi 31,62 juta, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 32,38 juta.

d) Indeks Gini

Indeks Gini (*Rasio Gini*) digunakan untuk menampilkan besaran pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan antara populasi dalam suatu wilayah. Indeks Gini memiliki nilai pada rentang 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan distribusi sangat merata yaitu setiap memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis, sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu memiliki segalanya dan semua lain tidak memiliki apa-apa dan rentang antara 0 – 1 menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Pada Diagram II-5 ditampilkan data Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional dimana kondisi tahun 2017 – 2021.

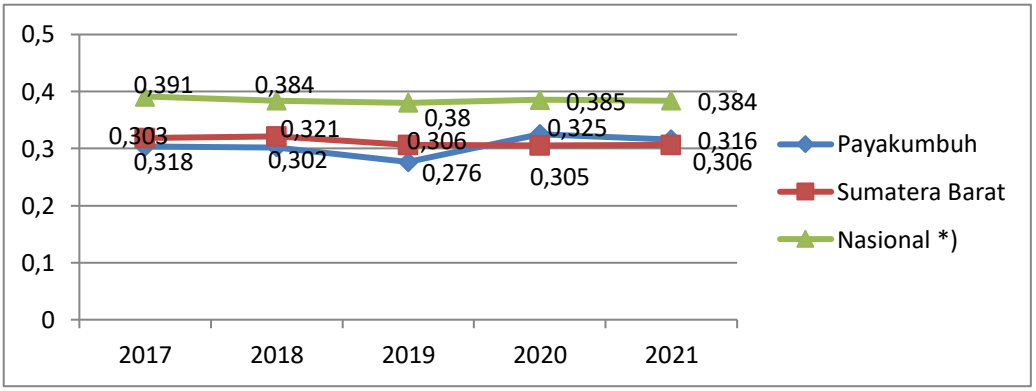

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)
*) indeks gini Nasional merupakan nilai rata-rata semester I dan semester II

Diagram II-5
Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2017-2021

Diagram II-5 menjelaskan bahwa kondisi COVID-19 sangat mempengaruhi distribusi pendapatan di Kota Payakumbuh dimana indeks gini Kota Payakumbuh berada diatas Provinsi Sumatera Barat, padahal pada tahun 2021, indeks gini Kota Payakumbuh sudah lebih baik dari tingkat Provinsi maupun Nasional.

2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial

a) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel II-21
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Payakumbuh	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel II-21 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini mengidentifikasikan bahwa mutu pendidikan di Kota Payakumbuh semakin baik.

b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk melalui 3 dimensi dasar yaitu :

a). Umur panjang dan hidup sehat;
b). Pengetahuan;
c). Standar hidup layak.

Penilaian IPM ini diinisiasi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan metodologi dari komponen IPM

yang digunakan, tahun dasar yang digunakan sampai pada metode agregasi yang digunakan. Sehingga pada tahun 2014 disempurnakan dengan menetapkan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada dimensi pengetahuan, Angka Harapan Hidup pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, dan pengeluaran yang disesuaikan (tahun dasar PNB per Kapita 2011 dan rata-rata pengeluaran per kapita kontan/ riil tahun dasar 2012=100) dengan menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas bukan makanan menggunakan metode penghitungan paritas daya beli (Metode Rao) pada dimensi standar hidup layak, sedangkan metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Capaian IPM ini dikelompokan pada 4 (empat) kategori yaitu :

a. IPM < 60 : IPM Rendah;
b. 60 ≤ IPM < 70 : IPM Sedang ;
c. 70 ≤ IPM < 80 : IPM Tinggi;
d. IPM ≥ 80 : IPM Sangat Tinggi

Tabel II-22
Capaian Indikator HDI/IPM Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Indikator HDI	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendidikan					
	- Harapan Lama Sekolah	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27
	- Rata-rata lama Sekolah (Thn)	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
2.	Kesehatan					
	- Angka Harapan Hidup (Thn)	73,13	73,33	73,61	73,74	73,84
3.	Ekonomi					
	- Pengeluaran yang disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	12,858	13,114	13,464	13,281	13,317
4.	**Human Developmen Index (IPM)**	**77,91**	**78,23**	**78,95**	**78,90**	**79,08**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari data tabel II-22 terlihat selama rentang waktu 5 tahun secara umum terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 77,91 pada tahun 2017 menjadi 79,08 pada tahun 2021.

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana semakin rendah capaian angka persentase balita gizi buruk maka semakin baik kinerja bidang kesehatan di Kota Payakumbuh. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk memperhatikan keadaan gizi anak mereka. Pada Revisi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022, target pencapaian indikator Balita Gizi Buruk adalah dibawah 3,00% (< 3,00%), dengan melihat capaian pada akhiar 2020 telah mencapai 0,2% maka target tersebut telah terpenuhiApabila dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2017 sebesar <3% maka target ini

terpenuhi yang berarti mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan serta kesadaran memelihara kesehatan masyarakat kota Payakumbuh.

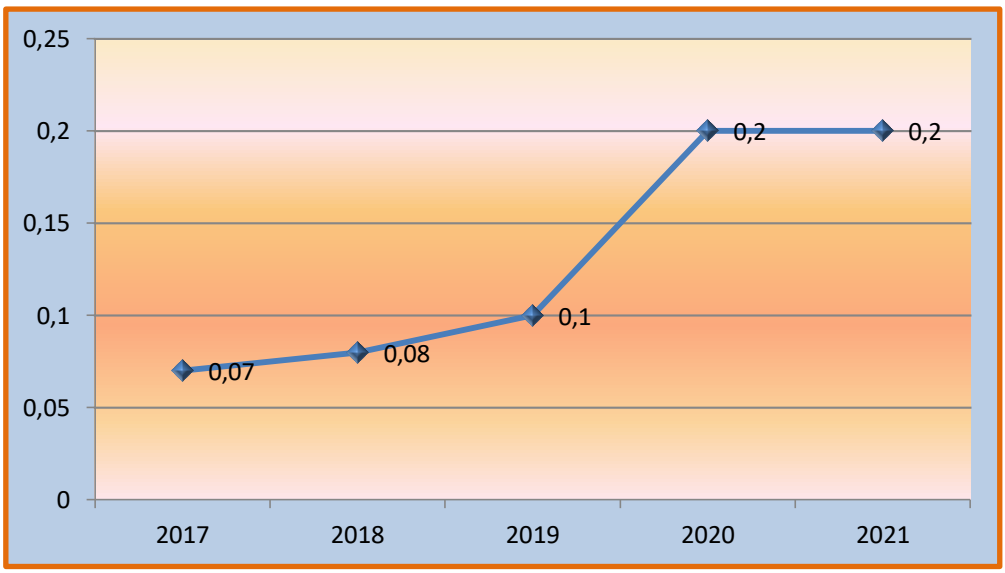

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

Diagram II-6

Balita Gizi Buruk Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, pada tahun 2021, tercatat 71,73% tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 yang tercatat sudah bekerja sebanyak 69.498 jiwa, selebihnya merupakan pengangguran/ sedang mencari pekerjaan. TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis diantaranya umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, pendapatan dan agama.

Tabel II-23

Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	**66.919**	**67.083**	**65,892**	**69.808**	**74.303**
Bekerja	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
Penganggur	2.307	2.538	2.710	4.664	4.805
Bukan Angkatan Kerja	**26.780**	**28.083**	**30.919**	**31.830**	**29.279**
Sekolah	9.739	11.219	8.708	9.734	10.220
Mengurus Rumah Tangga	13.720	15.030	18.403	16.937	17.783
Lainnya	3.321	1.834	3.808	5.159	1.276
Penduduk Usia Kerja	**93.699**	**95.166**	**96.811**	**101.638**	**103.582**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,42	70,49	68,06	68,68	71,73
Tingkat Penganggur (%)	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021

Terjadi kenaikan angkatan kerja yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 4.495 jiwa pada tahun 2021 sehingga jumlah angkatan kerja sebanyak 74.303 jiwa. Kondisi ini disebabkan banyaknya siswa tamatan SMA/SMK tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi namun juga tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan/keahlian yang mumpuni untuk berkompetisi dengan yang lainnya.

e) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan hasil proyeksi dari data tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi kenaikan tingkat kesempatan kerja di Kota Payakumbuh sebesar 1% dari tahun 2020 (Tabel II-24) atau dengan kata lain dari 100 jiwa penduduk angkatan kerja, terdapat 94 jiwa penduduk yang bekerja. Data rasio penduduk yang bekerja ini ditampilkan pada tabel II-24.

Tabel II-24
Rasio Penduduk Bekerja Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja (orang)	66.919	67.083	65,892	69.808	74.303
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
3.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,55	96,22	95,89	93,32	93,53
4.	Rasio	97	96	96	93	94

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021

f) Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Kemiskinan dan Pengangguran telah menjadi masalah sosial diberbagai daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang tergambar dalam Tabel II-25.

Tabel II-25
Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	7.720	7.690	7.680	7.740	8.697
3	Tingkat Kemiskinan	%	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16

Sumber : Dinas Sosial 2021

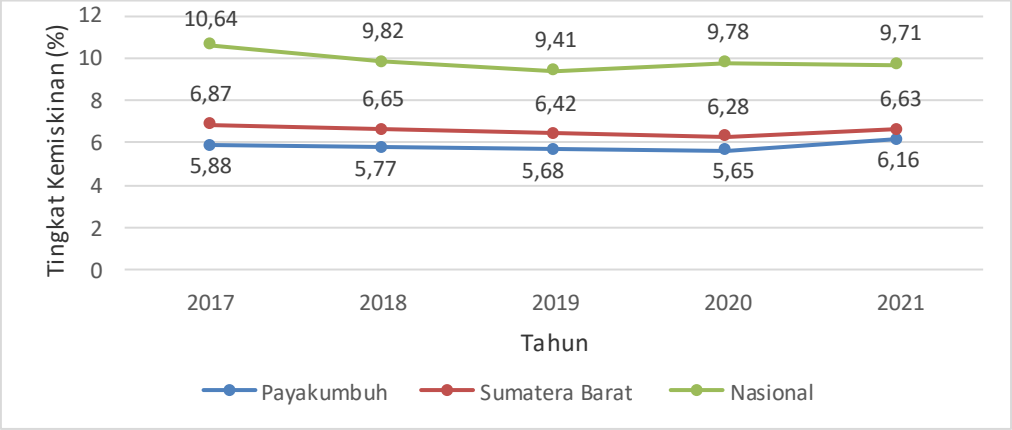

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

*) tingkat kemiskinan bulan maret setiap tahunnya

Diagram II-7

Perbandingan Fluktuasi Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021

Dari tabel II-25 dan diagram II-7, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan diketahui tidak hanya di Kota Payakumbuh, namun juga di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional adanya kecenderungan peningkatan tingkat kemiskinan dengan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi merupakan efek dari penurunan ekonomi semenjak pandemi COVID-19 yang berimbas pada tingkat kemiskinan.

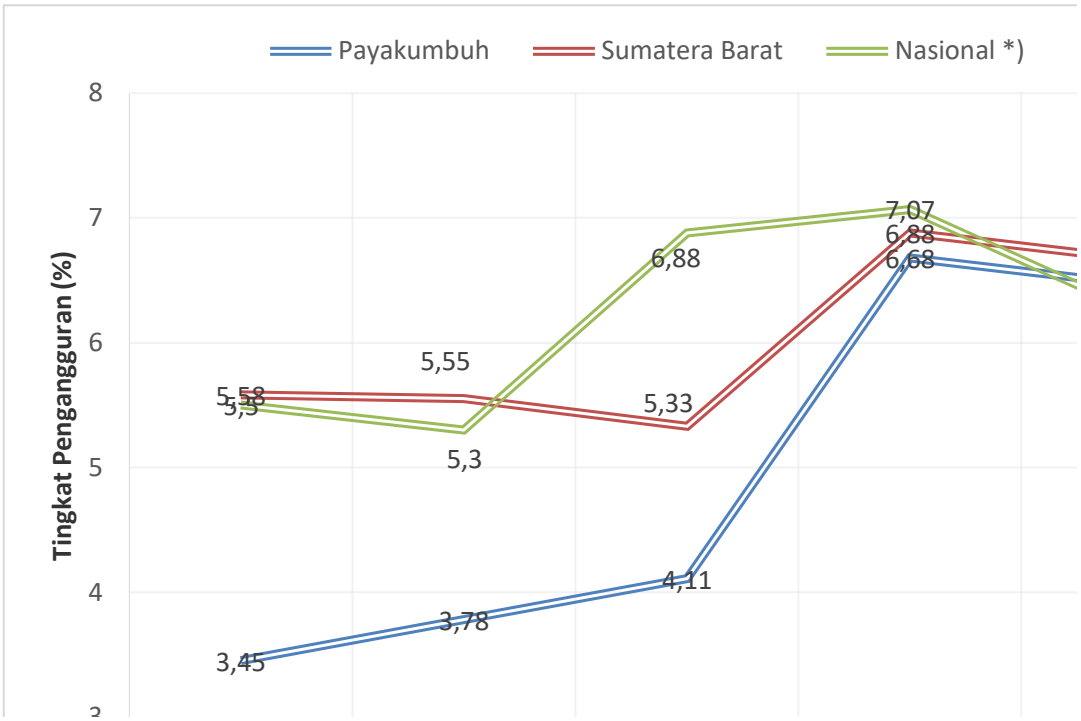

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

*) tingkat pengangguran pada bulan agustus setiap tahunnya

**) tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat diambil dari bps.go.id

Diagram II-8

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Seperti yang terlihat pada diagram II-8, adanya fluktuasi tingkat pengangguran setiap tahun pada masing-masing wilayah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Tingkat pengangguran pada tahun 2021 memiliki tren menurun baik itu di payakumbuh, Sumatera Barat maupun di tingkat Nasional. Ini disebabkan oleh mulai bangkitnya perekonomian setelah PPKM dilonggarkan

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/*expo*, jumlah sarana dan penyelenggaraan festifal seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian. Untuk kondisi 2021 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya dari tidak dilaksanakan pada tahun 2020, pada tahun ini meningkat menjadi 19 kali, hal ini dikarenakan mulai melandainya kasus positif covid-19, sementara itu akibat pelaksanaan PPKM, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga menimbulkan minat masyarakan untuk kembali menghidupkan kesenian daerah yang biasanya mati suri. Pada tahun ini peningkatan jumlah kesenian yang aktif sebanyak 8 grup, dari 72 grup tahun 2020 menjadi 80 grup pada tahun 2021, atau terjadi peningkatan sebesar 11,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II-26.

Tabel II-26
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	Kali	1	3	13	-	-
2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Kali	9	38	40	-	19
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	2	3	4	5	5
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Unit	22	26	26	34	34
5.	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	Unit	22	26	26	34	34
6.	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	Grup	70	70	15	72	80

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah atlet berprestasi merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Namun dengan terjadinya wabah Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan target prestasi atlet tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada Tabel II-27 di bawah ini terlihat bahwa tahun 2020 perolehan medali sebagai perwujudan prestasi atlet sangat sedikit karena banyaknya even-even olah raga baik regional, nasional dan internasional yang tidak dilaksanakan.

Tabel II-27
Prestasi Olahraga Tahun 2017 - 2021

No	Cabang Olah Raga	2017			2018			2019			2020			2021		
		Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)		
		Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Angkat Berat				12			-	-							
2	Atletik				4	1		12	1					16		
3	Balap Sepeda							-	-							
4	Bola Basket				2	1		-	-							
5	Bola Volly					1		1	-							
6	Bulu Tangkis				1			14	-		5					
7	Catur					1	1	2	-							
8	Futsal				1			-	-							
9	Judo				9			-	-							
10	Karate				6			16	-	1	10				1	
11	Kempo				4			-	-						1	
12	Menembak				3			-	-							
13	Panjat Tebing				2			-	-							
14	Renang				22	2		2	38					29		
15	Senam				13			-	-							
16	Sepak Bola							-	-							
17	Sepak Takraw				2			-	-							
18	Silat				3											
19	Taekwondo				5			9	1							
20	Tarung Drajat				8			3	-							
21	Tenis Lapangan				2			-	-		2					
22	Tenis Meja				4	2										
23	Aero Sport				10			-	9		4	1			6	
24	Tinju				6	2		-	1							
25	Bridge															
26	Wushu				5	1		-	-							
27	Soft Tenis				3			-	-							
28	Muaythai				2			-	-							
29	Panahan				4			-	-							
30	Bilyard				3											
31	Dayung				6											
32	BOCCE (Tolak Peluru)							1	-							
TOTAL		**147**	**0**	**0**	**0**	**142**	**11**	**1**	**60**	**50**	**1**	**21**	**1**	**45**	**8**	**0**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah sarana dan prasana olah raga di Kota Payakumbuh cukup signifikan, namun kualitasnya belum representatif untuk even-even skala nasional. Walaupun pada tahun 2019 telah mulai dibangun stadion olah raga dengan rencananya berstandar nasional di area Sungai Batang Agam Kelurahan Tanjung Pauh namun belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olah raga juga telah dibangun sarana olah raga di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diate yang diberi

nama “Payakumbuh Bugar”. Diharapkan dengan adanya sarana ini dapat merangsang tumbuhnya bibit-bibit atlet di level regional, nasional dan internasional.

Tabel II-28

Sarana Prasarana olahraga Tahun 2021

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	15 Lapangan	Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Koto Baru Payobasuang; Talawi; Tanjuang Anau; SMAN 2; Parik Muko Aia; Sungai Durian; Koto Panjang Lampasi; Tanjuang Gadang; Ma’had Islamy; Payobasuang;
2	Lapangan Basket	25 Lapangan	Kubu Gadang 2 buah; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; MAN 1; MAN 2;
3	Lapangan Volley	48 Lapangan	Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh;SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; MAN 1; MAN 2; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibuh; Tambago; Bonai; Tigo Koto Diate
4	Lapangan Bulu Tangkis	31 Lapangan	GOR M. Yamin; Jax’s Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; SMKN 1 indoor 2 bh; SMKN 2 indoor 3 bh; Nunang; Padang Tangah Payobada; Balai Jariang Timur; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Muaro; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Padang Alai; Padang Karambia
5	Lapangan Tenis	6 Lapangan	Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tenis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tenis Outdoor SMAN 2,Tenis Outdoor MAN 2, Tenis Outdoor Batalyon 131 BS, Tenis Outdoor SMAN 3
6	Lapangan Atletik	3 Lapangan	Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin, Padang Kaduduak
7	Kolam Renang	1 Lapangan	Ngalau Indah
8	Gelanggang/ Balai Remaja	4 Lapangan	Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah
9	Lapangan Futsal	1 lapangan	Tigo Koto Diate
10	Joging Track	1 lapangan	Tigo Koto Diate
TOTAL		**133**	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Payakumbuh. Aspek ini menyangkut pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menjadi wewenang dari beberapa Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diembannya.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan menjadi soko guru (penyangga) pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Menurut ahli sumber daya manusia, Priyono (2009) dan Elfindri (2014), pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia

sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini, peningkatan APK, APM, APS dan sebagainya.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dinimerupakan salah satu upaya memperkenalkan pendidikan sejak dini kepada anak yang dilakukan melalui pembinaan/ pendidikan kepada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembinaan ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal. Secara Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD dikategorikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) target usia 4 tahun – 6 tahun, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) target usia 4 – 6 tahun dengan prioritas 5 – 6 tahun; dan jalur pendidikan non formal yang meliputi Kelompok Bermain (KB) target usia 2 – 6 tahun dengan prioritas usia 3 – 4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) target usia sejak lahir – 6 tahun dengan prioritas usia sejak lahir – 4 tahun, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) yang merupakan pendidikan non formal mandiri terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial menargetkan usia sejak lahir – 6 tahun.

Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-29
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2017-2021 Kota Payakumbuh

No	PAUD Formal	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	54	55	56	60	61
2.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.167	3.110	3.332	2.975	2.836
4.	Jumlah Rombongan Belajar	202	206	213	215	206

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Kota Payakumbuh memiliki APK lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lain dan banyaknya anak sekolah yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP) yang umurnya diluar tingkatan usia jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APK PAUD

paling tinggi berada pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021 disebabkan oleh perubahan data dapodik.

Tabel II-30
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	PAUD*)	62,61	82,81	81,49	76,28	44,63
2	SD/MI**)	109,45	113,58	110,29	110,52	110,14
3	SMP/MTs**)	85,63	87,26	90,21	93,74	92,03

Sumber : *) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021
**) website BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Indikator ini digunakan untuk menunjukan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja melalui kualifikasi pendidikan angkatan kerja tersebut.

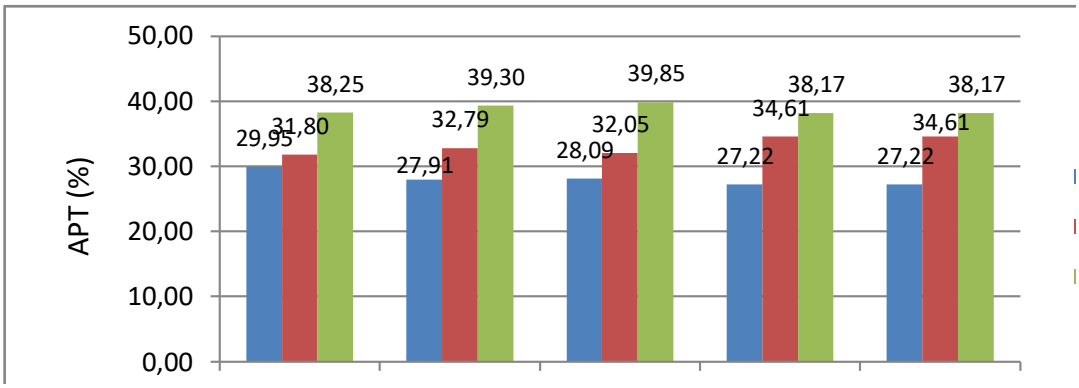

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Diagram II-9
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (dalam %)

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur terhadap kelompok usia sekolah yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Angka Partisipasi Murni tingkat SD Kota Payakumbuh tahun 2021 cenderung naik, namun APM SMP sederajat tahun 2021 sedikit turun dibandingkan tahun 2020.

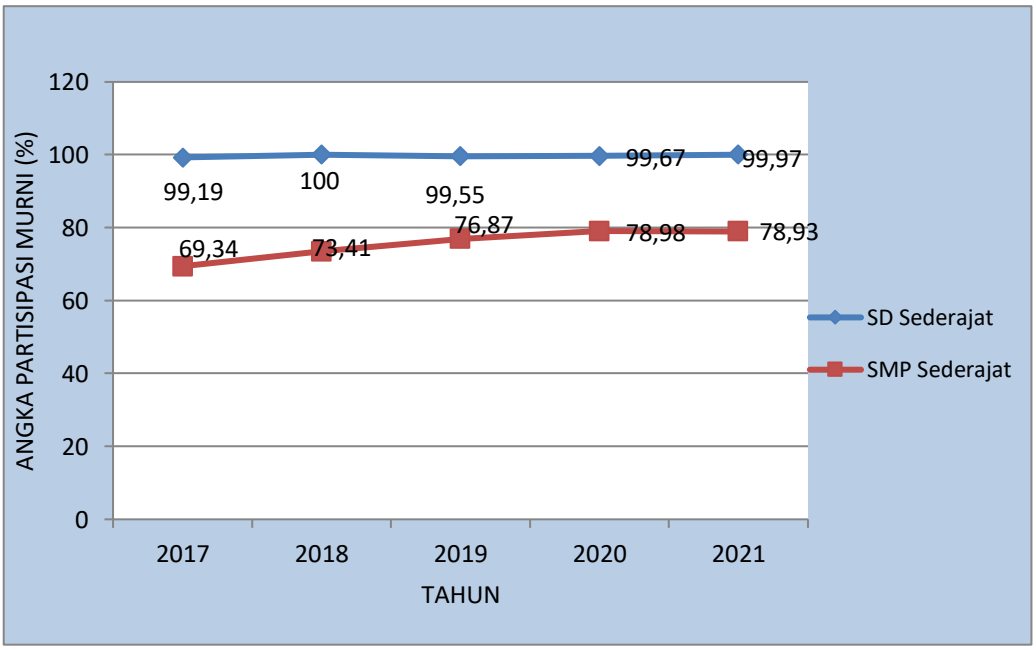

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Diagram II-10
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS didapatkan dari proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2021, tiingkat APS 7-12 tahun (SD/MI) mencapai 99,97, sedangkan APS 13-15 tahun (SMP/ MTs) mencapai 97,98, seperti terlihat pada diagram II-11 berikut ini :

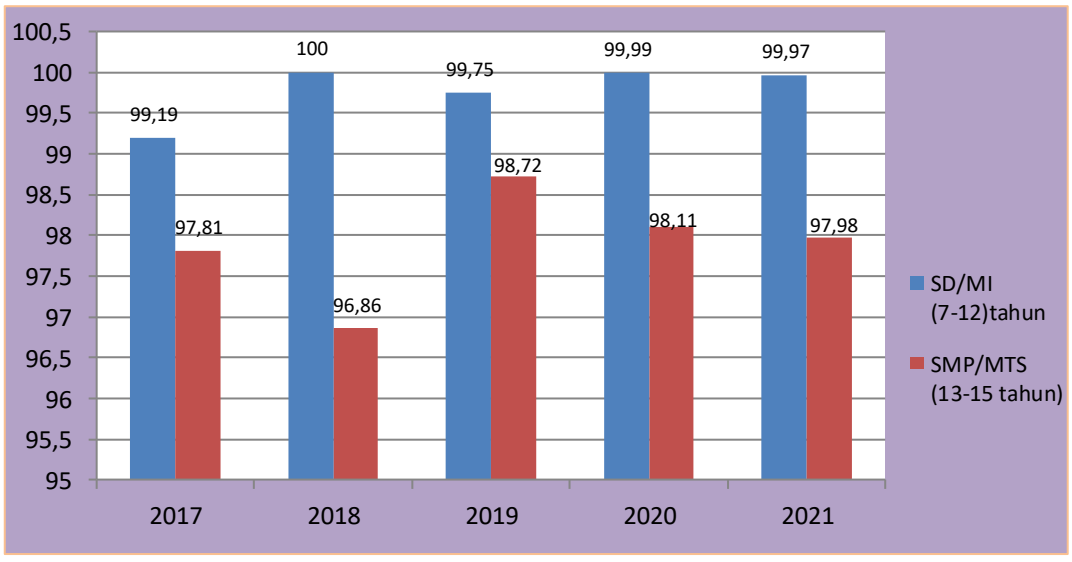

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Diagram II-11
Angka Partisipasi Sekolah Kota Payakumbuh 2017-2021

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa setiap tingkatan pendidikan yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel II-31
Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	19	1	3	5	7
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,11	0,01	0,02	0,03	0,04
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	65	39	57	35	33
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,60	0,35	0,50	0.30	0,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Pada tahun 2021, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sudah 100%.

Tabel II-32
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.741	2.775	2.917	2.821	N/A
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.740	2.775	2.915	2.820	N/A
1.3.	Persentase Lulusan	99,96	100	99,93	99,96	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.993	3.263	3.335	3.587	N/A
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.989	3.260	3.326	3.586	N/A
2.3.	Persentase Lulusan	99,87	99,91	99,73	99,97	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Pelaksanaan UN tahun 2020 merupakan kegiatan UN yang terakhir. Selanjutnya di tahun 2021 UN tidak ada dan untuk evaluasi siswa di lakukan dengan *Assesment* Nasional yang mana meliputi Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan satuan pendidikan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut ditampilkan data rasio ketersediaan sekolah pada tabel II-33.

Tabel II-33
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah sekolah	76	77	78	82	82
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14.477	12.853	14.246	14.528	14.528
1.3.	Rasio (:10.000)	53	60	55	56	56
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah sekolah	18	17	18	20	20
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.933	6.933	6.972	7.166	7.166
2.3.	Rasio (:10.000)	26	25	26	28	28
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah sekolah	24	24	25	25	25
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.991	6.991	7.042	7.171	7.171
3.3.	Rasio (:10.000)	34	34	36	35	35

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan Tabel II-33 dapat diartikan pada rentang tahun 2017 – 2021, setiap 10.000 jiwa penduduk pada kelompok usia 7 – 12 tahun telah tersedia sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta sebanyak rentang 53 – 60 sekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13 – 15 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk dapat ditampung pada rentang 24 – 28 sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Begitu juga halnya untuk kelompok usia 16 – 18 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk terdapat ketersediaan sekolah pada rentang 31 – 36 sekolah SMA/MA/ SMK baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Pada tabel II-33 kecenderungan jumlah sekolah di Kota Payakumbuh selalu bertambah dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah sekolah dari 18 menjadi 17 sekolah dimana pada tahun 2018 SMP Tarbiyah tidak lagi aktif, namun pada tahun 2019, jumlah sekolah SMP/MTs kembali menjadi 18 dengan dibukanya SMP Mutiara Hati.

Tabel II-34
Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombongan Belajar (Rombel) Tahun 2021

No	Uraian	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
1	Ruang Kelas	204	31	706	24	319	76
	a. Kondisi Baik	174	20	569	17	291	72
	b. Kondisi Rusak Ringan	18	11	100	7	26	4
	c. Kondisi Rusak berat	3	0	15	0	2	0
	d. Bukan milik/ sewa	9	0	22	0	0	0
2	Jumlah rombel	181	25	704	26	309	76

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

9. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.Jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Tabel II-35
Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
1.2.	Jumlah Murid	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.3.	Rasio	1:17	1:16	1:16	1:16	1:16
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	782	864	836	835	820
2.2.	Jumlah Murid	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.3.	Rasio	1:14	1:13	1:14	1:14	1:14

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Selanjutnya terkait dengan status kepegawaian dari para pengajar dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pada Diagram II-12.

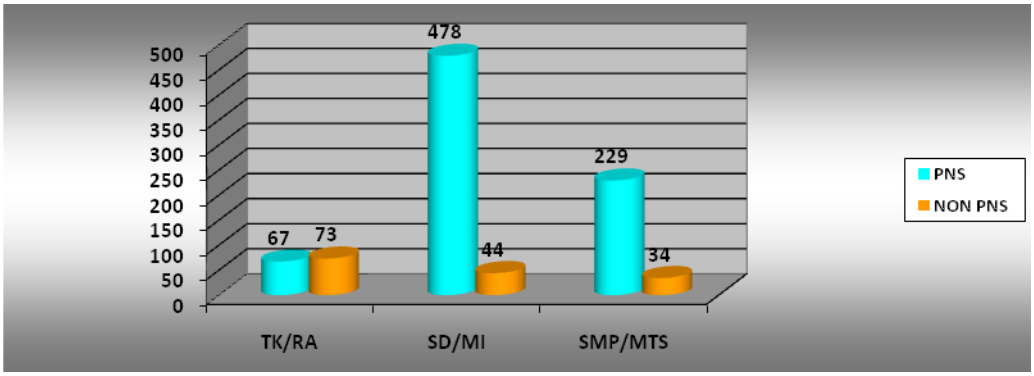

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Diagram II-12
Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2021

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tabel II-36
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	246	263	274	271	282
1.3.	Rasio (:100)	77	82	84	84	86,50
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.026	1.040	1.067	1.018	1.061
2.3.	Rasio (:100)	92	93	94	95	96,37

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
3	**SLB**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	120	115	115	123	122
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	110	104	104	110	112
3.3.	Rasio (:100)	92	90	90	89	91,80
4	SMP/MTs					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	782	864	836	834	820
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	733	816	806	814	789
4.3.	Rasio (:100)	94	94	96	98	96,22
5	SMA/MA/SMK					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.243	1.251	1.250	1.224	1.225
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.209	1.227	1.208	1.207	1.215
5.3.	Rasio (:100)	97	98	97	99	99,18

Sumber **:** Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Dari Tabel II-36 terlihat rata – rata guru yang mengajar di Kota Payakumbuh yang telah berkualifikasi S1/D4 telah melebihi 90 dari 100 guru yang mengajar, hanya tingkat TK/RA dan SLB yang jumlahnya dibawah 90 pada tahun 2021, hal ini disebabkan penambahan jumlah guru namun tidak dengan kualifikasi S.1/D.IV.Diharapkan kedepan untuk tenaga pengajar ini dapat sepenuhnya memenuhi kualifikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

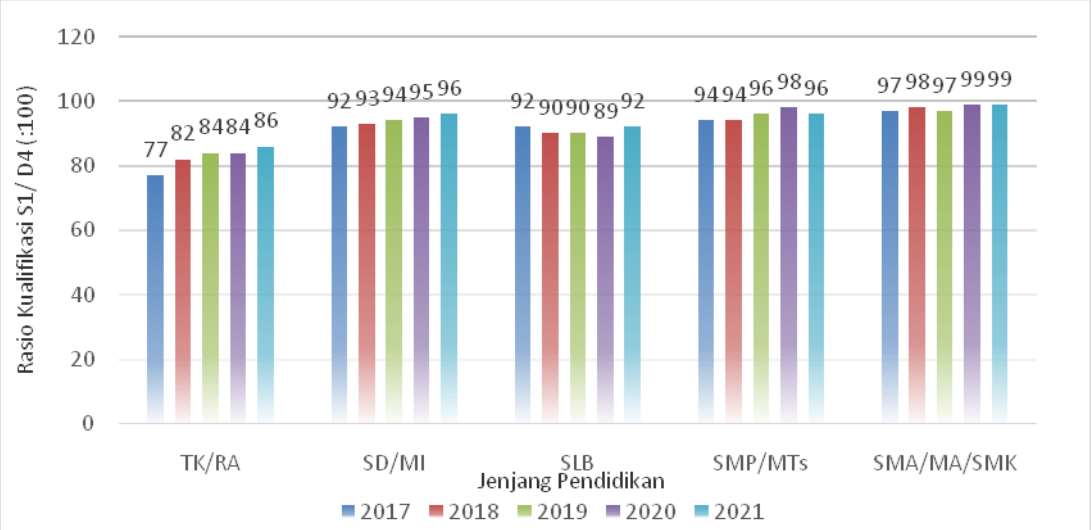

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Diagram II-13
Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang PendidikanTahun 2017-2021

Selain tingkat pendidikan, untuk meningkatkan kualifikasi guru, pemerintah telah menetapkan standar tertentu bagi seorang guru yang dikenal dengan sertifikasi guru. Untuk menjadi guru yang bersertifikasi terdapat persyaratan yang tidak mudah sesuai dengan profesi guru tersebut. Kota Payakumbuh telah memiliki guru-guru yang bersertifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak didik di Kota Payakumbuh yang dapat dilihat pada tabel II-37.

Tabel II-37
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	**TK/RA**						
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	317	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	126	129	133	143	139	140
1.3.	Rasio (:100)	40	40	42	44	43	43
2	**SD/MI**						
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.062	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	540	458	492	528	513	522
2.3.	Rasio (:100)	51	41	44	47	48	48
3	**SMP/MTs**						
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	799	782	864	836	834	820
3.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	302	271	293	295	280	263
3.3.	Rasio (:100)	38	35	34	35	34	33
4	**PengawasSekolah**						
4.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	30	19	20	20	17	16
4.2.	Pengawas Bersertifikasi (Orang)	30	19	20	20	17	16
4.3.	Rasio (:100)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Jika mengikuti standar sertifikasi guru yang ditetapkan pemerintah, maka dari tabel diatas diketahui bahwa kurang dari 50,00% jumlah guru yang telah bersertifikasi seperti misalnya pada tingkat SMP/ MTs dimana dari 100 guru yang ada, hanya 33 guru yang tergolong guru sertifikasi. Walaupun jumlah guru yang bersertifikasi masih dibawah 50,00% dari jumlah guru yang ada, kualitas pendidikan masih tetap dapat ditingkatkan terutama dengan adanya pengawas sekolah yang telah bersertifikasi seluruhnya, sehingga dengan begitu diharapakan dapat memastikan jalannya pendidikan di Kota Payakumbuh dengan baik.

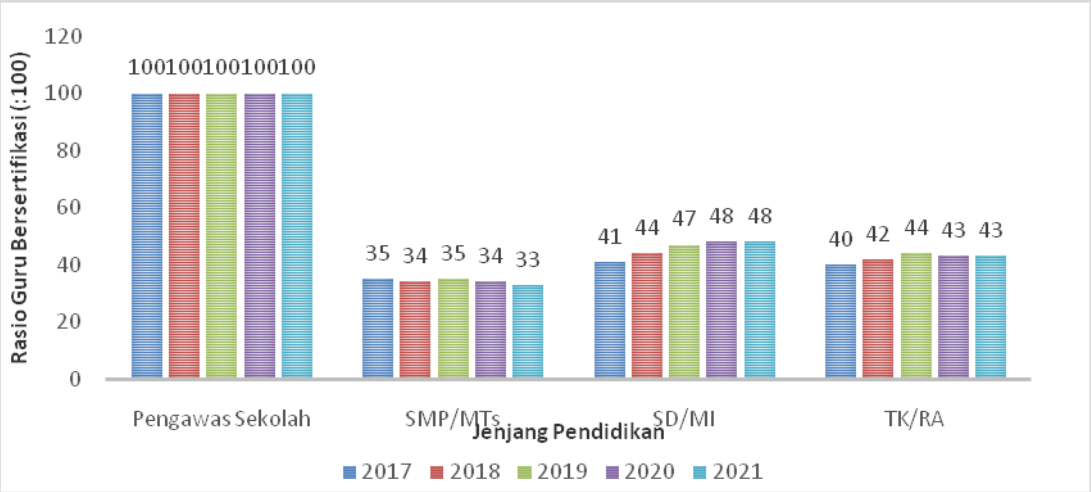

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Diagram II-14
Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

11. Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, karena persyaratan untuk mendapatkan akreditasi tersebut, sekolah harus memenuhi sarana prasarana, kurikulum dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikn baik sarana prasarana maupun sistem pendidikan, agar dapat memenuhi persyaratan akreditasi dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Upaya peningkatan akreditasi sekolah ini dilakukan melalui peningkatan capaian 8 standar pendidikan, meliputi standarisi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan serta standar penilaian.

Tabel II-38

Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Sekolah Dasar**	**76**	**77**	**78**	**82**	**81**
	Akreditasi A	54	59	63	63	62
	Akreditasi B	15	17	12	12	13
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	6	0	2	6	5
	Persen SD terakreditasi A	71,05%	76,62%	80,77%	76,83%	76,54%
2	**SMP**	**18**	**17**	**18**	**20**	**20**
	Akreditasi A	11	11	12	12	12
	Akreditasi B	1	3	3	3	3
	Akreditasi C	1	1	3	3	4
	Belum Terakreditasi	5	2	-	2	1
	Persen SMP terakreditasi A	61,11%	64,71%	66,67%	60%	60%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Pada tahun 2021, Sekolah Dasar yang sudah terakreditasi A mencapai 76,54% dan SMP baru 60,00%. Penurunan persentase jumlah sekolah yang terakreditasi A terjadi karena pada tahun 2021 terjadi penambahan beberapa unit sekolah yang rata-rata masih belum memiliki akreditasi sekolah.

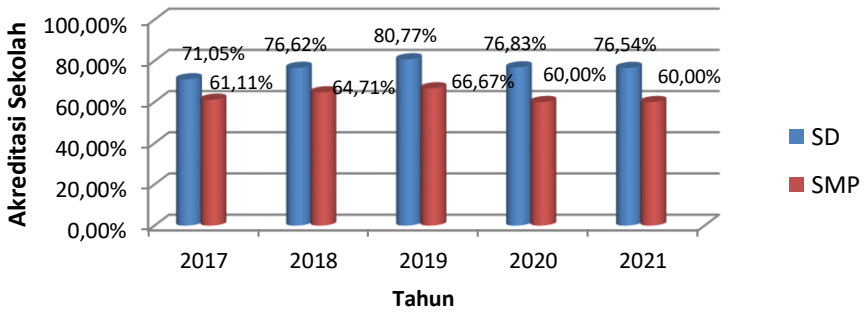

Diagram II-15

Rasio SekolahTerakreditasi A di Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

12. Muatan Pendidikan Karakter

Saat ini perhatian masyarakat dalam pendidikan anaknya lebih mengarah pada pembentukan karakter anak sejak dini. Oleh karenanya sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta yang memiliki keleluasaan dalam menyusun muatan kurikulum pendidikan berlomba-lomba untuk memasukan pendidikan karakter pada muatan pendidikan mereka.

Secara umum, pendidkan karakter pada kurikulum sekolah telah disusun, namun dari segi pandangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga kesempatan ini digunakan oleh sekolah swasta untuk menambahkan muatan pendidikan karakter pada daftar kurikulum pendidikan mereka.

Tabel II - 39
Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
1	AGAMA			
	- Pendidikan Agama Islam	4 JP/minggu	4 JP/minggu	
	- Tahsin / Tahfilz	-	8 JP/minggu	Sekolah tertentu, (ekskul)
	- Baca/tulis Al Qur'an	2 JP/minggu	2 JP/minggu	
	- Doa harian / hadist	-	2 JP/minggu	
	- Zikir Almatsura	-	1 JP/minggu	
2	PEMBIASAAN KARAKTER/AKHLAK MULIA			
	- Sholat Berjamaah (Zuhur)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Berjamaah (Ashar)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Duha	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Adab Islami	NA	Setiap hari	Di pantau guru /teman
	- Puasa Sunnah	-	2 x /bulan	Senin/Kamis
	- Berdoa sebelum/ sesudah belajar	Setiap hari	Setiap hari	
	- Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan	NA	Setiap hari	
3	KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN			
	- Out Bond	-	1x/semester	
	- Malam pembinaan Iman & Taqwa	-	1x/semester	
	- Kunjungan edukatif	1x/semester	1x/semester	
	- Kunjungan ke rumah (home visit)	1x/semester	1x/semester	
	- Muhaddaroh	1x/semester	2x/bulan	
	- Market day	-	2x/bulan	
4	EVALUASI / KONTROL AKHLAK / KARAKTER			
	- Pengisian buku penghubung /kontrol amalan di rumah/ sekolah	Belum setiap hari	Setiap hari	Di cek oleh guru kelas/walas
	- Kontrol guru	Belum dinilai	Dinilai setiap minggu	Nilai mingguan
	- Kontrol orang tua	Belum Optimal	Dinilai setiap minggu	
	- Kontrol Kepala Sekolah	Belum Optimal	Setiap Bulan	
5	KEJUJURAN			
	Kantin Jujur Sehat	Belum Optimal	Setiap hari	- Kontrol guru - Laporan ke Kepala sekolah

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
6	PRAMUKA	1/Minggu	1/Minggu	Ekskul Wajib
7	PARENTING	1/Tahun	1/Bulan	
8	LITERASI	2 JP/minggu	2 JP/minggu	Ditambah Ekskul
9	OLAH RAGA	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul
10	SENI BUDAYA	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka Dinas Pendidikan memunculkan indikator kinerja dalam urusan pendidikan yaitu “persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik”. Indikator ini diperoleh dari jumlah sekolah yang menerapkan muatan pendidikan karakter berkategori baik dibandingkan dengan jumlah sekolah keseluruhan. Kategori sekolah dengan pendidikan karakter berketegori baik dinilai berdasarkan pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui rekapitulasi buku penghubung yang ada disekolah.Buku penghubung adalah buku yang melaporkan pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh guru dan siswa berdasarkan instrument yang disusun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Pada tahun 2021, persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik telah mencapai 75,49%. Berikut data sekolahyang melaksanakan Pendidikan Karakter di Kota Payakumbuh.

Tabel II - 40
Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Berkategori Baik Tahun 2021

No	Sekolah	No	Sekolah
A	SD		
1.	SDN 01 Payakumbuh	41.	SDN 41 Payakumbuh
2.	SDN 02 Payakumbuh	42.	SDN 42 Payakumbuh
3.	SDN 03 Payakumbuh	43.	SDN 43 Payakumbuh
4.	SDN 04 Payakumbuh	44.	SDN 44 Payakumbuh
5.	SDN 05 Payakumbuh	45.	SDN 45 Payakumbuh
6.	SDN 06 Payakumbuh	46.	SDN 46 Payakumbuh
7.	SDN 07 Payakumbuh	47.	SDN 47 Payakumbuh
8.	SDN 08 Payakumbuh	48.	SDN 48 Payakumbuh
9.	SDN 09 Payakumbuh	49.	SDN 49 Payakumbuh
10.	SDN 10 Payakumbuh	50.	SDN 50 Payakumbuh
11.	SDN 11 Payakumbuh	51.	SDN 51 Payakumbuh
12.	SDN 12 Payakumbuh	52.	SDN 52 Payakumbuh
13.	SDN 13 Payakumbuh	53.	SDN 53 Payakumbuh
14.	SDN 14 Payakumbuh	54.	SDN 54 Payakumbuh
15.	SDN 15 Payakumbuh	55.	SDN 55 Payakumbuh
16.	SDN 16 Payakumbuh	56.	SDN 56 Payakumbuh
17.	SDN 17 Payakumbuh	57.	SDN 57 Payakumbuh
18.	SDN 18 Payakumbuh	58.	SDN 58 Payakumbuh
19.	SDN 19 Payakumbuh	59.	SDN 59 Payakumbuh
20.	SDN 20 Payakumbuh	60.	SDN 60 Payakumbuh

No	Sekolah	No	Sekolah
21.	SDN 21 Payakumbuh	61.	SDN 61 Payakumbuh
22.	SDN 22 Payakumbuh	62.	SDN 62 Payakumbuh
23.	SDN 23 Payakumbuh	63.	SDN 63 Payakumbuh
24.	SDN 24 Payakumbuh	64.	SDN 64 Payakumbuh
25.	SDN 25 Payakumbuh	65.	SDN 65 Payakumbuh
26.	SDN 26 Payakumbuh	66.	SDN 66 Payakumbuh
27.	SDN 27 Payakumbuh	67.	SDI Raudhatul Jannah
28.	SDN 28 Payakumbuh	68.	SDIT Al Iffat
29.	SDN 29 Payakumbuh	69.	SDIT Al Huffazh
30.	SDN 30 Payakumbuh	70.	SDIT Madani
31.	SDN 31 Payakumbuh	71.	SDIT IPHI
32.	SDN 32 Payakumbuh	72.	SDI Muhammadiyah
33.	SDN 33 Payakumbuh	73.	SD Pius Payakumbuh
34.	SDN 34 Payakumbuh	**B.**	**SMP**
35.	SDN 35 Payakumbuh	1	SMPN 2 Payakumbuh
36.	SDN 36 Payakumbuh	2	SMPN 4 Payakumbuh
37.	SDN 37 Payakumbuh	3	SMPN 8 Payakumbuh
38.	SDN 38 Payakumbuh	4	SMP ICBS
39.	SDN 39 Payakumbuh		
40.	SDN 40 Payakumbuh		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2021

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib dan menjadi prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2021. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator - indikator berikut ini :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, masih terdapat kasus kematian bayi di Kota Payakumbuh, dimana pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, dan menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2021 yang disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 4 orang, Asfiksia sebanyak 2 orang dan penyakit bawaan sebanyak 1 orang. Untuk kematian balita pada tahun 2020 sebanyak 6 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 2 orang yang disebabkan oleh 1 orang kecelakan dan 1 orang kelainan jantung. Dan untuk kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 tidak ditemukan kasus.

Tabel II-41

Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kasus Kematian Bayi	13	16	10	20	7
2.	Kasus Kematian Balita	3	0	1	6	2
3.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	3	1	0	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tahun 2020tidak ada penambahan jumlah posyandu di Kota Payakumbuh, dimana terdapat 165 satuan posyandu yang terdiri atas Posyandu Madya sebanyak 1 buah, Posyandu Purnama sebanyak 82 buah dan Posyandu Mandiri sebanyak 82 buah. Sedangkan untuk jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2020 sebanyak 13.794 jiwa.

Tabel II-42
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah posyandu	165	165	165	165	165
2.	Jumlah balita	13.898	13.858	13.825	13.794	13.434
	Rasio (:1000)	1:84	1:83	1:83	1:83	1:81

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

Tabel II-42 di atas menginformasikan bahwa untuk 1 posyandu melayani ± 81 balita pada tahun 2021, sehingga belum efisiennya pelayanan posyandu.

Tabel II-43
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kecamatan Payakumbuh Timur	38	3.368	1 : 89
2	Kecamatan Payakumbuh Barat	55	5.310	1 : 97
3	Kecamatan Payakumbuh Selatan	18	1.082	1 : 60
4	Kecamatan Payakumbuh Utara	42	1.964	1 : 47
5	Lamposi Tigo Nagori	12	1.710	1 : 143
	Jumlah	**165**	**13.434**	**1 : 81**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk

Pemberian layanan kesehatan kepada masyakat merupakan upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan lain sebagainya. Kota Payakumbuh telah memiliki 1 rumah sakit tipe C, 8 puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan yang juga dibantu dengan adanya puskesmas pembantu sebanyak 23 unit. Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Payakumbuh, puskesmas-puskesmas di Kota Payakumbuh telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2018 dan 2 dari 8 puskesmas tersebut telah memiliki layanan poned 24 jam yaitu Puskesmas Ibuah dan Puskemas Lampasi.

Tabel II-44
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	JumlahPuskesmas	8	8	8	8	8
2.	JumlahPoliklinik	15	15	15	15	15

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jumlah Pustu	23	23	23	23	23
4.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
	Rasio (:1000)	0,349	0,344	0,339	0,329	0,326

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik yang ada di Kota Payakumbuh Tahun 2021 tercatat sebanyak 46 unit. Jika dirasiokan maka 1000 jiwa penduduk akan dilayani oleh 0,326 unit atau dengan kata lain 1 unit pusat kesehatan masyarakat dan unit pembantunya melayani 3.067 jiwa penduduk.

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, Kota Payakumbuh memiliki 1 Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama RSUD Dr. Adnaan WD. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C yang telah terakreditasi Paripurna oleh Badan Akreditasi Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2017. Seperti halnya puskesmas yang ada di Payakumbuh, RSUD Dr. Adnaan WD merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang berstatus BLUD, dimana RSUD dapat langsung mengelola pendapatan untuk membiayai kebutuhan rumah sakit. Untuk peningkatan pelayanan di RSUD Dr Adnan WD, dilakukan percepatan pembangunan berbagai fasilitas yang tidak hanya dibiayai melalui dana BLUD rumah sakit, tetapi juga dana pembiayaan dengan sharing pembayaran APBD Kota Payakumbuh. Berikut disajikan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Payakumbuh beserta rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel II-45

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	3	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan khusus lainnya	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	4	4	4	6	6
6.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
	Rasio (:1000)	1 : 32.955	1 : 33.426	1 : 33.893	1 : 23.263	1:23.530

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Tabel II-46

Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawatan di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat tidur	269	292	326	285	338

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh, permasalahan tersebut diperburuk dengan tidak meratanya kualitas dokter.

Tabel II-47
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	JumlahPenduduk	JumlahDokter		Rasio	
			dr	drg	dr	drg
1	Payakumbuh Timur	29.669	21	11	1 : 1.270	1 :2.698
2	Payakumbuh Barat	55.133	46	18	1:199	1:3.063
3	Payakumbuh Selatan	12.205	15	4	1:814	1:3.051
4	Payakumbuh Utara	32.443	56	10	1:579	1:3.244
5	Lamposi Tigo Nagori	11.734	5	1	1:2.347	1:11.734
Jumlah		**141.184**	**143**	**44**	**1:987**	**1:3.209**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2021 di kecamatan payakumbuh Timur, untuk 1 dokter harus melayani 1.270 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 2.698 orang, di Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk 1 dokter harus melayani 199 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 3.063 orang. Di Kecamatan Payakumbuh Selatan 1 dokter harus melayani 814 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 3.051 orang. Di Kecamatan Payakumbuh Utara 1 dokter harus melayani 579 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 3.244 orang dan Di Kecamatan Latina 1 dokter harus melayani 2.347 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 11.734 orang. Dan secara keselurahan di Kota payakumbuh, untuk 1 dokter melayani 987 orang dan jumlah dokter gigi sangat kurang dimana 1 dokter gigi harus melayani 3.209 orang. Standar untuk kebutuhan dokter umum, 1 dokter melayani 2500 penduduk dan dokter spesialis 1 dokter melayani 16.000 penduduk. Untuk di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari memang kurang memadai disebabkan oleh kekerangan SDM, untuk kedepannya diharapkan merekrut tenaga kesehatan.

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan, perawat, perawat gigi) pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 798, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2021 adalah 1:177.

Tabel II-48
Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tenaga Para Medis	157	225	250	343	798
2.	JumlahPenduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.171
	Rasio	1 : 840	1 : 594	1 : 542	1 : 407	1:177

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

7. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 3,37% sehingga menjadi 14,38%. Sedangkan secara kelurahan sudah seluruh kelurahan atau 100,00% telah menerapkan UCI yakni sebanyak 47 kelurahan.

Tabel II-49

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Balita	13.898	13.858	13.825	13.794	13.794
2.	Jumlah Balita yang di Imunisasi	2.607	2.477	2.454	1.983	1.983
3.	Universal Child Immunization (UCI) (%)	18,76	17,87	17,75	14,38	14,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021 (data diolah)

Terjadi penurunan cakupan UCI pada tahun 2021 disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan posyandu akibat pembatasan keramaian dan takutnya orang tua balita untuk mengimunisasi balitanya pada masa pandemi COVID-19. Selain itu hal ini juga diakibatkan oleh adanya keyakinan sebagian masyarakat untuk tidak melakukan imunisasi.Kedepannya untuk beberapa penyebab yang bersifat sosial akan melakukan pendekatan kepada alim ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian atau pemahama mengenai imunisasi kepada masyarakat.

8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari pelaksanaan Posyandu maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita, dan diharapkan akan terjaring bayi dan balita dengan keadaan gizi kurang atau buruk. Jika dilihat pada tahun 2021 terdapat 9 balita dengan gizi buruk (0,2%), dan semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100%, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel II-50

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Balita Gizi Buruk (%)	0,07	0.08	0,1	0,2	0,2
2.	Jumlah Balita Gizi buruk	9	11	13	9	9
3.	Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	9	11	13	9	9
4.	Cakupan balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

9. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada tahun 2021 cakupan kunjungan bayi mencapai 72,6 %, menurun dari tahun 2019 yang mencapai 96,2 %. Penurunan kunjungan bayi kePosyandu dikarenakan Pandemi COVID-19 dimana adanya larangan mengadakan keramaian pada awal pandemi merebak dan adanya ketakutan/ ketidak inginan tua mengimunisasi bayinya pada masa pandemi, selain itu juga ada keyakinan sebagian masyarakat untuk tidak melakukan imunisasi.

Tabel II-51
Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Bayi	2400	2387	2388	2180	2180
2	Jumlah Posyandu	165	165	165	165	165
3	Jumlah Kunjungan Bayi ke Posyandu	2313	2286	2297	1580	1580
4	Cakupan Kunjungan Bayi	96,4%	95,84%	96,2%	72,6%	72,6%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

10. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) unit, jika dilihat perbandingannya setiap kecamatan telah memiliki 1 unit puskesmas bahkan ada 1 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara.

Tabel II-52
Cakupan Puskesmas Per kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan Puskesmas per Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

11. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 47 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2021 adalah sebesar 48,94%. Berikut ditampilkan cakupan Pustu di Kota Payakumbuh pada tahun 2017 – 2021.

Tabel II-53
Cakupan Pustu Per kelurahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pustu	23	23	23	23	23
2	Jumlah kelurahan	47	47	47	47	47
3	Persentase Cakupan Pustu per Kelurahan	48,94	48,94	48,94	48,94	48,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluraga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat, dengan kata lain PHBS merupakan upaya untuk menularkan perilaku hidup sehat pada masyarakat melalui individu, kelompok maupun masyarakat luas dengan memanfaatkan sarana media yang ada.

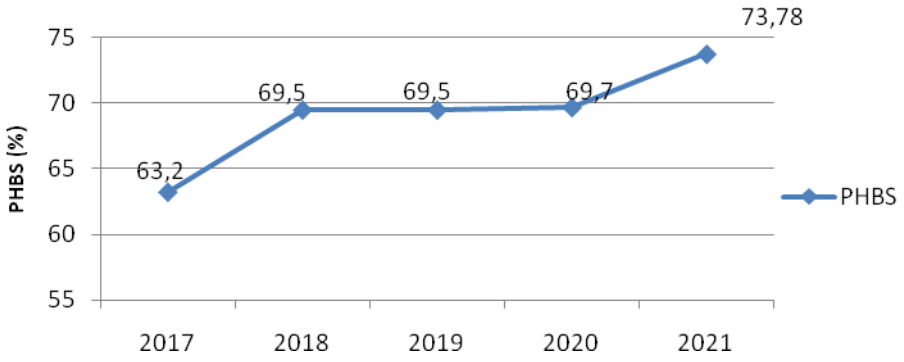

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Diagram II-16

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Diagram II-16 terlihat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Persentase PHBS dilihat dari indikator nya adalah tidak merokok, makan buah dan sayur, dan aktivitas fisik.

13. Prevalensi Penyakit

Tabel II-54

10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kasus				
	2017	2018	2019	2020	2021
ISPA	19.228 (1)	16.247 (1)	16.795 (1)	9.393(2)	6.357 (2)
Hipertensi primer	7.501 (2)	9.523 (2)	12.381 (2)	9.761(1)	12.934 (1)
Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	5.067 (3)	5.726 (3)	5.252 (3)	1.754(6)	1.410(5)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	2.708 (8)	3.042 (6)	3.149 (7)		1.391(6)
Penyakit kulit Alergi	-	2.461 (7)	-		
Rheumatoid	4.856 (5)	3.297 (5)	3.167 (6)		
Gangguan Refraksi dan Akomodasi	-	-	-		
Diare	-	2.220 (8)	-		
Penyakit saluran pernapasan atas lainnya	-	-	-		
Diabetes	3.388 (6)	3.603 (4)	4.474 (4)	4.512(3)	4.755(3)
Gasteristis	5.022 (4)	-	3.007 (8)	2.917(4)	
Dispepsia	2562 (9)	2.239 10)	-	619(9)	
Cepalgia	-	2.873(7)	-		
Dermatitis	-	-	3.395 (5)	2.168(5)	1.290(8)
Kelainan Refraksi	-	-	-		
Myalgia	-	2.534(9)	-		
Jantung			2.319 (9)		
Karies Gigi	--	-	1.693 (10)		
Vulnus				1.606(7)	2.070(4)
Febris				573(10)	1.270(7)
Gout Artritis				1.148(8)	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel II-54 dapat terlihat penyakit yang banyak diderita masyarakat Kota Payakumbuh tahun 2021 adalah hipertensi primer sebanyak 12.934 kasus, disusul posisi kedua oleh ISPA

sebanyak 6.357 kasus yang disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat. Pada tabel II-55 berikut ditampilkan data prevalensi penyakit menular seperti HIV/AIDS, dimana prevalensi ini diperoleh dari jumlah pendertia HIV/AIDS dibandingkan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Tabel II-55
Data Prevalensi HIV/ AIDS Tahun 2017-2021

No	Permasalahan Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penderita HIV/AIDS	15	12	18	9	10
2	Jumlah Penderita HIV/AIDS yang memeriksakan ke Faskes	15	12	18	9	10
3	Prevalensi jumlah penderita HIV/AIDS (x100%)	0,0113	0,0090	0,132	0,065	0.071

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Penurunan prevalensi HIV/AIDS sebenarnya cukup baik dan diharapkan tidak adanya kasus HIV/AIDS di Kota Payakumbuh, namun penurunan ini terjadi karena rendahya kemauan masyarakat untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV/AIDS ke fasilitas layanan kesehatan serta karena adanya pembatasan sosial dan pengalihan beberapa kegiatan untuk percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak terjaringnya data kasus HIV/AIDS secara maksimal.

Tabel II-56
Jumlah Penyakit Menular Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	TBC	290	179	265	279	154
2	Demam Berdarah	65	37	98	52	16
3	Diare	1674	2648	3660	1895	1130

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Penyakit menular yang paling banyak selama tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah diare yang terjadi penurunan pada tahun 2021 sebanyak 1130 kasus, dan kasus demam berdarah merupakan penyakit menular yang paling sedikit. Ini disebabkan oleh sudah semakin sadarnya masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih yang tidak adanya lagi sarang nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah.

14. Jaminan Kesehatan Nasional

Tabel II-57
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertaan JKN	Persentase
1	2017	131.819	109.238	82,87
2	2018	133.703	130.039	97,26
3	2019	135.573	128.347	94,67
4	2020	139.576	124.128	88,93
5	2021	141.171	129.584	91,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri.Tahun 2020 terjadi penurunan kesertaan JKN, yakni dari 94,67 % pada tahun 2019 menjadi 88,93% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 91,80%.

Penanganan stunting perlu menjadi salah satu prioritas. Percepatan penurunan Kematian Ibu dan Stunting menjadi salah satu prioritas (major project) Nasional, dan ini sangat terkait dengan layanan dasar kesehatan. Kota Payakumbuh sudah termasuk kedalam kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2022. Data yang tersedia untuk kondisi tahun 2021 berdasarkan SSGI (Buku Saku status Gizi Indonesia) tingkat stunting di Kota Payakumbuh 20.34 %.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan dalam kondisi baik merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat baik akses maupun barang. Salah satu unsur yang menjadi acuan adalah kinerja jaringan jalan ditinjau dari aspek kemantapan, yang mana ini merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan baik di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 mencapai 203,338 km meningkat dari kondisi tahun 2020 sepanjang 113,32 km. Semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 panjang jalan di Kota Payakumbuh secara keseluruhan tetap yakni sepanjang 286,80 km.

Dari tabel berikut ini terlihat bahwa persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh dari tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2021 secara persentase selalu mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan setiap tahunnya

Tabel II-58
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	KondisiBaik	89,17	88,37	89,50	113,32	203,338
2.	KondisiRusak Sedang	82,02	87,89	88,95	79,98	8,356
3.	Kondisi Rusak/Rusak Berat	83,49	78,41	76,23	61,38	42,984
4.	Panjang Jalan Kota	254,68	254,68	254,68	254,68	254,678
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	286,80	286,80	286,80	286,80	286,80

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2021

2. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Keberadaan trotoar di sepanjang jalan terutama yang selalu dipergunakan pejalan kaki menjadi salah satu indikator kemudahan akses pejalan kaki di sepanjang jalan. Di samping itu, untuk menjamin usia jalan yang sudah dibangun seharusnya terdapat pembuangan air hujan di sepanjang jalan berupa adanya drainase yang akan menampung air dikala terjadinya hujan. Untuk itulah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh menjadi indikator pembangunan ke-PU-an. Berdasarkan hal tersebut, terjadi peningkatan panjang jalan yang memiliki drainase sampai tahun 2021 adalah 64,12% dan panjang jalan yang memiliki trotoar sampai dengan tahun 2021 sudah 7,82% jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-59
Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jalan kota yang memiliki drainase skala kota (km)	120	139,40	150,12	155,97	163,30
2.	Panjang jalan kota (km)	254,68	254,68	254,68	254,68	254,68
	Persentase	51,86	54,74	58,95	61,24	64,12

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Tabel II-60
Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh yang Memiliki Trotoar Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jalan Kota yang memiliki trotoar (km)	18,75	18,75	19,43	19,56	19,91
2.	Panjang jalan seluruhnya (km)	254,68	254,68	254,68	254,68	254,68
	Persentase	7,36	7,36	7,63	7,68	7,82

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

3. Pemenuhan Sistem Drainase Skala Kota

Drainase merupakan salah satu komponen pelengkap jalan yang sangat berguna untuk melancarkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Sistem Drainase Skala Kota merupakan sistem drainase keseluruhan yang ada di jalan Kota. Pada tahun 2021, drainase skala kota sepanjang 163,304 km. Tabel II-61 menampilkan data sistem drainase skala kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Tabel II-61
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jalan kota yang memilki drainase skala kota (km)	120,83	131,77	150,12	152,04	163,304
2.	Panjang jalan kota keseluruhan (km)	254,68	254,68	254,68	254,68	254,68
	Persentase	**76,23**	**77,62**	**73,26**	**59,69**	**64,18**

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

4. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar) yang ada di Kota Payakumbuh. Panjang jaringan irigasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 tercatat 161.862 meter yang tidak ada perubahan dari panjang irigasi tahun 2020. Dalam hal pembangunan irigasi hanya berupa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada.Perkembangan Kota Payakumbuh, telah merubah tatanan penggunaan lahan di Kota Payakumbuh, Berikut Tabel II-62 menampilkan rasio jaringan irigasi dengan lahan pertanian di Kota Payakumbuh.

Tabel II-62

Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jaringan irigasi (m')	161.862	161.862,0	161.862,0	161.862,0	161.862,0
2.	Luas lahan pertanian (ha)	5.109	5.073	5.073	5.075	5.075
	Rasio	**31,68**	**31,91**	**31,91**	**31,89**	**31,89**

Sumber : Payakumbuh dalam Angka 2017 – 2021

Tabel diatas menjelaskan adanya fluktuasi rasio jaringan irigasi dengan lahan pertanian, per tahun 2021 dapat dilihat bahwa dari 100 Ha lahan pertanian, telah dialiri oleh jaringan irigasi sepanjang 31,89 m', jika dibandingkan dengan data tahun 2021 tidak terdapat penambahan.

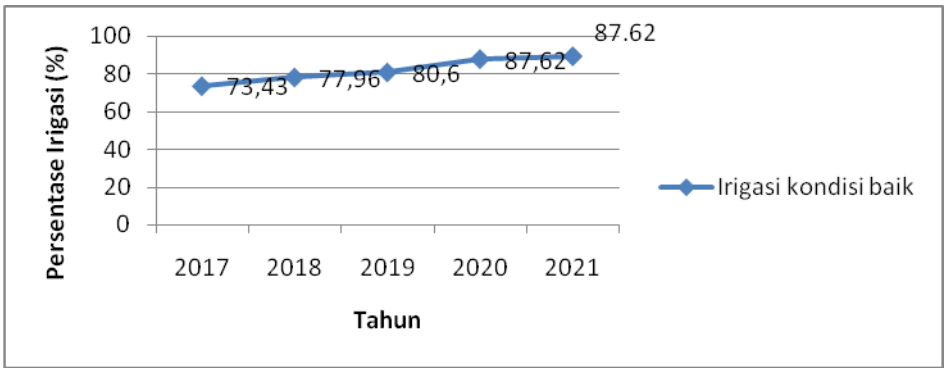

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Diagram II-17

Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021

Secara detil persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik juga dapat dilihat pada tabel II-63

Tabel II-63

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jaringan irigasi (m')	161.862	161.862	161.862	161.862	161.862
2.	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (m')	118.855,26	126.187,62	130.460,77	141.821,24	144.196,32
	Persentase	**73,43**	**77,96**	**80,60**	**87,62**	**89,09**

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

5. Panjang Sungai yang dinormalisasi

Seperti yang telah dipaparkan pada aspek geografis, Kota Payakumbuh dilalui oleh 8 sungai. Sungai ini berpotensi sebagai sumber air baku baik untuk keperluan air bersih maupun air irigasi, serta ikut menjadi terintegrasi dengan sistem drainase.

Untuk menjaga manfaat dan menghindari adanya abrasi, longsoran, dan pendangkalan sungai, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan normalisasi sungai. Persentase panjang sungai yang dinormalisasi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 panjang sungai yang telah dinormalisasi sudah mencapai 4,54%.

Berikut ditampilkan data normalisasi sungai yang telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh semenjak tahun 2017 – 2021.

Tabel II-64
Persentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang sungai (meter)	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
2.	Panjang sungai yang dinormalisasi (meter)	1.190	1.277	2.143	2.635	3.150,22
	Persentase	1,71	1,84	3,09	3,80	4,54

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk dikonsumsi sebagai air minum. Untuk itu pemerintah Kota Payakumbuh berusaha memenuhi kebutuhan ini menambah akses masyarakat terhadap layanan air bersih/ minum yang dilaksanakan melalui PDAM Tirta Sago maupun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait seperti pembangunan embung, pembangunan *water treatment plant* (WTP) Batang Agam mulai tahun 2018 dan telah beroperasi 2019. Realisasi layanan air minum di Kota Payakumbuh pada tahun 2021, sebesar 95,11% atau 134.241 jiwa, secara persentase memang terjadi penurunan namun secara layanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang ditampilkan pada tabel II-65.

Tabel II-65
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang dilayani air minum	jiwa	110.727	132.155	132.645	135.165	138.028
2	Jumlah penduduk	Jiwa	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
	Persentase Pelayanan Air Minum	**%**	**83,99**	**98,84**	**97,84**	**96,84**	**97,76**

Sumber:Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2021

Gambar II-6
***Water Treatment Plant* (WTP) Kota Payakumbuh**

7. Rasio Tempat Ibadah per-Satuan Penduduk

Rasio ini dihitung antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2021 di dapat bahwa dengan 1.000 penduduk dapat di tampung pada 3 tempat ibadah.

Tabel II-66
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tempat Ibadah	300	365	358	360	363
2.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
	Rasio	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017 – 2022

8. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Pemerintah Kota Payakumbuh dan pihak terkait berusaha untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang hijau dan bersih dengan cara menyediakan ruang terbuka hijau. Pada tahun 2021, telah tersedia 0,093 Ha ruang terbuka hijau dari setiap 1 Ha wilayah Kota yang jika dilihat dari tahun sebelumnya tidak ada perbedaan. Berikut ditampilkan data ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh.

Tabel II-67
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	20,99	22,99	747,69	747,69	747,69
2.	Luas wilayah (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3	**Rasio ruang terbuka hijau**	**0,0026**	**0,0029**	**0,093**	**0,093**	**0,093**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Gambar II-7
RTH Ratapan Ibu Kota Payakumbuh

Indikator jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh terdiri dari : RTH Taman Kota 0,28 Ha, RTH Jalur Hijau jalan 4,14 ha, RTH Tempat Pemakaman Umum 19,20 ha, RTH Sabuk Hijau 153,55 ha, RTH Hutan Kota 208,25 ha, RTH Sempadan Sungai 256,20 ha, RTH Sempadan Mata Air 24,09 ha, RTH Sempadan Sutet 45,52 ha, RTH Sempadan Rel 38,74 dan RTH Kelurahan RT/RW 0,71 ha. Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah.

9. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Rasio bangunan ber-IMB nilainya diperoleh dari jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan jumlah bangunan. Dengan bertambahnya jumlah bangunan ber-IMB mengindikasikan meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Tabel II-68
Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	10.413	11.085	11.417	11.993	12.871
2.	Jumlah Bangunan	33.702	33.829	33.829	35.196	36.084
3.	**Rasio bangunan ber-IMB**	**0,31**	**0,33**	**0,34**	**0,34**	**0,36**

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan perbandingan antara bangunan ber-IMB dengan bangunan yang ada di Kota Payakumbuh walaupun perbandingannya belum mencapai 1 : 1, namun hal ini sudah memperlihatkan peningkatan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap aturan tata ruang yang dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian IMB oleh instansi terkait.

10. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Selama kurun waktu perencanaan dari tahun 2017-2020 ketaatan terhadap RTRW cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Perda RTRW yang sudah ada, maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menetapkan **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** melalui **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018** yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah Kota Payakumbuh dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Pada tahun 2021, untuk 100 ha wilayah Kota terdapat 0,799 ha penggunaan lahan sudah mengikuti rencana tata ruang.

Tabel II-69
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Realisasi RTRW (ha)	6.321,80	6.345,93	6.372,52	6.400,72	6431,97
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3.	**Rasio (:100)**	**78,60**	**78,90**	**79,23**	**79,58**	**79,97**

Sumber : Profil Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021 (data diolah)

11. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat di Kota Payakumbuh, seiring dengan meningkatnya pembangunan sanitasi perkotaan sebagai salah satu prioritas penanggulangan wilayah kumuh di Kota Payakumbuh. Rumah tinggal berakses sanitasi, didalam rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dirumuskan adalah rumah tangga/KK yang memperoleh akses sanitasi dasar dalam hal ini berupa tangki septik, baik individu maupun komunal.

Tabel II-70
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	24.434	29.669	31.009	31.719	32.261
2.	Jumlah Rumah Tinggal	28.436	33.046	33.046	33.046	33.046
3.	Persentase	85,92	89,78	93,23	95,98	97,62

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2021

Adanya penambahan pembangunan tangki septik individu untuk tahun 2021 sebanyak 542 unit menjadikan jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kota Payakumbuh adalah 32.261 RT/KK. Untuk jumlah rumah tinggal 33.046 KK sehingga persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal untuk kondisi akhir tahun 2021 adalah 97,62%.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen secara global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat dan *Sustainable* Development Goals (SDG's).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal yang layak, meningkatkan kualitas permukiman serta lingkungannya. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan diselenggarakannya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, tepat dan berkelanjutan.

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Tabel II-71
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	26.132	26.441	28.649	28.891	28.933
2.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	140.201	141.184
3.	Rasio	0,19	0,19	0,21	0,20	0,20

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa teradi peningkatan jumlah rumah layak huni di kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena adanya program bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bantuan bersifat rangsangan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah layak huni. Bantuan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan kolaborasi pendanaan lainnya. Pada tahun 2021, dilaksanakan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 169 unit yang terdiri dari 61 unit bersumber dari dana DAK, 87 dari dana DAU, 18 unit dari APBN (BSPS) dan 3 unit dari sumber dana lainnya (yayasan Indo Jalito, Baznas dan Pramuka).

2. Kawasan Kumuh

Luas Permukiman kumuh, untuk tahun 2021 telah dilakukan intervensi pengurangan dengan melibatkan berbagai sektor terkait dengan besaran pengurangan ± 10,40 Ha dari luasan permukiman pada awal tahun sebesar ± 63,45 Ha. Hal ini menjadikan luasan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh untuk akhir tahun 2021 adalah ± 15,71 Ha

Tabel II-72
Luas Kawasan Kumuh Kota PayakumbuhTahun 2021

No	Wilayah	Luas Kawasan Kumuh (ha)
1.	Kec. Payakumbuh Barat	0,00
2.	Kec. Payakumbuh Timur	0,39
3	Kec. Payakumbuh Utara	15,32
4	Kec. Payakumbuh Selatan	0,00
5	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0,00
Total		**15,71**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2021

3. Backlog Rumah

Backlog adalah angka kebutuhan rumah di kota Payakumbuhyang dihitung berdasarkan beberapa kriteria yaitu : (1) status kelayakan rumah; (2) status kepemilikan rumah; (3) status ketahanan bangunan; (4) status kepadatan hunian.

Adapun konsep backlog perumahan dapat ditinjau pada 2 perspektif yaitu : (1) kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal yaitu 1 keluarga menghuni 1 rumah; (2) kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate, yaitu persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

Tabel II-73
Backlog Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah keluarga	33.046	33.046	34.034	34.034	34.034
2.	Jumlah Rumah	28.436	28.436	33.038	33.038	33.038
3.	Backlog	4.610	4.610	996	996	996

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2021

Perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*).dari tabel diatas terlihat bahwa pada adanya pengurangan blacklog rumah yang cukup signifikan disebakan oleh adanya bantuan perumahan yang di gawangi oleh Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan semakin banyaknya pengembang perumahan di Kota Payakumbuh yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah tempat tinggal.

Tabel II-74
Backlog Kepemilikan Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/ Backlog Kepemilikan Rumah (ruta)
(1)	(2)	(3)	(4) = BPS	(5) = (3) x (4)	(6) = (3) – (5)
2017	131.819	33.046	60,91	20.128	12.918
2018	133.703	33.046	64,00	21.149	11.897
2019	135.573	34.034	62,00	21.101	12.933
2020	140.201	34.034	59,21	20.152	13.882
2021	141.171	34.034	64,67	22.010	12.024

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2021

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel II-75
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Petugas Pol PP	167	175	189	204	208
	Jumlah Petugas Satpol PP PNS	61	59	52	51	48
	Jumlah Petugas Satpol PP Non PNS	106	116	137	153	160
2.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
3.	Rasio (:10000)	13	13	14	15	15

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat. Rasio Jumlah polisi Pamong praja Kota Payakumbuh pada tahun 2021 adalah 15.

Tabel II-76
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Linmas (orang)	525	525	786	554	554
2.	Luas Wilayah (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3	Persentase	6,53	6,53	9,77	6,89	6,89

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2019 terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota payakumbuh, ini disebabkan karena adanya perekrutan linmas untuk pilpres dan pileg.

2. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi mayarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2017-2021 , total pelanggaran tiap tahunnya pada tahun 2017 sebanyak 618 kasus, tahun 2021 melonjak menjadi 11.188 kasus. Dari kasus pelanggaran Perda yang terjadi tahun 2021 yang dapat tertangani seluruhnya (100%).

Tabel II-77
Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2017-2021

No	KategoriKasus	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	121	179	61	44	107
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	652	224	195	898	11.081
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	773	435	229	942	11.188
	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	Kasus	618	403	229	942	11.188
	Persentase Perda yang tertangani	**%**	**79,95**	**92,64**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Dari sisi penanggulangan bencana, ada 2 sumber data perolehan yaitu dari Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kasus kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kasus bencana alam. Data Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada tahun 2021 terjadi kasus kebakaran sebanyak 70 kasus dan telah tertangani seluruhnya. Berikut ditampilkan data kasus kebakaran kurun waktu 2017 – 2021.

Tabel II-78
Data Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)
Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus kebakaran	Kasus	120	176	162	271	70
2.	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	Kasus	120	176	162	271	70
3.	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel diatas, telah terjadi fluktuasi kebakaran kurun waktu 2017 sampai 2021, dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 271 kasus. Dan pada tahun 2021 menurun menjadi 70 kasus. Kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya instalasi listrik yang sudah lama.

Tabel II-79

Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angin Kencang, Badai/Puting Beliung	Kejadian	26	22	74	10	21
2	Banjir	Kejadian	1	1	7	7	-
3	Longsor	Kejadian	3	1	1	0	-

Sumber : Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bencana Alam di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 terdiri dari 3 (tiga) jenis bencana yaitu : angin kencang, badai/puting beliung; banjir; dan longsor. Bencana alam tersebut trennya cendrung meningkat sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi 21 angin kencang,badai/puting beliung dan tidak ada terjasi banjir dan longsor.

Tabel II-80

Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Payakumbuh tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	18,00	17,34	74,47	18,36	14,89
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana rendah karena belu adanya kajian resiko bencana yang memuat peta daerah rawan bencana.

F. Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, terutama setelah adanya pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB yang menyarankan bahwa dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya masalah sosial dalam pelaksanaan kegiatannya harus *crosscutting* dengan Perangkat Daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel II-81

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Jenis PMKS (orang)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak BalitaTerlantar	16	11	8	6	10
2	Anak Terlantar	62	42	41	29	22
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	10	34	6	12	4
4	Anak Jalanan	5	7	5	1	0
5	Anak dengan Kedasibilitasan	165	181	216	165	178
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	2	1	4	-	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3	1	-	-	0
8	Lanjut UsiaTerlantar	220	144	319	344	256
9	Penyandang Disabilitas	277	389	517	620	615
10	Tuna Susila	1	-	-	-	-
11	Gelandangan	1	6	1	1	0
12	Pengemis	15	14	19	20	13
13	Pemulung	62	74	56	49	37
14	Kelompok Minoritas	3	4	1	-	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	48	292	75	45	36
16	Orang dengan HIV/AIDS	15	12	18	9	2
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	39	56	49	29	31
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	0
19	Korban Tindak kekerasan	7	-	27	-	2
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	-	-	2	0
21	Korban Bencana Alam	1	8	-	1	0
22	Korban Bencana Sosial	7	2	9	1	0
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	491	374	-	1.411	0
24	Fakir Miskin	5745	6.855	7.998	9.898	14.349
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	7	26	9	13	18
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	0
Jumlah		**7.191**	**8.525**	**9.364**	**12.649**	**16.766**

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Salah satu Program Nasional yang diberikan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pemberian beras miskin (Raskin) pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meningkatnya fakir miskin di Kota Payakumbuh disebabkan oleh satuan pada aplikasi SIKS-NG pada tahun 2020 adalah RUTA (Rumah Tangga) sedangkan pada tahun 2021 berubah menjadi KK (Kepala keluarga) dimana dalam satu RUTA bisa jadi lebih dari 1 KK. Besaran yang diterima KPM setiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-

Tabel II-82

Data Keluarga Penerima Manfaat Memperoleh program Sembako Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	KPM	Pagu Sembako/Bulan
1.	Payakumbuh Utara	750	150.000.000
2.	Payakumbuh Barat	1717	343.400.000
3.	Payakumbuh Timur	495	99.000.000
4.	Payakumbuh Selatan	926	185.200.000
5.	Lamposi Tigo Nagori	1169	233.800.000
Jumlah		**5057**	1.011.400.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel II-83
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2021

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PekerjaSosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	3	42	45
	Kec. Payakumbuh Timur	2	24	26
	Kec. Payakumbuh Utara	2	16	18
	Kec. Payakumbuh Selatan	5	26	31
	Kec. LamposiTigoNagori	2	15	17
	TOTAL			**137**
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	1	0	1
	Kec. LamposiTigoNagori	1	0	1
	TOTAL			**5**

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

PSM dan TKSK adalah mitra kerja dalam penanganan masalah Sosial, yang bekerja menurut wilayah kerja masing-masing. TKSK memiliki wilayah kerja Kecamatan, sedangkan PSM memiliki wilayah kerja di Kelurahan.

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia tenaga kerja dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Angkatan kerja Tahun 2020 sebanyak 69.808 orang dan pada Tahun 2021 meningkat sebanyak 74.303 orang. Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada penduduk usia kerja yang masuk kedalam angkatan kerja. Dampak dari semakin besarnya jumlah penduduk usia kerja, akan sangat mempengaruhi terhadap tambahan jumlah angkatan kerja. Secara umum jumlah angkatan kerja meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja.

Penduduk yang bekerja pada Tahun 2020 sebanyak 65.144 orang dan pada Tahun 2021 sebanyak 69.498 orang, terjadi peningkatan. Peningkatan dan penurunan dapat dilihat dari pergeseran penduduk yang bekerja baik menurut jenis kelamin, lapangan pekerjaan utama, jabatan, jam kerja, golongan umur dan tingkat pendidikan.

Jumlah pengangguran pada Tahun 2020 sebanyak 4.664 orang dan pada Tahun 2021 sebanyak 4.805 orang, terjadi kenaikan sebanyak 141 orang. Hal ini disebabkan lajunya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan perluasan kesempatan kerja dan angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Akibat covid-19 salah satu angka pengangguran meningkat banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Rasio angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja adalah 92,99%. Hal ini berarti sudah bagus, hanya 7% saja penduduk yang tidak bekerja/pengangguran dapat dilihat pada tabel II-84 sebagai berikut:

Tabel II-84
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja (orang)	66.919	67.083	65.892	69.808	74.303
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
3.	Jumlah Pengangguran	2.307	2.538	2.710	4.664	4.805
4.	Rasio (%)	96,55	96,22	95,89	93,32	93,53

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017 – 2021

Tabel II-85
Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga kerja yang kompeten	%	32	70	102	20	969
2	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja	org	1.034	1.167	684	1.572	465
3	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat BPJS Kesehatan	org	2.015	2.025	2.068	1.994	2.718
4	Jumlah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan	perusahaan	40	98	124	110	112
5	Pencari kerja yang ditempatkan	%	38,49	61,1	77,34	65,52	46,24
6	Jumlah Sengketa Perusahaan	Kasus	6	-	-	-	-
7	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	100	77,8	100	80	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2021

Tenaga kerja yang kompeten Tahun 2020 ada sebanyak 20 orang dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 969 orang. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dan UPTD BLK Kota Payakumbuh dan LPK-LPK Swasta yang ada di Payakumbuh.

Dalam upaya untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan mempersiapkan tenaga kerja yang berkompetensi maka pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan bekerjsama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Payakumbuh melaksanakan program

peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi tenaga kerja pada Tahun 2020 sebanyak 1.572 orang dan pada Tahun 2021 sebanyak 465 orang, penurunan angka pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja (AK1) disebabkan karena terbatasnya lowongan kerja akibat pandemi covid-19 dan masa berlaku AK1 selama 2 tahun, Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan. Dibandingkan dengan Tahun 2020 jumlah pekerja yang mengikuti program BPJS Kesehatan meningkat dratis, tahun ini tercatat sebanyak 2.718 orang pekerja terdaftar sebagai peserta. Peningkatan ini terjadi salah satunya disebabkan gencarnya pembinaan dan penyuluhan peningkatan kepatuhan kepesertaan yang dilaksanakan bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri, Jumlah perusahaan yang ikut program BPJS Kesehatan juga mengalami peningkatan, hal ini karena ada beberapa perusahaan baru di Kota Payakumbuh seperti Pizza Hut dan PT DI. Pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2020 sebanyak 1.030 orang dan pada Tahun 2021 menurun sebanyak 192 orang, disebabkan karena terbatasnya lowongan pekerjaan formal yang ada di Kota Payakumbuh sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, Untuk sengketa perusahaan tidak ada datanya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, karena sesuai tusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, sedangkan untuk perusahaan tidak ada yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan secara Bipartit dengan Perjanjian Bersama Tahun 2021 ada sebanyak 3 kasus dan semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan Perjanjian Bersama. Jadi tidak ada kasus perselisihan hubungan industrial di Kota Payakumbuh yang harus diselesaikan dengan pengadilan hubungan industrial.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa nilai IPG meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2017 IPG tidak dilakukan pengukuran, dan tahun 2018 mulai dilakukan pengukuran kembali. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 IPG Kota Payakumbuh berkisar pada angka 98,51%, ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari distribusi pendapatan, angka harapan hidup dan angka rata-rata lama.

Tabel II-86

Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,52	98,53	98,54	98,51	98,51
2.	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	N/A	61,99	62,30	67,81	67,81
3.	Persentase partisipasi perempuan	20,8	66,76	67,33	N/A	N/A

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	dilembaga pemerintah					
4.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga non pemerintah (swasta)	75,57	55,74	55,64	N/A	N/A
5.	Rasio KDRT	0,0015	0,0395	0,018	N/A	N/A

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021, N/A) = Tidak dilakukan penghitugan

Tabel II-87
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017-2021

No	Kasus KDRT	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kekerasan terhadap perempuan	9	19	12	19	12
2.	Kekerasan terhadap anak	23	15	20	26	27

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

Terdapat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, namun kekerasan terhadap anak masih menunjukkan angka yg tinggi. Hal ini tentunya menuntut peningkatan peran pemerintah dan keterlibatan semua pihak terhadap kekerasan kepada anak dan perempuan, salah satunya dengan dibentuknya lembaga yang menanungi kasus kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pembangunan Responsif Gender

Disamping itu, hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender adalah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari bidang pemberdayaan perempuan, 40% stakeholder sudah melaksanakan PPRG, dalam artian sudah membuat *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan.

2. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Fasilitas umum yang ramah anak

Sebagai kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Payakumbuh diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat – tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak. Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Payakumbuh telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya RTH Batang Agam, RTH Talawi serta Objek wisata Ngalau Indah, program sekolah ramah anak, Puskesmas layak anak, MPP layak anak dan difabel.

b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui

Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 31 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan semenjak tahun 2020 juga sudah mulai ada di Perangkat daerah yang tidak melakukan pelayanan Publik seperti Bappeda.

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2021 adalah sebanyak 44.976 anak dari total 46.649 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 96,41%. Angka ini terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya 75,32%. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh oleh pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kepemilikan akta lahir bagi anak usia 18 tahun kebawah melalui program GESIT DAKU KEJAR BANG (Gerakan sinergi terpadu mengejar akta kelahiranku melalui buatkan, mengantarkan dan mengumpulkan) dengan melibatkan kader-kader dikelurahan dalam mengejar penerbitan akte kelahiran usia 0-18 tahun di masing-masing kelurahan di Kota Payakumbuh dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel II-88
Persentase Anak (Usia 0-18 Tahun) yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak usia (0-18 tahun)	45.999	45.150	47.109	46.649	46.649
2.	Jumlah anak usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	31.287	40.584	44.324	44.976	44.976
3.	Persentase usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	68,02	89,89	94,09	96,41	96,41

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2021

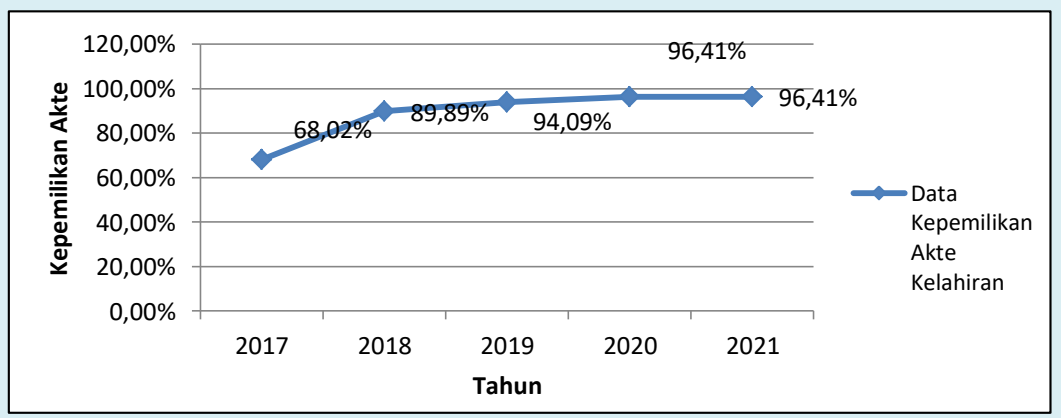

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2021

Diagram II-18
Persentase Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Tabel II-89
Capaian Terkait Kota Layak Anak Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	-	Madya	-	Madya
2.	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	1	1	1	1	2
3.	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	95	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian Kota layak Anak (KLA), pada tahun 2021, tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat Madya dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak ada 2 yaitu dengan membentuk Forum Anak Kota Payakumbuh sebagai wadah yang menfasilitasi program perlindungan anak, dan membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait program Kota Layak Anak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial pada tahun 2021, terdapat 178 anak dengan penyandang disabilitas yang tersebar di lima kecamatan. Bentuk program pemerintah dalam melayani anak penyandang disabilitas ini berupa bantuan BLT Kemensos, KIS, BPNT, PKH,KKS, dan JKN, yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kota.

C. Pangan

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan. Distribusi pangan yang efektif dan efisien berguna untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Informasi harga pangan diperlukan oleh produsen untuk melihat jadwal tanam melalui pengaturan pola tanam, peluang pasar, dan gejolak harga yang terjadi. Disisi lain, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga pada saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Terkait penataan ini, Pemko Payakumbuh juga memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di seluruh kelurahan, dimana upaya yang dilakukan meliputi **pemanfaatan pekarangan rumah** untuk ditanami berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan fungsi KWT ini juga sejalan dengan peningkatan peran Dasawisma di tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Skor PPH Ketersediaan Merupakan informasi yang menggambarkan tentang pencapaian keberagaman pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu

setahun. PPH ketersediaan di ukur berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimana NBM dihasilkan dari Data Produksi Daerah, Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) serta penggunaan lainnya, sehingga dapat digambarkan jumlah penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh dalam satuan Kg/Kap/Th, dan juga menggambarkan jumlah kalori yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam satuan Kkal/Kap/hari.

Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 88,05 pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan 3 kelompok bahan pangan masih rendah tingkat ketersediaannya yaitu kacang – kacangan, buah biji berminyak dan sayuran dan buah. Untuk tahun selanjutnya diupayakan agar kelompok bahan pangan yang menyebabkan PPH rendah akan ditingkatkan produksinya dan akan dilancarkan distribusinya sehingga ketersediaannya mencukupi untuk Kota Payakumbuh.

Tabel II-90
Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat

No.	Tahun	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/th)	Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat	Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh	Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh
1	2017	571,26	86,3	NA	81,51
2	2018	594,59	83,7	84,1	84,31
3	2019	541,04	86	82	87,64
4	2020	141,38	86,6	83,7	88,05
5	2021	141,38	86,6	84,20	88,05

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2021

Skor PPH Konsumsi, merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Untuk Tahun 2021 Skor PPH Konsumsi 83,70 dan masih dibawah Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat, selain itu angka ini masih jauh dari target ideal skor PPH yang diharapkan yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan B2SA.

2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Selain ketersediaan pangan, keamanan pangan juga merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintahan, dimana keamanan pangan dalam kurun waktu tertentu jika tidak diperhatikan akan menyebabkan bahaya kesehatan bagi masyarakat.

Oleh karenannya, setiap tahunnya Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk menjadi keamanan pangan tersebut pada level tingkat keamanan tinggi (86 – 100%).

Data pengambilan sampel bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 dari 20 sampel yang diambil sebanyak 18 sampel aman dikonsumsi (90,00%) dan sebanyak 2 sampel tidak aman dikonsumsi, dimana yang tidak aman terdapat residu pestisida pada satu komoditi cabe dan formalin pada satu komoditi ikan baguak kering. Dari data tersebut diketahui bahwa level keamanan pangan di Kota Payakumbuh berada pada level tinggi. Walaupun demikian kedepannya perlu dilakukan pengawasan bahan pangan yang lebih intensif lagi dengan melibatkan tim terpadu yang berwenang dan pemeriksaan sampel dilakukan secara kontinyu 4 kali setahun, agar bahan pangan yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi.

Tabel II-91
Data Keamanan Pangan selama PeriodeTahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah sampel	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel tidak aman	Sampel aman (%)
1	2021	20	18	2	90,00
2	2020	20	18	2	90,00
3	2019	47	38	9	80,85
4	2018	57	48	9	84,2
5	2017	83	70	13	80,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2021

D. Pertanahan

Indikator Urusan pertanhan yang hendak dicapai oleh Pemerintah daerah adalah persentase sertifikat asset tanah dan bangunan pemerintahan kota sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel II-92
Data Capaian Urusan Pertanahan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	11,75	12,59	14,29	15,56	16,83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase sertifikat asset tanah dan bangunan pemerintahan kota, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah jumlah Urusan Pertanahan didukung oleh Program penatagunaan tanah yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

E. Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II-93.

Tabel II-93
Data Capaian Indeks Lingkungan Hidup

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,5	58,96	59,66	57,68	58,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kulaitas lingkungan hidupdipengaruhioleh kualitas air,lahan dan udara. Di Mota payakumbuh indeks kualitas lingkungan hidup, paling banyak dipengaruhi oleh indeks kulaitas air karena Kota payakumbuh dilalui oleh tiga sungai yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi dan batang Sinamar. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu 59,59%.

1. Pencemaran Sungai

Baku mutu sungai di Kota Payakumbuh di ambil sampel adalah sungai Batang Agam pada dua lokasi, dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 baku mutu Sungai di Kota Payakumbuh dari parameter yang diambil terhadap dua lokasi tingkat kecemarannya tergolong dalam tercemar sedang, artinya kualitas air Sungai batang Agam masuk dalam kategori 2, seperti yang terlihat pada tabel II-94.

Dari table II-94 tersebut dapat dilihat jika Indeks Kualitas Air Kota Payakumbuh tahun 2021 mengalami penurunan dibebarapa titik yang diuji di tiga sungai. Pencemaran sungai Batang Agam disebabkan karena masih adanya kotoran yang dibuang ke Batang Agam, Sungai Batang Lampasi tercemar karena masih banyak kotoran ternak yang dibuang ke sungai, sementara itu Batang Sikali akibat limbah industri rumah tangga yang masih dibuang ke sungai.

Tabel II-94
Data Baku Mutu Sungai Kota PayakumbuhTahun 2017-2021

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	
Sungai Batang Agam	1	pH	7,33	7,29	7,9	7,7	7,24	7,55	8,25	7,88	7,6	8,14	8,14	8,09	6-9
	2	TSS			16,6	27	57,4	20,2	18,8	11,75	11,23	9,47	85,9	51,6	50
	3	BOD	1,29	2,03	2,11	1,08	3,66	3,66	3,33	3,41	4,35	3,04	2,44	3,2	3
	4	COD	6,45	22,4	9,29	23,07	5,82	129	20,95	20,4	22,05	14	23,8	10,3	25
	5	Fecal Coliform	-	-	4900	4900	13000	>160000	18815	5150	2050	140000	210000	220000	1000
	6	Total Coliform	-	-	17000	17000	13000	160000	82565	28200	18500	0,074	0,365	0,069	5000
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	150	163,5	141	78	194	146	1000
	8	DO	-	-	-	-	-	-	8,06	7,9	7,31	7.33	7.47	6.56	4
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,06	-	-	-	0,06
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	0,99	0.56	3.530	1.14	10
	11	Fosfat	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	0,02	0.074	0.365	0.801	0,2
Status Mutu Sungai			Tercemar Berat	Tercemar Berat	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	
	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,75	7,74	7,6	7.91	7.88	8.09	6-9
	2	TSS	-	-	-	-	34.2	12.3	65,85	18	17,75	83.5	124	51.6	50
	3	BOD	-	-	-	-	4.03	3.66	-	-	-	3.72	3.44	3.2	3

Sungai Batang Lampasi	4	COD	-	-	-	-	34.7	91.7	20,35	24,65	23,9	15.5	11.2	10.3	25
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	4,600	1,300	15150	4645	4650	130000	170000	220000	1000
	6	Total Coliform	-	-	-	-	17,000	7,900	88500	19200	47100	3.72	3.44	3.20	5000
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	205	109	113,35	108	68	134	1000
	8	DO	-	-	-	-	0.604	1.11	6,04	7	6,92	6.89	6.38	7.35	4
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,066	0,07	0,07	-	-	-	0,06
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,325	1,35	1,5	1.9	0.8	0.66	10
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	0.014	0.006	0,05	0,05	0,06	0.781	0.06	0.069	0,2
Status Mutu Sungai					-	-	-	-	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	
Sungai Batang Sikali	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,36	7,27	-	7.95	7.88	-	6-9
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	32,10	21,1	-	10.30	16.80	-	50
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	4,01	3,705	-	3.44	2.80	-	3
	4	COD	-	-	-	-	-	-	17,01	25,75	-	16.20	15.60	-	25
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	14300	4290	-	7800	200000	-	1000
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	87000	29300	-			-	5000
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	63,34	71	-	53	124	-	1000
	8	DO	-	-	-	-	-	-	6,34	6,59	-	7.01	6.75	-	4
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,14	0,068	-			-	0,06

	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	2,09	1,415	-	0.87	2.53	-	10
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	0,00	0,035	-	0.04	0.02	-	0,2
Nama Sungai	**No.**	**Parameter Pengujian**	**Tahun 2017**		**Tahun 2018**		**Tahun 2019**		**Tahun 2020**			**Tahun 2021**			**Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001**
			Lokasi I	**Lokasi II**	**Lokasi I**	**Lokasi II**	**Lokasi I**	**Lokasi II**	**Lokasi I**	**Lokasi II**	**Lokasi III**	**Lokasi**	**Lokasi II**	**Lokasi III**	
Sungai Batang Pulau	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,36	7,27	-	7.12	7.49	-	6-9
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	109,65	21,75	-	47.4	24.9	-	50
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	2,555	2,52	-	5.99	3.82	-	3
	4	COD	-	-	-	-	-	-	21,2	20,45	-	16.30	20.1	-	25
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	10450	41742	-	1100	4600	-	1000
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	33500	126000	-	-	-	-	5000
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	155,5	44,2	-	130.	141	-	1000
	8	DO	-	-	-	-	-	-	5,82	5,11	-	5.9	4.76	-	4
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,097	0,09	-			-	0,06
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,44	1,72	-	0.04	0.04	-	10
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	0,0645	0,06	-	0.46	0.22	-	0,2
Status Mutu Sungai					-	-	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang		Cemar Ringan	Cemar Ringan		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2. Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kota Payakumbuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan masing-masing parameter yang di uji hasilnya fluktuatif. Pada parameter SO_2 terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,49, dari sebelumnya 6,30, akan tetapi pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6 dan tahun 2021 naik menjadi 6,97. Begitu juga untuk NO_2 meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,12 dari sebelumnya 5,86 akan tetapi kembali turun pada tahun 2021 menjadi 5,80, hal ini disebabkan karena pengaruh semakin tingginya volume kendaraan, pembakaran sampah dan sisa hasil panen yang tidak dimanfaatkan secara bijak serta adanya penebangan pepohonan yang selama ini diharapkan dapat menetralisir pencemaran udara. Akan tetapi Kualitas udara di Kota Payakumbuh masih sangat baik, ini didapat dari data yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan tetapi untuk lebih meningkatkan kualitas udara perlu diimbangi dengan penyediaan hutan kota atau tanaman penghijauan untuk menetralisir kembali udara yang tercemar.

Tabel II-95
Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Parameter	2017	2018	2019	2020	2021
1	SO_2	4,73	6,30	5,49	6	6,97
2	CO	-	6,50	-	-	-
3	NO_2	4,3	-	5,86	6,12	5,80
4	O_3	-	-	-	-	-
5	HC	-	-	-	-	-
6	PM10	-			-	-
7	PM2,5	-	-	-	-	-
8	TSP	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

3. Kawasan Lindung dan Pemanfaatan Air Tanah

Luas kawasan lindung di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020, karena memang tidak ada program untuk ini di tahun 2021, hanya sekedar mempertahankan kondisi yang sudah ada, ini dikarenakan tersedotnya anggaran untuk penangan Pandemi Covid-19. Namun tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, karena adanya program penghijauan di sepanjang aliran sungai dan sumber air di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Data tersebut bersumber dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, kawasan lindung di Kota Payakumbuh terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 349,43 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 254,68 Ha, RTH seluas 568,89, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 0,4 Ha, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah (sempadan mata air) seluas 24,09 Ha. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk jumlah mata air di Kota Payakumbuh memiliki 2 buah sempadan mata air seluas 24,09 Ha dengan tutupan lahan berupa vegetasi, kawasan ini termasuk kedalam kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Selatan di Limbukan (seluas 11,57 Ha) dan Sawah Padang Aur Kuning (seluas 12,51 Ha)

Tabel II-96
Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kawasan Lindung	Ha	343,11	343,11	1.196,156	1.196,156	1.196,156
2.	Mata Air	buah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

4. Persentase Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih kurang efektif di Kota Payakumbuh, dalam pengelolaannya masih dilakukan secara swadaya, walaupun sudah ada TPST di beberapa kelurahan, namun pengelolaannya belum maksimal, sehingga sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk masih dibuang ke TPA, belum menerapkan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*). Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 36.069 ton sampah yang dihasilkan, hanya terkelola sebesar 5.999,33 ton atau hanya sebesar 16,63% saja, jauh menurun dari tahun 2020 sebanyak 8.767 ton. Harus ditingkatkan upaya untuk memaksimalkan pengelolaan sampah yaitu sosialiasi tentang pengelolaan persampahan, meningkatkan jumlah bank sampah, meningkatkan dan menfungsikan TPTS serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Sedangkan untuk pengangkutan sampah sudah cukup baik, dalam catatan yang ada sudah mencapai 91,30% ini terutama disebabkan adanya penyerahan pengangkutan sampah ke kelurahan dengan melengkapi sarana dan prasarana melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK).

Tabel II-97
Volume dan Produksi Sampah Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	1.137	3.482	8.968	8.767	5.999,33
2.	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	22.732	22.494	26.177	27.669	28.037
3.	Jumlah volume produksi sampah (ton)	45.464	27.813	29.280	30.467	36.069
	Persentase	**69,33**	**53,79**	**89,40**	**90,82**	91.30

Sumber **:** Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2021

5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Pada tabel II-98 terlihat jumlah TPS-3R mengalami penurunan dari tahun 2017 berjumlah 5 unit TPS-3R menjadi hanya tinggal 2 unit pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 kembali bertambah menjadi 6 unit, yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat 2 unit, Kecamtan Payakumbuh Timur 1 unit, Kecamatan Payakumbuh Timur 1 unit dan di Kecamatan Payakumbuh Selatan 2 unit.

Tabel II-98
Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Payakumbuh Timur	1	-	-	-	1
2.	Payakumbuh Barat	2	1	1	1	2
3.	Payakumbuh Utara	-	-	-	-	1
4.	Payakumbuh Selatan	2	1	1	1	2
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Dari sisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Kapalo Koto di wilayah Kota Payakumbuh juga merupakan lokasi TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini TPA sudah cukup padat dan diperkirakan sekitar 5-6 tahun lagi TPA ini akan penuh, karena sebagai TPA Regional harus menampung sampah dari daerah sekitarnya. Ini menjadi persoalan ke depannya, sehingga jika TPA Kapalo Koto ini semakin penuh perlu dicari lokasi baru sebagai pengganti. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengadaan TPA Regional baru di sekitar Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam.

Gambar II-8
TPA Regional Payakumbuh

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui UPT TPA Sampah Regional ini menampung sampah dari beberapa wilayah, antara lain Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam dan Kota Payakumbuh sendiri. Penanganan TPA Regional sampai saat ini dilakukan dengan *System sanitary landfill*, dimana sebelumnya dilakukan melalui *system Open Dumping*.

Tabel II-99
Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	218	142	142	144	142
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	190,7	182,15	218,58	218,58	125,00
3.	Jumlah penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
4.	**Rasio**	**0,16**	**1,33**	**2,69**	**1,57**	**1,52**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2021

Untuk sarana tempat pembuangan sampah sendiri, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa melakukan peningkatan dan optimalisasi pemeliharaan TPS yang sudah ada. Dari data yang tersedia terdapat 142 unit TPS yang ada di seluruh wilayah terutama di sentra-sentra bisnis masyarakat. Jumlah ini berkurang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 144 unit. Jika dilihat dari rasio daya tampung TPS ini dengan jumlah penduduk hanya sebesar 1,52 yang mana ini menggambarkan bahwa daya tampung TPS hanya 1,57 ton untuk setiap 1000 orang penduduk.

6. Pengawasan Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari tahun 2017 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 terjadi penurunan, dan pada tahun 2021 penurunannya sangat tajam sehingga hanya tersisa 108 usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan karena adanya wabah Covid-19, yang membuat tidak kondusifnya dunia investasi, sehingga masyarakat dan investor berpikir jauh untuk menanamkan modalnya. Demikian juga dengan penerbitan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang juga menurun di tahun 2021 lalu dari 185 menjadi 92, ini membuktikan banyak juga usaha lokal yang menjadi korban pandemi covid-19.

Tabel II-100
Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	152	155	260	207	108
2.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	Kasus	7	13	7	10	8
3.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan	Kasus	6	13	7	10	8
4.	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan	Surat Rekomendasi	139	140	251	185	92
5.	Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Surat Rekomendasi	13	15	9	18	16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2022

Kasus penegakan hukum lingkungan hanya dilaksanakan apabila ada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sehingga setiap tahun jumlahnya berbeda. Setiap kasus pengaduan yang masuk dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Pengaduan yang merupakan perwakilan dari OPD terkait.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usah dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya pada Pasal 34 disebutkan bahwa setiap usaha dan/aatu kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL maka wajib memiliki UKL-UPL. Sementara itu, pada pasal 35 disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kecuali untuk KTP menurun dikarenakan hanya penduduk yang baru memiliki KTP yang membuat KTP baru.
Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber KTP. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Tabel II-101
Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kartu Tanda Penduduk	KTP/Lembar	13.281	21.457	14.041	20.692	17.025
2.	Akta Kelahiran	Lembar	4.526	3.738	4.353	3.816	3.822
3.	Akta Kematian	Lembar	279	835	925	207	1.481
4.	Akta Perkawinan	Lembar	17	21	26	13	13
5	Akta Perceraian	Lembar	1	1	2	1	0
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan	Lembar	0	1	0	6	0

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	Adopsi Anak						
7	Akta Ganti Nama	Lembar	8	28	39	2	27
8	Jumlah Kartu Keluarga diterbitkan	Lembar	18.811	11.147	11.147	21.029	15.110

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerbitan dokumen kependudukan bersifat dinamis, tergantung dengan peristiwa kependudukan (pindah, datang) dan peristiwa penting lainnya (lahir, meninggal, perkawinan, perceraian) yang dialami warga masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi. Program ini dikenal dengan nama **SEMEDI (Sepuluh Menit Jadi).**

Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Payakumbuh yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi 'TAMENG SAKTI' (Data meninggal Selesaikan Akta Kematian). Inovasi ini bekerja sama dengan Kasi Pemerintahan di masing-masing Kelurahan.

Dengan Inovasi "TAMENG SAKTI", setiap awal bulan kelurahan melalui Kasi Pemerintahan menyampaikan laporan LAMPID (Lahir Mati, Pindah dan Datang) Kelurahan berupa data terkait kejadian Kelahiran, Kematian, Pindah dan Datang penduduk bulan lalu. Data tersebut lah yang menjadi sumber data penduduk meninggal Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Sehingga Pencatatan peristiwa Kematian di Kota Payakumbuh tahun 2021 cukup tinggi yakni sebanyak 1.481.

Selain itu juga dilakukan melalui inovasi 'DENTING PIANO' (Data Penting Penduduk Indonesia) yakni melalui data penduduk meninggal dunia yang ditemukan oleh BPS dalam melakukan Sensus Penduduk tahun 2021 tetapi masih aktif dalam database kependudukan

Untuk Penerbitan Dokumen Akta Ganti pada tahun 2021 nama cukup tinggi, salah satu penyebab adalah perubahan nama untuk keperluan sekolah dan dunia kerja.

Tabel II-102
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh
Tahun 2021

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
97.894	846	40.341	1.587	71.013	70.158	47.502	15.878
99,14%		**96,21%**		**50,13%**		**74,95%**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2021

Salah satu penyebab kepemilikan Kartu Keluarga ini tidak 100% dikarenakan pada saat pencataan peristiwa perkawinan dan kematian akan mengakibatkan terjadinya pemecahan kepala keluarga. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pencatatan peristiwa kematian berdasarkan laporan LAMPID yang disampaikan oleh kelurahan. sedangkan untuk penerbitan akta kematian dan pembaharuan kartu keluarga dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan. Tahun 2015 kembali dilaksanakan penggabungan kelurahan menjadi 48 kelurahan dan tahun 2017 terjadi penggabungan Kelurahan Tanah Mati dan Padang Datar, sehingga jumlah kelurahan saat ini adalah 47 kelurahan.

Tabel II-103
Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	1	7	17
2	Payakumbuh Utara	7	1	1	9
3	Payakumbuh Timur	8	-	1	9
4	Payakumbuh Selatan	5	1	-	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	5	1	6
Total		**29**	**8**	**10**	**47**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2022

Pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah di Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, maka kelurahan harus dilengkapi dengan fasilitas gedung kantor dan prasarana yang mencukupi. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini sama kondisinya dengan kondisi yang ada pada tahun 2021 yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor dengan kondisi baik/representatif sebanyak 61.7%. Kondisi baik disebabkan gedung kantor masih baru, penataan ruang sudah baik, cukup luas, gedung sudah milik sendiri, dan ruang kantor sudah tidak digunakan bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada dikelurahan. Kantor kondisi ini banyak pada kelurahan yang bergabung.
2. Kondisi kantor sedang sebanyak 17.02%. Kondisi ini berupa gedung kantor yang masih baik, tapi bangunan sudah lama, ruangan belum memadai, bangunan masih didirikan pada tanah masyarakat yang disewa.
3. Kantor dengan kondisi kurang sebanyak 21.78%. Kondisi kantor yang kurang/tidak representatif dapat dikatakan karena kondisi kantor kurang layak disebabkan kantor kecil, ruangan sempit, tidak ada penataan ruang yang jelas, kantor menumpang pada tanah masyarakat, pemakaian ruangan masih bergabung dengan unsur-unsur yang ada pada kelurahan seperti PKK, LPM.

Mengingat kondisi gedung kantor kelurahan yang ada saat ini, pemerintah kota sendang mengusahaan pembelian lahan untuk beberapa kantor lurah yang kondisi lahannya tidak memadai seperti terlalu sempit, telalu mepet kejalan dan berbagai kondisi lain yang idak memungkinkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu untuk kantor lurah yang kondisi lahannya cukup memadai akan tetapi bangunan gedung kantornya sudah tidak layak akan dilakukan rehabilitasi berat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel II-104
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per KecamatanTahun 2022

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	3	5	17
2	Payakumbuh Utara	-	3	6	9
3	Payakumbuh Timur	6	-	3	9
4	Payakumbuh Selatan	-	5	1	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	-	6	6
	Jumlah	15	11	21	47

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2022

Demikian juga untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas seperti mobiler, perlengkapan kantor, alat-alat elektronik (komputer), pada tahun 2021 dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sebesar 31,91%, dapat dilihat dari keberadaan mobiler yang layak dan mencukupi, perlengkapan kantor yang masih baik dan peralatan elektronik seperti komputer yang lebih dari 3 (tiga) unit.
2. Sarana dan prasarana dalam kondisi sedang sebesar 23,40%, dapat dilihat dari mobiler yang layak namun belum mencukupi dengan kondisi yang baik, sedangkan peralatan elektronik/komputer sebanyak 2-3 unit.
3. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang sebesar 44,68%, adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, perlengkapan kantor berupa komputer hanya 1 (satu) buah dan kondisinya sudah lama. Kondisi ini berada pada kelurahan-kelurahan yang kecil.

Dalam mengantisipasi kekurangan sarana dan prasarana kantor, setiap tahun secara bertahap akan dilakukan pengadaan sarana perkantoran sesuai dengan kebutuhan, mengingat kondisi keuangan daerah pada situasi pandemi covid-19, dimana pada saat ini fokus pemerintah paling utama adalah penangan covid-19.

Untuk menggerakkan partisipasi dan pembangunan di kelurahan, terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM dan PKK. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang saat ini berjumlah 47 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yang mengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya juga 47 kelompok. Dengan adanya program anggaran dana kelurahan dan alokasi anggaran kelurahan yang saat ini dikelola oleh kelurahan, maka diharapkan semua kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan dapat tersedia secara merata.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pertambahan penduduk, pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,15%. Pertambahan atau pengurangan penduduk setiap tahunnya

dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh.

Tabel II-105
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Payakumbuh Barat	50.616	51.340	53.266	54.839	55.133
2.	Payakumbuh Timur	29.106	29.522	28.477	29.318	29.669
3.	Payakumbuh Utara	30.946	31.389	32.269	33.222	32.443
4.	Payakumbuh Selatan	11.051	11.209	11.406	11.743	12.205
5.	Lamposi Tigo Nagori	10.100	10.244	10.155	10.455	11.734
	Total Jumlah Penduduk	**131.819**	**133.703**	**135.573**	**139.576**	**141.184**
	Laju Pertumbuhan Penduduk	**1,55%**	**1,43%**	**1,40%**	**1,40%**	**1,15%**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2017 - 2021

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

Contraceptive Prevalence Rate merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2021, untuk Kota Payakumbuh nilainya tetap dari tahun sebelumnya sebesar 69,44 %, artinya rasionya masih di bawah 80%, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-106
Tingkat Kepesertaan KB Aktif tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pasangan usia subur	19.740	19.137	19.213	19.197	18.784
2.	Tingkat kepersertaan KB aktif (CPR)	71,14	69,07	70,30	73,16	69,44

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

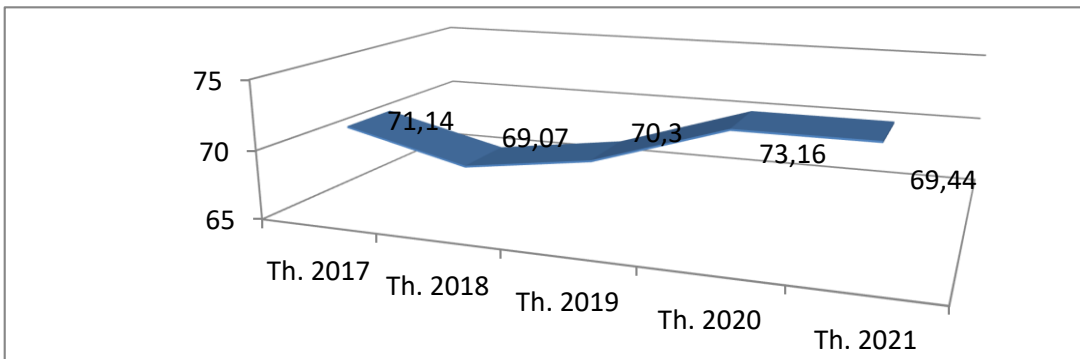

Diagram II-19
***Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) Tahun 2017-2021**
Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

3. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

Tabel II-107
Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah akseptor KB (Pasang)	14.043	13.217	13.508	14.045	13.051
2.	Jumlah PUS (pasang)	19.740	19.137	19.213	19.197	18.784
3.	Rasio Akseptor KB (%)	71,14	69,07	70,30	73,16	69,48

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

Sejak tahun 2017 - 2021 terjadi fluktuasi dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2017 Rasio Akseptor KB sebesar 71,14%, dan pada tahun 2020 menjadi 73,16%, akan tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 69,48%, Sementara itu pencapaian peserta KB baru juga turun pada tahun 2021, dimana dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 3,68% atau sejumlah 994 orang.

Tabel II-108
Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Mix Kontrasepsi	2017		2018		2019		2020		2021	
		PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian
1	I U D	647	680	729	543	802	503	480	349	265	403
2	M O P	2	8	6	5	8	6	3	2	5	0
3	M O W	150	185	150	105	198	171	40	120	23	146
4	I M P	373	350	466	292	317	228	117	203	211	409
5	SUNTIK	1.476	1.912	1.627	1.713	1.583	1.094	1205	750	1193	540
6	P I L	1.013	941	544	289	438	157	344	270	586	96
7	KONDOM	194	213	238	207	241	280	215	244	269	88
Jumlah		3131	3.855	3.855	3.760	3.760	3.587	2.439	2.404	2.552	1.680
Pencapaian (%)		**111,34**		**83,88**		**68,00**		**80,61**		**65,83**	

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

Sementara itu, capaian peserta KB baru di tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, dari 80,61% menjadi 65,83% walaupun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) lebih sedikit, namun ini merupakan target realistis yang ditetapkan sesuai dengan kondisi PUS di Kota Payakumbuh, dan pengaruh wabah covid-19 yang membuat masyarakat enggan untu datang ke Pusat pelayanan KB.

4. Petugas dan Kader KB

Selanjutnya terkait perbandingan antara petugas KB dengan kader, tabel berikut ini menggambarkan bahwa rata–rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolahaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat

jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

Tabel II-109
Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah PKB	Jumlah Kader KB
1	Payakumbuh Utara	9 kelurahan	4 orang	84 orang
2	Payakumbuh Timur	9 kelurahan	3 orang	57 orang
3	Payakumbuh Selatan	6 kelurahan	2 orang	25 orang
4	Payakumbuh Barat	17 kelurahan	4 orang	91 orang
5	Lamposi Tigo Nagori	6 kelurahan	2 orang	23 orang
Jumlah		**47 kelurahan**	**15 orang**	**280 orang**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah petugas KB mengalami kenaikan karena 2 (dua) orang petugas KB memasuki masa pensiun telah digantikan oleh petugas KB yang baru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu Jumlah Kader KB tetap dipertahankan sebanyak 280 kader KB se-Kota Payakumbuh.

H. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkatan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun, jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Untuk tahun 2017 sampai 2021 terjadi penurunan pada jumlah penumpang angkutan umum. Hal ini disebabkan adanya angkutan sewa “travel” yang bisa antar jemput ke lokasi keberangkatan dan lokasi tujuan. Di samping itu, juga adanya kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi melalui uang muka ringan yang berdampak pada menjamurnya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat dan ditambah lagi efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan sekolah daring dan hampir semua kegiatan dilakukan secara online, membuat arus penumpang angkutan umum makin menurun.

Tabel II-110
Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penumpang	117.617	82.654	82.098	25.519	22.407

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2022

2. Rasio izin trayek

Rasio izin trayek tidak ada perubahan dalam 5 (lima) tahun terakhir, karena tidak adanya penambahan izin trayek angkutan dalam kurun waktu tersebut. ini menandakan bahwa kurangnya minat perusahaan melakukan usaha di bidang angkutan umum disebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta adanya kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Juga sejak tahun 2019 perpanjangan kartu kontrol izin angkutan umum tidak dikeluarkan lagi oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Perkembangan ijin trayek selama tahun 2017 - 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di II-111.

Tabel II-111
Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Izin Trayek	Dokumen	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	131.819	133.703	135.573	139.576	140.184
3.	Rasio Trayek dengan Jumlah Penduduk	%	0,02	0,04	0,07	0,08	0,074

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2021

3. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 terdapat tiga buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar propinsi (Terminal Koto Nan Ampek) yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi dan 2 terminal angkutan kota/pedesaan yaitu Terminal Labuah Baru dan Pos Kota.Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Koto Nan IV (tipe B) berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 2 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe C) dikelola Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan belum beroperasi secara optimal dikarenakan rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal.

4. Angkutan Darat

Angkutan darat yang dimaksudkan di sini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2017 perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang adalah 1,71 %. Kondisi ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2020 dengan persentase perbandingan menjadi 12,81%, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 menjadi 15,24%. Ini disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang yang signifikan dan meningkatnya jumlah angkutan darat.

Tabel II-112
Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Angkutan Darat	2.664	2.978	3.147	3.269	3.414
2.	Jumlah Penumpang	117.617	82.654	82.098	25.519	22.407
3.	**Persentase Perbandingan**	**2,26**	**3,60**	**3,83**	**12,81**	**15,24**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2021

5. Perparkiran

Parkir kendaraan merupakan permasalahan yang cukup pelik di Kota Payakumbuh, apalagi dengan meningkatnya volume kendaraan terutama di saat keramaian dan hari libur, karena Kota Payakumbuh belum memiliki lahan parkir yang representatif. Sampai saat ini masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (*on street*). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, sedangkan kondisi lalu lintas semakin padat.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pertambahan kendaraan mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Payakumbuh sebanyak 25 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir *on street* diperlukan juga titik parkir *off street* berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersedian lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

6. Pelanggaran lalu Lintas.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Payakumbuh, dari 5.862 kasus pada tahun 2019 menjadi 3.355 di tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menurun sangat signifikan menjadi 842 pelanggaran. Hal ini disebabkan berkurangnya aktifitas masyarakat di luar rumah sebagai dampak pandemi Covid-19. Di samping itu, diperkirakan juga telah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, dilihat dari hasil pembinaan/penyuluhan secara berkala dengan dan pengawasan yang semakin ketat dari pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan secara terus menerus sehingga menambah pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain pembinaan/penyuluhan, Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan raya. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan hambatan, persimpangan, sekolah, dan perkantoran. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan sehingga mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Tabel II-113
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.689	7.871	5.862	3.355	842

Sumber : Polres Kota Payakumbuh, 2021

7. Prasarana Jalan

Kelengkapan prasarana jalan merupakan salah satu jaminan terhadap kelancaran arus transportasi baik orang maupun barang. Dengan pertambahan jumlah kendaraan secara kontinu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan lainnya. Sampai dengan tahun 2020 masih banyak ruas jalan di Kota Payakumbuh, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang belum dilengkapi prasarana jalan. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan

dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel II-114
Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rambu (buah)	995	1.025	1.077	1.077	1.077
	Jumlah RPPJ (buah)	27	27	27	27	27
	Jumlah Papan Nama Jalan (buah	246	246	246	246	246
2.	Jumlah traffic light (tiang)	48	52	56	56	56
	Jumlah warning light (tiang)	34	38	39	39	39
3.	Jumlah marka (m2)	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
4.	Jumlah halte (buah)	8	7	7	7	7
5.	Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah)	120	120	120	120	120

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2021

Untuk kondisi tahun 2020, dengan adanya refocusing anggaran sebagai pendukung penanganan wabah Covid-19, maka tidak ada penambahan prasarana perhubungan, hanya sebagian kecil dilakukan pemeliharaan pada lokasi-lokasi strategis dan prioritas.

I. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika telah berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan kepemerintahan.Pada tahun 2015 telah disusun *Master Plan E-Government* untuk periode Tahun 2015–2020, sehingga acuan pengembangan Teknologi Informatika (TI) di Kota Payakumbuh dapat terarah sesuai dokumen tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Penyediaan *Hotspot*

Jumlah *hotspot* yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh dimulai dari 2013 sebanyak 1 unit dan terus ditingkatkan samapai tahun 2017 sudah ada sebanyak 15 unit. Mulai tahun 2017 ditingkatkan dengan titik *hotspot Fiber Optic* (FO) di *meetingpoint* untuk publik melalui *hotspot* PT Telkom, sedangkan pada tahun 2018 ditingkatkan dengan radio penerima dan pemancar pada 15 titik perkantoran. Pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 11 dan 12 titik yang diutamakan pada lokasi-lokasi prioritas saja. Perkembangan dan lokasi penempatan hotspot tersebut dapat dilihat pada tabel II-115 dan tabel II-116 berikut.

Tabel II-115
Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Hotspot	Unit	15	15	11	12	12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2021

Tabel II-116
Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Lokasi	Jenis	Jumlah
1	Tugu Adipura	public	1
2	Ngalau Indah	public	1
3	Perkantoran Bukik Sibaluik	Private	2
4	GOR M. Yamin	public	1
5	Lapangan Tenis Gelanggang	public	1
6	Balaikota	Private	2
7	Kantor Persatuan Wartawan Indonesia	public	1
8	Kantor PKK	public	1
9	Mall Pelayanan Publik	public	1
10	Pasar Padang Kaduduak	public	1
	Jumlah		**12**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2021

2. Integrasi Sistem Informasi Teknologi

Di samping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan adminsitrasi kepemerintahan dan layanan masyarakat melalui integrasi sistem informasi teknologi pada Sub Domain Web Resmi Kota Payakumbuh, yakni http://www.payakumbuhkota.go.id

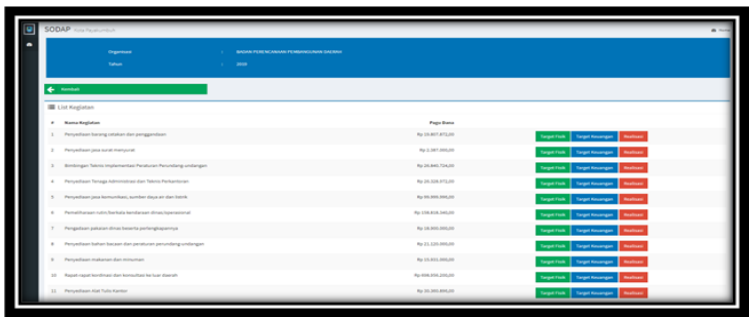

Gambar II-9
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh

Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari

- Aplikasi *e-Musrenbang, e-Pokir,* SIPPD dan SIPKD.

  Ini merupakan aplikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran. Disamping 4 (empat) aplikasi tersebut, sejak tahun 2021 Kota Payakumbuh juga menggunakan apliksi SIPD yang terintegrasi dengan SIPD Kemendagri.
- Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- Aplikasi CCTV Jalan Raya
- Aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi SETDAKO)
- Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)

- Aplikasi Kliping (Kominfo)
- Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- Aplikasi SIPADUKO (Kominfo)
- SMS *Centre* RSUD (Dinas Kesehatan)
- Aplikasi AKIP Online (BKPSDM)
- Aplikasi *E-SPPD*
- Aplikasi SODAP untuk Pengendalian dan Evaluasi
- Aplikasi *E-Kinerja*

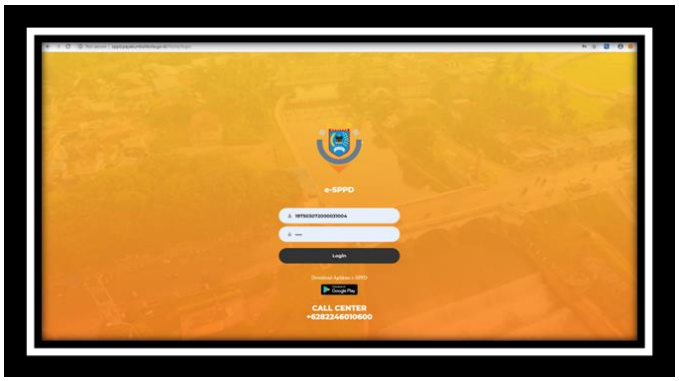

Gambar II-10
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Kota Payakumbuh. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdaya perekonomian daerah berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi pada tahun 2021 berkurang sebanyak 8 unit dari 151 unit pada tahun 2020 menjadi 142 unit pada tahun 2021, koperasi tersebut kewenangan pembinaannya pindah menjadi primer propinsi, setelah melakukan perubahan anggaran dasar (PAD), karena pendiri yang ada di anggaran dasar ada yang ber KTP diluar Kota Payakumbuh. Hal tersebut juga menyebabkan Jumlah koperasi aktif menurun dari 73 unit pada tahun 2020 menjadi 67 unit pada tahun 2021. 8 koperasi yang pindah menjadi primer propinsi tersebut yaitu : 1) yang melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) yaitu koperasi Ikhwan Depag, KPRI guru-guru kec. Payakumbuh Timur dan PDAM; 2) Koperasi baru yaitu (ciptaru tirta marga, bidang kebersihan kota, SMA 4 dan carano saiyo sakato); 3) koperasi Rajo Bangau Putiah, merupakan koperasi yang berbadan hukum ganda yang sebelumnya ada di primer propinsi danjuga ada di data koperasi binaan kota Payakumbuh.

Tabel II-117
Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi aktif	133	80	71	73	67
2.	Jumlah koperasi	144	145	149	151	142
3.	Persentase koperasi aktif	92,4	55,2	47,7	48,34	46,85
4.	Persentase koperasi sehat	12,03	21,25	22,54	28,77	30,43

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2021

Mulai tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan Program dan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Prinsip dasarnya adalah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas koperasi. Hal ini menyikapi banyaknya koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif (sesuai ketentuan UU 25/1992 dan Permenkop No. 9/2018) tapi masih terdapat dalam data koperasi nasional dan daerah sebagai koperasi aktif. Kebijakan ini seiring dengan makin selektifnya input data pada ODS (*Online Data System*) Kemenkop dan UKM RI, dimana data yang diinput adalah data koperasi berdasarkan data pelaksanaan RAT terakhir (dan RAT 3 tahun terakhir) yang dikategorikan untuk koperasi aktif. Karena hal ini terkait juga dengan penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi). Jumlah izin usaha simpan pinjam hanya diterbitkan untuk koperasi aktif. Konsekuensinya kita harus mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut bahwa kategori koperasi aktif adalah yang melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut masuk kategori tidak aktif dan termasuk dikategorikan untuk dibubarkan. Untuk persentase koperasi sehat tahun 2017-2021 yang masih rendah berkisar 12,03-30,43%, untuk itu perlu pembinaan secara intensif agar persentase Koperasi sehat mengalami peningkatan, dan para pihak yang berkepentingan harus saling bersinergi dalam meningkatkan fungsi dan manfaat dari koperasi.

2. Jenis Koperasi

Jenis koperasi di Kota Payakumbuh cukup beragam, yang dominan adalah Koperasi Serba Usaha, Koperasi Fungsional dan Koperasi Tani. Jenis dan jumlahnya digambarkan sebagaimana tabel II-118.

Tabel II-118
Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Jenis koperasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koperasi Unit desa	5	5	5	5	5
2	Koperasi Fungsional	43	43	43	43	41
3	Koperasi Karyawan	8	8	8	8	7
4	Koperasi serba Usaha	43	43	43	43	43
5	Koperasi wanita	7	7	7	7	7
6	Koperasi Tani	15	15	15	16	16
7	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2	2	2
8	Koperasi Simpan Pinjam	6	6	7	7	7
9	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1	1	1
10	Koperasi Pasar	0	0	0	0	0
11	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2	2	2
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	1	1	1	1	1
14	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	1
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5	5	4
18	Koperasi Pemasaran	2	2	3	3	0
19	Koperasi Produsen	0	1	3	4	2
JUMLAH		144	145	149	151	142

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2021

Dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah koperasi di Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 8 unit karena menjadi koperasi primer propinsi (binaan Propinsi):

1. Koperasi Ikhwan Depag
2. KPRI guru-guru kec. Payakumbuh Timur
3. Koperasi PDAM
4. Koperasi Ciptaru Tirta Marga
5. Koperasi Bidang Kebersihan Kota
6. Koperasi SMA 4
7. Koperasi Carano Saiyo Sakato
8. Koperasi Rajo Bangau Putiah
9. Koperasi Pemasaran Anak Nagari Sejahtera

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM. Pada tahun 2021, persentase UKM terhadap UMKM di Kota Payakumbuh meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 dari 13,68 % menjadi 14,19%, artinya terjadi peningkatan jumlah UMKM di kota payakumbuh, ini adalah efek dari mulai menggeliatnya perekonomian Kota Payakumbuh seiring dengan mulai melandainya kasus covid-19. Walaupun dibandingkan dengan tahun 2017 yang persentasenya 27,14%, pada tahun 2018-2021 kondisinya menurun drastis, walaupun mulai menggeliat akan tetapi persentasenya masih dibawah tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah usaha mikro yang sangat signifikan, pada tahun 2018-2021 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro dan UKM terjadi penurunan ± 50% dari tahun 2017, sehingga persentase UKM terhadap UMKM menjadi turun.

Tabel II-119
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2021

Jenis usaha	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	Unit	15.262	16.714	16.770	19.388	20.088
Usaha Kecil	Unit	5.471	2.565	2.615	2.615	2.865
Usaha Menengah-Besar	Unit	214	448	458	458	458
Persentase UKM terhadap UMKM	%	27,14	15,27	15,49	13,68	14,19
Total UMKM	**Unit**	**20.947**	**19.727**	**19.843**	**22.461**	**23.411**

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2021

K. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh pada urusan Penanaman Modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel II-120
Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	23	22	6	38	29
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	milyar	112,08	49,4	16,1	130,6	90,20

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Nilai realisasi investasi	milyar	229,3	231,5	250,6	178,3	417,24
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	milyar	54,3	2,2	19,1	-72,3	238,94
5	Lama proses perijinan	hari	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, 2021

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi investasi yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2019, yaitu dari Rp. 250,6 milyar menjadi 178,3 milyar pada tahun 2020, atau terjadi penurunan sebesar 72,3 milyar. Ini disebabkan terutama karena perekonomian nasional yang cenderung lesu pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, perekonomian mulai bangkit, dengan iklim investasi yang mendukung, dengan naiknya nilai realisasi investasi menjadi 417,24 milyar.

Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017).

L. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Namun dengan terjadinya wabah Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan target prestasi atlet tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada tabel II-121 di bawah ini terlihat bahwa tahun 2020 perolehan medali sebagai perwujudan prestasi atlet sangat sedikit karena banyaknya even-even olah raga baik regional, nasional dan internasional yang tidak dilaksanakan.

Tabel II-121
Prestasi Olahraga Tahun 2017 - 2021

No	Cabang Olah Raga	2017			2018			2019			2020			2021		
		Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)		
		Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Angkat Berat				12			-	-							
2	Atletik				4	1		12	1					16		
3	Balap Sepeda							-	-							
4	Bola Basket				2	1		-	-							
5	Bola Volly					1		1	-							
6	Bulu Tangkis				1			14	-		5					
7	Catur					1	1	2	-							
8	Futsal				1			-	-							
9	Judo				9			-	-							
10	Karate				6			16	-	1	10				1	
11	Kempo				4			-	-						1	
12	Menembak				3			-	-							
13	Panjat Tebing				2			-	-							

No	Cabang Olah Raga	2017			2018			2019			2020			2021		
		Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)			Prestasi (Jumlah Medali)		
		Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional	Provinsi	Nasional	Internasional
14	Renang				22	2		2	38					29		
15	Senam				13			-	-							
16	Sepak Bola							-	-							
17	Sepak Takraw				2			-	-							
18	Silat				3											
19	Taekwondo				5			9	1							
20	Tarung Drajat				8			3	-							
21	Tenis Lapangan				2			-	-		2					
22	Tenis Meja				4	2										
23	Aero Sport				10			-	9		4	1			6	
24	Tinju				6	2		-	1							
25	Bridge															
26	Wushu				5	1		-	-							
27	Soft Tenis				3			-	-							
28	Muaythai				2			-	-							
29	Panahan				4			-	-							
30	Bilyard				3											
31	Dayung				6											
32	BOCCE (Tolak Peluru)							1	-							
TOTAL		**147**	**0**	**0**	**0**	**142**	**11**	**1**	**60**	**50**	**1**	**21**	**1**	**45**	**8**	**0**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tanggal 8 September 2021 pada Pasal 6 yang bebunyi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupatenlkota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

pemerintah kota payakumbuh telah memenuhi kriteria yang telah diatur Peraturan Presiden tersebut. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana olah raga.

Jumlah sarana dan prasana olah raga di Kota Payakumbuh cukup banyak, namun kualitasnya belum representatif untuk even-even skala nasional. Walaupun pada tahun 2019 telah mulai dibangun stadion olah raga dengan rencananya berstandar nasional di area Sungai Batang Agam Kelurahan Tanjung Pauh namun belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olah raga juga telah dibangun sarana olah raga di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh yang diberi nama “Payakumbuh Bugar”. Diharapkan dengan adanya sarana ini dapat merangsang tumbuhnya bibit-bibit atlet di level regional, nasional dan internasional.

Gambar II-11
Gelanggang Olah Raga Payakumbuh Bugar di Kelurahan Tigo Koto Diate Kota Payakumbuh

Selanjutnya terkait jenis sarana dan prasarana olahraga yang ada sampai saat ini di wilayah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II-122.

Tabel II-122
Sarana Prasarana olahraga Tahun 2021

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	15 Lapangan	Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Koto Baru Payobasuang; Talawi; Tanjuang Anau; SMAN 2; Parik Muko Aia; Sungai Durian; Koto Panjang Lampasi; Tanjuang Gadang; Ma'had Islamy; Payobasuang;
2	Lapangan Basket	25 Lapangan	Kubu Gadang 2 buah; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; MAN 1; MAN 2;
3	Lapangan Volley	48 Lapangan	Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh;SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; MAN 1; MAN 2; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibuh; Tambago; Bonai; Tigo Koto Diate
4	Lapangan Bulu Tangkis	31 Lapangan	GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; SMKN 1 indoor 2 bh; SMKN 2 indoor 3 bh; Nunang; Padang Tangah Payobada; Balai Jariang Timur; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Muaro; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Padang Alai; Padang Karambia
5	Lapangan Tenis	6 Lapangan	Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tenis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tenis Outdoor SMAN 2,Tenis Outdoor MAN 2, Tenis Outdoor Batalyon 131 BS, Tenis Outdoor SMAN 3
6	Lapangan Atletik	3 Lapangan	Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin, Padang Kaduduak
7	Kolam Renang	1 Lapangan	Ngalau Indah
8	Gelanggang/ Balai Remaja	4 Lapangan	Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah
9	Lapangan Futsal	1 lapangan	Tigo Koto Diate
10	Joging Track	1 lapangan	Tigo Koto Diate
TOTAL		**133**	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

M. Statistik

Sampai saat ini Kota Payakumbuh belum memiliki sistem aplikasi data secara elektronik, sehingga belum terwujud pengarsipan data tahunan yang tertata dengan baik. Ini mengakibatkan sulitnya updating data dan terjadinya perubahan data setiap tahun yang disampaikan oleh penyedia data. Sistem aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari kedua aplikasi ini justru terjadi persoalan yang mana jenis data yang tersedia dalam aplikasi tidak menggambarkan kondisi lokal kedaerahan, sehingga banyak elemen data yang tidak terisi. Seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki sebuah sistem aplikasi data terpadu yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Kondisi di atas menyebabkan kurangnya ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan dan penelitian. Tingkat ketersediaan data untuk perencanaan baru sekitar 80%. Ini menandakan bahwa masih ada kekurangan data untuk perencanaan yang bisa berdampak pada kurangnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini mengharuskan pemerintah Kota Payakumbuh membangun aplikasi sendiri agar bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat sehingga kualitas perencanaan dapat ditinggkatkan dengan ketersediaan data yang di update terus menerus melalui portal sendiri. Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana bertujuan untuk mensinergikan data yang ada pada masing-masing walidata agar dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi lebih terarah dan terkoordinir.

N. Persandian

Salah satu indikator baru yang muncul akibat perubahan nomeklatur adalah urusan persandian, dari indikator yang ada mulai dari tahun 2021 dan indikator Persentase penanganan cyber attack yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020. Dari data tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan persandian di Kota Payakumbuh pada tahun pertama adalah:

Tabel II-123
Perkembangan Kinerja Persandian di Kota Payakumbuh tahun 2020 – 2021

No	Indikator	satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	Persentase penanganan cyber attack	%	80,00	100
2.	Persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi	%		-
3.	Indeks Domain Kebijakan Internal	Nilai		3,29
4.	Indeks Domain Tata Kelola	Nilai		2,43
5.	Indeks Domain Layanan	nilai		3

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022

Untuk persentase penanganan cyber attack yang sudah dimulai tahun 2021 terjadi peningkatan, dimana pada awalnya Cuma 80% yang tertangani, ditahun 2021 telah tertangani selurunya atau 100%. Untuk persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi belum diukur untuk tahun 2021, selanjutnya untuk indeks domain kebijakan internal, indeks domain tata kelola dan indeks domain layanan nilai yang didapat sama bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yaitu indeks domain tata kelola yang ditargetkan hanya 2,41 tercapai 2,43.

O. Kebudayaan

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/expo, jumlah sarana dan penyelenggaraan festifal seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup

kesenian. Untuk kondisi 2021 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya dari tidak dilaksanakan pada tahun 2020, pada tahun ini meningkat menjadi 19 kali, hal ini dikarenakan mulai melandainya kasus positif covid-19, sementara itu akibat pelaksanaan PPKM, masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga menimbulkan minat masyarakan untuk kembali menghidupkan kesenian daerah yang biasanya mati suri. Pada tahun ini peningkatan jumlah kesenian yang aktif sebanyak 8 grup dari 72 tahun 2020 menjadi 80 grup pada tahun 2021, atau terjadi peningkatan sebesar 11,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II-124.

Tabel II-124
Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	Kali	1	3	13	-	-
2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Kali	9	38	40	-	19
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	2	3	4	5	5
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Unit	22	26	26	34	34
5.	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	Unit	22	26	26	34	34
6.	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	Grup	70	70	15	72	80

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

P. Perpustakaan

Seiring dengan perkembangan multi media yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi, sehingga menyebabkan perpustakaan daerah harus menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Konsep pengembangan kepustakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip "**Literasi Menuju Kesejahteraan**", prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Untuk tahun 2021, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 44,8%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani. Pada tahun 2021 terdapat penambahan buku pada Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh melalui sub kegiatan pengadaan bahan pustaka sebanyak 290 judul/580 eksemplar.

Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Payakumbuh usia antara 5 s/d 69 tahun, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota. Jumlah perpustakaan adalah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh yang terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota

Payakumbuh dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat) / Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II-125
Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	5.351	6.609	6.914	6.914	7.204
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	12.375	14.891	15.501	15.501	16.801
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	43,24	44,38	44,60	44,60	44,80
2	Kunjungan perpustakaan	Orang	8.850	14.086	15.102	6.673	3.642
	Orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	91.672	95.338	118.704	123.907	125.149
	Pengunjung perpustakaan	%	9,66	14,77	12,72	5,39	2,91
3	Jumlah perpustakaan	Unit	37	36	38	42	42

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2021

Tahun 2021 kunjungan perpustakaan terus menurun, dimana Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2021 sebanyak 3.642 orang, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 6.673 orang, yang terdiri dari pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh sebanyak 3.548 orang dan pengunjung Perpustakaan Keliling sebanyak 94 orang. Hal ini dikarenakan masih merebaknya wabah Covid-19, yang mengharuskan tidak boleh berkumpul, sehingga beberapa even yang sudah direncanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak dapat dilaksanakan. Tapi hal ini tidak membuat jumlah perpustakaan berkurang.

Q. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh DinasPerpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk *tracking* surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat dapat menjaga data tersimpan dengan baik.

1. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan tabel II-126, baru 25,80% Perangkat daerah (atau sekitar 8 perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2021, hal ini disebabkan karena sumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap Perangkat Daerah.

Tabel II-126
Perkembangan Kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	PD	5	3	5	6	8
2.	Jumlah Perangkat Daerah	PD	31	31	31	31	31
3.	Penerapan pengelolaan arsip secara	%	16,13	9,68	16,13	19,35	25,80

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	baku						
4.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	2	2	1	1

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2021

2. SDM Pengelola Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 meningkat dari 31.818 berkas menjadi 34.683 berkas, terjadi peningkatan sebanyak 782 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional arsiparis yang tersedia. Jumlah pejabat arsiparis pada tahun 2021 hanya tersedia 2 orang. mengalami pengurangan dari tahun 2020, karena ada 1 orang fungsional yang mengundurkan diri menjadi staf fungsional umum. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini sangat tidak ideal untuk satu kota, untuk ini perlu dilaksanakan penambahan pegawai fungsional arsiparis. Akan tetapi penambahan jumlah fungsional arsiparis tergantung dari peminatan pegawai.

Tabel II-127
Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	31.818	34.392	35.138	33.901	34.683
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	1	2	3	3	2

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2021

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan di Kota Payakumbuh dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih ikan dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.Pada umumnyakegiatan perikanan lebih banyak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mayarakat Kota Payakumbuh akan protein hewani dari ikan. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Payakumbuh sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain di sekitar Kota Payakumbuh, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Di samping itu, dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan yang dikelola di bawah bimbingan petugas penyuluh perikanan pad Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Secara lebih lengkap perkembangan populasi, produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada Tabel II-128.

Tabel II-128
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Rumah Tangga Pembudidaya ikan**						
	• Pembudidaya ikan kultur (sambilan utama)	RT	698	625	718	718	718
	• Pembudidaya Ikan Kultur (sambilan tambahan	RT	2.513	2.208	2.208	2.208	2.208
	• Penangkap ikan	RT	38	38	38	83	83
2	**Produksi Benih Ikan**						
	• Luas Kolam	ha	6,3	6,3	6,5	4,5	9.3
	• Produksi	ribu ekor	10.865	11.951	12.340	12.390	12.418.
3	**Produksi Pembudidayaan Ikan Rakyat (Ikan Konsumsi)**						
	• Luas Kolam	Ha	201,73	201,73	64	64	64
	• Produksi	Ton	482,25	501,65	520,11	540,27	551.87
4	**Penangkapan Ikan di Perairan Umum**						
	• Luas Kolam	Ha	38,95	38,95	38,95	38,95	38.95
	• Produksi	Ton	6,6	8,07	8,56	10,05	10.15

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Jumlah Rumah tangga pembudidaya ikan tahun 2020 dan 2021 masih sama. Luas kolam pembenihan dan produksi benih ikan mengalami peningkatan pada tahun 2021,produksi ikan konsumsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Dengan adanya pengalihan pengelolaan (Balai Benih Ikan) BBI Padang Tangah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2018, maka diharapkan adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan dengan dukungan dengan adanya 2 (dua) Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, serta didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan, sehingga menyebabkan Produksi Benih Ikan mengalami peningkatan selain peningkatan permintaan pasar atas benih ikan yang menjadi salah satu faktor.

Tabel II-129
Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Jenis produk	Satuan	Produksi				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan	Ton	482,25	501,65	520,11	540,27	540,27
2	Produk Olahan Perikanan	Ton	20	26,74	34,212	30.000	30.000
3	Benih Perikanan	Ribu ekor	10.865	11.951	12.340.150	12.390.000	12.390.000

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Produksi perikanan (Ikan Konsumsi) mengalamai peningkatan pada tahun 2021 yaitu 551.87 ton dari target 550 ton dengan pencapaian 100.34 %. Sedangkan produksi olahan hasil perikanan menurun drastis, hal ini disebabkan menurunnya penjualan di beberapa tempat pemasaran spt Trans Mart sejak bulan Juni 2021, salah satu penyebabnya adalah pemberlakukan PPKM. Produksi benih ikan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dari tahun 2020.

Produksi perikanan dan produk olahan perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh optimalisasi lahan dan usaha perikanan masyarakat dan meningkatnya permintaan pasar dimana dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsumsi ikan. Hal ini juga di dukung oleh program kegiatan yang ada

pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, yaitu Penyuluhan Gemarikan yang dilakukan kepada masyarakat, termasuk anak-anak usia dini, akan tetapi pada tahun 2021 Produk olahan terus menurun karena masih dipengruhi oleh pandemi Covid -19.

B. Urusan Pariwisata

Kota Payakumbuh tidak mempunyai potensi pariwisata alam yang memadai, hanya terbatas di Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Namun, potensi pengembangan pariwisata kedepannya cukup besar, terutama wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh. Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun belum memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

1. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 lalu, dan masih mengalami penurunan pada tahun 2021, Wabah Covid-19 telah memukul sektor pariwisata tidak saja di Payakumbuh, namun pariwisata regional, nasional dan seluruh dunia mengalaminya. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, hampir seluruh indikator kepariwisataan mengalami penurunan, khususnya kunjungan wisata baik asing maupun domestik, termasuk even-even pariwisata yang tidak bisa dilaksanakan, karena penerapan PPKM tahun 2021, dan anggaran ini dialihkan untuk mendukung penanganan wabah Covid-19.

Tabel II-130
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan wisata	Orang	183,942	193.502	203.389	34.479	32.110
	Kunjungan wisata Asing	Orang	957	164	183	13	5
	Kunjungan wisata Domestik	Orang	182.983	193.338	203.206	34.466	32.105
2	Jumlah objek wisata unggulan	buah	1	3	3	3	3
3	Jumlah restoran, rumah makan dan warteg	Unit	178	176	187	189	188
4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	kali	16	12	24	1	7

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

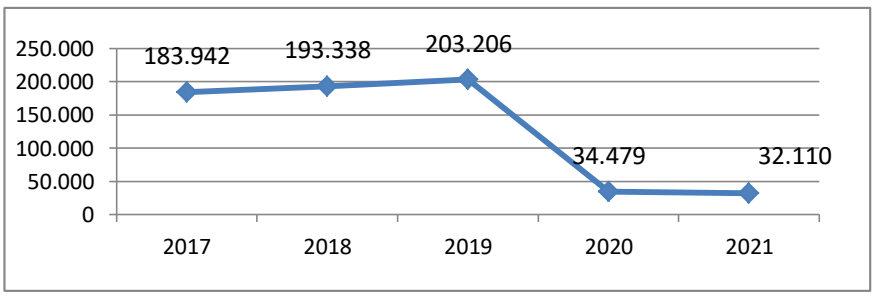

Diagram II-20
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Sejalan dengan penurunan kunjungan wisata, maka tingkat hunian hotel pun mengalami penurunan. Walaupun hotel di Kota Payakumbuh masih didominasi hotel kelas Melati, namun di akhir pekan biasanya cukup banyak tamu menginap, karena wisata kuliner di Kota Payakumbuh menjadi objek wisata tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Di akhir tahun 2021 lalu jumlah tamu yang menginap di hotel mulai naik seiring dengan pengurangan batasan syarat protokol kesehatan, namun secara keseluruhan belum signifikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagaimana tercantum pada tabel II-131.

Tabel II-131
Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tamu Menginap
1	Hotel Mangkuto	50	98	5.900
2	Hotel Bundo Kanduang	50	96	2.607
3	Wisma Flamboyan	12	22	3.092
4	Hotel Farabi	15	30	2.891
5	Hotel Kolivera I	15	33	1.527
6	Hotel Kolivera II	15	26	1.463
7	Hotel Kolivera III	16	26	908
8	Hotel Kolivera IV	9	14	50
9	Hotel Sari I	19	42	1.256
10	Hotel Faradisa	16	32	1.363
11	Hotel Pondok Bambu	19	21	481
12	Hotel Hafara Inn	10	15	533
13	Grand Narasaki	15	19	1.150
14	Hotel Candano	6	9	451
Jumlah		**267**	**483**	**23.672**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

2. Atraksi Wisata

Atraksi wisata sudah dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelum pandemi covid-19, pada tahun 2021 ini telah dilaksanakan 14 (empat belas) atraksi wisata yang diadakan sampai pada akhir tahun 2021 karena mulai melandainya kasus positif covid-19. Jika dilihat kecenderungan atraksi wisata yang dilaksanakan selama tahun perencanaan mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 saja yang menurun.

Tabel II-132
Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Atraksi Wisata	22	14	15	6	14

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

Tabel II-133
Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pacu itiak	12	8	8	4	8
Pacu Jawi	5	2	3	1	6
Pacu kuda	3	2	2	1	-
Buru Babi	2	2	2	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2021

Dibanding dengan tahun 2017 atraksi wisata di kota payakumbuh mengalami penurunan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2020 hanya ada enam even atraksi wisata, hal ini dikarenakan kurangnya minat pelaku atraksi, ditambah tahun 2020 dan 2021 yang di pengaruhi pamdemi covid-19, dengan pelaksanaan PSBB pada tahun 2020 dan PPKM pada tahun 2021, yang menyebabkan berkurang ruang lingkup gerak masyarakat untuk berkumpul akibat pembatasan ini.

C. Urusan Pertanian

1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Payakumbuh cukup tinggi setiap tahunnya sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan perumahan serta bangunan komersil lainnya. Dalam lima tahun terakhir perubahan fungsi lahan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini, dimana pada tahun 2021 alih fungsi lahan turun menjadi 5,5 Ha. Alih fungsi terjadi pada kawasan permukiman, jalan utama, jalan, jalan penghubung, kawasan perkembangan perekenomian yang pesat untuk perumahan dan permukiman, pusat pertokoan dan pembangunan jalan**.** Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu memperketat pemberian izin dengan penerapan RTRW dan RTBL serta penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Tabel II-134
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2017 - 2021

No	Data Awal (Ha)	Alih Fungsi Lahan (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lahan Pertanian Awal; 2751 Ha	1 Ha	66,8 Ha	27 Ha	14,4 Ha	5,50 Ha

Sumber : Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Tahun 2018 – 2035; Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Pada tahun 2021 luas Lahan pertanian yang mengalami penurunan tingkat kesuburan tidak ada, hal ini juga dapat dilihat dari hasil produktifitas pertanian di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang menandakan lahan masih subur. Ini diakibatkan semakin ketatnya pengawasan terhadap usaha industri dan perbengkelan yang ada serta penerapan pupuk organik yang semakin digalakkan oleh para petani.

Tabel II-135
Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat KesuburanTahun 2017 - 2021

No	Jenis lahan	Luas lahan (ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Lahan basah	1 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
2	Lahan kering	1 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

2. Potensi Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Walaupun corak kekotaan Payakumbuh semakin tampak, namun areal pertanian masih mendominasi penggunaan lahannya. Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, dan kakao. Produksinya cukup prospektif untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor ke luar daerah. Komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar Provinsi Sumatera Barat. Walaupun lahan pertanian dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan karena banyaknya alih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang, maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran, yaitu dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

Tabel II-136
Jumlah Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Komoditas	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Produksi Padi	41.515	5,25	39.800	4,99	43.038	5,41	43.038	5,57	43.950	5,84
2.	Produksi Jagung	1.302	3,63	2.640,73	6,03	1.486	4,59	1.486	6,63	1.420,22	4,61
3.	Produksi Ubi Kayu	6.178	42,03	5.519,25	50,18	3.132	27,23	3.132	31,64	4.396,16	41,87
4.	Produksi Kacang panjang	645	17,43	605,44	13,45	298	0,78	298	9,93	343,2	11,18
5.	Produksi Cabe	897,6	10,69	892	12,05	898	14,48	898	9,92	912,5	9,83
6.	Produksi Terung	1.385	29,47	872,63	19,83	937,4	36,05	937,4	19,53	1080,1	23,63
7.	Produksi Ketimun	4.095	48,75	819,80	10,12	667,7		667,7	11,13	985,4	13,60
8.	Produksi Kangkung	480	13,33	739,14	12,97	909,0		909,0	8,34	1143,3	8,28
9.	Produksi Kakao	1.045	1,2	3.000,2	1,25	1.029,7	1,3	1.029,7	0,94	578,34	1,19

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel II-136 terlihat untuk tahun 2021 meningkatnya produksi padi dikarenakan meningkatnya produktivitas dibandingkan tahun lalu. Peningkatan produktivitas karena meningkatnya pemakaian benih unggul, pemupukan berimbang dan sistem irigasi yang relatif lancar/baik. Menurunnya produksi jagung dikarenakan turunnya produktivitas yang disebabkan oleh adanya serangan hama ulat grayak. Meningkatnya produksi ubi kayu disebabkan oleh meningkatnya luas panen, dimana pertanaman banyak dilakukan pada tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi kacang panjang dikarenakan meningkatnya produktivitas, dimana pemeliharaan yang dilakukan petani semakin intensif karena harga kacang panjang yang cenderung stabil pada semester pertama tahun 2021. Meningkatnya produksi cabe dikarenakan meningkatnya produktivitas. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya pemakaian varietas unggul lokal yang baru yaitu cabai akar, dimana produktivitas cukup tinggi dan lebih tahan serangan hama penyakit. Meningkatnya produksi terung dikarenakan peningkatan produktivitas. Harga terung yang cenderung bagus

sehingga petani intensif dalam pemeliharaan tanaman terung, di samping itu pemakaian benih unggul berperan dalam peningkatan produktivitas terung. Meningkatnya produksi ketimun dikarenakan meningkatnya produktivitas. Pemakaian benih dan pemeliharaan yang baik menjadi faktor penyebab meningkatnya produksi terung. Meningkatnya produksi kangkung dikarenakan peningkatan permintaan dari luar sehingga luas tanam dan luas panen meningkat dibanding tahun lalu.

3. Produktifitas Peternakan

Kemajuan dibidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Disamping dalam bentuk perkembangan populasi, produksi daging, telur dan susu dalam pembangunan peternakan juga dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat penunjang seperti inseminasi buatan dan kegiatan pemeliharaan kesehatan. Perkembangan populasi dan produksi peternakan tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mendirikan *breeding farm* di Kelurahan Kapalo Koto.

Dari tabel II-137 terlihat bahwa populasi ternak besar mengalami peningkatan pada tahun 2021, dimana dari tahun 2017 sampai dengan 2021 umumnya terjadi peningkatan produksi, ini hal ini di dukung dengan adanya program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif. Selain itu juga didukung oleh adanya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

Demikian pula dengan populasi ayam ras pedaging dan ayam ras petelur, puyuh. Demikian juga populasi ternak kerbau, kambing, itik, dan ayam kampung mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Tabel II-137
Produktifitas Peternakan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Ternak	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	5.707	5.756	5.849	5.965	5.995
2	Kerbau	170	177	169	135	139
3	Kuda	258	263	362	362	370
4	Kambing	5.240	3.975	3.860	3.464	3.500
5	Ayam Kampung	45.134	39.457	33.840	23.517	23.771
6	Puyuh	192.000	154.300	156.000	193.834	193.943
7	Itik	57.324	63.608	54.090	53.446	53.666
8	Ayam Ras Petelur	1.045.800	1.080.700	1.111.700	1.090.834	1.098.689
9	Ayam Ras Pedaging	2.754.000	2.657.800	2.815.000	2.822.000	2.845.458

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Kota Payakumbuh merupakan wilayah sentra unggas, selain itu dengan dicanangkannya Kota Payakumbuh sebagai *City Of Rendang,* maka permintaan akan kebutuhan daging juga

mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan adanya fasilitas yang ada di Kota Payakumbuh berupa Rumah Potong Hewan Modern dan Pasar Ternak sebagai akses keluar masuk ternak, perkembangannya bisa dilihat pada tabel II-138.

Tabel II-138
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2017 - 2021

No	Jenis Ternak dan Unggas	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Daging (Kg)**	**4.474.195**	**4.345.275**	**4.446.102**	**4.209.346**	**4.251.439**
	Daging Sapi	939.256	914.820	1.091.500	901.244	910.256
	Daging Kerbau	43.051	111.038	18.542	5.754	5.812
	Daging kambing	84.388	85.119	83.171	83.016	83.846
	Daging Kuda	7.350	15.540	4.410	2.730	2757
	Daging ayam kampung	48.654	45.535	26.406	25.351	25.605
	Daging Ayam ras pedaging	2.525.780	2.322.740	2.357.990	2.345.770	2.369.228
	Daging ayam ras petelur	802.070	824.245	843.835	823.435	831.669
	Daging itik	314.709	26.238	20.248	22.046	22.266
2.	**Telur (Kg)**	**7.181.078**	**8.042.777**	**8.210.909**	**8.108.597**	**8.189.686**
	Telur ayam ras	7.437.540	7.668.366	7.925.781	7.800.157	7.878.162
	Telur ayam kampung	28.829	25.203	15.646	15.021	15.170
	Telur itik	314.709	349.208	269.482	293.419	296.354

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Produksi daging dan telur di Kota Payakumbuh tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, disebabkan karena mulai menggeliatnya perekonomian pasca melandainya kasus covid-19 sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian

Di samping itu, dalam meningkat produksi dan produktifitas sektor pertanian, juga telah difasilitasi penerapan teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, tidak hanya pada sektor pertanian saja, tapi juga pada sektor peternakan dan perikanan.

Tabel II-139
Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan di Kota Payakumbuh
Tahun 2017 - 2021

No	Sub sector	Jumlah Teknologi (Paket)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanaman pangan	21	22	22	23	76
2	Hortikultura	22	23	23	24	75
3	Perkebunan	16	16	17	18	50
4	Peternakan	21	21	25	26	62
5	Perikanan	10	12	12	13	13

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah teknologi anjuran yang telah diterapkan di sektor perikanan baik untuk usaha budidaya perikanan maupun usaha pengolahan hasil perikanan masih tetap sama pada

tahun 2020 dan 2021, yaitu 13 teknologi, diantaranya pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, jajar legowo, pemakaian berbagai macam alsintan (traktor, combine harvester, alat penyiangan dsb), irigasi, padi tanam sebatang (PTS), Pemakaian pupuk organik, PGPR, dsb. Teknologi anjuran untuk tanaman hortikultura ada sebanyak 75 teknologi diantaranya pemakaian barrier tanaman, bibit unggul, pemakaian *tricoderma*, pestisida nabatidan sebagainya. Teknologi anjuran untuk perkebunan sebanyak 50 teknologi diantaranya sambung samping, sambung pupuk pucuk, pemakaian beauveria bassiana, fermentasi kakao, pemangkasan, dsb. Teknologi anjuran untuk peternakan sebanyak 62 teknologi diantaranya *embrio transfer*, inseminasi buatan, teknologi pakan ternak (*silase*, permen sapi, fermentasi jerami) dan sebagainya.

5. Pelaku Sektor Pertanian

Walaupun secara umum terjadi perubahan alih fungsi lahan pada sektor pertanian, namun minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup menggembirakan. Ini ditandai dengan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya.

Tabel II-140
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2017 - 2021

No	Jenis usaha/ komunitas	Kelompok yang mengusahakan (kelompok)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	175	175	175	177	171
2	Palawija	46	46	46	48	89
3	Hortikultura					
	- Sayuran	45	45	45	46	105
	- Buah-buahan	8	8	8	8	8
	- Tanaman hias	15	15	15	15	8
	- Biofarmaka	21	21	42	42	18
4	Peternakan					
	- Ternak besar	47	47	42	42	55
	- Unggas	40	40	4	4	30
5	Perikanan	2	3	30	35	35
6	Up3hp	6	6	6	6	15
7	Poklahsar	3	3	4	2	3
8	Perkebunan	24	24	24	24	29

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Jumlah kelompok usaha pertanian tanaman padi tahun 2021 adalah 171 kelompok, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 177 kelompok. Jumlah kelompok palawija adalah 89 juga naik dari tahun sebelumnya 48 kelompok. Untuk kelompok perikanan tetap sebanyak 35 kelompok sejak tahun 2020. Untuk kelompok Pengolahan dan Pemasaran pada tahun 2021 naik menjadi 3 kelompok, dimana pada tahun 2020 adalah 2 kelompok. Dilihat dari data terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, berdasarkan fakta di lapangan hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi covid 19.Untuk kelompok hortikultura, terjadi peningkatan dari 46 menjadi 105, peternakan, meningkat pesat terutama ternak unggas yang awalnya pada tahun 2020 hanya 4 menjadi 30 pada tahun 2021 dan ternak besar dari 42 menjadi 55. UP3HP meningkat dari 6 menjadi 15 dan perkebunan juga meningkat sedikit dari tahun sebelumnya, 24 menjadi 29. Untuk Kota Payakumbuh jumlah kelompok tersebut sudah memadai yang perlu dilakukan adalah membina agar kelompok kelompok tersebut terus aktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan anggotanya.

Tabel II-141
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2017 - 2021

No	Sektor	Tenaga Kerja (org)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanaman pangan	22.150	22.122	9.217	12.280	8.050
2	Hortikultura	3.700	3.723	1.563	2.064	2.682
3	Perkebunan	1.840	1.811	1.876	2.481	1.931
4	Peternakan	9.334	9.322	2.980	3.971	2.983
Jumlah		**37.024**	**36.978**	**15.636**	**20.796**	**15.646**

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2021

Pada tabel II-140 terlihat pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja disemua sektor pertanian dibandingkan tahun 2020, Penurunan jumlah tenaga kerja disektor pertanian ini seiring dengan efek dari PPKM yang menyebabkan turunnya produksi pertanian juga menurunnya keinginan kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian. Namun ada sedikit kenaikan di sektor holtikultura, karena pada tahun 2021 berkembang pola tanam masyarakat yang memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk berkebun.

D. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan sangat besar perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat. Untuk tahun 2021 tidak satupun elemen pasar yang ada di Kota Payakumbuh mengalami perubahan baik meningkat atau penurunan.

Tabel II-142
Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)	unit	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272
2	Pasar Tradisional (Ibuh& Padang Kaduduk)	unit	2	2	2	2	2
3	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	unit	1	1	1	1	1
4	Mall	buah	1	1	1	-	-
5	Pasar Swalayan	buah	15	42	42	43	43
6	Kaki lima	buah	2.261	2.261	2.169	2.169	2.169

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kota Payakumbuh, 2021

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representatif.

E. Urusan Perindustrian

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program *one vilage one produk* (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

1. Perkembangan Industri

Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (lima) tahu terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-143
Perkembangan Industri Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Unit Usaha	Unit	1.963	1.783	1.853	1.902	1.928
2.	Formal	unit	594	225	583	630	643
3.	Non Formal	unit	1.369	1.558	1.270	1.272	1.285
4.	Tenaga Kerja	orang	4.486	5.854	6.106	6.271	6.308
5.	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86.567.512	86.742.512	88.040.791	95.649.716	95.954.716
6.	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	364.355.333	337.720.000	342.785.800	257.089.350	296.463.459

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah unit usaha terutama sektor formal yang mengalami kenaikan dari 630 unit pada tahun 2020 menjadi 643 unit pada tahun 2021, sedangkan usaha non formal mengalami sedikit kenaikan. Begitu jumlah tenaga kerja, nilai investasi juga mengalami peningkatan. Nilai produksi pelaku usaha UMKM di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap kemampuan produksi di Tahun 2021.Hal ini mungkin disebakan oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap produk IKM Kota Payakumbuh. Begitu juga dengan jumlah pelaku usaha bertambah sebanyak 26 IKM, sehingga jumlah IKM Kota Payakumbuh menjadi 1.928 meskipun dalam

data tersebut diyakini terdapat pelaku usaha yang sudah tidak aktif atau sudah beralih ke profesi lain, berhubung pendataan IKM terakhir Tahun 2015 yang lalu.

2. Unit Usaha dan Nilai Produksi Industri

Berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu tabel II-143, untuk tahun 2020 unit usaha industri mengalami peningkatan sebesar 1.902 unit usaha dibanding Tahun 2019 sebesar 1.853 unit usaha. Nilai ini diperoleh dari penggabungan data dari izin TDI DPMDPTSP dan dari informasi pelaku usaha industri di Kota Payakumbuh, begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja untuk Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6.271 orang dibandingkan Tahun 2019 sebesar 6.106. Hal ini disebabkan adanya penambahan unit usaha industri maka agregat serapan tenaga kerja juga bertambah, sebagaimana dalam tabel II-144.

Tabel II-144
Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2021

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging	13	55
2	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	5	9
3	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	9	28
4	Industri minyak dari Kelapa	0	0
5	Industri susu	2	11
6	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	13	19
7	Industri ransum pakan ternak/ikan	0	0
8	Industri konsentrat pakan ternak	5	11
9	Industri roti dan sejenisnya	58	197
10	Industri makaroni, mie, spagheti, bihun, soun dan sejenisnya	5	37
11	Industri pengolahan teh dan kopi	15	29
12	Industri es (macam-macam es)	7	17
13	Industri tempe	3	10
14	Industri makanan dari kedelai dan kacangan-kacangan lainnya selain kacang dan tempe (Industri Tahu)	53	208
15	Industri kerupuk dan sejenisnya	399	1923
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	42	155
17	Industri kue basah	248	812
18	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	76	251
19	Industri minum ringan (Soft Drink)	5	24
20	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	33
21	Industri pengrajin kayu	9	33
22	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	1	4
23	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	12	32
24	Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan	114	186
25	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	3	7
26	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	2	2
27	Industri air minum dalam kemasan	64	152
28	Industri penggilingan padi	54	140
29	Industri percetakan	27	116
30	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4	6
31	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	5	11

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
32	Industri batu bata dari tanah liat	21	58
33	Industri kapur	3	5
34	Industri barang-barang dari semen	93	182
35	Industri barang dari untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	4
36	Industri furniture dari kayu	121	410
37	Industri pemintalan benang	0	0
38	Industri pertenunan	11	56
39	Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi	40	132
40	Industri bordir/sulaman	10	35
41	Industri kain rajut	11	61
42	Industri pakaian jadi dari tekstil	123	296
43	Industri furniture dari logam	18	44
44	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	18	28
45	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	0	0
46	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang	117	276
47	Industri alat pertanian dari logam	2	6
48	Industri alat pertukangan dari logam	1	4
49	Industri alat-alat dapur	6	19
50	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	0	0
51	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3
52	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	7
53	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	3	5
54	Industri penempatan pengepresan dan penggilingan logam	3	4
55	Industri mainan	0	0
56	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	21	61
57	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	11	32
58	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	2	5
59	Industri jasa reparasi jam	0	0
60	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (Mobil)	1	3
61	Industri bengkel/reparasi sepeda motor	4	10
62	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (Sepeda)	0	0
63	Industri jasa perorangan lainnya	2	7
64	Industri alat musik tradisional	0	0
Jumlah		**1902**	**6271**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2021

2.1.3.3. Unsur Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Daerah mempunyai indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, Nilai IKM, Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik, Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi, Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf,

Persentase lembaga keagamaan yang aktif. Capaian indikator ini selama periode tahun 2017 s.d 2021.

Tabel II-145
Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah

Indikator kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan	Nilai	-	-	-	-	11,72
Nilai LPPD	Nilai	-	-	-	-	3,1238
Nilai IKM	Nilai	-	-	-	86,48	90,90
Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	50	60	60	100	100
Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf	%	3	3,20	4,78	7,29	7,29
Persentase lembaga keagamaan yang aktif	%	20,00	20,00	60,00	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, dan Nilai IKM baru tersedia pada tahun 2021, karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menjalankan urusan pendukung, dengan indikator kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan, dan Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2017 s.d 2021 sebagai mana Tabel II-146.

Tabel II-146
Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Nilai	73,29	82,00	83,00	83,28	78,56
Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2017 s.d 2021	%	100	100,00	100,00	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

2.1.3.4. Unsur Penunjang

A. Perencanaan

Sesuai dengan sasaran strategis daerah pada RPJMD tahun 2017-2022, maka untuk urusan perencanaan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat, Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan Persentase indikator RPJMD yang tercapai. Capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat digambarkan pada tabel II-147.

Tabel II-147
Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	95,80	-	-	-	-
2.	Persentase Realisasi Rencana Pembangunan	%	99,35	-	-	-	-
3.	Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	31,23	33,08	33,11	17,14	17,14
4.	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	100	92,24	88,76	100	100
5.	Persentase indikator RPJMD yang tercapai	%	83,29	77,38	88,76	83,44	83,44
6.	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	80,00	85,71	90,91	84,62	84,62

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2021

Untuk mengukur capaian kinerja perencanaan, maka mulai tahun 2017 menggunakan indikator baru sesuai dengan yang ada dalam RPJMD tahun 2017-2022, indikator 1 dan 2 tidak digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga Bappeda tidak lagi melakukan pengukuran pada indikator ini. Dari data di atas, indikator Persentase Konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD sudah konsisten seluruhnya, sedangkan pagu belanja yang mengakomodir usulan masyarakat menurun disebabkan adanya prioritas pembangunan pada program skala besar seperti pengadaan tanah dan fasilitas umum perkotaan. Indikator Persentase indikator RPJMD yang tercapai hanya sebesar 83,44% ini disebabkan adanya dampak wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan dan anggarannya direfocusing untuk penanganan wabah.

B. Keuangan

Urusan Penunjang keuangan digawangi oleh Badan Keuangan Daerah, dengan 3 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BKD, yaitu Opini laporan keuangan pemerintah daerah, Penetapan Perda APBD tepat waktu, dan Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah

Tabel II-148
Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	22 Des	28 Des	27 Des	29 Des	22 Des
3.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	15,78	13,64	13,29	16,18	13,43

Sumber : BKD Kota Payakumbuh, 2021

Opini laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditargetkan paeda minggu keempat bulan Desember pada tahun sebelum tahun anggaran (n-1). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebesar 13,43% pada tahun 2021, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 karena dampak Covid-19.

C. Kepegawaian

1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Pada tahun 2021, Kota Payakumbuh hanya melaksanakan Diklat Pim III dan mengikutkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklat Struktural eselon III.

Tabel II-149
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2017 - 2021

No	Eselon	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Eselon II	orang	2	-	1	-	-
2.	Eselon III	orang	2	3	1	-	6
3.	Eselon IV	orang	-	30	-	-	-

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel terlihat bahwa jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 terdapat 6 orang yang mengikuti Diklat kepemimpinan Tingkat III (Pim III)

- Tanggal 1 Maret.d 17 Juni 2021, Diklat PIM III dilaksanakan di BPSDM Sumatera Barat sebanyak 5 orang.
- Tanggal 17 Mei s.d 9 September, Diklat PIM III dilaksanakan di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi sebanyak 1 orang

Tabel II-150
Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional TertentuTahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	143	139	20	193	67
2	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	orang	1.562	27	14	5	-

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2021

1. Diklat Teknis Perbendaharaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Februari 2021 di BPSDM Kemendagri Republik Indonesia diikuti sebanyak 6 orang.
2. Diklat Teknis Penyusunan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 5 Maret 2021 di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi diikuti sebanyak 5 orang.
3. Diklat Teknis Penyusunan SPM Bidang Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Maret 2021 di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi diikuti sebanyak 2 orang.
4. Diklat Teknis Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tingkat Dasar dilaksanakan pada tanggal 8 s.d18 November 2021 di BKPSDM Kota Payakumbuh diikuti sebanyak 40 orang.
5. Diklat Teknis City Planning dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d 3 September 2021 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan/Megister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM diikuti sebanyak 5 orang (Distance Learning).
6. Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah-RPJMD dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d 3 September 2021 oleh Pusbindiklatren Bappenas Republik Indonesia / Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu social dan Ilmu politik Universitas Gadjah Mada diikuti sebanyak 9 orang(Distance Learning).

2. Kedisiplinan Pegawai

Permasalahan kepegawaian di Kota Payakumbuh diidentifikasikan terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung. Pada tahun 2021 terdapat pelanggaran disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilakukan pemberian sanksi sebagaimana pada tabel II-151.
Pelanggaran disiplin PNS tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Pelanggaran Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban PNS.

Tabel II-151
Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasal 3 PP Nomor 53Tahun 2010	Orang	-	10	24	5	5
2.	Pasal 9 PP Nomor 53Tahun 2010	orang	-	-	-	-	-
3.	Pasal 4 PP Nomor 53Tahun 2010	orang	-	1	5	-	-
4.	Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 2010	orang	-	1	-	-	-
5.	Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010	orang	-	-	1	-	-

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2021

Untuk meningkatkan disiplin PNS ini, mulai tahun 2018 pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan Sistem Kinerja Pegawai Negeri (SKP *Online*) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM,dan mulai tahun 2019 meningkatkan sistem tersebut dengan Aplikasi Penilaian Kinerja dengan nama *E-Kinerja* yang menerapkan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja, aktifitas harian dan presensi kehadiran yang sudah *online* dan sinkron dengan sistem *Finger Print* (Sidik Jari) dalam absensi serta perhitungan sanksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.

Gambar II-12
Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kota Payakumbuh

Selain aplikasi E-Kinerja, Kota payakumbuh juga membuat aplikasi terintegrasi proses bisnis yang dimulai dari tahap perencanaan, pengeloaan keuangan pengendalian, pengawasan sampai dengan kepegawaian, yang diberi nama Sistem Informasi Kota Payakumbuh (SIKOPAY).

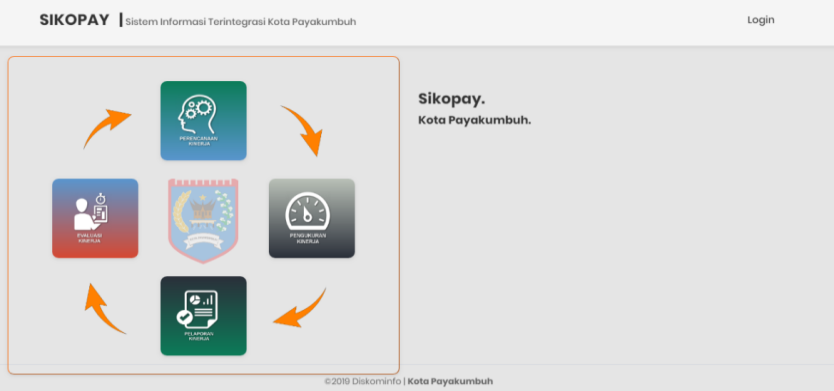

Gambar II-13
Aplikasi Sistim Informasi Kota Payakumbuh

D. Penelitian dan Pengembangan

Dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan semakin ditingkatkan baik kuantitas dan pendanaannya. Namun selama tahun 2021 anggaran kegiatan untuk penelitian dan pengembangan direfocusing untuk penanganan wabah Covid-19, sehingga di tahun 2021 tidak dilakukan kegiatan penelitian, hanya dilakukan diseminasi terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Payakumbuh, seperti UNAND dan Politani Tanjung Pati. Temanya disesuaikan dengan kondisi aktual, yaitu dampak wabah Covid-19 terhadap Payakumbuh.

Tabel II-152
Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh
Tahun 2017 - 2021

2017	2018	2019	2020	2021
3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 penelitian daerah berjumlah 3 dokumen yang melibatkan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 2 penelitian. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing 4 dokumen. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan penelitian. Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sudah diupayakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan melalui pemasyarakatan teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

2.1.3.5. Unsur Pengawasan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menilai pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan secara Nasional oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk Kota Payakumbuh penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2017 dan nilainya pada saat itu adalah sebesar 45 yang menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih rendah, karena target dari Kemenpan RB adalah 50, namun pada tahun 2017 nilainya sudah meningkat menjadi 59,63, tahun 2018 meningkat menjadi 61,69 dan tahun 2019 naik lagi menjadi 64,20 yang menandakan bahwa reformasi birokrasi sudah semakin baik. Untuk tahun 2021 kembali naik menjadi 68,42. Namun secara keseluruhan dengan pembinaan dan fasilitasi dari Kementerian PAN dan RB setiap tahun, pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah berjalan semakin baik. Di samping itu,

akuntabilitas kinerja pemerintahan juga semakin meningkat dengan diraihnya nilai "AA" atau kategori sangat memuaskan pada tahun 2021, Sesuai dengan Hasil Reviu Inspektorat Kota Payakumbuh LHP Nomor : 700/32.a/Insp-Pyk/2021 Tanggal 27 Mei 2021.

Tabel II-153
Data capaian TLHP Inspektorat tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah temuan	1.898.457.122,81	2.215.319.537,81	2.387.592.237,81	2.647.350.458,32	2.793.236.247,43
Temuan yang ditindaklanjuti	443.284.952,09	783.575.070,09	1.040.920.934,09	1.343.512.123,60	1.437.666.897,60
Temuan yang belum ditindaklanjuti	1.445.932.986,72	1.431.744.467,72	1.346.671.303,72	1.303.838.334,72	1.355.570.274,72
% Temuan yang ditindaklanjuti	23,35	48,30	47,51	48,17	51,47

Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2021

Untuk penindaklanjutan temuan laporan hasil pemeriksaan meningkat dari tahun ke tahun kecuali tahun 2019 yang turun dari 48,30 menjadi 47,51%. Pada tahun 2021, jumlah TLHP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 51,47%, ini membuktikan bahwa kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh mekin tahun makin meningkat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Payakumbuh, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Payakumbuh maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga, karena fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia.

Data berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017 - 2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pada tahun 2021, peningkatan konsumsi rumah tangga tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan karena dampak wabah Covid-19 yang sedikit menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kondisi ketidakpastian selama tahun 2021, membuat rumah tangga cenderung menahan konsumsi terutama untuk kebutuhan non pangan.

Tabel II-154
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Payakumbuh
Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	2.827,76	3.053,19	3.278,62	3.289,89	3.371,99
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	1.989,40	2.078,82	2.168,24	2.190,08	1.984,17
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	49,09	48,30	47,51	48,17	46,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)					
▪ ADHB	21.803,52	31.232,16	17.182,2	23.578,68	23.883,72
▪ ADHK 2010	15.091,91	15.555,91	16.019,92	15.690,54	15.495,08
Pertumbuhan	3,09	3,07	2,98	-2,06	-1,25
Jumlah penduduk (orang)	131.858	133.703	135.573	139.576	141.184

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Selama periode 2017 - 2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung menurun. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 49,09% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 47,51%. Tapi di tahun 2020 justru meningkat, ini disebabkan secara total PDRB mengalami penurunan karena dampak wabah Covid-19, namun dari sisi konsumsi rumah tangga tidak terjadi penurunan.

Sementara itu secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga/kapita dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan, ini disebabkan karena pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat cukup pesat setelah Sensus Penduduk tahun 2020. Jika dibandingkan tahun 2019, maka pertumbuhan konsumsi rata-rata per kapita turun sebesar -2,06% pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 kembali turun sebesar 1,25%. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya pengeluaran, yang secara tidak langsung juga menunjukkan penurunan pendapatan. Ini secara langsung diakibatkan oleh adanya wabah Covid-19.

Dilihat dari sisi konsumsi terhadap makanan dan non makanan, tergambar bahwa tingkat konsumsi non makanan mengalami kenaikan sejak tahun 2017-2019. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya pengeluaran masyarakat untuk memperoleh kebutuhan non makanan seperti perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa serta untuk rekreasi. Komposisi pengeluaran non makanan yang naik ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, karena sebagian besar pendapatan sudah dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan. Tapi di tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi non makanan dan peningkatan konsumsi makanan, ini diisebabkan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengalihkan pola konsumsi ke makanan, terutama adanya ketidakpastian terhadap perekonomian nasional. Untuk lebih jelasnya tergambar pada tabel II-155.

Tabel II-155
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga (%)					
• Makanan	50,80	48,17	39,82	45,88	48,586
• Non Makanan	49,20	51,83	60,18	54,12	51,414
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Statistik Kesra Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-156
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga perkapita (%)					
• Makanan	50,81	50,87	51,30	45,88	47,27
• Non Makanan	49,19	49,13	48,70	54,12	52,72
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2021

Untuk pengeluaran perkapita terjadi tren penurunan untuk makanan dan meningkat untuk non makanan, diperkirakan ini terjadi akibat dari pengaruh pandemi covid-19 yang melanda, sehingga belanja masyarakat mengalami pegeseran untuk penyediaan obat-obatan yang makin meningkat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena mulai adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel II-157.

Tabel II-157
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Realisasi RTRW (ha)	6.321,80	6.345,93	6.372,52	6.400,72	6.431,97
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
	Rasio (1/2)	**78,60**	**78,90**	**79,23**	**79,58**	**79,97**

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2021

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak mengalami perubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada tabel II-158.

Tabel II-158
Rasio Luas Wilayah Produktif Kota PayakumbuhTahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*)
1.	Luas Wilayah produktif	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**	**0,94**

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2020
*) Angka sementara

c. Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industri dibandingkan dengan luas wilayah budi daya. Sama halnya dengan luas wilayah produktif di atas, rasio luas wilayah industri dari tahun 2017 sampai tahun 2021 juga tidak mengalami perubahan, karena perkembangan wilayah industri skala menengah dan besar di Kota Payakumbuh tidak signifikan, sedangkan yang ada hanyalah industri rumah tangga atau berbentuk UMKM, dapat dilihat pada tabel II-159.

Tabel II-159
Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2017 - 2021 Kota Payakumbuh

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*)
1.	Luas Wilayah industri	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2020
*) Angka sementara

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, dan akan mempengaruhi iklim investasi suatu daerah. Pembangunan di daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus narkoba dsb.

Tabel II-160
Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Kriminal	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus Narkoba	43	59	46	177	45
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	5	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	4	5	2	2	46
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	155	175	102	42	8
5.	Jumlah kasus Pencurian	311	352	427	62	117
6.	Jumlah kasus Penipuan	125	181	45	6	28
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	2	2
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	640	773	775	296	456
9.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
10.	**Angka Kriminalitas (8)/(9)**	**4,86**	**5,78**	**5,72**	**2,12**	**3,23**

Sumber : Polres Kota Payakumbuh, 2021

Dari tabel di atas, angka kriminalitas di Kota Payakumbuh relatif rendah, dimana pada tahun 2019 angka kriminalitas adalah 5,72 angka ini turun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,72. Sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka kriminalitas, yaitu hanya 2,12, artinya dari 10.000 penduduk terjadi kriminalitas sebanyak 21 kasus, kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,23.

Tabel II-161
Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tindak Pelanggaran Perda	kasus	773	435	229	942	11.188
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184
	Rasio Pelanggaran Perda per 10.000 Penduduk	**%**	**58,64**	**32,53**	**16,89**	**67,49**	**792,48**

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Pelanggaran Perda Pekat sebanyak 107 kasus, dan selain Perda Pekat berjumlah 11.081 yang merupakan pelanggaran Perda No 06 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease sebanyak 10.986 Kasus dan 95 kasus merupakan Peraturan daerah tentang Lem dan Ketertiban Umum.

Tabel II-162
Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pos Siskamling	Unit	48	48	94	94	94
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	131.819	133.703	135.573	139.576	141,184
	Rasio Pos Siskamling per 10.000 Penduduk	**%**	**3,6**	**3,5**	**6,7**	**6,7**	**6,6**

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2021

Pada dasarnya, angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh.

b. Jumlah Demonstrasi

Kota Payakumbuh adalah kota yang relatif aman, selama tahun 2020 tidak ada gejolak sosial kemasyarakatan yang mengganggu aktifitas pembangunan dan investasi. Ini menandakan bahwa masyarakatnya sudah makmur dan sejahtera, sehingga tidak perlu menyampaikan aspirasinya dengan demonstrasi menuntut hal-hal yang tidak menyentuh

rasa keadilan masyarakat. Walaupun ada tuntutan aspirasi yang disampaikan terhadap ketidakpuasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, itu disampaikan hanya dengan pawai atau mekanisme langsung dengan tatap muka dengan pemerintah Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Perijinan dan Pelayanan untuk Investasi

Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam proses perizinan dan pelayanan publik dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh di lantai 1 Balaikota Jalan Veteran Payakumbuh, yang telah dibuka mulai bulan Oktober tahun 2019 dan sampai tahun 2020 telah melayani sebanyak 161 jenis perijinan dan sampai sekarang telah berjalan dengan baik bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian PAN dan RB.

Dengan beroperainya MPP ini diharapkan dapat mempermudah proses perijinan investasi dalam negeri dan asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. ini berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dan ditempatkan dalam satu lokasi yaitu MPP. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Lama proses pelayanan perizinan disederhanakan sesuai dengan jenis perijinan dan diberikan, yaitu berkisar antara 1 s/d 14 hari kerja dengan layanan gratis dan berbiaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2021 ini meliputi ; Pajak sebanyak 10 macam dan retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu Retribusi jasa umum 8 macam, Retribusi Jasa usaha 8 macam dan retribusi perizinan tertentu satu macam, sebagaimana tertera pada tabel II-163.

Tabel II-163
Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2021

No	Pajak/Retribusi
I.	**Pajak**
1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Restoran
3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Penerangan Jalan
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Parkir
8.	Pajak Air Tanah
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
II.	**Retribusi**
	Retribusi Jasa Umum
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.	Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

No	Pajak/Retribusi
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.	Retribusi Pelayanan Pasar
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Retribusi Jasa Usaha
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3.	Retribusi Tempat Pelelangan
4.	Retribusi Terminal
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sumber : Badan keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh, 2021

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Payakumbuh terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Untuk Kota Payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dari tabel II-164.

Tabel II-164
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2017 - 2021

Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*)
≤SD	16. 200	16. 586	11. 418	12.253	12.047
SMTP	12. 489	11. 303	10. 419	9.144	10.644
SMTA Umum	14. 478	15. 243	15. 081	15.758	15.892
SMTA Kejuruan	10. 313	9. 918	13. 670	15.242	16.656
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	3. 125	3. 965	5. 103	5.311	5.475
UNIVERSITAS	10. 314	10. 068	10. 201	12.130	13.589
JUMLAH	**66.919**	**67. 083**	**65. 892**	**69.808**	**74.303**

Sumber : Buku Angkatan Kerja kota Payakumbuh (BPS), 2020
*) Angka perkiraan/sementara

Dari tabel II-164 terlihat bahwa proyeksi pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, demikian pula kualitas angkatan kerja untuk lulusan Universitas dan Diploma juga naik. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 2021 jumlah lulusan perguruan tinggi lebih besar dibandingkan tahun 2020. Dari perbandingan masing-masing jenjang pendidikan tersebut kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang secara umum menandakan bahwa kualitas angkatan kerja di Kota Payakumbuh relatif masih rendah. Untuk mengatasi kondisi ini, terus digalakkan pendidikan keterampilan, sehingga daya saing angkatan kerja dapat ditingkatkan.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tabel II-165
Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	38.555	38.811	39.354	36.595	36.479
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7.630	7.991	8.103	8.876	9.360
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	46.185	46.802	47.457	45.471	45.839
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	85.634	86.901	88.116	94.105	95.345
5.	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	53,93	53,85	53,86	48,32	48,08
6.	Rasio Ketergantungan muda (1/4)	45,02	44,66	44,66	38,89	38,26
7.	Rasio ketergantungan tua (2/4)	8,91	9,20	9,20	9,43	9,82
8.	Jumlah Penduduk	131.819	133.703	135.573	139.576	141.184

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2017 – 2021

Rasio ketergantungan terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 53,93. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 45,02 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,91. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh

masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Namun kondisi ini terus menurun sampai tahun 2021, bahkan tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan, dimana tingkat ketergantungan total hanya 48,08. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 48,08 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 38,26 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,82. Sekitar 67,53% dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2021 adalah penduduk usia produktif, sedangkan sisanya merupakan jumlah usia tidak produktif yang otomatis menjadi beban ketergantungan. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk, rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.1.5. Gambaran Wabah Covid-19 di Kota Payakumbuh

Sejak awal tahun 2020 ini, wabah Covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara-negara di dunia akhirnya juga menimpa Indonesia. Provinsi Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh tidak dapat menghindar dari wabah tersebut. Jika dilihat trend perkembangan kasus yang menimpa penduduk dari awal bulan April sampai September 2020 cenderung semakin meningkat.

Sampai akhir tahun 2020 ini kasus yang terkonfirmasi positif di Kota Payakumbuh berjumlah 592 orang, meninggal 10 orang dan yang sembuh 582 orang, sedangkan sisanya masih menjalani perawatan baik secara mandiri maupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah serta dirawat pada beberapa Rumah Sakit Rujukan Covid.

Dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 10.415 orang ditemukan kasus positif sebanyak 592 orang, jadi secara keseluruhan tingkat positif rate kasus Covid-19 di Kota Payakumbuh sebesar 5,68%. Pada tahun 2020 ini juga terjadi 9 (sembilan) kasus meninggal dari pasien yang terkonfirmasi positif di Kota Payakumbuh, Pasien covid yang meninggal dikarenakan faktor komorbid (penyakit penyerta) yang sudah diderita oleh pasien tersebut . Di samping itu, jumlah pasien terkonfirmasi positif yang sembuh mencapai 582 orang atau sebesar 98,31%. Ini tidak lain karena penanganan yang cukup baik terhadap semua kasus yang terkonfirmasi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 menjadi 2.146 terindikasi positif, dengan jumlah kesembuhan 2.102 kasus, sementara yang meninggal sebanyak 44 orang.

Untuk lebih lengkapnya sebagaimana tergambar pada Tabel II-166.

Tabel II-166
Data Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh 2020 -2021

No	Uraian	Tahun		Jumlah
		2020 (orang)	2021 (orang)	
1	Spesimen	9.888	10.968	20.856
2	Positif	592	2.146	2.738
3	Sembuh	582	2.102	2.685
4	Meninggal	9	44	53

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2021

Sementara itu, jika dilihat dari karakteristik kasus pada pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 592 orang tersebut, perempuan sebanyak 298 orang dan 294 orang laki-laki, ini cukup menandakan bahwa semua jenis kelamin rentan terhadap wabah ini. Rata-rata lama perawatan yang dilakukan terhadap kasus positif ini adalah 19 hari, dimana perawatan yang paling lama adalah 49 hari dan terpendek adalah 9 hari saja. Sedangkan yang menderita penyakit bawaan berjumlah 105 orang. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana tergambar pada Tabel II-167.

Tabel II-167
Karakteristik Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Karakteristik Kasus Konfirmasi Positif Covid	Jumlah
1	Jumlah Kasus Konfirmasi	2.738 orang
2	Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-laki - Perempuan	 1.188 orang 1.550 orang
3	Perawatan Terpanjang	47 hari
4	Perawatan Terpendek	5 hari
5	Comorbid	281 orang
6	Klinis	1.405 orang
7	Rata-rata Lama Rawat	15 hari

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2021

Secara keseluruhan dari kasus kematian yang ditimbulkan oleh wabah covid-19 ini dari 2.146 orang yang terkonfirmasi positif dan meninggal 44 orang (2,05%) ini menandakan penanganan yang cukup baik dari pemerintah dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap wabah ini.

Namun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar, dimana terjadinya halangan bagi masyarakat untuk berkumpul untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga mengakibatkan sekolah diliburkan dan dilakukan secara online, aktifitas perekonomian masyarakat menurun serta menimbulkan tersedotnya perhatian semua pihak terutama pemerintah kepada wabah ini. Pemerintah terpaksa melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, dengan beberapa kebijakan yang diambil antara lain, meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan, melakukan langkah-langkah mitigasi, penanganan dampak sosial, ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Di samping itu, dampak global akibat wabah Covid-19 ini juga menyebabkan anjloknya capaian makro ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai level minus (-1,66%) pada tahun 2020 yang belum pernah terjadi dalam sejarah Kota Payakumbuh selama ini, namun pada tahun 2021, perekonomian mulai bergerak naik, walaupun kasus Covid-19 masih meningkat, karena masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kebijakan *new normal.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kota Payakumbuh harus menggenjot upaya peningkatan makro ekonominya dengan mempertimbangkan kondisi lokal, regional dan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari merebaknya kasus Covid-19, maka pada tahun 2021 dimulai pelaksanaan pemberian vaksin secara bertahap, dengan sasaran kepada 3 (tiga) kategori penduduk berdasarkan usia. Hingga akhir Februari 2022, vaksinasi Covid telah mencapai

105.279 sasaran untuk vaksin 1, atau sekitar 95,65%, vaksin 2 sebanyak 81.233 sasaran atau sekitar 73,80%, dan vaksin ketiga sebanyak 15.217 sasaran, atau sekitar 13,82%.

Tabel II-168
Jumlah Penerima Vaksin Covid Kota Payakumbuh (Kondisi Februari 2022)

No	Karakteristik Penerima vaksin Covid	Total Sasaran	Vaksin 1	Vaksin 2	Vaksin 3
1	Dewasa (12 – 60 tahun)	98.273	86.747	72.240	13.943
2	Orang tua (diatas 60 tahun)	11.793	12.220	8.973	1.274
3	Anak-anak (6 – 11 tahun)	-	6.312	20	0
Total		110.066	105.279	81.233	15.217

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2021

2.1.6. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Evaluasi capaian kinerja untuk perubahan RPJMD ini menggunakan model evaluasi Form E.58 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena kita perlu menampilkan evaluasi tahunan mulai dari target, realisasi dan tingkat capaian. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Tabel II-169
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Tahun 2017-2021 RPJMD Kota Payakumbuh

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	82	42	70	74	77		66	70	75			157,14	100,00	101,35	-	-	91,46
		Rata-rata lama sekolah	*10,90*				*10,79*	*10,85*				*10,73*	*10,81*				*99,44*	*99,63*	*99,17*
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	74,50	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	73,13	73,33	73,61	73,74	73,84	99,99	99,90	100,01	99,78	99,38	*99,11*
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	61,70	61,76	61,80	61,86	62,35	61,99	61,99	62,30	67,81	67,81	100,47	100,37	100,81	109,62	107,04	*108,50*
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,00	6,2	5,93	5,66	5,54	5,41	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16	105,44	102,77	100,35	98,05	87,82	*81,17*
		Tingkat Pengangguran	5,80	7,07	6,77	6,62	5,90	5,83	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47	204,93	179,10	161,07	88,32	90,11	*89,64*
5	Meningkatnya prestasi Atlet	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	20	4	7	11	-	-	9	14	20	-	-	225,00	200,00	181,82	-	-	*100*
6	Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,17	23,92	23,97	24,02	24,07	24,12	24,48	25,15	25,13	24,53	24,01	102,34	104,92	104,62	101,91	99,54	*99.38*
		Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	6,12	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	5,26	5,13	4,80	4,86	5,9	87,96	85,50	79,73	79,93	96,56	*96,41*
		Kontribusi Sektor Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,47	7,39	7,42	7,44	7,45	7,46	7,04	6,75	6,35	6,43	6,09	95,26	90,97	85,34	86,31	81,63	*81,53*
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	7,50	1,2	5,00	5,10	5,50	6,70	10,80	11,28	5,11	-83,05	38,154	900,00	225,60	100,20	-1510	569,46	*508,72*
7	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	202,00	195	195,00	196,90	74,4	200,9	229,3	231,5	236,6	178,3	417,24	117,59	118,72	120,16	239,65	207,69	*206,55*
		Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	29,70	27,14	27,64	28,15	1,50	2,00	27,14	15,27	15,49	13,68	14,19	100,00	55,25	55,02	912	709,5	47,78
8	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	18,30	10,26	10,00	12,15	-	-	2,18	3,77	9,01	-	-	21,25	37,70	74,12	-	-	49.23
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	Persentase pelayanan air minum	100,00	94,41	96,71	98,80	99,02	99,67	94,41	98,84	99,12	96,84	99,76	100,00	102,20	100,32	97,80	100,09	99,76
		Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	80,31	66,56	69,31	72,06	75,90	75,56	67,22	69,21	72,25	75,90	83,12	100,99	99,86	100,26	100	110,005	103,50
		Persentase Sistem drainase skala kota	50,44	42,17	44,46	47,93	60,39	62,91	47,44	51,74	58,95	59,70	61,54	112,50	116,37	124,39	98,86	97,82	122,01
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,10	78,60	78,90	79,20	79,50	79,80	78,60	78,90	79,23	79,58	79,97	100,00	100,00	100,04	100,10	100,21	99,84
		Persentase daerah irigasi berkinerja baik	86,58	73,43	76,34	79,10	-	-	73,45	77,73	80,20	-	-	100,03	105,83	101,39	-	-	92,63
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	94,44	72,22	77,78	83,33	69,84	66,67	66,67	66,67	67,98	69,84	70,87	92,32	85,72	81,58	100	106,30	75,04
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,00	56,5	57,00	57,25	57,50	57,75	56,5	58,96	59,66	57,68	58,59	100,00	103,44	104,21	100,31	101,45	101,02
11	Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	Persentase luas kawasan kumuh	1,17	1,77	1,77	1,62	1,34	0,82	1,60	0,59	0,84	0,77	0,46	90,40	33,33	192,86	174,03	178,26	254,35
0,0012	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	BB	BB *)	100,00	100,00	100,00	95	95	95,00
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
		Persentase Perangkat Daerah terintegrasi Teknologi Informasi	100,00	9,68	29,03	45,16	-	-	9,68	29,03	45,16	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00
		Indeks SPBE	3,00				2,70	2,80				2,89	2,89				107,04	103,21	96,33
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,85	79,35	79,85	80,35	-	-	79,35	80,90	81,66	-	-	100,00	101,31	101,63	-	-	99,76
		Indeks Reformasi Birokrasi	70,00	45	50,00	55,00	-	-	56,83	67,41	71,66	-	-	126,29	134,82	130,29	-	-	102,37
		Indeks Pelayanan Publik	*4,51*				*4,00*	*4,20*				*4,29*	*4,24*				107,25	100,95	94,01
13	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	51,06	5,81	21,28	28,72	36,17	47,62	5,81	22,00	47,62	75,49	75,49*)	100,00	103,38	165,81	208,71	158,53	147,85
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan	5,00	3,0	3,40	3,80	4,20	4,60	3,5	3,00	4,78	7,29	7,29*)	116,67	88,24	125,79	173,57	158,48	145,80

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf																	
14	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	100,00	61,29	30,00	40,00	-	-	62	15,00	60,00		-	101,16	50,00	150,00		-	60
		Persentase lembaga adat yang aktif	100,00	80,00	90,00	95,00	-	-	80	90,00	100,00			100,00	100,00	105,26			100
		Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya	*100,00*				*100,00*	*100,00*				*100*	*81,82*				*100*	*81,82*	81,82

Berdasarkan Tabel II-169, indikator kinerja utama pada dokumen perubahan rencana jangka menengah daerah 2017-2022, terdapat 25 indikator. Jika dibandingkan realisasi capaian tahun 2021 dengan target yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan pada tahun 2017, terdapat 19 indikator dengan predikat kinerja sangat tinggi atau pencapaian di atas 91%, 4 indikator dengan predikat tinggi atau pencapaian kinerja antara 76 % sampai 91%, 1 indikator pencapaian 75,04% dengan predikat sedang, dan 1 indikator berpredikat sangat rendah karena pencapaian hanya 47,78%. Berikut rincian capaian indikator sesuai predikat kinerja :

1. Predikat sangat tinggi, mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, yaitu :
   - Rata-rata lama sekolah
   - Angka Usia Harapan Hidup
   - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
   - Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
   - Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB
   - Persentase peningkatan kunjungan wisata
   - Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)
   - Persentase pelayanan air minum
   - Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap
   - Persentase Sistem drainase skala kota
   - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
   - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
   - Persentase luas kawasan kumuh
   - Nilai Evaluasi AKIP Kota
   - Opini BPK
   - Indeks SPBE
   - Indeks Pelayanan Publik
   - Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik
   - Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf.

   Diantara 20 indikator di atas, terdapat beberapa indikator yang jauh melebihi target, sekitar 200% sampai dengan 500%, yaitu Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) dan Persentase Luas Kawasan Kumuh, masing-masing sebesar 206,55% dan 254,35%. Untuk indikator persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 508,72%, karena terjadi peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 yang sangat signifikan, disebabkan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami pengurangan pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. Sehingga capaian untuk indikator peningkatan kunjungan wisata pada tahun 2021 sebesar 38,154%, sementara target di awal tahun perencanaan jangka menengah sebesar 7,50%.

2. Predikat tinggi, mencakup 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu :
   - Tingkat Kemiskinan
   - Tingkat Pengangguran
   - Kontribusi Sektor Sektor Pertanian terhadap PDRB

- Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya

3. Predikat sedang pada 1 (satu), yaitu persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan sebesar 75,04 %. Capaian kinerja berkategori sedang karena target yang ditetapkan pada awal periode sebesar 94,44%, hal ini di dasari dengan kondisi pada awal perencanaan pada angka sekitar 70%, jika diproyeksikan naik, target akan tercapai. Namun karena beberapa faktor, capaian pada akhir tahun 2021 hanya sebesar 70,87%.

Predikat sangat rendah pada indikator persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM, dimana capaian kinerja hanya sebesar 47,78%. Pencapaian sangat rendah karena target pada awal periode perencanaan tahun 2017 sebesar 29,70%, sementara capaian di akhir tahun 2021 hanya sebesar 14,19%. Penetapan target sebesar 29,70% di awal, didasari kondisi pada awal tahun perencanaan capaian sudah sekitar 27%, jika diproyeksikan untuk lima tahun ke depan, target yang ditetapkan diharapkan dapat dicapai, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah usaha kecil, sehingga terjadi penurunan capaian kinerja. Dan efek pandemi pada tahun 2020 dan 2021 yang juga berdampak pada jumlah usaha kecil menengah.

Tabel II-170
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan Tahun 2017-2021 RPJMD Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat																		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,38	6,11	6,14	6,20	1,18	4,18	6,12	6,05	5,92	-1,66	3.58	100,16	98,53	95,48	-140,68	85.65	56.11
2	Laju Inflasi	%	2,85	4,17	4,97	4,44	3,91	3,38	2,11	2,55	1,72	2,12	1,69	197,63	194,90	258,14	184,43	200	168,64
3	PDRB Perkapita	*juta rupiah*	47,89	40,11	41,93	43,87	50,25	51,63	41,19	47,10	50,37	49,28	51,6	102,69	112,33	114,82	98,07	99,94	107,75
4	Nilai Koefisien Gini	Nilai	0,300	0,303	0,302	0,301	0,300	0,300	0,303	0,303	0,280	0,325	0,316	100,00	99,67	107,50	92,31	105,33	94,94
5	Tingkat kemiskinan	%	5,00	6,20	5,93	5,66	5,54	5,41	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16	105,44	102,77	99,65	98,05	87,82	81,17
6	Tingkat Pengangguran	%	5,80	6,92	6,77	6,62	5,90	5,83	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47	200,58	179,10	161,07	88,32	90,11	89,64
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	79,63	77,90	78,25	78,60	79,33	80,13	77,97	78,23	78,95	78,90	79,08	100,09	99,97	100,45	99,46	98,69	99,31
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,90	10,40	10,50	10,60	10,79	10,85	10,42	10,50	10,72	10,73	10,81	100,19	100,00	101,13	99,44	99,63	99,17
9	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,77	14,31	14,40	14,49	14,58	14,67	14,25	14,24	14,25	14,26	14,27	99,58	98,89	98,34	97,81	97,27	96,61
10	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,50	73,14	73,40	73,60	73,90	74,30	73,23	73,33	73,61	73,74	73,84	100,12	99,90	100,01	99,78	99,38	99,11
	Aspek Pelayanan Umum																		
	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar																		
a.	**Urusan Pendidikan**																		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)																		
-	APK PAUD	%	76,30	75,00	75,50	75,70	75,90	76,10	62,61	82,81	81,49	76,28	44,63	83,48	109,68	107,65	100,50	58,65	58,49
-	APK SD/MI/Paket A	%	132,75	114,31	121,66	125,05	127,50	130,10	124,20	120,75	122,53	120,57	112,39	108,65	99,25	97,98	94,56	86,39	84,66
-	APK SMP/MTs/Paket B	%	162,10	141,05	156,98	158,10	160,08	161,15	159,67	160,33	165,51	166,82	84,01	113,20	102,13	104,69	104,21	52,13	51,82
2	Angka Partisipasi Murni																		
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	113,80	100,88	108,39	109,75	110,50	112,05	110,65	108,07	110,16	108,07	100	109,68	99,70	100,37	97,80	89,25	87,87
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	124,15	109,94	119,30	120,15	121,30	122,10	121,32	122,83	125,30	126,76	72,96	110,35	102,96	104,29	104,50	59,75	58,77
-	Jumlah prestasi siswa tingkat provinsi	Prestasi	109	15	15	16	16	17	27	15	30	17	27	113,33	100,00	187,50	106,25	158,83	24,77
-	Jumlah prestasi siswa tingkat nasional	Prestasi	18	2	2	2	3	3	7	0	4	6	5	100,00	0,00	200,00	200	166,67	27,78
-	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	Sekolah	82	67	70	74	77	80	70	70	75	75	74	104,48	100,00	101,35	97,40	92,5	90,24
-	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	%	51,06				36,17	47,62	13,83	22	47,62	75,49	75,49*)				208,7	158,53	147,85
-	Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi	Sekolah	12	4	5	7	-	-	54	4	9	-	-	1350,00	80,00	128,57	-	-	75
-	Jumlah PAUD terakreditasi A	sekolah	12				9	11				9	9*)				100	81,82	75,00
-	Jumlah Dikmas yang terakreditasi B	lembaga	4				2	3				2	3*)				100	100	75,00
-	Angka kelulusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	100	100	100	100	99,91	100,00	100,00	100	100	100,00
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD	Nilai	7,90	7,60	7,65	7,70	-	-	7,60	7,43	7,29	-	-	100,00	97,12	94,68	-	-	92,28
-	*Persentase pencapaian KKM SD pada satuan pendidikan*	*Persen*	*94*	-	-	-	*90*	*92*				*90*	*100*				*100*	*108,70*	106,38
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Nilai	6,51	5,75	5,80	5,85	5,90	-	5,75	5,95	5,81	8,23	-	100,00	102,59	99,32	139,49	-	126,42
-	*Persentase pencapaian KKM*	*Persen*	6,10	-	-	-	-	6,00					5,9*)					98,33	96,72

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
	SMP pada satuan pendidikan																		
b.	**Urusan Kesehatan**																		
1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	23	27	27	26	25	24	13	16	10	20	7	207,69	168,75	260,00	125	342,86	328,57
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	jumlah	3	3	3	3	3	3	3	1	0	2	0	100,00	300,00	400,00	150	300	300,00
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	<3	<3	<3	<3	<3	0,07	0,08	0,1	0,2	<2	100,00	100,00	100,00	100	100	100
4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<8	<13	<12	<11	<10	<9	3	0	1	6	<2	100,00	100,00	100,00	100	100	100
5	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Menular berpotensi KLB	%	100	100	100	100	100	100	100	97,2	100	100	100	100,00	97,20	100,00	100	100	100
6	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	%	100	100	100	100	100	100	100	91,1	100	100	100	100,00	91,10	100,00	100	100	100
7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	95,00	85,00	87,00	89,00	100	94	85,12	85,56	97,29	100	100	100,14	98,34	109,31	100	106,38	105,26
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
9	Persentase Kelurahan STBM	%	95	87	87	90	100	93	92,68	95,74	100,00	100	100	106,53	110,05	111,11	100	107,53	105,26
10	Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	87	77	77	80	82	85	75,46	76,39	78,40	82	73,78	98,00	99,21	98,00	100	86,8	84,80
11	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	93	80	80	85	87	90	82,77	85,46	100	87	95	103,46	106,83	117,65	100	105,56	102,15
12	Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	80	60	60	65	70	75	62,5	75,5	65	75	90,8	104,17	125,83	100,00	107,14	121,07	113,50
13	Cakupan Usia Produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100				100	100			100		81,4				100	81,4	81,40
14	Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	100				100	100				100	58,22				100	58,22	58,22
c.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																		
1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	94,89	91,61	92,30	92,97	-	-	94,41	96,73	96,37	-	-	103,06	104,80	103,66	-		101,56
	Persentase Pelayanan Air Minum	%					99,02	99,67	95,46	96,73	97,84	96,84	99,76				97,90	100,09	99,76
2	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	86,58	76,34	76,34	79,10	81,72	84,21	76,77	77,96	80,60	82,08	84,40	100,56	102,12	101,90	100,44	100,23	97,48
3	Persentase Penataan sungai	%	26,37	18,56	18,56	21,69	23,52	24,81	72,40	18,56	23,38	23,52	24,83	390,09	100,00	107,79	100	100,08	94,16
4	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	%	80,31	66.56	69,31	72,06	75,90	75,56	66,56	69,21	72,25	75,90	83,12	100,00	99,86	100,26	100	110,005	103,50
5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	50,44	44,46	44,46	45,95	-	-	47,44	54,74	58,95		-	106,70	123,12	128,29			116,87
	Persentase sistem drainase skala kota	%	64,40				60,39	62,91	47,44	51,74	58,95	59,70	61,54				98,86	97,82	95,56
6	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	34,18	31,32	31,32	32,02	34,07	35,05	31,36	31,43	33,75	34,07	35,33	100,13	100,35	105,40	100	100,80	103,36
	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	%	71,98				69,84	71,39	66,67	66,67	68,00	69,84	70,87				100	106,30	98,46
d.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**																		
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,27	91,70	92,95	93,81	94,87	95,74	91,90	92,98	94,22	95,26	95,85	100,21	100,03	100,44	100,65	100,11	99,55
	Persentase pengurangan Backlog	%	2,06	NA	2,04	3,04	-	-	-	2,32	4,80	-	-	-	113,73	157,89	-		233,01
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	98,18	88,20	89,71	91,22	92,74	96,97	89,64	91,33	93,09	95,24	96,92	101,63	101,80	102,04	102,69	99,94	99,43

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
	Luas pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,30	5,80	5,70	5,60	-	-	5,80	11,29	19,70	-	-	100,00	198,07	351,79	-		371,69
3	Persentase luas pemukiman kumuh	%	0,30	2,89	2,37	1,86	1,34	0,82	2,59	1,88	1,64	0,77	0,46	89,62	79,32	88,17	174,03	178,26	65,22
4	Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang	%	18,62	0,00	0,00	1,96	3,92	16,66	0	0	14,70	14,70	20,59	-	-	750	100,65	123,59	110,58
e.	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**																		
1	Penegakkan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	13,00	8,00	8,00	8,00	13,00	13,00	8,00	8,00	9,8	13,89	11,47	109,00	115,00	122,50	106,65	88,23	88,23
3	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	Rasio	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	42,00	39,81	56,25	39,67	48	82,98	81,81	120,79	82,65	100	100,00
4	Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	Unit	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
5	Persentase cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	124,33	124,33	129	131	124,33	124,33	124,33	129	131	100,00	100,00	100,00	103,76	100	105,36
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,91	40,35	40,91	40,91	40,91	89,79	55,77	84,64	85,71	85,71	89,36	159,70	206,84	209,51	202,18	99,52	218,43
f.	**Penanggulangan Bencana Daerah**																		
1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	100	16,24	17,34	17,34	18,36	74,47	18,00	17,34	74,47	18,36	14,89	110,83	100	429,47	100	19,99	14,89
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
3	Persentase kelurahan yang difasilitasi kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana, dan kajian renkontjensi	%	100	0	0	0	0	100				-	-					-	-
4	Persentase pemulihan lokasi/objek kejadian pasca bencana	%	100	0	0	0	0	100				-	-					-	-
5	Persentase warga Kota Payakumbuhyang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	100	0	0	0	0	100				-	100					100	100,00
g.	**Urusan Sosial**																		
1	Tingkat Kemiskinan	%	5,27	6,20	5,93	5,66	5,54	5,41	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16	105,44	102,77	99,65	98,05	87,82	85,55
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	1,00	0,20	0,20	0,40	0,60	0,80	0,53	1,95	7,93	13,81	0,0	265,00	975,00	1982,50	2301,67	0.00	0,00
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	70,00	44,00	48,00	50,00	60,00	65,00	45,55	92,57	66,66	100	100	103,52	192,85	133,32	166,67	165,85	142,86
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100,00	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	98,00	101,64	98,85	125,38	100	98,49	102,05	99,15	125,63	100,1	100,00
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																		
a.	**Urusan Ketenagakerjaan**																		
1	Tingkat Pengangguran	%	5,80	6,92	6,77	6,62	5,90	5,83	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47	200,58	180,53	161,07	88,32	90,11	89,64
	Tingkat Partisipasi Angatan Kerja (TPAK)	%	71,50	35,68	43,68	51,00	-	-	70,62	43,87	68,06			197,93	100,43	133,45			95,19

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
2	Persentase penempatan tenaga kerja formal	%	40,00	-	-	-	33,00	40,00				65,52	41,29				198,54	103,23	103,23
3	Persentase penyerapan tenaga kerja informal	%	47,00	-	-	-	33,00	40,00				43,89	41,94				133	104,85	89,23
b.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**																		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,57	98,52	98,52	98,52	98,55	98,56	98,53	98,54	98,54	98,51	98,51	100,00	100,01	100,02	99,96	99,94	99,94
2	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	-	Utama	-	Utama	-	-	Utama	-	-	Utama	-	100,00	-	-	100	100
3	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Pratama	-	Madya	-	Madya	Pratama	-	Madya	-	Madya	100,00	100,00	100,00	-	100	100
4	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	Jumlah	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
5	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	%	100	95	95	95	100	100	95	100	100	100	100	100,00	105,26	105,26	100	100	100,00
6	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	%	16,00	8,00	8,00	12,00	16,00	16,00	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	66,67	100	100	100,00
7	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,026	0,07	0,061	0,052	0,040	0,035	0,040	0,0385	0,054	0,056	0,056	100,00	158,44	135,06	71,43	72,92	54,17
8	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0,04	0,10	0,092	0,074	0,06	0,055	0,05	0,0395	0,018	0,041	0,026	100,00	232,91	187,34	146,34	203,70	148,15
c.	**Urusan Pangan**																		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	96,50	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	81,49	84,31	87,64	88,05	*)	101,86	101,58	101,91	100,06		90,82
2	Skor PPH Konsumsi	skor	93,00	NA	80,50	82,00	83,00	84,00	80,5	84,01	82	83,07	84,20	100,00	100,00	100,00	100,08	100,24	88,17
3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	Tinggi	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	100,00	100,00	100,00	100	100	90,00
4	Stabilisasi harga																		
	a. Beras	%	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	3,18	1,74	3,13	1,53	1,78	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
	b. Cabe	%	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	28,87	13,62	22,80	16,76	18,85	86,60	183,55	109,65	100	100	100,00
	c. Bawang	%	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤25	11	15,83	17,25	12,08	11,08	90,91	63,17	57,97	83,33	100	57,97
5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	77,55	78,25	79,00	79	79	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
d.	**Urusan Pertanahan**																		
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	63,64	56,82	58,18	59,55	15,56	16,40	11,75	12,59	14,29	15,56	16,83	101,41	100,21	99,87	100	102,62	26,45
e.	**Urusan Lingkungan Hidup**																		
1	Persentase RTH Publik	%	17,00	15,45	15,91	16,25	16,50	16,75	15,45	0,96	14,87	14,87	14,87	135,92	144,50	141,48	90,12	88,78	87,47
2	Indeks Kualitas Air	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	66,67	70,83	65,00	41	100,00	88,89	94,44	86,67	54,67	54,67
3	Indeks Kualitas Udara	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	92,29	93,73	92,94	92,66	100,00	115,36	117,16	116,18	115,83	115,83
4	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	60,01	35,05	42,02	46,03	51,05	55,03	30,01	42,06	42,22	42,2	43,36	114,12	100,10	91,72	82,66	78,79	72,25
5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	95,34	89,12	90,16	91,22	92,26	93,30	88,02	88,00	89,40	90,82	99,56	99,01	97,60	98,00	98,44	106,71	104,43
6	Indeks kualitas lahan	%	24,22	-	-	-	24,12	24,17	-	-	-	25,74	25,74				25,74	25,87	106,66
f.	**Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**																		
1	Cakupan kepemilikan KTP	%	91,00	83,00	84,00	88,00	98,96	90,00	96,70	95,23	98,96	99,54	99,14	116,51	113,37	112,45	102,57	106,50	108,95
2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0–18 Tahun)	%	92,00	85,00	87,00	89,00	94,52	91,00	86,10	91,01	94,52	96,41	97,15	101,29	104,61	106,20	102	106,76	105,60
3	Cakupan kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100	100,00	100	96,21	100,00	100,00	100,00	100	96,21	96,21

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	62,00	36,00	37,00	40,00	47,00	52,00	36,00	50,17	70,53	48,59	100	100,00	135,59	176,33	103,38	100	161,29
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	86,25	76,00	77,00	79,25	90,77	91,00	76,00	84,10	90,77	100	98,13	100,00	109,22	114,54	110,17	192,31	113,77
6	Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	%	98,00	85,00	88,00	90,00	100	100	85,00	100	100	100	100	100,00	113,64	111,11	100	100	102,04
7	Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	hari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
8	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP-el dalam kondisi baik	%	92	-	-	-	-	90,00					92					102,22	100,00
9	Jumlah nota kesepahaman kerjasama inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nota kesepahaman	28	-	-	-	-	13					13					100	46,43
10	Persentase pemberian hak akses data kependudukan	%	50	-	-	-	-	35,00					60					171,43	120,00
11	Persentase pengolahan data kependudukan	%	85	-	-	-	-	80,00					82					102,5	96,47
12	Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi	%	90	-	-	-	-	85,00					100					117,65	111,11
13	Persentase penyajian data kependudukan	%	100	-	-	-	-	100					100					100	100,00
g.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																		
1	Contrasepsi Prevalens Rate	%	70,75	76,60	76,80	76,9	77,00	70,50	71,14	69,07	70,30	73,16	69,44	92,87	89,93	91,42	103,99	98,50	98,15
2	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	87	70,00	74,00	80,00	83,00	85,00	70,00	74,00	80,00	83,00	-	100,00	100,00	100,00	100		82,22
h.	**Urusan Perhubungan**																		
1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	50,80	63,24	65,36	67,48	50,50	50,65	63,24	92,95	94,77	96,65	75,59	141,08	142,21	140,44	191,39	149,24	148,80
2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	71,55	70,45	70,60	70,75	71,20	71,45	70,45	71,42	100	100	100	100,00	101,16	141,34	140,45	100	100
3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	13,00	23,00	23,00	13,00	13,00	13,00	23	23	13	13	13	100,00	100,00	100,00	100	100	100
4	Nilai survey IKM Pelayanan Transportasi	angka	100,00	90,16	90,22	90,28	100,00	100,00	90,16	89,20	89,28	88,36	88,58	99,82	98,87	98,89	88,36	88,58	88,58
	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	*%*	*80,21*	*68,50*	*70,70*	*73,25*			*40,00*	*86,06*	*76,67*			58,39	121,73	200,23	191,39		-
i.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																		
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	%	100,00	9,68	29,03	45,16	64,52	100,00	12,90	29,03	45,16	61,29	100	100,41	100,00	100,00	94,99	100	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang mempublikasikan informasi pembangunan daerah	%	100,00				100	100				*100*	100				100	100	100,00
3	Persentase penerapan keterbukaan informasi publik	%	100,00					100					100					100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
4	Indeks SPBE	nilai	3				2,70	2,8				*2,89*	2,89				107,04	103,21	96,33
j.	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**																		
1	Persentase UKM terhadap UMKM	%	29,70	27,14	27,64	28,15	1,50	2,00	27,14	15,27	15,49	13,68	14,19	100,00	55,25	55,03	912	709,5	47,78
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	20,00	10,00	12,00	14,00	1,70	2,20	10,09	14,18	1,50	5,74	3,11	100,90	92,08	10,71	337,65	141,36	15,55
3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	18,30	7,26	10,00	12,15	5,00	5,50	2,18	3,77	9,01	-10,81	14,19	30,03	37,70	74,16	-46,25	258	77,54
4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	12,60	2,77	5,00	6,50	4,50	5,00	14,54	5,30	4,33	3,84	-10,62	524,91	105,80	66,62	85,33	-212,4	-84,29
k.	**Urusan Penanaman Modal**																		
1	Jumlah investor	orang	2.000	496	766	936	1.151	1.839	564	1.038	1.539	1.877	3.758	112,90	135,51	164,64	163,08	204,35	187,90
2	Nilai Survey Kepuasaan Masyarakat	Nilai	95,03	82,00	82,00	82,20	94,03	94,50	81,67	90,05	93,49	94,03	96,63	99,60	109,82	113,73	100	102,25	101,68
3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	pengaduan	3	8	7	6	5	4	7	5	3	5	2	98,28	140,00	200,00	100	200	150,00
4	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	1.190,5	195,00	195,00	196,90	74,4	200,9	229,3	231,5	250,60	178,3	417,24	117,59	118,72	120,16	239,65	207,69	109,78
l.	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**																		
1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	-	1	1	1	2	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00
2	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional	Orang	8				2	2			1	-	-					-	12,5
3	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	2	1	1	2	2	2	1	1	1	-	5	0,00	0,00	66,67		250	40,00
4	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk. nasional	Peringkat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	0,00	0,00	0,00		-	0,00
5	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	30	20	22	24	26	27	-	-	24	26	30	250,00	227,27	100,00	100	111,11	100,00
6	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah	Medali	557	24	145	30	155	33	24	145	30	21	45	100,00	100,00	100,00	13,55	136,36	47,58
7	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	orang	20				15	18	4	7	11	1	8				6,67	44,44	40,00
m.	**Urusan Statistik**																		
1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	buah	5	3	4	4	4	5	3	4	4	4	5	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
2	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	90,00	-	-	-	85	90	-	-	-	87,52	87,5 *)				102,96	97,22	97,22
3	Indeks domain kebijakan internal	%	80,00	-	-	-	70	75,00	-	-	-	-	100				-	133,33	125,00
4	Jumlah data statitik sektoral yang dimanfaatkan perangkat daerah	Data	10	-	-	-	10	10	-	-	-	10	10				100	100	100,00
5	Jumlah forum data yang terlaksana	kali	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2				-	200	200,00
n.	**Urusan Persandian**																		
1	Persentase penanganan cyber attack	%	90,00				80,00	85,00	-	-	-	80,00	100				100	117,65	111,11
2	Persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi	%	90,00					85,00	-	-	-		-					-	
3	Indeks Domain Kebijakan Internal	Nilai	3					3	-	-	-		3,29					109,67	109,67
4	Indeks Domain Tata Kelola	Nilai	2,5					2,3	-	-	-		2,43					105,65	97,20
5	Indeks Domain Layanan	nilai	3,25					3	-	-	-		3					100	92,31
o.	**Urusan Kebudayaan**																		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi	unit	28	18	20	22	26	26	18	26	26	34	34	100,00	130,00	118,18	130,77	130,77	121,43
2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	grup	74	66	70	71	72	73	66	70	71	72	80	106,06	100,00	21,13	100	109,59	108,11
p.	**Urusan Perpustakaan**																		
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.000	7.500	9.000	10.500	6.000	3.000	8.850	14.086	15.102	6.673	3.642	118,00	156,51	143,83	111,22	121,4	52,03
o.	**Urusan Kearsipan**																		
1	Jumlah khasanah arsip	berkas	9.500	6.000	7.250	8.000	8.500	9.000	6.541	10.645	8.594	9.651	6.131	109,02	146,83	107,43	113,54	68,12	64,54
	Layanan Urusan Pilihan																		
a.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**																		
1	Produksi ikan konsumsi	Ton	560,00	485,27	501,65	520,11	540,00	550,00	329	501,65	520,11	540,27	551,87	68,22	100,33	100,02	100,05	100,34	98,55
2	Angka Konsumsi Ikan	%	35,00	29	30,18	31,52	33	34	29	30,15	31,52	33,01	33,67	100,03	97,26	100,06	100,03	99,03	96,20
b.	**Urusan Pariwisata**																		
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	7,50	10,80	11,28	5,11	5,50	5,50	10,80	11,28	5,11	-83,05	38,154	432,00	225,60	100,20	-1510	693,71	508,72
c.	**Urusan Pertanian**																		
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	7,47	7,04	6,75	6,35	7,45	7,46				6,43	7,46 *)				86,31	100	99,87
2	Produksi padi	Ton	41.200	41.150	41.515	39.800	40.517	41.000	28.113	41.515	39.800	43.038,86	43.905	74,97	109,97	103,14	106,22	107,09	106,57
3	Produksi cabe	Ton	905	606	892	897,6	985	900	306	892	897,6	898	912,5	31,22	91,02	91,13	91,17	101,39	100,83
4	Produksi bawang	Ton	220	110	140	211,50	400	215	92	140	211,60	288	180,29	51,11	70,00	70,53	72	83,86	81,95
5	Produksi Kakao	Ton	1.110	950	1.045	2.002,24	1.100	1.105	780	1.045	3.000,2	1.029,65	776,04	71,23	95,43	273,99	93,60	70,23	69,91
6	Jumlah sapi	Ekor	6.025	5.707	5.756	5.849	5.962	5.992	5.530	5.756	5.849	5.965	5.995	98,40	100,42	100,05	100,05	100,05	99,50
d.	**Urusan Perdagangan**																		
1	Persentase pertumbuhan omset	%	5.50	0	6.45	31,00	5,00	5,32	28	27,05	27,05	-5,10	1,78	112,00	100,19	93,28	-202	33,46	32,36
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)	%	24,17	24,48	25,15	25,13	24,07	24,12	24,48	25,15	25,13	24,53	24,12	102,34	104,92	104,62	101,91	100	99,79
e.	**Urusan Perindustrian**																		
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	6,12	5,67	5,35	5,60	6,08	6,11	5,26	5,13	4,80	4,86	5,9	87,96	85,50	79,73	79,93	96,56	96,41
2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	3,00	2,15	1,59	1,65	2,00	2,50	2	1,59	1,65	-13,8	15,3	100,00	100,00	100,00	-690	612	510,00
3	Jumlah Produk Industri yang mendapatkan sertifikat industri	Nilai	-	5,52	9,00	9,00	-	15	6,00	8,00	8,00		16	100,00	100,00	100,00		106,67	106,67
	Urusan Pendukung																		
a.	**Kesekretariatan Daerah**																		
	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	-	BB	BB	A	-	-	BB	BB	BB	-		120,00	100,00	100,00	-		
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan	%	12,50					12,01					11,72 *)					97,59	93,76
	Peringkat LPPD	Peringkat	-	19	15	30	-	-	15	15	30	-		133,33	120,00	53,33	-		
2	Nilai LPPD	Nilai	3,1600					3,150					3,1238*)					99,30	98,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kategori	-	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik	Baik	-		100,00	100,00	100,00	-		
3	Nilai IKM	Nilai	81,85				80,75	81,35				86,48	90,90				107,10	111,74	111,06
4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	90,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	50	60	60	100	100	100,00	100,00	85,71	125	117,65	111,11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
6	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf	%	5,00				4,20	4,60	3	3,20	4,78	7,29	7,29 *)				173,57	158,48	145,80
	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yang aktif	%	-				60,00	-	20,00	20,00	60,00	100	-				166,67		
7	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	%	80					70					100				-	142,86	125,00
b.	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**																		
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	84,00	73,29	82,00	83,00	83,00	84,00	73,29	82,00	83,00	83,28	78,56	104,70	110,81	109,21	100,34	93,52	93,52
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	100,00	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100	125,00	121,95	117,65	100	100	100,00
	Urusan Penunjang																		
a.	**Perencanaan**																		
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	-	31,23	33,08	33,11	17,00	17,50	31,23	33,08	33,11	17,14	20,91	100,74	103,38	100,33	100,82	119,49	116,17
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	98,80	94,08	92,24	88,76	97,04	98,20	100	92,24	88,76	100,00	108,11	106,29	96,88	93,20	103,05	110,09	109,42
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	97,22	83,29	78,57	89,88	91,67	93,39	83,29	77,38	77,38	83,44	93,39 *)	97,63	88,15	86,52	91,02	100	96,06
b.	**Keuangan**																		
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	27 Des	23 Nov	23 Nov	27 Des	20 Des	20 Des	22 Sept	28 Des	27 Des	29 Des	22 Des	300,00	105,00	80,00	95	95	100,00
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	12,00	15,78	13,64	13,36	12,00	12,00	15,78	13,64	13,29	16,18	13,43	135,92	113,67	110,75	134,83	111,92	111,92
c.	**Kepegawaian**																		
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	57,81	52,97	57,54	57,81	57,81	57,81	50	57,54	57,81	57,81	58,64	94,39	100,00	81,79	100	101,44	101,44
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	56,24	41,79	47,63	48,86	56,24	56,24	45	47,63	48,86	56,24	58,00	107,68	100,76	89,97	100	103,13	103,13
3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	85,00	79,34	83,00	83,28	82,70	83,85	79,34	83,00	83,28	82,70	88,50	99,18	103,23	102,12	100	105,55	104,12
d.	**Penelitian dan Pengembangan**																		
1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	95,00	80,00	85,71	90,91	85,00	90,00	80	85,71	90,91	84,62	90,00	133,33	114,28	113,64	99,55	100	94,74
e.	**Inspektorat**																		
	Nilai indeks reformasi birokrasi	%	65	58,86	59,63	61,69	60	65	64,52	81,48	77,78	64,20	68,42	400,00	315,81	219,22	107	105,26	105,26
1	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan	%	64,52	64,52	81,48	77,78	60	60	80,65	62,96	74,07	60	93,54	500,00	244,03	208,77	100	155,9	144,98

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target					Realisasi					Tingkat Capaian (%)					Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*			*11*	*12*	*13*			*14*
2	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Aset	%	64,52	64,52	81,48	77,78	60	60	80,65	62,96	74,07	60	80,65	500,00	244,03	208,77	100	134,42	125,00
3	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	3,70	N/A	2,35	3,82	3,50	3,50	3,65	56,83	67,41	71,66	3,85	5,18	126,29	134,82	130,29	110	141,92	140,00
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yg ditindaklanjuti	%	82	82,16	85,12	86,02	82	82	86,02	85,12	86,02	86,32	84,45	145,80	144,27	145,80	105,27	102,99	102,99
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yg ditindaklanjuti	%	60,00	78,21	80,80	64,42	60	60	80,65	80,80	64,42	49,25	52,41	134,42	134,67	107,37	82,08	87,35	87,35
6	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	80,64	93,55	83,87	100	80,64	80,64	93,55	83,87	100	100	93,55	193,37	152,96	163,16	124,01	116,01	116,01
7	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat yg diberikan oleh tim evaluasi AKIP	Nilai	AA	A	A	A	AA	AA	B	A	A	AA	AA	100,00	100,00	100,00	100	100	100
f.	**Kewilayahan**																		
1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
g.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																		
1	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	95	100	95	100	100,00	95,00	100,00	95	100	100,00
2	Persentase parpol dan ormas yang aktif	%	90,64	-	-	-	90,64	90,64	90	85	93	86,27	90,20	99,29	93,78	102,60	95,18	99,52	99,51
	Aspek Daya Saing Daerah																		
1	Produktifitas Total Daerah	Rp. Jt	106,93	81,92	84,24	108,73	95,84	101,23	81,92	84,24	108,73	95,84	98,12	100,71	98,06	119,83	100	96,93	91,76
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu (per orang/bulan)	2.271,42	1.816,96	2.602,68	1.431,85	2.060,03	2.165,69	1.816,96	2.602,68	1.431,85	1.964,89	1.990,31	104,22	140,77	73,26	95,38	91,90	87,62
3	Nilai Tukar Petani	%	-	99,23	100,44	98,95	-	-	99,23	100,44	98,95	-	-	98,85	99,93	98,35	-	-	-
4	Rasio Ketergantungan	%	54,44	54,15	53,62	53,86	54,42	54,44	54,15	53,62	53,86	48	48	99,56	98,57	98,99	101,30	113,42	113,42

Indikator kinerja daerah sebagaimana Tabel II-170, terdapat beberapa indikator yang capaian kinerja sangat tinggi mencapai 500%, yaitu indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan Persentase peningkatan nilai produksi, masing-masing sebesar 508,72% dan 510%. Hal ini disebabkan terjadi pengurangan kunjungan wisata dan penurunan nilai produksi yang sangat signifikan pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19, sementara pada tahun 2021, perekonomian mulai kembali normal, sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase peningkatan kunjungan wisata dan nilai produksi menjadi sangat tinggi. Sehingga capaian kinerja indikator kinerja daerah ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan jangka menengah menjadi sangat tinggi mencapai 500%. Untuk capaian kinerja yang sangat rendah dikarenakan target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan jangka menengah terlalu tinggi, kajian terhadap ketersediaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia tidak terlalu dipertimbangkan, sehingga saat tahun berjalan mengalami kendala dalam pelaksanaan, disamping itu juga bencana pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap pembangunan dan perekonomian, menyebabkan capaian beberapa indikator sangat rendah.

Tabel II-171.
Evaluasi Program RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	-															
1.01	**PENDIDIKAN**																**DINAS PENDIDIKAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	92	12.943.454.244	87,02	9.456.608.672							87	9.456.608.672	94,59	73,06	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	1.436.479.700	82	1.139.580.795							82	1.139.580.795	102,50	79,33	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00%	2.310.491.300	100	1.180.333.000					100,00		100	1.180.333.000	100,00	51,09	
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	8 orang	400.000.000	0	100.000.000					0,00	0,00	0	100.000.000	25,00	25,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	507.047.000	A	266.817.649					100,00			266.817.649	100,00	52,62	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	92	254.137.289.982			A	125.666.486.430	A	120.363.306.654				120.363.306.654		47,36	
		Nilai IKM					89,64		A					-			
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	90	96.568.712.860			87%	50.851.431.051	65%	47.852.503.959			1	47.852.503.959		49,55	
		Rata-rata nilai mid semester	7,75				7,7		7,75					-			
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SD pada sataun pendidikan	94				92%		91,5					-			
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SMP pada satuan pendidikan	6,1				6		5,6					-			
		Rata-rata nilai semester	7,75				7,7		7,73					-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase satuan PAUD yang meiliki sapras sesuai SNP	70				67%		55%				1	-			
		Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	80				77%		75%				1	-			
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	65				60%		53%				1	-			
		Angka melek huruf	99,81				99,75		99,75					-			
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06				47,62		35%				0	-			
8	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik	80	7.996.800			78%	3.998.950	60%	3.721.450			1	3.721.450		46,54	
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	65				60%		55%				1	-			
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik	80	15.193.721.199	67	10.221.667.811							67	10.221.667.811	83,75	67,28	
		Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sarpras sesuai SNP	70		78	-							78	-	111,43		
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	60		60	-							60	-	100,00		
10	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	100	84.120.480.924	89	25.868.592.486							89	25.868.592.486	89,00	30,75	
		Rata - rata nilai Mid semester	7,75		7,65	-							8	-	98,71		
		Rata - rata nilai semester	7,75		7,65	-							8	-	98,71		
11	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (%)	99,81	27.510.730.381	99,88	3.608.019.455							100	3.608.019.455	100,07	13,11	
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar	88,5	11.286.823.882	88	5.437.291.788	88%	10.889.320	88%	9.892.800	100,00	90,85	89	5.447.184.588	100,43	48,26	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran	81,50		81	-	81%		81%		100,00		82	-	100,38		
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	65		60	-	60%		53%		88,33		61	-	93,12		
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	80	2.965.302.490	78	590.517.680							78	590.517.680	97,50	19,91	
14	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak mulia	Persentase sekolah dgn pendidikan karakter berkategori baik	51,06	26.941.063.725	75,49	10.771.312.937							75	10.771.312.937	147,85	39,98	
15	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	APK SD	132,75	108.639.655.271	119,94	52.838.207.474							120	52.838.207.474	90,35	48,64	
		APK SMP	162,1		162,33	-							162	-	100,14		
		APM SD	113,8		107,86	-							108	-	94,78		
		APM SMP	124,15		125,42	-							125	-	101,02		
1.02	**KESEHATAN**							**183.932.944.959**		**163.576.068.695**			0	163.576.068.695	#DIV/0!		**DINAS KESEHATAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	13.965.264.716	82,07	8.101.145.008							82	8.101.145.008	92,21	58,01	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	85	2.087.738.100	80	945.989.557							80	945.989.557	94,12	45,31	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	1.037.060.000	0	509.330.000							0	509.330.000	100,00	49,11	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	857.977.112	A	386.980.312								386.980.312	100,00	45,10	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	89	259.027.337.100			87%	139.544.502.657	80,8	131.026.146.644	92,87	93,90	81	131.026.146.644	90,79	50,58	
		Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100				100%		100				100	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kasus kematian bayi	23	63.058.937.116			24%	38.169.206.818	7	28.011.560.014	29,17	73,39	7	28.011.560.014	30,43	44,42	
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	3				3%		0				0	-			
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB	100				100%		100				100	-			
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	100				100%		100				100	-			
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dan kualitas SDM pelayanan Kesehatan	100	361.141.808			100%	5.706.460.684	100%	4.101.452.297	100,00	71,87	1	4.101.452.297		1135,69	
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase peningkatan pengelolaan obat sesuai standar	100	13.983.600			100%	512.774.800	95%	436.909.740	95,00	85,20	1	436.909.740			
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan	100				100%		100%				1	-			
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes untuk 24 bulan	100	18.414.593.425	100	6.552.326.271							100	6.552.326.271	100,00	35,58	
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan sosialisasi pangan sehat	87		85	-							85	-	97,70		
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	100	61.508.555.158	90,28	40.981.679.231							90	40.981.679.231	90,28	66,63	
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kelompok masyakat cerdas menggunakan obat	60	1.695.564.782	30	245.656.543							30	245.656.543	50,00	14,49	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan	100		75	-							75	-	75,00		
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	80	4.809.169.216	34,1	2.345.636.400							34	2.345.636.400	42,63	48,77	
		Persentase sekolah PHBS	90		84,5	-							85	-	93,89		
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyarakat	100	573.133.862	100	355.447.033							100	355.447.033	100,00	62,02	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100		100	-							100	-	100,00		
		Cakupan balita gizi buruk (%)	<3		100	-					100,00		100	-	-		
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan jamban yang sesuai standar kesehatan (%)	95	2.275.764.600	95	1.139.963.900							95	1.139.963.900	100,00	50,09	
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (%)	99		99	-							99	-	100,00		
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (%)	99,5		33,37	-							33	-	33,54		
		Cakupan Pengelolan Limbah Cair Rumah Tangga (%)	96		33496	-							33496	-	34891, 67		
		Cakupan Laik Sehat TPM (%)	83		793	-							793	-	955,42		
		Cakupan Laik Sehat TTU (%)	85		368	-							368	-	432,94		
		Persentase peningkatan STBM	100		48	-							48	-	48,00		
		Persentase cakupan stop BABS	52,08		47	-							47	-	90,25		
		Persenatase laik sehat TTM dan TTU	99		88,9	-							89	-	89,80		
15	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Cakupan penemuan semua kasus TB (%)	45	1.333.758.444	22,2	695.361.330							22	695.361.330	49,33	52,14	
		Persentase TB yang mengetahui status HIV	45		84,4	-							84	-	187,56		
		Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	20		100	-							100	-	500,00		
		Cakupan penanganan kasus diare (%)	100		225	-							225	-	225,00		
		Insident rate DBD per 100.000 penduduk	<41		31	-							31	-	100,00		
		Cakupan Kelurahan UCI (%)	99,5		57,4	-							57	-	57,69		
		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah (%)	100		95	-							95	-	95,00		
		Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap (%)	100		67,1	-							67	-	67,10		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		cakupan penanganan kasus DBD	100		90	-							90	-	90,00		
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS dan Puskesmas terakreditasi	100	2.985.804.567	100	1.762.080.627							100	1.762.080.627	100,00	59,02	
		Persentase puskesmas dengan nilai IKM >75	100		100	-							100	-	100,00		
		Persentase Sarpras puskesmas yang sesuai standar	80		100	-							100	-	125,00		
17	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Prasarana Puskesmas sesuai standar	90	83.400.000.000	100	34.900.000.000							100	34.900.000.000	111,11	41,85	
18	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan dengan nakes di faskes (%)	100	4.453.633.280	90	2.342.196.258							90	2.342.196.258	90,00	52,59	
		Cakupan pelayan Nifas sesuai standar (%)	100		88	-							88	-	88,00		
		Cakupan pelayan Neonatal sesuai standar (%)	100		92	-							92	-	92,00		
19	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan (%)	100	209.343.652	10888	104.544.402							10888	104.544.402	10888,00	49,94	
		Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar (%)	100		1444	-							1444	-	1444,00		
		Cakupan IVA positif yang tertangani (%)	100		5	-							5	-	5,00		
		Cakupan pelayanan IVA usia produktif (%)	35		45	-							45	-	128,57		
		Cakupan penemuan kasus hipertensi usia > 15 tahun (%)	24		10,8	-							11	-	45,00		
		Cakupan penemuan kasus DM usia > 15 tahun (%)	2		2	-							2	-	100,00		
20	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah	Persentase Ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar	87	170.133.531.084	87	85.133.531.084							87	85.133.531.084	100,00	50,04	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																
		Persentase Ketersediaan Prasarana RS sesuai standar	87		100	-							100	-	114,94		
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai standar	100	343.747.530	100	138.308.490							100	138.308.490	100,00	40,24	
22	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100	376.404.481.635	100	183.657.225.100							100	183.657.225.100	100,00	48,79	
23	Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	Persentase puskesmas dengan nilai IKM >75	100	21.190.065.000	55,2	15.716.903.052							55	15.716.903.052	55,20	74,17	
24	Program Peningkatan Pelayanan	Persentase Tata Laksana Keuangan yang memenuhi standar				63.178.500.055							0	63.178.500.055			
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												0	-			**DINAS PU PR**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	36.241.234.786	83,28	23.973.214.600							83	23.973.214.600	93,57	66,15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	41.799.939.250	93,3	31.702.994.976							93	31.702.994.976	116,63	75,84	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	365.350.000	100	248.270.000							100	248.270.000	100,00	67,95	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	20	695.780.000	4	233.930.000							4	233.930.000	20,00	33,62	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	793.442.400	A	496.817.098					100,00			496.817.098	100,00	62,62	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks AKIP SKPD	87	28.878.494.252			90	12.538.715.190	90,22	11.819.015.399				11.819.015.399		40,93	
		Indeks kepuasan masyarakat	90				85		88,51					-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pengelolaan reformasi birokrasi (PMPRB	92,5				85		91,66					-			
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan	100	3.828.069.640			99,25	2.022.389.140	99,76	1.734.331.890				1.734.331.890		45,31	
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	64,44	21.971.669.096			63%	10.192.538.034	64,18	10.076.710.994				10.076.710.994		45,86	
9	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkung kondisi baik					42	3.301.459.940	41,31	3.225.908.620				3.225.908.620			
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representif					79,25	10.110.697.776	79,26	17.893.715.627				17.893.715.627			
		Persentase penyediiaan sarana perkantoran tertentu yang representatif					78,03		78,04					-			
		Persentase ketersediaan fasilitasi umum					66,67		70,87					-			
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota yang memenuhi standar konstruksi dan fungsi	50,01	48.729.383.040			48,84	21.371.509.568	53,13	18.548.981.526				18.548.981.526		38,07	
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik	85	690.371.060			90%	314.316.700	92,52	293.339.010				293.339.010		42,49	
13	Program Penyelenggraaan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang	36,18	3.129.646.172			35,05%	1.581.368.426	35,33	1.468.786.398				1.468.786.398		46,93	
16	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan dengan kondisi mantap	80,31	82.625.539.800	100,07	26.641.723.325							100	26.641.723.325	124,60	32,24	
17	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/ gorong-gorong (%)	50,44	144.127.915.665	57,02	54.209.427.691							57	54.209.427.691	113,05	37,61	
18	Program pembangunan turab/talud bronjong	Persentase penataan sungai	26,37	15.022.973.800	82,51	7.208.425.500							83	7.208.425.500	312,89	47,98	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan yang dipelihara	25,5	160.865.110.646	48,66	76.090.661.620							49	76.090.661.620	190,82	47,30	
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat yang tersedia (unit)	17	3.038.982.728	94,74	2.610.723.750							95	2.610.723.750	557,29	85,91	
		Jumlah alat labor yang tersedia (unit)	4		2	-							2	-	50,00		
21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringa Pengairan Lainnya	Persentase irigasi dengan kondisi baik	86,58	67.830.663.241	87,62	52.775.472.690							88	52.775.472.690	101,20	77,80	
22	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase sungai yang dinormalisasi	56,44	67.883.219.530	22,23	27.548.598.440							22	27.548.598.440	39,39	40,58	
23	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	94,89	10.858.090.000	61,24	3.268.386.926							61	3.268.386.926	64,54	30,10	
24	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang trotoar yang dibangun (m)	33600	11.666.082.907	7,67	6.683.534.112							8	6.683.534.112	0,02	57,29	
25	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tertatanya kawasan pusat kota	78	9.060.787.660	55,56	2.376.053.008							56	2.376.053.008	71,23	26,22	
		Jumlah advice planning yang dikeluarkan (buah)	825		0	-							0	-	0,00		
		Keberadaan PERDA RTRW (perda)	1		0	-							0	-	0,00		
26	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan	23	3.171.018.550	34,07	1.370.716.450							34	1.370.716.450	148,13	43,23	
27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau	42,5	1.925.411.455	42,46	911.450.420							42	911.450.420	99,91	47,34	
28	Program Pembinan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	34,18	1.794.467.275	32,74	713.728.300							33	713.728.300	95,79	39,77	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan lingkung yang dibangun	5903	13.688.249.136	70,95	12.379.352.036							71	12.379.352.036	1,20	90,44	
31	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum	94,4	12.900.000.000	74,53	6.994.204.000							75	6.994.204.000	78,95	54,22	
32	Program perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR)	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	94,89	1.056.840.000	97,39	1.056.840.000						-	97	1.056.840.000	102,63	100,00	
1.04	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**												0	-			**DINAS PERA DAN KAWASAN PERMUKIM AN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	3.941.795.135	85	2.542.089.107							85	2.542.089.107	95,51	64,49	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.284.872.000	80	1.932.044.410							80	1.932.044.410	100,00	84,56	
3	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	77.400.000	100	50.850.000							100	50.850.000	100,00	65,70	
4	Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	16 orang	40.000.000	0	10.000.000							0	10.000.000	12,50	25,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	87	9.393.259.050			87	4.592.615.618	83,5	4.021.119.438				4.021.119.438		42,81	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	206.807.400	A	120.900.560					100,00			120.900.560	95,00	58,46	
6	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	96,27	31.300.498.168	95,26	15.089.355.733	95,74	10.240.180	95,85	9.583.800			95,85	15.098.939.533	98,23	48,24	
		Persentase penurunan angka backlog (kebutuhan rumah)					14,57%		13,54 %					-			
7	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	98,18	11.300.697.502	95,24		96,97	3.881.551.804	96,92	3.551.572.145			96,92	3.551.572.145		31,43	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persenatse rumah layak huni	96,27				95,74		95,85					-			
		Persentase luas permukiman kumuh					0,82		0,46					-			
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							3.792.307.550		3.668.906.950			0	3.668.906.950			
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penyerahan PSU oleh pengembang	18,62	752.116.383			16,66	619.516.758	20,59	593.115.321				593.115.321		78,86	
10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah bersanitasi layak	95,76	22.210.050.926	95,98	19.652.227.950							96	19.652.227.950	100,23	88,48	
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN RAKYAT (SATPOL PP)**												0	-			**SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	9.772.590.260	80,22	4.286.743.253							80	4.286.743.253	90,13	43,86	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	13.204.662.600	80	9.786.249.025							80	9.786.249.025	100,00	74,11	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	2.316.608.500	100	1.269.505.250							100	1.269.505.250	100,00	54,80	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	186.720.000	100	81.720.000					-	-	100	81.720.000	100,00	43,77	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	91	11.632.303.400			87	5.501.593.586		489.161.177			0	489.161.177		4,21	
6	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan	100	19.589.865.098	100	2.196.124.570	100	5.307.258.950		4.796.123.718	0,00	90,37	100	6.992.248.288	100,00	35,69	
							100						0	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		133	2.656.310.680				1.328.155.340		1.301.671.767			0	1.301.671.767		49,00	
8	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penegakan Perda	100	38.188.645.888	100	18.568.862.905							100	18.568.862.905	100,00	48,62	
9	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	124.33 pelayanan	23.589.358.190	124,33	4.080.316.839							124	4.080.316.839	100,00	17,30	
1,06	**BPBD**												0	-			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	4.373.445.050	86,8	2.337.738.622							87	2.337.738.622	97,53	53,45	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	7.932.715.122	89,41	6.445.997.900							89	6.445.997.900	111,76	81,26	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	417.100.000	100	202.100.000							100	202.100.000	100,00	48,45	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	60.000.000	A	34.989.025								34.989.025	100,00	58,32	
5	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	18	11.177.375.812	18,36	3.961.833.277							18	3.961.833.277	102,00	35,45	
		Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100		100	-							100	-	100,00	#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	89	8.160.215.694			######## ######		3.554.709.204				###### ###### ####	-		0,00	
	Program Penanggulangan Bencana	persentase pelayanan penaggulangan bencana	100	1.497.926.960			422.842.960		312.690.440				312.690.440	-		0,00	
1,07	**SOSIAL**				-									-	-		**DINAS SOSIAL**
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	3.976.592.549	87,23	2.519.431.603							87	2.519.431.603	95,86	63,36	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.866.962.597	100	1.335.801.077							100	1.335.801.077	125,00	71,55	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	400.111.122	93,94	251.183.960							94	251.183.960	93,94	62,78	
4	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	138.590.105	A	64.659.160							A	64.659.160	100,00	46,65	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	91	6.242.628.074			89	2.974.277.020	89	276.119.981			89	276.119.981		4,42	
6	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	70	469.272.240			65%	234.634.140	100%	185.802.826			1	185.802.826		39,59	
7	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100	686.003.250			99,90%	551.585.700	100%	486.394.820			1	486.394.820		70,90	
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)	100	441.769.270			100%	5.499.999.676		1.599.559.720			0	1.599.559.720		362,08	
9	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100	204.437.360			100%	90.818.680	100%	8.522.700			1	8.522.700		4,17	
10	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase usulan masyakarat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	100	63.047.540			100%	31.523.770	100%	30.841.855			1	30.841.855		48,92	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Persentase peningkatan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan	60	3.831.267.324	53,73	2.202.943.974							54	2.202.943.974	89,55	57,50	
12	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal	100	24.727.034.145	100	3.980.550.787							100	3.980.550.787	100,00	16,10	
13	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan kualitas lembaga kesejahteraa n sosial	100	8.619.791.200	56,57	3.523.956.030							57	3.523.956.030	56,57	40,88	
14	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan	100	430.176.240	96,91	368.137.081							97	368.137.081	96,91	85,58	
2.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**												0	-			
2.01.	**TENAGA KERJA**												0	-			**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
1	Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran	Nilai IKM	90	4.863.422.010	87,39	2.837.230.529							87	2.837.230.529	97,10	58,34	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.222.014.840	80	747.002.787							80	747.002.787	100,00	61,13	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	108.853.500	100	66.000.000							100	66.000.000	100,00	60,63	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	31.369.000	A	45.561.285								45.561.285	100,00	145,24	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai IKM	90	6.354.769.616			89	2.974.277.020	89	2.761.192.981			89	2.761.192.981		4,35	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha (orang)	111 orang	9.359.327.636	59	3.262.737.636	25	73.148.945	20	69.729.350	80,00	95,33	79	3.332.466.986	53,15	35,61	
		jumlah tenaga kerja yang diserap wira usaha (orang)	166 orang		121	-	45		35		77,78	-	156	-	72,89		
7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga yang ditempatkan	261	229.173.974			239	114.579.857	192	110.235.391	80,33	96,21	192	110.235.391		48,10	
8	Program Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselesihan hubungan industrial yang diselsaikan	12	43.235.840			4	21.617.780	3	19.850.500	75,00	91,82	3	19.850.500		45,91	
9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	261 orang	13.467.631.554	1030	5.770.101.472							1030	5.770.101.472	100,00	42,84	
10	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah penurunan angka PHK (%)	174	21.407.321.271	30	743.925.052							30	743.925.052	17,24	3,48	
2.02.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												0	-			**DINAS P3AP2KB**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	3.798.826.925	89	2.352.306.076							89	2.352.306.076	97,80	61,92	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.869.794.852	80	984.287.108							80	984.287.108	100,00	52,64	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	182.135.520	100	102.958.300							100	102.958.300	100,00	56,53	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota												0	-			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah PKB yang meningkat kualifikasinya	5 Orang	31.617.695	1	13.795.000							1	13.795.000	20,00	43,63	
5	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	365.307.953	A	162.126.615								162.126.615	100,00	44,38	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Capaian Kinerja dan Keuangan																
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	A	7.317.030.212			90	3.614.683.429	90	3.459.735.446			90	3.459.735.446		47,28	
		Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80				80		80				80	-			
		Persenatse ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100				100		100				100	-			
		Persentase kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	89				89		89				89	-			
		Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat	A				A		A					-			
		Persentase sasaran program kegiatan renja perangkat daerah uyang selaras dengan renstra perangkat daerah	90				90		90				90	-			
		Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD bebas temuan	90				90		90				90	-			
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	16%	176.881.260			16%	81.607.260	16%				0	-		0,00	
		Jumlah kelembagaan PUG	33 lembaga				33 lembaga		33 lembaga					-			
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG-kan	15%				15%		n/a					-			
		Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	75%				75%		75%				1	-			
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	33	1.034.126.352			33 buah	494.605.256	33 buah	463.184.390				463.184.390		44,79	
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	2	18.020.320			2 dok	3.849.360	2 dok	3.582.160				3.582.160		19,88	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Anak																
		Rata-rata capaian pengelolaan sistem data gender dan anak					35		35				35	-			
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah pencapaian skor kota layak anak	850	215.179.680			720	88.912.750	650	3.582.160			650	3.582.160		1,66	
		Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	12				11 kel		12				12	-			
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	0,026	751.149.420			0,04	257.303.710	0,05	50.695.770			0	50.695.770		6,75	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak					100		100				100	-			
12	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	0,04	50.262.480			0,06	150.235.520	0,03	45.058.000			0	45.058.000		89,65	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan					100		100				100	-			
13	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Jumlah perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	7	1.448.400.981	1	571.536.390							1	571.536.390	14,29	39,46	
		Persentase perempuan yang duduk di legislatif	12		16	-						-	16	-	133,33		
		persentase kekerasan terhadap anak	0,00026		0,04	-						-	0	-	0,65		
14	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah kelembagaan PUG	33 lembaga	5.035.415.834	33	2.442.009.821							33	2.442.009.821	100,00	48,50	
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan	17		15	-						-	15	-	88,24		
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	850		610	-						-	610	-	71,76		
		Jumlah Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	12 lembaga		10	-						-	10	-	83,33		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	100		100	-						-	100	-	100,00		
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	100		100	-						-	100	-	100,00		
15	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase pelaku usaha ekonom perempuan	82	1.175.397.483	60	415.225.810					0,00		60	415.225.810	73,17	35,33	
		Persentase kekerasan terhadap perempuan	0,0004		0,00074	-						-	0	-	54,05		
16	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	33 buah	1.908.077.776	29	6.925.160							29	6.925.160	87,88	0,36	
2.03.	**PANGAN**												0	-			**DINAS KETAHANAN PANGAN**
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai IKM	89	2.787.613.662	83,11	1.603.768.631							83	1.603.768.631	93,38	57,53	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.337.725.000	80	584.772.350							80	584.772.350	100,00	17,52	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	89.450.000	100	50.700.000							100	50.700.000	100,00	56,68	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	78.050.000	A	28.737.195					100,00			28.737.195	100,00	36,82	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	85	5.402.166.490			85	2.494.493.538	85,2	**2.168.162.346**				2.168.162.346		40,14	
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan yang tersedia	50	1.289.729.816			40	71.401.018		680.464.301			0	680.464.301		52,76	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	60										0	-			
		Persentase penurunan komsumsi beras	1										0	-			
		Cakupan suplly lembaga distribusi pangan	15										0	-			
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga pasokan dana akses pangan	60										0	-			
7	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase bahan pangan yg telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)	100	16.433.147.720	88	2.871.745.797							88	2.871.745.797	88,00	17,48	
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	55		36,35	-						-	36	-	66,09		
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan	60		20	-						-	20	-	33,33		
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan & akses pangan	100		33	-						-	33	-	33,00		
8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90	114.451.288			87%	51.765.254	87,5	47.336.360				47.336.360		41,36	
2.04.	**PERTANAHAN**				-	-		-	-	-			0	-			**DINAS PU PR**
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	63,64	236.571.000	15,56	101.432.270							16	101.432.270	24,45	42,88	
2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	15	99.999.340			100	35.437.030	133,29	28.319.390				28.319.390		28,32	
		Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota	17,46				16,40		16,83					-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase luas tanah yang pemanfaatan sesuai izin lokasi	85	59.989.580			80	12.700.240	100	12.486.000			100	12.486.000		20,81	
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase tanah sengketa, konflik yang difasilitasi	27,83	201.999.720			21,43	25.606.310	28,57	24.596.800				24.596.800		12,18	
2.05.	**LINGKUNGAN HIDUP**												0	-			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
1	Program Pelayanan adimistrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	51.949.739.169	85,07	23.594.603.365							85	23.594.603.365	95,58	45,42	
2	Peningkatan Sarana-Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.602.272.284	80	1.135.109.426							80	1.135.109.426	100,00	43,62	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	1.224.379.147	100	661.373.500							100	661.373.500	100,00	54,02	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	1.448.425.000	A	507.236.280					100,00			507.236.280	95,00	35,02	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	89	9.151.655.316			81	4.442.853.102	87,9	4.122.129.735				4.122.129.735		45,04	
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	5	163.349.360			5 dok	81.674.550	5 dok	57.785.480				57.785.480		35,38	
7	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	75	950.778.450			75	200.570.340	45	101.141.510			45	101.141.510		10,64	
		Indeks kualitas udara	80				80		92,7					-			
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik	17	3.629.606.544			16,75	1.814.803.226	14,87	1.750.948.139				1.750.948.139		48,24	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	60,01	70.598.620			55,03	35.299.310	129	33.267.000			129	33.267.000		47,12	
10	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	80	69.384.760			80	30.861.800	27,7% Kel dan 19,1% sekolah	24.042.110				24.042.110		34,65	
11	Program Penghargaan Lingkungan Hodup untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima	7 penghargaan	89.131.540			7 penghargaan	28.248.770	3 penghargaan	20.457.948				20.457.948		22,95	
12	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	95,34	13.749.986.168			93,30%	7.809.714.376	93,30 %	7.338.711.003				7.338.711.003		53,37	
13	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	95	40.031.814.066	90,82	22.917.365.134							91	22.917.365.134	95,60	57,25	
14	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	60,01%	6.864.186.715	42,2	3.545.228.860							42	3.545.228.860	69,99	51,65	
15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sekolah adiwiyata	5 dokumen	1.101.577.950	4	276.577.950							4	276.577.950	100,00	25,11	
16	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun (dokumen)	78	705.938.000	42	342.174.675							42	342.174.675	53,85	48,47	
17	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Indeks Pencemaran Air	75	4.745.524.200	65	1.711.502.356							65	1.711.502.356	86,67	36,07	
		Indeks Pencemaran udara	80		80	-							80	-	100,00		
18	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH Publik	17	24.916.616.300	14,87	14.609.949.985							15	14.609.949.985	87,47	58,64	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.05	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												0	-			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Nilai IKM	90	5.020.414.132	93	3.149.247.250							93	3.149.247.250	103,33	62,73	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.010.364.000	95	2.396.873.584							95	2.396.873.584	118,75	79,62	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	144.806.000	100	97.100.000							100	97.100.000	100,00	67,06	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	185.213.500	A	113.774.000					100,00			113.774.000	100,00	61,43	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	A	6.788.720.786			89	4.219.957.241	93,03				93	-		0,00	
		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	90				A		A-					-			
6	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK	100	1.581.334.448			100	225.254.664	96,21	219.617.822				219.617.822		13,89	
		Cakupan Kepemilikan KTP-El	100				90		99,14					-			
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu	100				100		100				100	-			
		Rata-rata lama waktu penyelesian penerbitan dokumen (SOP) pendaftaran penduduk	1				1 hari		1 hari					-			
7	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th (%)	92	930.583.252				289.905.616		283.705.958			0	283.705.958		30,49	
8	Program Pengelolaan Informasi Adminsitrasi	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP-el dalam kondisi baik	92	366.247.500			90	53.208.040	92				92	-		0,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kependudukan																
		Jumlah nota kesepahaman kerjasama inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil	28				13 nota kesepahaman		13 nota kesepahaman					-			
		Persentase pemberian hak akses data kependudukan	50				35		60				60	-			
		Persentase pengolahan data kependudukan	85				80		82				82	-			
		Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi	90				85		100				100	-			
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	100	101.885.940			100	42.734.810	100	41.947.150			100	41.947.150		41,17	
10	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan Kartu keluarga (%)	100	11.370.551.823	93,91	6.709.296.577							94	6.709.296.577	93,91	59,01	
		Cakupan kepemilikan KTP-el (%)	91		99,54	-						-	100	-	109,38		
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th (%)	92		96,41	-						-	96	-	104,79		
		Cakupan penerbitan akta kematian (%)	62		48,59	-						-	49	-	78,37		
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	98		100	-						-	100	-	102,04		
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	1 hari		1	-					100,00	-	1	-	100,00		
2.06	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												0	-			**DINAS P3AP2KB**
1	Program Keluarga Berencana	Unmeet Need (%)	10,87	13.039.020.266	12,5	7.054.930.164							13	7.054.930.164	115,00	54,11	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	rata rata usia perkawinan	22,5 tahun	613.470.585	22,3	132.185.000							22	132.185.000	99,11	21,55	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan peserta KB Aktif (%)	77	440.895.000	73,16	144.122.950							73	144.122.950	95,01	32,69	
4	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Jumlah kelompok PIK remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif	30 kelompok	189.000.000	28	69.000.000						0,00	28	69.000.000	93,33	36,51	
5	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB aktif	100	2.163.544.233	100	1.320.787.260							100	1.320.787.260	100,00	61,05	
6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Persentase UPPKS aktif	54	353.666.000	50	80.500.000							50	80.500.000	92,59	22,76	
		Persentase BKL aktif	83		50	-							50	-	60,24		
7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase posyandu dengan strata mandiri	85	5.849.328.131	64,8	2.977.446.705							65	2.977.446.705	76,24	50,90	
8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh	100	125.999.980			100	62.999.940	100	56.088.540			100	56.088.540		44,51	
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmeet need	10,87	4.584.338.330			10,92	2.292.169.165	15	1.468.149.564			15	1.468.149.564		32,03	
		cakkupan peserta KB aktif	62,94				61,84		62				62	-			
		Jumlah peserta KB baru (Pb)	2170				2284		1680				1680	-			
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata-rata usia perkawinan	22,5				22,4	51.130.640		50.899.100			0	50.899.100			
		Jumlah kelompok PIK-remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif	30	102.261.280			29						0	-		0,00	
		Persentase BKB aktif	65				65						0	-			
		Persentase UPPKS aktif	54				53						0	-			
		Persentase BKL aktif	83				81						0	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.07	**PERHUBUNGAN**				-		-							-	-		**DINAS PERHUBUNGAN**
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	94	6.848.751.270	93	5.640.985.353							93	5.640.985.353	98,94	82,37	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.280.423.974	80	1.484.562.548							80	1.484.562.548	100,00	65,10	
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	801.200.000	100	604.276.000							100	604.276.000	100,00	75,42	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	109.091.396	A	51.405.149					100,00			51.405.149	100,00	47,12	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai UKM	94	12.646.271.200			94	6.233.576.686	89	5.846.300.878			89	5.846.300.878		46,23	
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persenatse penurunan angka kecelakaan lalu lintas	80,21	1.108.074.580			78,15	877.616.165	78,15	866.766.260			78	866.766.260		78,22	
		Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	50,8				50,65		50,65				51	-			
		Persentase peningkatan pelayanan parkir	74				74,74		74,74				75	-			
		Persenatse ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	88				88		88				88	-			
		Persentase ketersediaan fasilitasi umum	71,55				71,45		71,45				71	-			
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Fasilitasi Umum	94,44	7.100.000.000	88,89	100.000.000					-	-	89	100.000.000	94,12	1,41	
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	80,21	16.129.987.918	75	988.549.092							75	988.549.092	93,50	6,13	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	75,84	4.421.113.450	35	2.454.468.090							35	2.454.468.090	46,15	55,52	
10	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	89	1.704.998.291	100	1.091.316.034							100	1.091.316.034	112,36	64,01	
11	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	80,21	838.150.500	76	751.705.500							76	751.705.500	94,75	89,69	
12	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Parkir	Persentase peningkatan pelayanan parkir	78	1.638.745.000	71	945.110.450							71	945.110.450	91,03	57,67	
2.08	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												0	-			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Nilai IKM	94	6.261.938.370	93	3.545.028.794							93	3.545.028.794	98,94	56,61	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.028.833.490	80	1.400.160.085							80	1.400.160.085	100,00	69,01	
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	118.206.000	80	78.950.000							80	78.950.000	80,00	66,79	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	123.341.200	A	55.992.000					100,00			55.992.000	100,00	45,40	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	91	7.177.180.264			A	3.471.000.445	A	3.106.669.817				3.106.669.817		43,29	
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	85	3.212.746.724			70	1.783.636.482	100	1.547.642.453			100	1.547.642.453		48,17	
7	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	75	4.446.748.312			70	2.525.706.578	10	2.393.356.844			10	2.393.356.844		53,82	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persenatse PD yang telah menerapkan apliaksi pemerintahan yang terintegrasi	75				70		31				31	-		#DIV/0!	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD	85				80		100				100	-		#DIV/0!	
8	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	85	1.097.127.700	50	737.127.700					-	-	50	737.127.700	58,82	67,19	
9	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	85	10.506.587.917	60	6.929.594.916							60	6.929.594.916	70,59	65,95	
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	85	20.347.960.827	60	13.717.457.539							60	13.717.457.539	70,59	67,41	
11	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jenis informasi ber-klasifikasi persandian yang diamankan (set)	1	575.000.000	0	-					-	-	0	-	-	0,00	
2.09	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				-									-	-		**DINAS KOPERASI DAN UKM**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	14.248.735.598	85,22	7.038.460.370							85	7.038.460.370	95,75	49,40	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.664.969.091	80	1.812.646.198							80	1.812.646.198	100,00	68,02	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	219.150.000	100	155.048.485							100	155.048.485	100,00	70,75	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	72.930.290	A	48.260.175					100,00			48.260.175	100,00	66,17	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	89	16.005.729.808			86	7.598.670.484	86,35	7.459.566.062				7.459.566.062		46,61	
6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase penurunan jumlah tunggakan	5	39.999.600			11,80%	19.999.800	30,43 %	18.060.300				18.060.300		45,15	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koperasi																
7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat	11,9	29.999.860			11,80%	14.999.930	30,43 %	14.985.470				14.985.470		49,95	
8	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase penambahan anggota baru	0,75	887.855.940			0,75	443.777.940	3,5	416.664.614			4	416.664.614		46,93	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	49				48,25		46,53				47	-			
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	2	32.962.900			1,80%	16.481.450	2%	16.429.520			0	16.429.520		49,84	
10	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	3,5	85.695.740			3	42.847.870	3%	41.252.790			0	41.252.790		48,14	
		Persentase pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern					2		2%				0	-			
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri							5.626.800.002		2.106.213.432			0	2.106.213.432			
12	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	persentase pertumbuhan UMKM	20	398.003.850	13,19	129.435.320							13	129.435.320	65,95	32,52	
13	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	2	1.356.973.189	0,26	580.209.550							0	580.209.550	13,00	42,76	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	2		0,26	-							0	-	13,00		
14	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase peningkatan modal UMKM	3,5	822.030.574	0,22	406.527.425							0	406.527.425	6,29	49,45	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern (%)	2,2		9,1	-							9	-	413,64		
15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase penurunan jumlah tunggakan	25	2.225.665.500	5	1.074.160.887							5	1.074.160.887	20,00	48,26	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	49		48,34	-						-	48	-	98,65		
		Persentase peningkatan koperasi sehat	11,9		5,76	-						-	6	-	48,40		
2.10.	**PENANAMAN MODAL**				-	-		-	-	-	-	-		-	-		**DINAS PM DAN PTSP**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	82,8	5.625.129.114	94,03	3.573.772.923							94	3.573.772.923	113,56	63,53	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	834.143.824	80	460.141.470							80	460.141.470	100,00	55,16	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	162.122.400	100	91.644.300							100	91.644.300	100,00	56,53	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	147.200.000	A	106.399.740					100,00			106.399.740	100,00	72,28	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	94,5	9.368.977.200			94,05	4.520.521.752	96,63	4.299.675.599			97	4.299.675.599		45,89	
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor					1,839	52.199.590	5,635	50.951.600			6				
		Jumlah kerjasama investasi											0	-			
7	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi investasi	11	79.998.340			1 kali	39.998.970	1 kali	39.801.300				39.801.300		49,75	
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penertiban dokumen perijinan dan non perijinan sesuai SOP	100	528.810.920			100	264.405.295	100	233.076.505			100	233.076.505		44,08	
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	27				100		100				100	-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	29	652.242.850			28	326.120.910	28	284.402.790			28	284.402.790		43,60	
10	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	80	49.999.600			80	24.999.800	80	24.386.940			80	24.386.940		48,77	
11	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi (kerjasama)	9	1.940.275.788	8	714.597.510							8	714.597.510	88,89	36,83	
		Jumlah Promosi Investasi (kali)	5		5	-							5	-	100,00		
		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek (orang)	20		2	-							2	-	10,00		
12	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Investor (investor)	1451	1.870.659.477	1490	1.256.176.870							1490	1.256.176.870	102,69	67,15	
13	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	29	1.248.481.634	28	18.229.700							28	18.229.700	96,55	1,46	
14	Program optimalisasi pelayana publik	Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100	8.171.131.920	100	4.939.332.270							100	4.939.332.270	100,00	60,45	
		Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	100		100	-						-	100	-	100,00		
2.11	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				-								-		-		**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional	10 orang	639.545.650	2	239.364.550							2	239.364.550	20,00	37,43	
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang berwirausaha	100	293.028.789	64	175.133.200							64	175.133.200	64,00	59,77	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peringkat pramuka tingkat provinsi	2	416.281.260			2,00	208.141.051	5	183.709.812	250,00	88,26	5	183.709.812	250,00	44,13	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional	8	1.210.952.480			2,00	701.069.740	0	671.014.734	0,00	95,71	0	671.014.734	0,00	55,41	
		Persentase pemuda yang berwirausaha	65				65,00		65				65		100,00		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	30				27,00		30				30		100,00		
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	684 medali	28.048.201.500	176	14.162.011.670							176	14.162.011.670	25,73	50,49	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	90	18.142.003.800	85	18.312.263.500							85	18.312.263.500	94,44	100,94	
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras olah raga yang dibangun	13 buah	5.805.000.000	9	23.052.643.490							9	23.052.643.490	69,23	397,12	
6	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	30 buah	543.000.000	26	225.000.000							26	225.000.000	86,67	41,44	
7	Program Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah Penyelenggraan event olah raga rekreasi	40 event	8.000.000.000	6	2.000.000.000							6	2.000.000.000	15,00	25,00	
8	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olahraga ingkat daerah	557	24.209.925.850			33,00	11.714.295.961	45	10.843.173.940	136	-	45	10.843.173.940	8,08	44,79	
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik	90				87,00		87		100	-	87		96,67		
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun	13				3,00		3		100	-	3		23,08		
		jumlah penyelenggaraan event olahraga rekreasi	30				8,00		0		-	-	0		0,00		
2.12	**STATISTIK**												0				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kepuasan data pengguna statistik	85	471.438.794	80	217.920.750							80	217.920.750	94,12	46,22	
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedia	80	149.997.360			75,00	74.998.680	100	63.968.940	133,33	85,29	100	63.968.940	125,00	42,65	
2.13	**PERSANDIAN**												0				
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasian	Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan (set)	1	173.776.404			1,00	86.888.202	1	86.049.514	100,00	99,03	1	86.049.514	100,00	49,52	
		Persentase penanganan cyber attack	90				85,00		100				100		111,11		
2.14	**KEBUDAYAAN**				-										-		**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif (kelompok)	74	3.279.816.000	72	1.287.352.000							72	1.287.352.000	97,30	39,25	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	27		25	-							25	-	92,59	-	
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs cagar budaya yang dilindungi (BCB)	28	1.248.190.000	34	646.019.000							34	646.019.000	121,43	51,76	
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival budaya (event)	15	5.762.670.867	6	3.034.478.015							6	3.034.478.015	40,00	52,66	
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	73	730.871.160			73,00	493.569.290	80	419.841.428	109,59	85,06	80	419.841.428	109,59	57,44	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah (orang)	26				26,00		22		84,62		22	-	84,62		
		Jumlah penyelenggaraan festival budaya (event)	12				12,00		19		158,33		19	-	158,33		
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi	26	106.680.400			26,00	75.852.140	34	68.924.750	130,77	90,87	34	68.924.750	130,77	64,61	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.15	**PERPUSTAKAAN**				-										-		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	90	2.832.901.578	86,16	1.654.033.718							86	1.654.033.718	95,73	58,39	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	24.779.103.200	80	10.895.082.900							80	10.895.082.900	100,00	43,97	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	59.400.000	100	40.050.000							100	40.050.000	100,00	67,42	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	140.000.000	A	76.854.800							A	76.854.800	100,00	54,90	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	90	4.722.451.566			89,00	2.244.246.361	86,5	2.112.877.587	97,19	94,15	87	2.112.877.587	96,11	44,74	
6	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan	1810 orang	1.953.289.422	2084	827.416.920							2084	827.416.920	115,14	42,36	
7	Program Pembinanan Perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan (orang)	3546	744.554.576			1.738,00	333.178.748	2.226	319.698.030	128,08	95,95	2226	319.698.030	62,77	42,94	
2.16	**KEARSIPAN**										-	-	0	-	-	-	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	74,19	652.659.980	48,38	299.859.980							48	299.859.980	65,21	45,94	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi (berkas)	3800	986.152.230	760	401.980.651							760	401.980.651	20,00	40,76	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase PD dan Kelurahan yang telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar	32,05	42.131.000	19,23	23.531.000							19	23.531.000	60,00	55,85	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	100	1.820.190.260	48,38	277.365.910							48	277.365.910	48,38	15,24	
5	Program pengelolaaan arsip	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	74,19	93.547.200			25,80	59.334.110	25,80	54.327.530	100,00	91,56	26	54.327.530	34,78	58,07	
		Persentase PD yang melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	100				5,00		5		100,00		5		5,00		
6	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah dokumen/arsip yang diakuisisi	1520	258.866.336			132,00	116.871.966	132	113.096.722	100,00	96,77	132	113.096.722	8,68	43,69	
													0				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												0				
3.01.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				-										-		**DINAS PERTANIAN**
1	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi (ton)	560	9.028.894.094	540,27	5.788.129.860							540	5.788.129.860	96,48	64,11	
2	Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan	Persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	90,32	2.090.622.536	84	691.745.420							84	691.745.420	93,00	33,09	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok tani yang menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan	72	805.511.274				293.725.817		275.933.842		93,94	0	275.933.842	0,00	34,26	
		Persentase kematian ikan	5										0				
		Produksi ikan konsumsi (ton)	560				550,00		551,87		100,34		552				
		Jumlah angka konsumsi ikan (kg/kapita/Tahun)	35				34,00		33,67		99,03		34				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan (kali)	9	488.535.500	3	188.535.500						-	3	188.535.500	33,33	38,59	
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan (kali)	3	39.999.760			3,00	19.999.880	3	19.952.350	100,00	99,76	3	19.952.350	100,00	49,88	
3.02.	**PARIWISATA**				-	-		-		-					-		**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	5.849.199.402	83	3.628.652.297							83	3.628.652.297	93,26	62,04	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.352.151.812	80	738.519.395							80	738.519.395	100,00	54,62	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	123.529.905	100	82.950.000							100	82.950.000	100,00	67,15	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	163.746.747	A	119.993.190							A	119.993.190	100,00	73,28	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	89	10.261.764.088			86,00	5.545.480.996	86	4.788.544.965	100,00	86,35	86	4.788.544.965	96,63	46,66	
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80	23.324.157.566	55	4.047.675.420							55	4.047.675.420	68,75	17,35	
		Rata-rata lama tingggal wisatawan (hari)	1,5		1	-							1	-	66,67	-	
7	Program Pengembangan Destinasi Parawisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	50	28.044.889.530	40	16.859.334.425							40	16.859.334.425	80,00	60,12	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata (ow)	7		2	-						-	2	-	28,57	-	
8	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	80	325.998.140			75,00	292.117.660	65	224.457.400	86,67	76,84	65	224.457.400	81,25	68,85	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,5				1,40		1				1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa paiwisata	7				6,00		6				6				
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik	50	2.541.078.062									0				
		Jumlah pengembangan destinasi pariwisata (ow)	7										0				
10	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata (kerjasama)	7	2.583.113.233	0	558.398.750							0	558.398.750	0,00	21,62	
11	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	5	2.203.600.000	0	898.720.873							0	898.720.873	0,00	40,78	
12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	5	221.361.380			1,00	110.680.690	4	81.347.900	400	73,50	4	81.347.900	80,00	36,75	
3.03.	**PERTANIAN**						-				-	-		-	-	-	**DINAS PERTANIAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	6.138.051.360	83,61	3.971.681.258							84	3.971.681.258	93,94	64,71	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.677.746.650	85	1.837.750.740							85	1.837.750.740	106,25	49,97	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	519.652.000	100	272.052.000							100	272.052.000	100,00	52,35	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat	A	149.636.000	A	51.036.000					100,00	-	A	51.036.000	100,00	34,11	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	IKM	89	22.529.103.926			86,00	11.488.727.108	86,28	11.058.918.215	100	96,26	86	11.058.918.215	96,94	49,09	
6	Program peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	101	3.268.462.703	100,73	1.182.202.527							101	1.182.202.527	99,73	36,17	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan	30	780.073.574	35	132.759.149							35	132.759.149	116,67	17,02	
8	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan	30	20.063.380			29,00	632.930	50,00	626.800	172	99,03	50	626.800	166,67	3,12	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	100,22				100,15		100,15		100		100	-	99,93		
9	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas Padi (ton/ha)	6	11.846.131.595	5,63	679.899.018							6	679.899.018	93,83	5,74	
		Produktivitas Cabe (ton/ha)	12		8,94	-							9	-	74,50	-	
		Produktivitas Bawang (ton/ha)	15		11,9	-							12	-	79,33	-	
		Produktivitas Kakao (ton/ha)	1,4		0,94	-							1	-	67,14	-	
10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi (ton)	43.000	25.248.783.076	43038,86	5.922.549.319							43039	5.922.549.319	100,09	23,46	
		Produksi cabe (ton)	990		898	-							898	-	90,71	-	
		Produksi bawang (ton)	600		288	-							288	-	48,00	-	
		Produksi Kakao (ton)	1230		1029,65	-							1030	-	83,71	-	
11	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian	60	1.164.734.970	51	494.597.150							51	494.597.150	85,00	42,46	
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak	0,35	2.779.548.000	0	1.188.856.079							0	1.188.856.079	100,00	42,77	
13	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Sapi (ekor)	6202	16.258.140.626	5965	7.485.287.294							5965	7.485.287.294	96,18	46,04	
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	1131		1036	-							1036	-	91,60	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi (ton/ha)	5,18	1.963.062.450			5,17	495.254.032	5,17	457.995.212	100	92,48	5	457.995.212	99,81	23,33	
		Produktivitas bawang merah (ton/ha)	9				8,00		8,97				9				
		Produktivitas Cabe (ton/ha)	6,94				6,84		9,89				10				
		Produktivitas Kakao (ton/ha)	0,96				0,95		1,19				1				
		Produktivitas jagung (ton/ha)	7,93				7,77		10,01				10				
		Populasi Sapi (ekor)	6.025				5.992		5.995				5995				
		Jumlah kelahiran sapi	820				800		800				800				
15	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Produksi padi (ton)	41.200	227.999.080			41.000	54.675.540	43.905	53.841.150	107	98,47	43905	53.841.150	106,57	23,61	
		Produksi bawang merah (ton)	220				215		180,29		84		180		81,95		
		Produksi cabe (ton)	905				900		912,5		101		913		100,83		
		Produksi Kakao (ton)	1.110				1.105		776,04		70		776		69,91		
		Produksi jagung (ton)	2950				2.900		2.382		82		2382		80,75		
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	58,5	888.290.600			57,31	442.482.230	57,31	437.422.710	100	98,86	57,31	437.422.710	97,97	49,24	
17	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi anjuran	60	453.577.440			55,00	209.775.000	55,00	196.662.550	100	93,75	55,00	196.662.550	91,67	43,36	
18	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	35	8.665.012.500	50,71	5.974.379.222							51	5.974.379.222	144,89	68,95	
19	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase angka kematian ternak	0,3	2.524.570.550			0,30	1.008.471.425	0,3	966.177.482	100	95,81	0,30	966.177.482	100,00	38,27	
		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	35				34,00		34		100,00		34		97,14		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.04	**PERDAGANGAN**				-										-		**DINAS KOPERASI DAN UKM**
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	80	4.399.509.179	77,64	1.711.349.380							78	1.711.349.380	97,05	38,90	
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	5,5		4,45	-							4	-	80,91	-	
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	20	124.634.240			20	62.317.120	27,60	53.811.300	138,00	86,35	27,60	53.811.300	138,00	43,18	
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Jumlah Kerjasama Perdagangan (kerjasama)	35	35.057.217.130	16	22.147.163.520							16	22.147.163.520	45,71	63,17	
4	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP	90	13.356.159.525	80	7.274.754.396							80	7.274.754.396	88,89	54,47	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	11	328.564.320			4	120.460.625	2	88.096.869	50,00	73,13	2,00	88.096.869	18,18	26,81	
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pedagannng kaki lima yang memiliki izin usaha	6	150.000.000			20	17.929.920		12.640.600	-	70,50		12.640.600		8,43	
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	25	39.359.840			5	36.124.000		35.026.700	-	96,96		35.026.700		88,99	
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	5,5	68.748.320			85	1.085.987.840		1.081.113.690	-	99,55		1.081.113.690		1572,57	
		Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik	90				80										
3.05	**PERINDUSTRIAN**				-										-		**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu	2,75	4.140.317.000	3,7	2.090.086.350							4	2.090.086.350	134,55	50,48	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sistem Produksi	produk															
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase promosi produk yang memperoleh umpan balik	55	2.751.153.000	40	1.111.887.000							40	1.111.887.000	72,73	40,42	
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	3,35	4.114.347.743	2,3	2.213.435.050							2	2.213.435.050	68,66	53,80	
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna	3,35	12.338.256.470			3,3	536.624.651	2,1	497.487.599	63,64	92,71	2	497.487.599	62,69	4,03	
		Persentase sentra/klaster industri yan tertata	60				40		40		100,00		40	-	66,67		
5	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk	6	18.848.892.835	22	15.003.034.674							22	15.003.034.674	366,67	79,60	
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	2,75	74.460.060			2,50	37.230.030	2,2	36.835.090	88,00	98,94	2	36.835.090	80,00	49,47	
		Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk	1				1,00		9		900		9		900,00		
7	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Persentase sentra/klaster industri yang tertata	60	5.486.850.000	20	1.543.425.000						-	20	1.543.425.000	33,33	28,13	
4.	**FUNGSI PENDUKUNG URUSAN**				-										-		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				-										-		**SETDAKO**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM Setdako	89	30.361.349.797	88,64	25.169.137.500							89	25.169.137.500	99,60	82,90	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	0,8	23.928.498.748	80	16.912.955.500							80	16.912.955.500	10000,00	70,68	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	1	975.000.000	100	679.564.000							100	679.564.000	10000,00	69,70	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	20	639.917.650	0	233.400.000							0	233.400.000	0,00	36,47	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	5.398.368.398	A	2.281.264.566							A	2.281.264.566	100,00	42,26	
		Nilai IKM Kota	81,85		86,48	-							86	-	105,66		
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	15.538.142.980	100	9.026.213.224							100	9.026.213.224	100,00	58,09	
7	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100	149.980.000	100	82.310.200							100	82.310.200	100,00	54,88	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen sakip setdako sesuai pedoman	100	46.991.649.070			100	10.074.993.808	10000 %	9.420.617.373	100,00	93,50	100	9.420.617.373	100,00	20,05	
		Persentase sasaran, program dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra	100				100		10000 %		100,00		100		100,00		
		IKM Sekretariat Daerah	87				86		89,94		104,58		90		103,38		
		Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	A				A		A		A		A		100,00		
		Nilai Evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja oleh Kemenpan RB	12,5				12,01		11,72		97,59		12		93,76		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	39,09				39,09		39,09		100,00		39		100,00		
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori baik pada tahun n	100				100		100		100,00		100		100,00		
		Persentase unit pelayanan publik dengan kategori baik	66,67				66,67		100		149,99		100		149,99		
		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah	100				100		100		100,00		100		100,00		
		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100				200		100		50,00		100		100,00		
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	90				85		85		100,00		85		94,44		
		Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai SOP	100				100		100		100,00		100		100,00		
		Persentase pelayanan informasi kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipublikasikan	100				100		100		100,00		100		100,00		
9	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	90	4.516.600.489	0	2.371.763.053							0	2.371.763.053	0,00	52,51	
10	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan	100	1.390.975.559	100	789.989.850							100	789.989.850	100,00	56,79	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase pengelola kegiatan yang tertib administrasi sesuai dengan aturan	96,5	928.974.020	90	443.581.640							90	443.581.640	93,26	47,75	
12	Program Pembinaan dan Pengawasan jasa konstruksi	Persentase tertib administrasi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100	5.915.087.430	100	3.434.802.284							100	3.434.802.284	100,00	58,07	
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	5	4.849.472.497	0	2.363.672.890							0	2.363.672.890	0,00	48,74	
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	75		65	-							65	-	86,67	-	
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti	100	1.701.866.119	100	695.830.368							100	695.830.368	100,00	40,89	
15	Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal	100	1.757.919.323	100	851.191.650							100	851.191.650	100,00	48,42	
16	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Kota Payakumbuh	3	4.885.572.350			3,1500	2.852.662.745	3,1238	2.494.309.125	99,17	87,44	3,1238	2.494.309.125	98,85	51,05	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	100				100		100								
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	100				90		90								
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	85				80		80								
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	80				77		77								
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	100				80		100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	85				80		80								
		Jumlah sekolah/madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	4				4		4								
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	100				100		100								
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	80				75		100								
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	85				80		100								
		Persentase peraturan perundangundangan yang dipublikasikan ke masyarakat	100				100		100								
17	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Peringkat LPPD	12	10.442.463.400	15	4.905.706.372							15	4.905.706.372	80,00	46,98	
18	Program peningkatan produksi daerah	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	100	2.415.893.050	100	989.537.100							100	989.537.100	100,00	40,96	
19	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamaan	Persentase perda yang dibahas di	83	17.492.711.152	77	6.021.006.650							77	6.021.006.650	92,77	34,42	
20	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	100	1.340.844.440			100	625.784.364	100	519.408.472	100,00	83,00	100	519.408.472	100,00	38,74	
		Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	100				100		100								
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	100				100		100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase terlaksananya penyajian data/informasi bidang ekonomi	100				100		100								
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	100				100		100								
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	100				100		100								
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				-										-		**SEKRETARIAT DPRD**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peraturan perundangundangan	81,85	47.526.772.360	83,28	29.753.050.395							83	29.753.050.395	101,75	62,60	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	yang dipublikasikan ke masyarakat	80	7.877.558.194	100	6.075.630.312							100	6.075.630.312	125,00	77,13	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	946.660.000	100	671.440.000							100	671.440.000	100,00	70,93	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	4.325.250.000	A	2.556.215.000							A	2.556.215.000	100,00	59,10	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	81,85	37.747.567.084			81,35	18.502.904.875	80,99	15.596.190.810	99,56	84,29	80,99	15.596.190.810	98,95	41,32	
		Nilai AKIP	A				A		A								
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	100	96.908.080.000	100	51.145.193.985							100	51.145.193.985	100,00	52,78	
		Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi (buah)	15		12	-							12	-	80,00	-	
													0				
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi rapat-rapat dan persidangan DPRD tepat	100	29.269.869.640			100,00	12.407.925.950	100	11.045.767.070	100,00	89,02	100,00	11.045.767.070	100,00	37,74	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		waktu															
5.	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5.01	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**				-										-		**BAPPEDA**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	6.764.444.054	86,57	3.648.182.223							87	3.648.182.223	97,27	53,93	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	2.099.576.436	80	1.332.978.778							80	1.332.978.778	100,00	63,49	
3	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	122.400.000	100	75.145.900							100	75.145.900	100,00	61,39	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	18	257.886.373	9	103.781.448							9	103.781.448	50,00	40,24	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	161.703.750	AA	78.261.915							AA	78.261.915	110,00	48,40	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	89	10.450.296.576			86	5.561.369.913	87,82	5.140.186.166	102,12	92,43	87,82	5.140.186.166	98,67	49,19	
		Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	A				A		AA								
		Persentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan	58,82				44,12		44,12								
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	100				100		100								
		Persentase Capaian realisasi keuangan program kegiatan	100				100		93,04								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah	95	1.755.110.830	85	908.839.660							85	908.839.660	89,47	51,78	
8	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	18	1.542.666.540			17,50	678.010.810	20,91	648.227.630	119,49	95,61	20,91	648.227.630	116,17	42,02	
		Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	97,22				93,39		93,39								
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	29				28		24,04								
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	20				18		11,51								
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yangsesuai dengan prioritas pembangunan daerah	90,91				86,36		90								
		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	98,5				97,38		92,5								
		Tingkat aksebilitas data	100				100,00		100								
		Persentase perangkat daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90%	93,55				90,32		90,32								
		Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	96,84				96,20		96,2								
9	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90	475.165.066	100	292.390.050							100	292.390.050	111,11	61,53	
10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	510.381.671	100	210.010.450							100	210.010.450	100,00	41,15	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah dan besar yang ditindaklanjuti	100	1.042.253.430	100	475.332.835							100	475.332.835	100,00	45,61	
12	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	100	537.525.903	100	342.905.360							100	342.905.360	100,00	63,79	
13	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98,8	9.516.395.742	100	5.205.596.083							100	5.205.596.083	101,21	54,70	
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	70		84,15	-							84	-	120,21	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	100		100	-							100	-	100,00	-	
14	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	1.438.091.878	100	1.084.891.730							100	1.084.891.730	100,00	75,44	
15	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase PD lingkup bidang sosial dan budaya yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100	1.724.408.408	100	795.099.440							100	795.099.440	100,00	46,11	
16	Program Penyusunan Aksi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase Rencana Aksi PPK dengan Kategori Minimal Baik (Hijau)	100	251.674.250	100	143.328.200							100	143.328.200	100,00	56,95	
17	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	98,80	413.801.820			98,20	191.665.240	108,11	186.206.100	110,09	97,15	108,11	186.206.100	109,42	45,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	100,00				100,00		100								
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional,kab/kota wilayah perbatasan kota	100,00				100,00		100								
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindak lanjuti	100,00				100,00		100								
		Tingkat kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah	100,00				100,00		100								
5:02	**KEUANGAN**				-										-		**BADAN KEUANGAN DAERAH**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	90	27.930.491.211	87,95	13.280.502.791							88	13.280.502.791	97,72	47,55	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.148.727.221	80	2.419.936.500							80	2.419.936.500	100,00	76,85	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	248.790.000	100	140.790.000							100	140.790.000	100,00	56,59	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	20 orang	400.000.000	10	400.000.000							10	400.000.000	50,00	100,00	
5	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	164.370.000	A	80.695.090							A	80.695.090	100,00	49,09	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM	85	20.537.647.466			83,00	9.052.551.266	87,23	8.427.277.054	105,10	93,09	87,23	8.427.277.054	102,62	41,03	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten/Kota																
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	95	164.370.000	93,02	1.954.147.197							93	1.954.147.197	97,92	1188,87	
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan	10		8,4	-							8	-	84,00	-	
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	Ada		Ada	-							Ada	-	100,00	-	
		Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	74,41		100	-							100	-	134,39	-	
		Persentase realisasi PAD	100		110	-							110	-	110,00	-	
8	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	95	26.640.157.440			95	3.653.168.090	90,70	2.849.793.890	95,47	78,01	90,70	2.849.793.890	95,47	10,70	
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD	<10				<10%		10,96 % (>10%)								
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	Ada				Ada		Ada								
9	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	93,54	1.524.929.260			90,32	1.014.486.840	100	951.464.025	110,72	93,79	100,00	951.464.025	106,91	62,39	
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya pendapatan daerah	100	1.424.625.510			5,00	484.336.765	0	369.410.565	-	76,27	0,00	369.410.565	0,00	25,93	
11	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	70	1.200.000.000	32	4.081.064.162							32	4.081.064.162	45,71	340,09	
5:03	**KEPEGAWAIAN**				-										-		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	85	3.309.822.898	83,36	2.275.327.358							83	2.275.327.358	98,07	68,74	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.377.856.197	80	677.872.875							80	677.872.875	100,00	49,20	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	131.040.000	100	76.860.000							100	76.860.000	100,00	58,65	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	0,64	6.726.422.970	98,08	3.150.523.117							98	3.150.523.117	15325,00	46,84	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	101.205.508	A	56.800.300							A	56.800.300	100,00	56,12	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	85	14.619.786.590			83,85	5.225.088.641	88,5	4.784.849.181	105,55	91,57	88,50	4.784.849.181	104,12	32,73	
7	Program Kepegawaian Daerah	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap	100	1.506.143.580			100,00	985.432.740	100	890.010.220	100,00	90,32	100,00	890.010.220	100,00	59,09	
		Persentase laporan kesalahan data Kepegawaian yang ditindaklanjuti	100				100,00		100								
		Persentase penyelesaian produk layanan	100				100,00		100								
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100				100,00		100								
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100				100,00		100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik	99,5				99,40		100								
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap	100	5.812.094.401	100	3.679.414.034							100	3.679.414.034	100,00	63,31	
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	100		100	-							100	-	100,00	-	
		Persentase penyelesaian produk layanan	100		100	-							100	-	100,00	-	
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	100		100	-							100	-	100,00	-	
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	100		100	-							100	-	100,00	-	
		Persentase Prestasi Kerja PNS Bernilai Baik	99,5		100	-							100	-	100,50	-	
5:04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																**BKPSDM**
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	64	220.053.800				279.972.455		230.288.635	#DIV/0!	82,25	0,00	230.288.635	0,00	104,65	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																**BAPPEDA**
1	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder (jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	95	3.818.940.853	84,62	1.749.791.923							85	1.749.791.923	89,07	45,82	
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dijasikan dasar dalam perumusan kebiajkan	95	576.723.920			90,00	230.335.120	90	222.810.630	100	96,73	90,00	222.810.630	94,74	38,63	
		Indeks inovasi daerah	4140				8.200,00		14.087								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	100				100,00		100								
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	2				2,00		2								
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100				100,00		100								
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																
6:01	**INSPEKTORAT DAERAH**				-										-		**INSPEKTORAT**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	81,85	2.282.943.040	86,94	1.880.078.323							87	1.880.078.323	106,22	82,35	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	1.532.409.827	96,84	666.333.078							97	666.333.078	121,05	43,48	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	141.787.900	100	106.377.000							100	106.377.000	100,00	75,03	
4	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	280.091.000	AA	132.363.250								132.363.250	110,00	47,26	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	81,85	15.002.450.102			81,85	8.361.527.259	87,58	7.813.908.159	107,001	93,45	87,58	7.813.908.159	107,00	52,08	
6	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat/level kapabilitas APIP	3	3.574.072.000	2	1.812.812.523							2	1.812.812.523	66,67	50,72	
7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah	100	3.143.796.000	100	1.754.680.100							100	1.754.680.100	100,00	55,81	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh	100	1.908.490.080			100,00	959.464.700	100	796.917.301	100,00	83,06	100,00	796.917.301	100,00	41,76	
9	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendai hasil pemriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	60	17.521.666.333	86,32	4.162.077.650							86	4.162.077.650	143,87	23,75	
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindak lanjuti	82	2.559.185.060			82,00	1.110.235.680	84,45	733.312.040	102,99	66,05	84,45	733.312.040	102,99	28,65	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	60				60,00		52,41								
		Tingkat/Level Kapabilitas APIP	3				3		2+								
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7.01	**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**				-										-		**KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	6.690.566.024	89,86	3.771.472.440							90	3.771.472.440	98,75	56,37	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	6.459.801.748	80	4.591.737.027							80	4.591.737.027	100,00	71,08	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	335.685.000	100	215.914.150							100	215.914.150	100,00	64,32	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	18	104.277.000	3	59.277.000							3	59.277.000	16,67	56,85	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	120.000.000	A	64.067.010							A	64.067.010	100,00	53,39	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	23.377.317.718			90,00	11.613.675.997	90,89	9.885.380.597	100,99	85,12	90,89	9.885.380.597	99,88	42,29	
7	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	2.891.645.880	100	2.135.670.055							100	2.135.670.055	100,00	73,86	
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	959.021.200	100	668.775.758							100	668.775.758	100,00	69,74	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Nilai IKM	91	18.685.845.010	89,86	1.846.619.543							90	1.846.619.543	98,75	9,88	
10	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	85	1.325.952.550	75	6.745.571.652							75	6.745.571.652	88,24	508,73	
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	75	175.559.756			70,00	87.779.878	70	85.665.126	100,00	97,59	70,00	85.665.126	93,33	48,80	
		Persentase Pelayanan yang diproses	100				100,00		100								
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	75	4.643.773.998			70,00	2.331.796.499	70	2.229.030.645	100,00	95,59	70,00	2.229.030.645	93,33	48,00	
		IKM Kelurahan	91				90,00		90,89								
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100				100,00		100								
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	100	184.724.680			80,00	92.362.140	80	76.224.750	100,00	82,53	80,00	76.224.750	80,00	41,26	
		Persentase santri yang berkualitas	80														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	24.717.160			100,00	1.140.441.160	100	993.861.720	100,00	87,15	100,00	993.861.720	100,00	4020,94	
7.02	**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**																**KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	5.797.566.931	87	3.392.895.850							87	3.392.895.850	95,60	58,52	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.678.821.960	80	1.686.804.161							80	1.686.804.161	100,00	45,85	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	314.719.500	100	168.346.500							100	168.346.500	100,00	53,49	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	15	50.000.000	3	20.000.000							3	20.000.000	20,00	40,00	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	141.373.000	A	81.903.950							A	81.903.950	100,00	57,93	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	15.248.428.306			90,00	7.177.454.974	91,74	6.740.013.738	101,93	93,91	91,74	6.740.013.738	100,81	44,20	
7	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	3.628.800.463	100	1.925.751.784							100	1.925.751.784	100,00	53,07	
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	797.986.050	100	513.700.850							100	513.700.850	100,00	64,37	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Nilai IKM	91	16.368.218.930	87	5.066.558.561							87	5.066.558.561	95,60	30,95	
10	Program Peningkatan kualitas pelayanan	Persentase santri yang berkualitas	85	760.138.555	75	507.895.255							75	507.895.255	88,24	66,82	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kehidupan beragama																
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	75	137.425.160			65,00	68.712.580	65	49.931.200	100,00	72,67	65,00	49.931.200	86,67	36,33	
		Persentase Pelayanan yang diproses	100				100,00		100								
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	70	2.485.990.982			75,00	1.242.995.491	75	1.194.716.573	100,00	96,12	75,00	1.194.716.573	107,14	48,06	
		IKM Kelurahan	91				90,00		90,89								
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100				100,00		100								
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	100	158.599.580			75,00	79.299.790	75	72.338.050	100,00	91,22	75,00	72.338.050	75,00	45,61	
		Persentase santri yang berkualitas	80														
14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	38.861.480			100,00	234.405.740	100	220.670.550	100,00	94,14	100,00	220.670.550	100,00	567,84	
7.03	**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**												0				**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	91	5.719.822.296	0	3.617.741.138							0	3.617.741.138	0,00	63,25	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	0,8	10.767.636.743	80	11.459.398.532							80	11.459.398.532	10000,00	106,42	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	221.250.000	100	143.866.000							100	143.866.000	100,00	65,02	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	18	60.000.000	0	30.000.000							0	30.000.000	0,00	50,00	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	AA	120.000.000	A	62.988.000							A	62.988.000	100,00	52,49	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	14.533.526.800			90,00	7.268.522.207	90,08	6.657.671.437	100,09	91,60	90,08	6.657.671.437	98,99	45,81	
7	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	1	3.630.300.900	100	2.352.548.105							100	2.352.548.105	10000,00	64,80	
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	1	718.433.000	100	533.546.250							100	533.546.250	10000,00	74,27	
9	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	Nilai IKM	91	23.482.591.286	89	6.468.390.120							89	6.468.390.120	97,80	27,55	
		Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	100		100	-							100	-	100,00	-	
10	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	0,85	752.755.200	75	432.241.000							75	432.241.000	8823,53	57,42	
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	70	141.468.820			70,00	70.734.410	70	59.557.500	100,00	84,20	70,00	59.557.500	100,00	42,10	
		Persentase Pelayanan yang diproses	100				100,00		100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	70	2.485.990.982			75,00	1.639.686.788	75	1.536.903.553	100,00	93,73	75,00	1.536.903.553	107,14	61,82	
		IKM Kelurahan	91				90,00		90,89								
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100				100,00		100								
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	100	292.443.680			75,00	146.220.840	75	113.315.900	100,00	77,50	75,00	113.315.900	75,00	38,75	
		Persentase santri yang berkualitas	85														
14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	45.799.466			100,00	723.588.653	100	492.078.950	100,00	68,01	100,00	492.078.950	100,00	1074,42	
7.04	**KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN**												0				**KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	90	4.984.608.684	87,08	2.701.870.179					#DIV/0!	#DIV/0!	87	2.701.870.179	96,76	54,20	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.411.886.700	80	1.296.917.700					#DIV/0!	#DIV/0!	80	1.296.917.700	100,00	38,01	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	153.270.000	100	98.680.100					#DIV/0!	#DIV/0!	100	98.680.100	100,00	64,38	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 orang	71.067.633	3	15.313.000					0,00	0,00	3	15.313.000	100,00	21,55	
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	135.742.000	A	57.759.050					100,00	#DIV/0!	#VALUE!	57.759.050	100,00	42,55	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	91	10.603.353.778			89,00	5.122.418.899	89,67	4.745.765.615	100,75	92,65	89,67	4.745.765.615	98,54	44,76	
7	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	2.749.055.630	100	1.357.720.285							100	1.357.720.285	100,00	49,39	
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	590.745.670	100	351.902.920							100	351.902.920	100,00	59,57	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Nilai IKM	91	16.369.853.961	87,08	3.096.134.622							87	3.096.134.622	95,69	18,91	
		Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	100		100	-							100	-	100,00	-	
10	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	85	423.108.610	75	530.111.650							75	530.111.650	88,24	125,29	
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	75	57.176.500			70,00	19.327.170	70	17.966.100	100,00	92,96	70,00	17.966.100	93,33	31,42	
		Persentase Pelayanan yang diproses	100				100,00		100								
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	75	1.843.542.916			75,00	909.788.108	75	864.381.117	100,00	95,01	75,00	864.381.117	100,00	46,89	
		IKM Kelurahan	90				89,00		89,67								
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100				100,00		100								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	100	125.030.520			80,00	62.515.260	80	58.613.300	100,00	93,76	80,00	58.613.300	80,00	46,88	
		Persentase santri yang berkualitas	85														
14	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	6.160.640			100,00	541.130.320	100	297.304.350	100,00	54,94	100,00	297.304.350	100,00	4825,87	
7.05	**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**				-										-		**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	4.897.737.754	84	2.557.544.832							84	2.557.544.832	94,38	52,22	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	3.566.989.917	80	1.809.803.102							80	1.809.803.102	100,00	50,74	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	139.070.210	100	85.534.200							100	85.534.200	100,00	61,50	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	168.395.750	A	78.017.100							A	78.017.100	100,00	46,33	
5	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	2.691.061.970	100	1.500.511.215							100	1.500.511.215	100,00	55,76	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	89	10.177.552.258			89,00	4.916.888.251	89,67	4.633.702.553	100,75	94,24	89,67	4.633.702.553	100,75	45,53	
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kehadiran peserta musrenbang	100	523.184.298	100	294.644.800							100	294.644.800	100,00	56,32	
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Nilai IKM	89	14.952.383.018	84	2.282.822.048							84	2.282.822.048	94,38	15,27	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	Persentase santri yang berkualitas	85	698.680.750	75	394.735.730							75	394.735.730	88,24	56,50	
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	70	50.018.680			70,00	17.890.610	70	17.316.240	100,00	96,79	70,00	17.316.240	100,00	34,62	
		Persentase Pelayanan yang diproses	100				100,00		100								
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	70	1.759.514.616			70,00	871.875.396	70	841.545.828	100,00	96,52	70,00	841.545.828	100,00	47,83	
		IKM Kelurahan	89				87,00		87		100,00		87,00				
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100				100,00		100		100,00		100,00				
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	100	166.181.900			80,00	83.090.950	80	82.312.600	100,00	99,06	80,00	82.312.600	80,00	49,53	
		Persentase santri yang berkualitas	85														
13	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	54.274.320			100,00	355.237.160	100	341.543.760	100,00	96,15	100,00	341.543.760	100,00	629,29	
8:00	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																
8:01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																**KANTOR KESBANGPOL**
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	92	3.574.102.232	90,02	1.921.904.154							90	1.921.904.154	97,85	53,77	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80	525.246.000	80	327.497.584							80	327.497.584	100,00	62,35	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	39.600.000	100	25.200.000							100	25.200.000	100,00	63,64	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	180.000.000	A	104.892.125							A	104.892.125	100,00	58,27	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	87	3.191.704.542			87,00	1.581.128.279	90,22	1.493.460.071	103,70	94,46	90,22	1.493.460.071	103,70	46,79	
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100	15.443.180.962	95	5.490.984.960							95	5.490.984.960	95,00	35,56	
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang dapat sosialisasi wawasan kebangsaan	25,06	105.977.540			25,00	67.421.560	25,06	66.884.000	100,24	99,20	25,06	66.884.000	100,00	63,11	
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sosialisasi yang diadakan	5 kali	1.099.706.930	5	377.597.170							5	377.597.170	100,00	34,34	
9	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah rapat tim dan sosialisasi pada parpol/ormas	5 kali	2.656.653.180	86,27	1.204.145.090							86	1.204.145.090	100,00	45,33	
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Persentase partai politik dan ormas yang aktif	90,64	1.578.309.126			90,64	796.954.563	90	795.763.113	99,51	99,85	90,20	795.763.113	99,51	50,42	
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Persentase penanganan konflik antar agama	100	411.215.640			100,00	216.957.820	100	176.039.500	100,00	81,14	100,00	176.039.500	100,00	42,81	
12	Program eningkatan Kewaspadaanasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100	1.296.170.820			100,00	618.053.410	100	566.953.620	100,00	91,73	100,00	566.953.620	100,00	43,74	

2.1.7. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan ini dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selanjutnya, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. SPM merupakan salah satu yang turut dievaluasi, karena ini merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2019, 2020, dan 2021, karena SPM ini baru diterapkan mulai tahun 2019.

Tabel II-172
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019-2021

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
A	**Pendidikan**							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	2.870	2.620	5.807	3.836	66.05
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartispasi dalam pendidikan dasar (SD, SMP, MTs)	Orang	24.431	24.591	14.456	15.464	107.86
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum	Orang	105	183	400	462	115.5

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan						
B	**Kesehatan**							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,26	92,78	3.169	2.775	87.57
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalian mendapatkan pelayanan persalinan	%	72,04	90,12	3.025	2.516	83.17
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	73,21	90,12	2.812	2.506	89.12
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	60,65	78,26	13.434	10.537	78.44
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,29	82,00	21.872	18.290	83.62
6	Pelayanan Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,2	65,47	89.597	81.881	91.39
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	82,00	82,35	18.936	11.025	58.22
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	104,6	80,15	22.404	18.068	80.65
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	80	89,34	1.342	1.421	105.89
10	Pelayanan	Persentase Orang	%	50,4	38,79	811	549	67.69

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
	kesehatan orang TB	terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
11	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	92,96	74,35	3.751	2.874	76.62
C	**Pekerjaan Umum**							
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik minimal sesuai haknya	%	93,23	95,98	97.52	90	92.28
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	98,60	96,84	98.02	97.54	99.51
D	**PERUMAHAN**							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni gabi korban bencana	orang	NA	NA	NA	NA	NA
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	NA	NA	NA	NA	NA
E	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Pelayanan ketentraman	Cakupan penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
	dan ketertiban umum	dan Peraturan Kepala Daerah di kabupaten / Kota						
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100
		Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten / Kota	rasio	1,3	1,3	1,3	1,3	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran di Kabupaten / Kota	%	124,33	124,33	124,33	124,33	100
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	%	100	100	100	100	100
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	85,71	85,71	85,71	85,71	100
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	unit	3	3	3	3	100
E	**Sosial**							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	13,28	37,39			
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				369	370	100.27
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	51,21	92,30			
		Jumlah anak terlantar yang				13	16	123,08

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi		2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
		memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti						
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	23,50	100			
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				201	265	131.84
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	85	100			
		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				9	12	133.33
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	39,47			
		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah				8	8	100

BAB 3
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa pasal Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga dicabut, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh dapat dilakukan

dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

   Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

   Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

   Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan.

   Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

3. Pertanggungiawaban Keuangan Daerah

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal

yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggararan dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan Kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

1. Transparansi dan Akuntabel
   Setiap pengeluaran belanja langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3. Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mnedukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

4. Tolok Ukur dan Target Kinerja
   Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukut dan target kinerja yang meliputi masukan *(input)*, output *(keluaran)* dan hasil *(outcome)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan

penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
   a. Dana Bagi Hasil
   b. Dana Alokasi Umum
   c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat;
   c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

Sementara, struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
   a. Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana Perimbangan
         a) Dana Transfer Umum
            (1) DBH; dan
            (2) DAU.
         b) Dana Transfer Khusus
            (1) DAK Fisik; dan
            (2) DAK Non Fisik.
      2) Dana Insentif Daerah;
      3) Dana Otonomi Khusus;
      4) Dana Keistimewaan;
      5) Dana Desa.
   b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat;
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, terdapat perbedaan struktur pendapatan daerah terutama pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, perubahan kebijakan tersebut sudah berlaku dan disesuaikan untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Sebagaimana pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami perubahan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Hibah
   c. Belanja bantuan sosial
   d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik
   e. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja langsung
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang dan Jasa
   c. Belanja Modal

Sementara struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Jalan;
   e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
   f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. SiLPA;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembentukan Dana Cadangan;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembiayaan daerah, tidak ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal di atas maka pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nasional efektif dilaksanakan dimulai pada Tahun Anggaran 2021.

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pembangunan pada Tahun 2021 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi daerah agar lebih efisien dan efektif. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*).

Melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan siginfikan yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Payakumbuh. Dampak paling siginfikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang tentunya akan berdampak besar pada belanja daerah, sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh pada Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

APBN Tahun 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekalius berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi secara bertahap, dan akan terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dimasa datang. Fokus utama arah kebijakan fiscal pada tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Refoemasi Struktural yaitu; *pertama* akselerasi penananan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan, sebagai

pemulihan ekonomi dengan menggencarkan vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit darurat, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. *Kedua* menjaga ketahanan hidup dan pemulihan akselerasi melalui perlindungan sosial, dukkungan terhadap dunia usaha dan UMKM dengan memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). *Ketiga* momentum reformasi struktural untuk peningkatan dana saing dan kapasitas berproduksi melalui SDM yang unggul dan berintegritas atau berpendidikan, system kesehatan yang handal, perlindungan social yang adaptif, infrastruktuk pendukung transformasi ekonomi dan juga reformasi institusional. *Keempat* reformasi fiscal yan komprehensif dengan reformasi perpajakan, mengunakan belanja Negara lebih baik *(zero based budgetting)* dan cadangan untuk antisipasi ketidakpastian serta inovasi pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Sovereign Wealth Funds* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) serta pengendalian hutang. *Kelima* menjaga pelaksanaan APBN 2022 tetap berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal 2023 yakni dengan reformasi structural harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil dan menjadi komitmen bersama di seluruh kementerian/lembaga.

Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait dana bagi hasil (DBH) di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tujuannya, untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih maksimal dalam menggunakan dana yang telah dibagihasilkan oleh pemerintah pusat. Poin-poin aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) akan berlaku bertahap mulai tahun 2023 hingga bersifat transisi sampai lima tahun ke depan sejak Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) berlaku. Setelah Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 muncul isu pengaturan *mandatory spending* (belanja wajib) terkait dengan infrastruktur, daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur paling rendah 40% dari total APBD. Kesenjangan Infrastruktur antar daerah di Indonesia pun masih terdapat 116 daerah yang memiliki kondisi jalan tidak mantap di atas 50%, untuk kondisi air minum sebanyak 123 daerah dan sanitasi layak sebanyak 190 daerah masih di bawah 75%. Investasi infrastruktur baru merupakan hal penting. Untuk itu pengalokasian aliran sumber daya keuangan yang konsisten untuk pengoperasian dan pemeliharaan adalah syarat yang diperlukan untuk keberhasilan layanan infrastruktur. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%-6% persen per tahun antara lain melalui investasi infrastruktur. Kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp. 137,3 triliun atau mencapai 11,5% dari APBD.

Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) membuka potensi bertambahnya pajak daerah, diantaranya melalui pilar pengembangan system pajak dan sejumlah ketententuannya. Semisal kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil untuk PBB dari jumlah sebelumnya 90% menjadi 100%. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) atau rokok naik dari 2% menjadi 3%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil walau pun berbeda provinsi. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mereklasifikasi jenis pajak daerah dari 16 menjadi 14 jenis jenis pajak daerah dan

merasionalisasikan retribusi daerah dari 32 menjadi 18 jenis layanan. Pengaturan alokasi pembagian:

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk daerah.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:
   * provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
   * kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
   * kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara yang bersumber dari iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b. kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:
   a. provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (2 persen);
   b. kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
   c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
   d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
   e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,57% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:
   a. Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
   b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
   c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efesien dan efektif melalui Hubungan Keuanan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Menguatkan Sistem Perpajakan Daerah;
   Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai (opsen) persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.
   Adanya pengabungan objek pajak sejenis dengan harapan *collection* dan *administrative costnya* menjadi lebih baik.

2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;
   Merefomulasikan Dana Alokasi Umum agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus untuk prioritas nasional, menintegrasikan pengelolaan Transfer Ke Daerah berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya *Dana Abadi Daerah* untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinegri antar sumber pendanaannya.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;
   Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan internal di daerah, Transfer Ke Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.
   Fungsi Transfer Ke Daerah yang sebagai *counter-cyclical policy member* keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refokusing APBD dalam situasi tertentu. Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi penguatan monitoring dan evaluasi.

   Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintah dalam kerangka Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi; (a). penyelengaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, (b). Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas APBN.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan Rancangan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 4 (Empat) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Payakumbuh secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 4 tahun ke depan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Perkiraan proyeksi selama 4 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 4 tahun ke depan (dari tahun 2023 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai

penambah ekuitas. Rancangan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel III-1.

Tabel III-1
Komposisi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2021

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA DAERAH (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)
1	2017	739.010.301.393	694.223.803.927	78.089.893.439
2	2018	708.532.769.023	716.396.747.761	91.411.296.761
3	2019	796.837.014.305	805.939.541.097	79.735.967.331
4	2020	717.701.105.678	750.947.870.902	42.047.582.714
5	2021	682.401.082.138	747.200.734.949	64.799.652.811

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2020 dan Target Perubahan APBD Tahun 2021

Dari tabel III-1 terlihat bahwa anggaran untuk pendapatan turun tahun 2018 karena pengurangan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan naik kembali tahun 2019. Namun turunnya Transfer Ke Daerah Dan Desa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan hingga di tahun 2021. Untuk belanja daerah tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Payakumbuh. Pendapatan daerah Kota Payakumbuh disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Payakumbuh, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat serta sumber lain – lain yang sah.

Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tabel III-2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah Tahun 2017			
	a. PAD	114.778.257.966,00	116.596.479.804,00	101,58%
	b. Pendapatan Transfer	631.100.535.835,00	621.597.821.589,00	98,49%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	1.050.000.000,00	816.000.000,00	77,71%
	Jumlah	746.928.793.801,00	739.010.301.393,00	98,94%
2.	Pendapatan Daerah Tahun 2018			
	a. PAD	103.244.423.500,00	94.287.442.042,00	91,32%
	b. Pendapatan Transfer	597.312.289.208,00	591.819.046.982,00	99,08%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	22.648.000.000,00	22.426.280.000,00	99,02%
	Jumlah	723.204.712.708,00	708.532.769.024,00	97,97%
3.	Pendapatan Daerah Tahun 2019			
	a. PAD	114.293.428.569,00	104.070.234.422,00	91,06%
	b. Pendapatan Transfer	684.325.991.255,00	672.960.290.170,00	98,34%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	19.381.600.000,00	19.806.489.713,0 0	102,19%
	Jumlah	818.001.019.824,00	796.837.014.305,00	97,41%
4.	Pendapatan Daerah Tahun 2020			
	a. PAD	98.325.518.029,00	115.996.425.752,00	117,97%
	b. Pendapatan Transfer	591.974.970.159,00	583.260.279.926,00	98,53%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	18.599.800.000,00	18.444.400.000,00	99,16%
	Jumlah	708.900.288.188,00	717.701.105.678,00	101,24%
5	Pendapatan Daerah Tahun 2021			
	a. PAD	93.427.968.867,00	90.291.310.165,00	96,64%
	b. Pendapatan Transfer	570.136.213.271,00	568.343.603.248,00	99,69%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	18.836.900.000,00	18.662.020.000,00	99,07%
	Jumlah	682.401.082.138,00	677.296.933.413,00	99,25%

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Diolah dari LRA Pemerintah Kota Payakumbuh 2017 s/d 2021

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi PAD Kota Payakumbuh terhadap total realisasi pendapatan daerah rata-rata berada pada angka 14,33%, terbilang rendah sehingga Kota Payakumbuh masih tinggi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kota Payakumbuh terjadi pada tahun 2020, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 101,24% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kinerja realisasi PAD dan

Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah masing-masing sebesar 117,97%, 98,45% dan 99,16% .

Kinerja PAD tahun 2017 - 2021 memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 14.33%. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar 57,79%, selanjutnya Pajak Daerah dengan rata-rata kontribusi 16,67%, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 6,96% dan terakhir retribusi daerah dengan rata-rata kontribusi 6,08%,

Dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung pembangunan ekonomi.

Khusus untuk capaian realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah selama 2017 -2021 yang mengalami peningkatan sebesar 17,85%. Dimana persentase kenaikan realisasi terbesar berasal dari pajak parkir yang naik sebesar 61,19%, BPHTB sebesar 43,68%, pajak hotel 43,24%, Pajak Restoran 13,27%, Pajak Penerangan Jalan 13%, PBB-P2 tumbuh sebesar 6,28%, dan Pajak air tanah realisasinya meningkat sebesar 5,78%. Sementara untuk pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak mineral bukan logam rata-rata realisasinya mengalami penurunan, secara berurutan sebesar 33,81%, 3,29% dan 16,32%. Penurunan tersebut lebih banyak terjadi pada tahun 2020 akibat dampak dari pandemi covid-19.

Sementara untuk retribusi daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi selama tahun 2017 -2021 mengalami pertumbuhan negatif yakni turun sebesar 2,02%. Secara berurutan kontribusi masing-masing item retribusi daerah, Retribusi Jasa Umum meningkat sebesar 11,29%, retribusi jasa usaha turun sebesar 10,45% dan retribusi perizinan tertentu juga turun sebesar 16,56%. Peningkatan pada retribusi jasa umum lebih di dominasi dari retribusi parkir ditepi jalan umum dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Sementara pada retribusi jasa usaha khususnya retribusi pasar grosir dan pertokoan, mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh yang memberlakukan pemberian keringan dalam pembayaran retribusi akibat dampak pandemi covid-19.

Dilihat dari nilai realiasasinya, pajak daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk tahun kedepan, Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya agar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan meningkat khususnya dari pajak daerah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, antara lain :

1. Melakukan penguatan basis data objek pajak
2. Pemasangan Perangkat Perekaman Transaksi Pembayaran (*Tapping Box*) pada Objek Pajak Hotel, Restoran, hiburan dan Parkir
3. Sms Center Dan Sms Notifikasi Pajak Daerah
4. Pembuatan Payment Gateway Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
5. Pembuatan Aplikasi E-SPTPD

6. Pembangunan aplikasi Pemungutan Pajak Restoran melalui Smart Tax
7. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak ke masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik

Untuk kontribusi realisasi item pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat kita lihat pada Tabel III-3.

Tabel III-3
Persentase Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Realisasi					%					
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendapatan Asli Daerah	116.596.479.804	94.287.442.042	104.070.234.422	115.996.425.752	90.291.310.165	15,78	13,31	13,06	16,16	13,33	14,33
2	Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	621.597.821.589	591.819.046.982	672.960.290.170	517.671.060.783	568.343.603.248	84,11	83,53	84,45	72,13	83,91	81,63
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	816.000.000	22.426.280.000	19.806.489.713	84.033.619.143	18.660.770.000	0,11	3,17	2,49	11,71	2,76	4,05
	Total	739.010.301.393	708.532.769.024	796.837.014.305	717.701.105.678	677.295.683.413	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2021

Untuk pendapatan transfer selama 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 dan 2018 realisasinya menurun, namun pada tahun 2019 cenderung naik dan kemudian turun kembali di tahun 2020 dan 2021. Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah selama 5 tahun belakang mencapai 83,45%. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 meski kembali naik cukup signifikan di tahun 2021. Kinerja DAU memiliki kinerja yang fluktuasi dibandingkan kinerja Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan DAK, meskipun sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi penerimaan Negara sehingga berdampak juga terhadap pengurangan DAU dari Pemerintah Pusat. Perkembangan pendapatan transfer ini tentu perlu mendapatkan perhatian untuk tahun-tahun mendatang karena adanya pelemahan ekonomi nasional dan dunia sehingga akan berdampak pada perolehan pendapatan Negara.

Perkembangan kinerja realisasi Dana Transfer secara keseluruhan mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, tapi terjadi pertumbuhan positif dari Dana Bagi Hasil yang naik sebesar 7,57% dan transfer antar daerah pada dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi yang selalu menunjukan trend peningkatan positif tiap tahunnya. Namun ditengah ketidakpastian krisis ekonomi dan kesehatan seperti saat ini, diperlukan perhatian yang ekstra bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih menerapkan disiplin anggaran dan efisiensi anggaran

Sementara, pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah untuk tahun 2017 – 2021 sebagian besar berasal dari hibah Bantuan Operasional Sekolah. Namun kinerja realisasinya mengalami kenaikan yang signifakan pada tahun 2018 yang naik menjadi

522,95%. Kenaikan realisasi tersebut akibat adanya penyesuaian alokasi pendapatan hibah BOS yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebelumnya dialokasikan pada lain-lain PAD yang sah. Untuk tahun 2018 – 2021 tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Payakumbuh bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja yang dilakukan Kota Payakumbuh dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Namun pembagian jenis belanja sebagaimana hal tersebut hanya digunakan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, seiring keluarnya Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut tabel III-4 yang menunjukkan target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

Tabel III-4

Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Tk. Pertumbuhan
1	2017	749.948.767.275,00	694.223.803.927,00	92,57	-
2	2018	794.830.171.158,00	716.396.747.761,00	90,13	3,19 %
3	2019	876.370.302.788,00	805.939.541.097,00	91,96	12,49 %
4	2020	750.947.870.902,00	702.910.343.145,00	93,60	-12,78 %
5	2021	747.200.734.949,00	677.743.492.157	90,70	-3,58 %
Rata- Rata		**783.859.569.414**	**719.442.785.617**	**91,79**	**-0,71 %**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2021

Tabel III-4 menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 12,49%. Dalam realisasi APBD Pemerintah Kota Payakumbuh selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja daerah mengalami perkembangan yang terus menurun, terlebih di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar Rp. 694.223.803.927, tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp716.396.747.761. Selanjutnya tahun 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp805.939.541.097,- dan turun menjadi sebesar Rp702.910.343.145,- di tahun 2020, kemudian pada tahun anggaran 2021 realisasi belanja daerah hanya sebesar Rp677.743.492.157,-. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan hanya sebesar minus 0,71%. Selain akibat akibat adanya dampak pandemi Covid-19 juga disebabkan kemampuan keuangan daerah yang selalu turun dari tahun ke tahun. Penurunan terbesar belanja modal terjadi pada tahun 2020 akibat adanya kebijakan refocusing anggaran sesuai dengan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat.

Adapun Komposisi pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel III-5.

Tabel III-5
Komposisi Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Payakumbuh
Tahun 2017 s/d Bulan 2020

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Pertum buhan (%)	Kontribusi terhadap total Realisasi Belanja Daerah (%)
Belanja Tidak Langsung						
1	2017	299.864.067.041,00	276.055.631.402,00	92,06	-	37,82
2	2018	344.086.330.691,00	313.862.704.296,00	91,22	13,70	43,00
3	2019	348.942.113.166,00	332.698.706.126,00	95,34	6,00	45,58
4	2020	362.389.196.881,00	340.777.953.510,00	94,04	2,43	46,69
Rata- Rata		**338.820.426.944,75**	**315.848.748.833,50**	**93,16**	**7,38**	**43,27**
Belanja Langsung						
1	2017	450.084.700.234,00	418.168.172.525,00	92,91	-	57,29
2	2018	450.743.840.467,00	402.534.043.465,18	89,30	-3,74	55,15
3	2019	527.428.189.622,00	473.240.834.971,00	89,73	17,57	64,84
4	2020	388.558.674.021,00	362.132.389.635,00	93,20	-23,48	49,62
Rata- Rata		**454.203.851.086,00**	**414.018.860.149,05**	**91,28**	**-3,22**	**56,73**
Rata-Rata Belanja		**793.024.278.030,75**	**729.867.608.982,55**			

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2020

Pada Tabel III-5 terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir pertumbuhan baik belanja tidak langsung maupun belamja langsung mengalami pertumbuhan dengan trend negatif. Tidak bisa dipungkiri penurunan belanja tersebut akibat semakin berkurangnya kemampuan keuangan daerah, terutama penurunan pendapatan transfer dari pusat akibat belum membaiknya perekonomian akibat dampak pandemi covid-19. Tentunya hal ini juga berimbas kepada belanja daerah yang harus disesuaikan dengan pendapatan tiap tahunnya. Untuk belanja tidak langsung walaupun memperlihatkan pertumbuhan positif tapi tiap

tahun besaran pertumbuhannya makin berkurang. Untuk tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 13.70% turun menjadi 6% pada tahun 2019 dan menjadi 2,43% pada tahun 2020. Sementara untuk belanja langsung juga mengalami hal yang sama yang turun rata-rata 3,22% walapun pada tahun 2019 meningkat sebesar 17,57%. Tentunya ini akan menjadi perhatian kedepan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Sementara untuk proporsi belanja langsung Kota Payakumbuh terhadap total realisasi belanja daerah, rata-rata dalam kurun waktu tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel III-6

Tabel III-6
Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 -2020

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Proporsi Realisasi Terhadap Rata-rata Belanja Daerah (%)
Belanja Tidak langsung				
1	2017	299.864.067.041,00	276.055.631.402,00	37,82
2	2018	344.086.330.691,00	313.862.704.296,00	43,00
3	2019	348.942.113.166,00	332.698.706.126,00	45,58
4	2020	362.389.196.881,00	340.777.953.510,00	46,69
Rata- Rata		**338.820.426.944,75**	**315.848.748.833,50**	**43,27**
Belanja Langsung				
1	2017	450.084.700.234,00	418.168.172.525,00	57,29
2	2018	450.743.840.467,00	402.534.043.465,18	55,15
3	2019	527.428.189.622,00	473.240.834.971,00	64,84
4	2020	388.558.674.021,00	362.132.389.635,00	49,62
Rata- Rata		**454.203.851.086,00**	**414.018.860.149,05**	**56,73**
Rata-rata Total Belanja Daerah		**793.024.278.030,75**	**729.867.608.982,55**	

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Target dan Realisasi APBD TA 2017 - 2022

Dari Tabel III-6 terlihat bahwa alokasi anggaran belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Rata-rata kontribusi per tahun untuk belanja tidak langsung sebesar 43,27% dan untuk belanja langsung sebesar 56,73%

Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dilihat dari perhitungan proporsi realisasi jenis belanja terhadap total belanja daerah pada Tabel III-7

Tabel III-7
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA DAERAH					
1	**Belanja Operasi**	74,48%	78,99%	77,32%	79,90%	83,75%
	Belanja Pegawai	44,09%	44,36%	41,88%	46,57%	47,28%
	Belanja Barang dan Jasa	29,40%	31,98%	33,80%	31,81%	35,64%

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	1,00%	2,00%	1,05%	0,97%	0,83%
	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	0,65%	0,59%	0,56%	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	**Belanja Modal**	25,44%	20,86%	22,61%	17,07%	16,25%
	Belanja Tanah	4,31%	2,28%	1,96%	2,64%	2,89%
	Belanja Peralatan dan mesin	4,89%	4,70%	5,96%	4,65%	3,07%
	Belanja Gedung dan bangunan	6,56%	4,74%	4,62%	4,30%	3,85%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,38%	8,71%	9,31%	5,35%	6,28%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,31%	0,43%	0,75%	0,13%	0,15%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	**Belanja Tidak Terduga**	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	0,00%
4	**Transfer**	0,07%	0,15%	0,07%	0,09%	0,00%
	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bantuan Keuangan Lainnya	0,07%	0,08%	0,07%	0,09%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Badan Keuangan Daerah, LRA Pemerintah Kota Payakumbuh 2017-2021

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, Tabel III-7 menunjukkan bahwa belanja Pemerintah Kota Payakumbuh lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dibanding dengan belanja lainnya dengan rata-rata 44,83%. Namun untuk belanja barang dan jasa mendapat porsi kedua terbesar dengan rata-rata 32.52%. Selanjutnya untuk belanja modal dengan porsi rata-rata 20,44% per tahun. Kondisi ini diperparah akibat kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui kebijakannya untuk meningkatkan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa dibanding jenis belanja lainnya. Kebijakan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah bahwa sampai tahun 2026 belanja daerah khususnya untuk belanja pegawai sebesar 30% dari total belaja daerah dan belanja modal sebesar 40% dari total belanja daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus atau defisit dalam

penganggaran daerah. Tabel III-8 berikut menunjukkan target dan realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari tahun tahun 2017 – 2021.

Tabel III-8
Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tingkat Pertumbuhan %
1	2017	3.019.973.474,00	43.650.893.439,00	1.445,41	-
2	2018	71.625.458.450,00	82.411.296.761,00	115,06	88,80
3	2019	58.369.282.964,00	69.344.667.905,00	118,80	-15,86
4	2020	42.047.582.714,00	59.945.152.495,00	142,57	-13,55
5	2021	64.799.652.811,00	74.735.915.028,00	115,33	24,67
Rata- Rata		**47.972.390.082,60**	**66.017.585.125,60**	**387,43**	**21,02**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, LRA Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

Berdasarkan Tabel III-8 diatas bahwa rata-rata pertumbuhan selama 2017 - 2021 mencapai 21,02%, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 88,80%. Sementara dari sisi realisasi penerimaan pembiayaan dengan rata-rata 387,43% dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 1.445,41%.

Untuk tahun anggaran 2017 – 2021, penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, dan besarnya SiLPA selama lima tahun perkembangannya fluktuatif dengan persentase rata- rata per tahun sebesar 10,33% dari belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kota Payakumbuh perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kota Payakumbuh di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sago.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun ke tahun, sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel III-9.

Tabel III-9
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021 (dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum buhan %
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**739.01**	**708.53**	**796.83**	**717.7**	**677,29**	- 1,81
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**116.59**	**94.28**	**104.07**	**115.99**	**90,29**	- 4,86
1.1.1	Pajak Daerah	14.04	16.09	17.65	17.07	20,35	10,06
1.1.2	Retribusi Daerah	6.72	7.28	7.39	4.36	5,44	- 1,60

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum buhan %
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8.82	5.94	7.02	7.05	7,69	- 1,24
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg sah	86.99	64.96	71.99	87.52	56,78	- 7,01
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**596.08**	**565.25**	**609.58**	**517.67**	**-**	**-4.14**
1.2.1	Dana Bagi Hasil	13.37	12.03	9.18	10.69	-	-5.75
1.2.2	Dana Alokasi Umum	437.69	437.69	468.54	421.05	-	-1.03
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	94.21	99.02	131.85	85.93	-	1.14
1.2.4	Dana Insentif Daerah	50.78	16.5	0	0	-	0
	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	568,34	-
	Pendapatan Transfer Pusat	-	-	-	-	534,13	-
	Pendapatan Transfer Antara Daerah	-	-	-	-	34,21	-
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**26.33**	**48.99**	**83.17**	**84.03**	**18,66**	19,77
1.3.1	Hibah	0.81	22.42	19.8	18.44	18,66	662,53
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	-	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	25.51	26.56	30.35	26.72	-	2.14
1.3.4	Dana Penyesuaian & Dana OTSUS	0	0	33.01	38.87	-	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Dari Pemerintah Lainnya	0.9	0	0	0	-	0
2	**BELANJA DAERAH**	**694.22**	**716.39**	**805.93**	**702.91**	**677,74**	**0.97**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**276.05**	**313.86**	**332.69**	**340.78**	**-**	**7.38**
2.1.1	Belanja Pegawai	268.61	303.28	318.91	308.79	-	4.96
2.1.2	Bunga	0	0	0	0	-	0
2.1.3	Subsidi	0	0	0	0	-	0
2.1.4	Hibah	7.32	4.86	8.46	6.8	-	6.95
2.1.5	Bantuan Sosial	0	4.63	4.72	3.91	-	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	-	0
2.1.7	Bantuan Keuangan	0.49	1.07	589.91	651.31	-	18.386.85

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertum buhan %
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0.45	462.53	20.63	-	0.00
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**418.16**	**402.53**	**473.24**	**362.13**	**-**	**-3.22**
2.2.1	Belanja Pegawai	37.46	14.51	18.61	18.56	-	-11.09
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.06	238.57	272.4	223.58	-	4.39
2.2.3	Belanja Modal	176.63	149.44	182.21	119.99	-	-9.20
						-	
	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	567,61	
	BELANJA MODAL	-	-	-	-	110,13	
	BELANJA HIBAH	-	-	-	-	5,63	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-	0	
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**43.65**	**82.41**	**69.34**	**59.95**	**74,73**	21,01
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	**60.87**	**86.91**	**74.54**	**59.95**	74,73	8,41
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	**17.21**	**4.5**	**5.19**	**0**	0	-19.20

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan RKPD 2021

Untuk pelaksanaan APBD tahun 2021 dan target tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III-10.

Tabel III-10
APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	682.401.082.138	691.578.704.377
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**93.427.968.867**	**111.514.945.567**
4.1.01	Pajak Daerah	17.273.566.272	18.962.547.176
4.1.02	Retribusi Daerah	7.876.102.070	7.919.613.419
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7.522.403.488	8.549.367.383
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg sah	60.755.897.037	76.083.417.589
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**570.136.213.271**	**580.063.758.810**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	538.840.683.461	549.783.229.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.295.529.810	**30.280.529.810**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.836.900.000**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kententuan Peraturan Perundang-Undangan	18.836.900.000	0
	Jumlah Pendapatan	682.401.082.138	691.578.704.377
5	**BELANJA**	747.200.734.949	747.501.389.929
5.1	**BELANJA OPERASI**	**620.935.777.058**	**618.076.997.002**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
5.1.01	Belanja Pegawai	342.042.855.890	343.175.130.391
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.644.356.078	262.530.561.818
5.1.05	Belanja Hibah	6.248.565.090	12.371.304.793
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0
5.2	**BELANJA MODAL**	**125.764.957.891**	**128.899.392.927**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.395.486.420	25.342.193.970
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.693.558.654	19.399.714.207
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.896.670.501	24.386.787.883
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.754.223.664	58.429.101.120
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.025.018.652	1.341.595.747
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.000.000**	**525.000.000**
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	525.000.000
	Jumlah Belanja	747.200.734.949	747.501.389.929
	Total Surplus/(Defisit)	**-64.799.652.811**	**-55.922.685.552**
6	**PEMBIAYAAN**	**64.799.652.811**	**55.922.685.552**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**64.799.652.811**	**62.062.685.552**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.799.652.811	62.062.685.552
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**94.799.652.811**	**94.799.652.811**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**6.140.000.000**
	Pembiayaan Netto	**0**	**6.140.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**64.799.652.811**	**55.922.685.552**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Perubahan APBD 2021 dan Target 2022

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah,tidak hanya dalam rangka memenuhi Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Berikut ini Tabel III-11 rasio keuangan daerah Kota payakumbuh dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah selama 4 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio

solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Tabel III-11
Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
I	**RASIO LIKUIDITAS**				
1	Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek	20,47	56,42	20,47	10,45
2	Rasio Quick =(Aktiva Lancar-persediaan):Kewajiban Jangka Pendek	17,56	53,62	17,56	8,91
II	**RASIO SOLVABILITAS**				
1	Rasio Total Hutang Terhadap Aset = Total Hutang : Total Aset	0,001	0,001	0,01	0,001
2	Rasio Hutang terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,001	0,001	0,01	0,001

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Data diolah 2017-2020

Selama periode 2017-2020, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah aset dari Rp. 1.209.901.212,00 menjadi Rp. 1.054.710.869.365,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dimana untuk aset tetap sudah diakui adanya akumulasi penyusutan terhadap nilai aset. Disamping itu penurunan aset tetap juga disebabkan oleh penyerahan aset yang ada disekolah menengah dilingkungan Dinas Pendidikan dan di Dinas Perhubungan yang akan diserahkan ke Propinsi Sumatera Barat terkait urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya mengenai rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2020 disajikan pada Tabel III-12.

Tabel III-12
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2020

No.	URAIAN	rata-rata pertumbuhan %
I	**ASET**	
I.I	**ASET LANCAR**	-0,68
I.I.I	Kas	17,13
I.I.2	Piutang	-31,33
I.I.3	Penyisihan Piutang	117,23
I.I.4	Beban Dibayar di Muka	1567,58
I.I.5	Persediaan	86,78
I.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	3,35
I.2.I	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,21
I.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	4,24
I.3	**ASET TETAP**	-1,33
I.3.I	Tanah	14,39
I.3.2	Peralatan dan Mesin	13,81
I.3.3	Gedung dan Bangunan	2,24
I.3.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	18,29
I.3.5	Aset Tetap Lainnya	-0,13
I.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-9,69

No.	URAIAN	rata-rata pertumbuhan %
I.3.7	Akumulasi Penyusutan	13,37
I.4	**ASET LAINNYA**	144,85
I.4.I	Tagihan Jangka Panjang	35,22
I.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	81,98
I.4.3	Aset Tak Berwujud	-7,36
I.4.4	Aset Lain-lain	299,04
	JUMLAH ASET	0,82
2	**KEWAJIBAN**	-5,93
2.I	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	-5,93
2.I.I	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-86,21
2.I.2	Utang Beban	114,41
2.I.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-100,00
2.I.4	Pendapatan Diterima Dimuka	147,83
3	**EKUITAS DANA**	0,57
3.I	**EKUITAS DANA LANCAR**	272,05
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	0,82

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercemin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Kota Payakumbuh merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan tersebut diarahkan pada upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dan retribusi daerah serta pendapatan transfer. Untuk peningkatan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif untuk sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer
3. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional
6. Peningkatan sarana dan prasarana terutama yang berbasis informasi teknologi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah
7. Peningkatan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

Adapun kebijakan dalam untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pendapatan transfer pusat dan transfer antar daerah

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 – 2020 dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dalam pelaksanaan program-program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan target perangkat daerah yang mendukung visi dan misi kepala daerah. Adapun belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja subisdi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Namun untuk tahun 2021, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2017 – 2022
3. Pendukungan terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs)
4. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah
5. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari belanja daerah diluar gaji
6. Pemenuhan anggaran infastruktur sekurang-kurangnya 25% dari Dana Transfer Umum
7. Pemenuhan anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua bidang pelayanan
8. Pemenuhan anggaran belanja modal dalam upaya menunjang infrastruktur daerah
9. Pengalokasian belanja Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan BOS sesuai dengan peruntukkannya

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul akibat jumlah pengeluaran lebih besar dari penerimaan daerah sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu (SiLPA) , pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daera yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah dan lain-lain.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penambahan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah dan BUMD Tirta Sago.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Payakumbuh 5 tahun terakhir. Tabel III-13 menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel III-13
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021
(dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Kontribusi
		2017	2018	2019	2020	2021	%
A	**Belanja Tidak Langsung**	**268.613,55**	**303.285,15**	**318.915,76**	**308.388,74**	**-**	**56,65**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.232,26	195.113,13	202.768,89	203.751,14	201.333,53	66,76
2	Belanja Tambahan Penghasilan	68.799,81	101.650,68	107.287,91	98.105,84	53.877,86	31,15
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.049,11	5.731,95	7.930,50	5.641,38	9.812,98	1,84
4	Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah	532,37	789,39	928,46	890,38	725,78	0,26
B.	**Belanja Langsung**	**254.212,54**	**224.047,94**	**265.828,59**	**179.655,09**	**-**	**43,35**
1	Belanja Honorarium PNS	27.777,38	9.406,88	13.086,42	13.937,26	7.599,00	6,95
2	Belanja Uang Lembur	-	1.242,80	1.632,11	1.064,63	1.110,10	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400,5	343,9	457,3	455,3	414,3	0,18
4	Belanja Kursus, Pelatihan, dan Sosialisasi	1.040,17	991,11	636,28	148,16	919,52	0,29
5	Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-	0	-
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.219,74	9.520,19	14.696,95	18.546,44	15.750,43	5,44
7	Belanja Makanan dan Minuman	10.390,35	11.815,30	13.195,44	8.034,25	11.422,16	4,70
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1526,5	1.449,69	1.851,86	1.398,80	727,57	0,68
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	684,58	1.128,72	1.025,04	341,3	0	0,34
10	Belanja Perjalanan Dinas	31.540,69	38.703,93	37.029,15	15.735,69	28.833,60	13,09
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-		-	-	0	-
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-		-	-	0	-
13	Belanja Modal	176.632,63	149.445,42	182.218,04	119.993,26	110.130,22	67,88
	TOTAL	**522.826,09**	**527.333,09**	**584.744,35**	**488.043,83**	**442.657,05**	**100,00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Sementara untuk analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2017 – 2021 dapat kita lihat pada Tabel III-14.

Tabel III-14
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2017	291.675.855.832	762.719.942.954	38%
2	2018	332.259.714.482	719.817.536.552	46%
3	2019	333.948.956.689	811.135.190.810	41%
4	2020	308.253.371.707	702.259.630.532	44%
5	2021	287.173.781.262	677.743.492.157	42%

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Berdasarkan tabel–tabel pengeluaran APBD Kota Payakumbuh tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara total keseluruhan belanja proporsi realisasi belanja tidak langsung masih merupakan komponen terbesar dari belanja daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 tetapi pada komponen belanja langsung mengalami kenaikan sehingga proporsi antara kedua komponen belanja ini semakin berimbang.
2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Payakumbuh pada rincian belanja bantuan keuangan kepada parpol adalah tetap sedangkan belanja tidak terduga mengalami fluktuasi naik dan turun.
3. Realisasi belanja kebutuhan aparatur lingkup Kota Payakumbuh untuk tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami pertumbuhan dengan proporsi yang juga tidak berbeda jauh dari tahun ke tahun.
4. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah pada dasarnya hanya penyertaan modal.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan salah satu penutup defisit penganggaran, oleh karena itu perlu dilihat perkembangannya. Berikut ini Analisis pembiayaan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III-15.

Tabel III-15
Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	739.010.301.393	708.532.769.023,54	796.837.014.305	717.701.105.678	677.295.683.413
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	694.223.803.927	716.396.747.761,18	805.939.541.097	702.910.343.145	677.743.492.158
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.219.500.000	4.500.000.000	5.195.649.713	-	0
A	**Defisit Rill**	**27.566.997.466**	**(12.363.978.738)**	**(14.298.176.505)**	**14.790.762.533**	**-447.808.745**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. Sebelumnya	47.701.324.055	86.911.296.761,00	74.540.317.618	59.945.152.495	74.735.915.028
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	0,00	0,00	0,00	0
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**60.870.393.439**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	**59.945.152.495**	74.735.915.028
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan TA. Berkenaan**	**88.437.390.904**	**74.547.318.023,82**	**60.242.141.113**	**74.735.915.028**	**74.288.106.283**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Berdasarkan analisis Tabel III-15, untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil tersaji pada Tabel III-16.

Tabel III-16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	Defisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. Sebelumnya	**47.701.324.055**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	**59.945.152.495**	**74.735.915.028**
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sisa Lebih Pembiayaan TA. berkenaan	**88.437.390.904**	**74.547.318.023,82**	**60.242.141.113**	**74.735.915.028**	**74.288.106.283**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan perkembangan realisasi dan komposisi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal Kota Payakumbuh mengalami defisit riil anggaran oleh karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan. Defisit riil anggaran ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya terutama dari pelampauan pendapatan dan sisa penghematan belanja.
2. SiLPA tahun anggaran sebelumnya menjadikan komponen ini menjadi yang terbesar dari penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel III-17.

Tabel III-17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	**Jumlah SiLPA**	**47.701.324.055**		**86.911.296.761**		**74.540.317.618**		**59.945.152.495**		**74.540.317.618**	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	191,649,473	0,32	16,596,767,238	22,45	-1.031.741.974	-2,18	0	0	74.735.915.028	100
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	70,372,922	0,12	(3,501,055,341)	-4,74	-2.748.771.098	-5,8	0	0	0	0
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(204,801,000)	-0,34	4,811,905,322	6,51	-125.258.568	-0,26	0	0	0	0
5	Sisa Penghematan Belanja	60,130,623,407	99,91	50,997,343,357	68,99	44.485.555.820	93,79	59.945.152.495	100	0	0
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	(8,116,211.00)	0		0	17.119.524.760	36,09		0	0	0
10	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	5,012,821,110	6,78	6.276.830.909	13,23	0	0	0	0
11	Penghematan Penyertaan Modal	0	0	0	0	-16.543.000.000	34,88	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah untuk sisa tahun periode RPJMD. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan

berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata-rata periode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan issu perubahan kebijakan fiskal, di samping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh selain akan mempertahankan strategi yang telah dilaksanakan tahun lalu juga akan melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui *multiplier* effect bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam masa RPDT Tahun 2023 hingga 2026.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang

dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai Tahun 2021 struktur APBD harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga kedua jenis belanja tersebut menjadi belanja operasional.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen belanja untuk tahun 2021 mengalami perombakan yang signifikan. Dalam regulasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terdiri dari : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Seluruh belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan bersama-sama dengan belanja barang dan jasa berada pada belanja operasi. Jadi realisasi pengeluaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III-18.

Tabel III-18
Realisasi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

Kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
2	**Belanja Daerah**	**694.223.803.927**	**716.396.747.761**	**805.939.541.097**	**702.910.343.145**	**677.743.492.157**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**276.055.631.402**	**313.862.704.296**	**332.698.706.126**	**340.777.953.510**	**0**
2.1.1	Belanja Pegawai	268.613.558.873	303.285.170.661	318.915.773.919	308.788.745.386	0
2.1.4	Belanja Hibah	6.942.395.604	4.863.322.426	8.467.558.024	6.803.494.436	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		4.635.000.000	4.725.000.000	3.907.400.000	0
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	499.676.925	1.079.211.209	589.911.650	651.312.613	0
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	-	-	462.533	20.627.001.075	0

Kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2.2	**Belanja Langsung**	**418.168.172.525**	**402.534.043.465**	**473.240.834.971**	**362.132.389.635**	**0**
2.2.1	Belanja Pegawai	37.466.734.399	14.515.771.750	18.618.588.401	18.555.124.900	0
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	204.068.799.002	238.572.846.724	272.404.198.399	223.584.002.596	0
2.2.3	Belanja Modal	176.632.639.124	149.445.424.991	182.218.048.171	119.993.262.139	0
5.1	**Belanja Operasi**	**0**	**0**	**0**	**0**	567.613.271.386
5.2	**Belanja Modal**	**0**	**0**	**0**	**0**	110.130.220.771
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.4	**Belanja Transfer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD setiap tahunnya. Dalam menyusun kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berpedoman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa kebijakan belanja atau *Mandatory Spending* yang menjadi beban dan menjadi komitmen yang harus dipenuhi antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota Payakumbuh secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Disamping itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
4. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pegawai 30% dari belanja daerah
5. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengawasan sebesar 1% dari belanja daerah
6. Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja pengembangan SDM 0,16% dari belanja daerah
7. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, antara lain:
    a. Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan MinimalPendidikan;

b. Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
    1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
    2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
f. Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja di atas, dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.
3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari dan PDAM serta pembayaran cicilan hutang ke Bank.

Dalam tabel III-19 terlihat gambaran realisasi pembiayaan daerah tahun 2017-2021 yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun proyeksi pembiayaan daerah untuk tahun 2023-2026.

Tabel III-19

Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2021

KODE	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN		**78.089.893.439**	**91.411.296.761**	**79.735.967.331**	**59.945.152.495**	**74.735.915.028**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**60.870.393.439**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	**59.945.152.495**	**74.735.915.028**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Thn Sebelumnya	47.701.324.055	86.911.296.761	74.540.317.617	59.945.152.495	74.735.915.028
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	0	0	0
	Pinjaman dari Bank	0	0	0	0	0
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	0	0	0	0
3.2.	**Pengeluaran** Pembiayaan **Daerah**	**17.219.500.000**	**4.500.000.000**	**5.195.649.713**	**0**	**0**
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.219.500.000	4.500.000.000	5.195.649.713	0	0
	Investasi BLUD RSUD	0	0	0	0	0
	Ivestasi UPTD Ternak Sapi	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		**43.650.893.439**	**82.411.296.761**	**69.344.667.905**	**59.945.152.495**	**74.735.915.028**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**88.437.390.904**	**74.547.318.023**	**60.242.141.113**	**74.735.915.028**	**74.288.106.283**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, LRA Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan arah dan kebijakan pendapatan daerah diatas dan juga memperhatikan perkembangan serta kinerja keuangan masa lalu, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun proyeksi pendapatan daerah Kota Payakumbuh sampai tahun 2026, sebagaimana terlihat dalam tabel III-20.

Tabel III-20
Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**682,401,082,138**	**691,578,704,377**	**570,321,359,490**	**574,886,206,666**	**579,384,822,876**	**586,452,144,940**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**93,427,968,867**	**111,514,945,567**	**112,751,715,004**	**116,517,158,930**	**120,200,383,827**	**126,436,006,750**
4.1.01	Pajak Daerah	17,273,566,272	18,962,547,176	19,974,151,583	21,908,609,439	23,004,039,911	25,304,443,903
4.1.02	Retribusi Daerah	7,876,102,070	7,919,613,419	8,132,774,273	8,506,526,598	8,991,320,219	9,349,894,331
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,522,403,488	8,549,367,383	8,549,367,383	8,699,367,383	8,799,367,383	8,949,367,383
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	60,755,897,037	76,083,417,589	76,095,421,765	77,402,655,510	79,405,656,314	82,832,301,133
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**570,136,213,271**	**580,063,758,810**	**457,569,644,486**	**458,369,047,736**	**459,184,439,049**	**460,016,138,190**
4.2.01	Pendapatan Transfer pemerintah pusat	538,840,683,461	549,783,229,000	426,683,504,080	426,865,184,522	427,050,498,571	427,239,518,902
4.2.02	Pendapatan Transfer antar daerah	31,295,529,810	30,280,529,810	30,886,140,406	31,503,863,214	32,133,940,478	32,776,619,288
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18,836,900,000**	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	18,836,900,000	-	-	-	-	-

Data: Target APBD 2022 dan Proyeksi pendapatan tahun 2023-2026
Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan kinerja kemampuan masa lalu, proyeksi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh maka proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 - 2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel III-21.

Tabel III.21
Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**BELANJA DAERAH**	**747,200,734,949**	**747,501,389,929**	**634.913.401.125**	**597,733,509,163**	**588,548,900,478**	**586,880,599,618**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**620,935,777,058**	**618,076,997,002**	497.199.951.193	494.240.328.284	486.645.967.348	485.266.520.568
5.1.01	Belanja Pegawai	342,042,855,890	343,175,130,391	279.050.245.781	279.417.248.864	275.200.628.901	274.434.718.131
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272,644,356,078	262,530,561,818	209.649.705.412	209.930.464.468	206.704.730.696	206.118.805.414
5.1.05	Belanja Hibah	6,248,565,090	12,371,304,793	8.500.000.000	4.892.614.952	4.740.607.752	4.712.997.023

No.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0	0	0	0
5.2	**BELANJA MODAL**	**125,764,957,891**	**128,899,392,927**	**137.188.449.932**	**102.968.180.879**	**101.377.933.130**	**101.089.079.050**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20,395,486,420	25,342,193,970	26.237.580.964	20.244.002.344	19.931.352.563	19.874.562.567
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,693,558,654	19,399,714,207	15.492.079.628	15.496.995.262	15.257.658.589	15.214.185.253
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,896,670,501	24,386,787,883	36.897.944.670	19.480.799.163	19.179.936.345	19.125.287.343
5.2.04	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	45,754,223,664	58,429,101,120	57.595.232.508	46.674.682.604	45.953.835.559	45.822.900.231
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	1,025,018,652	1,341,595,747	965.612.162	1.071.701.506	1.055.150.074	1.052.143.656
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500,000,000**	**525,000,000**	**525,000,000**	**525,000,000**	**525,000,000**	**525,000,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000

Data : Target APBD 2022 dan proyeksi belanja daerah tahun 2023-2026
Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Dari Tabel III-21 terlihat bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2023-2026 semakin lama semakin berkurang. Hal ini terjadi sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan efisiensi anggaran terutama belanja daerah. Sehingga kebijakan pengelolaan belanja daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Pengelolaan belanja daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan manfaat *(outcome)* yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berkenaan dengan hal tersebut maka proyeksi pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 - 2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel III-22.

Tabel III-22
Realisasi Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 serta Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2026

No.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**PEMBIAYAAN**	**45,065,742,985**	**47,319,030,134**	**26,612,746,424**	**22,847,302,498**	**9,164,077,601**	**428,454,678**
6.1	**PENERIMAAN**	**45,065,742,985**					

No.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMBIAYAAN		**47,319,030,134**	**26,612,746,424**	**22,847,302,498**	**19,164,077,601**	**12,928,454,678**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,065,742,985	**47,319,030,134**	**26,612,746,424**	**22,847,302,498**	**19,164,077,601**	**12,928,454,678**
	PENGELUARAN PEMBIAYAN	-	-	-	-	**10,000,000,000**	**12,928,454,678**
	Penyertaan Modal Daerah				-	**10,000,000,000**	**12,500,000,000**
	PEMBIAYAAN NETTO	**45,065,742,985**	**47,319,030,134**	**26,612,746,424**	**22,847,302,498**	**9,164,077,601**	**12,500,000,000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Data : Target APBD 2022 dan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2023-2026
Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Dari Tabel III-22 dapat dilihat pembiayaan daerah yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pengurangan pembiayaan menggambarkan pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh makin efektif dalam pemanfaatan belanja daerah. Pada tahun 2025 direncanakan penyertaan modal sebesar 10 Milyar dan tahun 2026 di rencanakan 12,5 Milyar untuk investasi ke BUMD seperti kepada Bank Nagari dan PDAM.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk pendanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026 perlu disusun kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Payakumbuh tahun 2023 - 2026 disajikan pada Tabel III-23.

Tabel III-23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
Pendapatan Daerah	**570.321.359.490**	**574.886.206.665**	**579.384.822.877**	**586.452.144.940**
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	26.612.746.424	22.847.302.498	19.164.077.601,00	12.928.454.678

Uraian	Proyeksi			
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
Total Penerimaan	**596.934.105.914**	**597.733.509.163**	**598.548.900.478**	**599.380.599.618**
Dikurangi:				
Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta	**210.957.812.781**	**210.957.812.781**	**210.957.812.781**	**210.957.812.781**
Prioritas Utama	249.050.245.781	**191.324.815.864**	**182.934.195.901**	178.434.195.900
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**385.976.293.133**	**386.775.696.382**	**387.591.087.697**	**388.422.786.837**

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Tabel III-23 menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh masih rendah karena pendapatan daerah yang rendah dan sebagian pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer pusat dan provinsi. Apalagi Perekonomian dunia dan nasional yang masih belum normal setelah 2 tahun dilanda wabah pandemi Covid-19.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam kurun waktu 2023 -2026 mendatangkan yang akan dirumuskan dalam RPD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dibagi menjadi 3 prioritas antara lain :

1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
2. Prioritas kedua dialokasikan dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh proyeksi alokasi anggaran indikatif untuk ketiga prioritas dibandingkan dengan kapasitas total penerimaan daerah, sebagaimana Tabel III-24.

Tabel III-24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	385.976.293.133,00	386.775.696.382,00	387.591.087.697,00	388.422.786.837,00
2	Prioritas I (45%)	173.689.331.909,85	174.049.063.371,90	174.415.989.463,65	174.790.254.076,65
3	Prioritas II (35%)	135.091.702.596,55	135.371.493.733,70	135.656.880.693,95	135.947.975.392,95
4	Prioritas III (20%)	77.195.258.626,60	77.355.139.276,40	77.518.217.539,40	77.684.557.367,40

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Diolah oleh tim, Tahun 2022

Jika dilihat dari Tabel III-24, maka dapat diperoleh persentase proyeksi alokasi anggaran untuk ketiga prioritas di atas selama 4 tahun ke depan, yaitu tahun 2023 s.d 2026, adalah untuk prioritas I memiliki alokasi 45% dari total penerimaan daerah, Prioritas II sebesar 35% dari total proyeksi penerimaan daerah serta Prioritas III sebesar 20% dari total penerimaan daerah.

BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi pembahasan dalam BAB ini, yaitu menuangkan permasalahan dan isu strategis tersebut, karena pada prinsipnya mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa diharapkan di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kota Payakumbuh walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya.

Pembahasan permasalahan pembangunan dalam dokumen ini dimulai dari permasalahan makro yang berkaitan dengan kondisi nasional, regional serta sektoral yang secara langsung saling berkaitan dan dilanjutkan dengan permasalahan menurut urusan pemerintahan.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Beberapa permasalahan pembangunan makro Kota Payakumbuh dilihat dengan melakukan komparasi dengan kondisi yang sama pada skala nasional dan regional. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Terjadinya Kecenderungan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Menurunnya pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan global, termasuk Kota Payakumbuh. Pandemi Covid-19 telah memukul seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun, pada tahun 2017 sebesar 6,12%, kemudian tahun 2018 menjadi 6,02%, demikian halnya tahun 2019 menjadi 5,92 dan terakhir tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,65% sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 mulai

awal tahun 2020 tersebut. Namun seiring membaiknya kondisi perekonomian selama tahun 2021 terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 dan peningkatan stimulasi investasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka perekonomian kembali tumbuh menyentuh angka 3,58%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, tapi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh ini masih jauh di bawah capaian pertumbuhan di kondisi normal di tahun 2017 s/d 2019 yang rata-rata mencapai angka 6,02%.

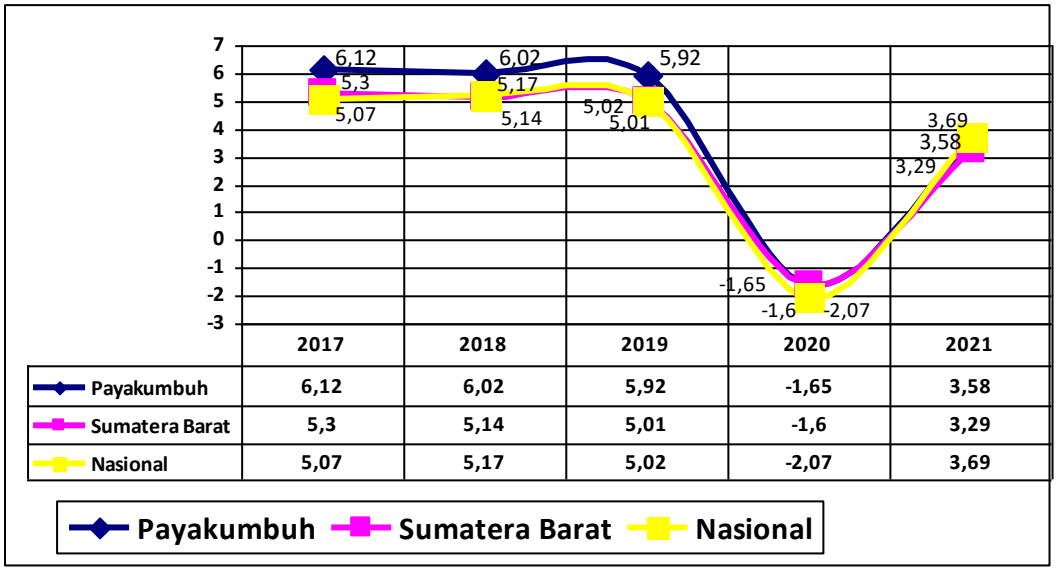

	2017	2018	2019	2020	2021
Payakumbuh	6,12	6,02	5,92	-1,65	3,58
Sumatera Barat	5,3	5,14	5,01	-1,6	3,29
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Diagram IV-1
Pertumbuhan Ekonomi Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional

2. Belum Terciptanya Stabilitas Harga

Stabilitas harga barang dan jasa di suatu daerah dilihat dari tingkat inflasi tahunan. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kota Payakumbuh mengikuti/mengacu pada perhitungan inflasi Kota Bukittinggi karena posisi Kota Payakumbuh dekat dari Kota Bukittinggi dan struktur ekonomi tidak jauh berbeda. Dari kondisi tersebut terlihat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tingkat inflasi cenderung meningkat. Ini terjadi disebabkan karena konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, serta ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, tingkat inflasi Kota Payakumbuh jika (dikonversikan dengan inflasi di Kota Bukittinggi) sebesar 2,12% lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Barat yang 2,11% dan lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 1,68%. Kondisi ini disebabkan terutama karena kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta produk cabai merah, rokok putih dan emas perhiasan. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi deflasi di Kota Payakumbuh, yaitu sampai menyentuh angka -0,04% lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,22%, juga lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 1,87%. Kondisi ini sangat kontradiktif dibandingkan empat tahun sebelumnya yang menunjukkan tingkat inflasi cukup tinggi. Terjadinya deflasi pada tahun 2021 disebabkan karena masyarakat cenderung bersikap pasif dan berhati-hati

dalam membelanjakan uangnya karena kondisi ketidakpastian wabah Covid-19. Namun demikian, menciptakan kestabilan harga merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh, agar tercipta kondisi saling menguntungkan terhadap produsen dan konsumen serta kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan TPID antara lain adalah pengalokasian anggaran untuk pengendalian harga pada instansi yang mengelola pasar, melakukan pengecekan rutin terhadap ketersediaan pasokan bahan pokok di daerah dengan melibatkan Forkopimda dan instansi terkait lainnya, menjamin ketersediaan produksi dan menjaga distribusi barang serta kelancaran transportasi antar daerah.

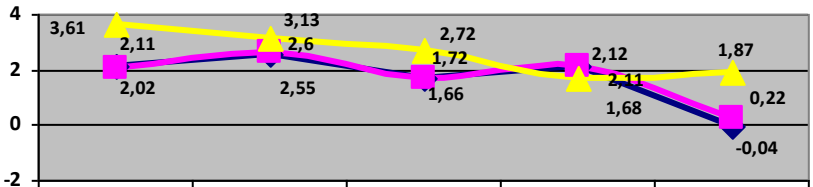

	2017	2018	2019	2020	2021
Payakumbuh	2,11	2,55	1,72	2,12	-0,04
Sumatera Barat	2,02	2,6	1,66	2,11	0,22
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Diagram IV-2
Tingkat Inflasi Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional

3. Masih Rendahnya PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kota Payakumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB Perkapita Nasional. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kota Payakumbuh sebesar Rp. 48,89 juta dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 44,03 juta, sedangkan nasional mencapai Rp. 56,94 juta. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih rendahnya rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kota Payakumbuh dibandingkan nasional secara keseluruhan. Namun dibandingkan rata-rata Sumatera Barat lebih tinggi. Ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Payakumbuh masih rendah. Pada tahun 2020 ini juga terjadi penurunan pendapatan perkapita dari ketiga level tersebut, karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2021, seiring membaiknya kondisi perekonomian, maka pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan. PDRB Perkapita Kota Payakumbuh mencapai posisi tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebesar Rp. 51,64 juta, namun masih lebih rendah dibandingkan PDRB Perkapita Nasional yang sudah mencapai Rp. 62,2 juta. Walaupun masih lebih tinggi dibandingkan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

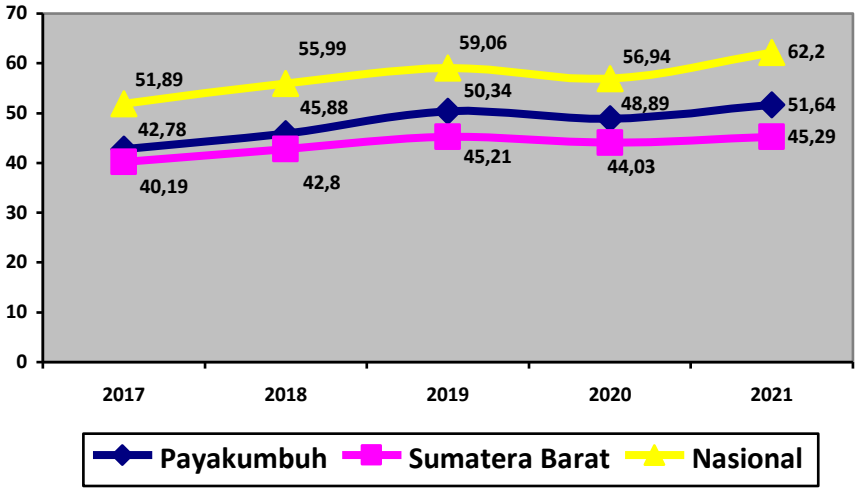

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Diagram IV-3
PDRB Perkapita (ADHB) Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional (Rp. Juta/jiwa)

4. Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan

Dalam beberapa tahun terakhir Indeks Gini Kota Payakumbuh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Kota Payakumbuh dapat terdistribusi secara lebih merata. Namun pada tahun 2020 terjadi kenaikan nilai Indeks Gini pada semua level, termasuk Kota Payakumbuh. Ini disebabkan efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk berpendapatan rendah semakin menurun kesejahteraannya, sedangkan penduduk berpendapatan tinggi tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tersebut, sehingga terjadi peningkatan ketimpangan secara keseluruhan termasuk di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan di Kota Payakumbuh mulai turun. Ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai koefisien Gini sebesar 0,09 poin dari 0,325 menjadi 0,316. Namun tingkat ketimpangan ini masih berada di atas ketimpangan Provinsi Sumatera Barat.

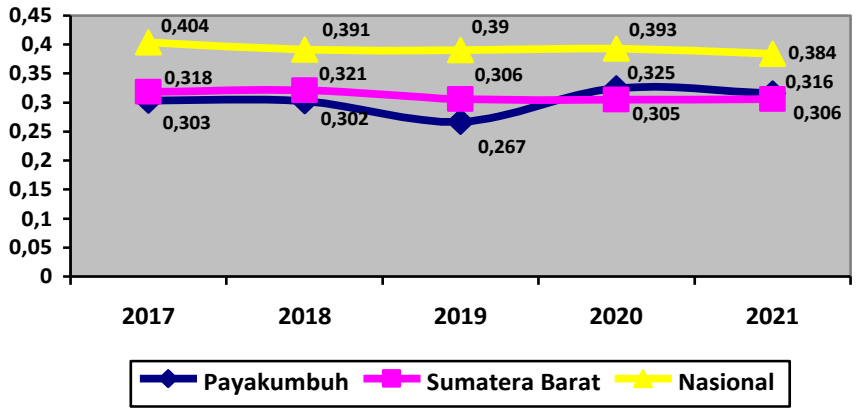

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Diagram IV-4
Indeks Gini Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional

5. Masih tingginya Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh masih tergolong cukup tinggi, walaupun lebih rendah dari rata-rata Sumatera Barat dan Nasional, namun untuk skala kota tingkat kemiskinan sebesar 6,16% tahun 2021 masih tergolong tinggi. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan terutama di era pandemi Covid-19 ini, sehingga di tahun 2020 masih dapat menurunkan tingkat kemiskinan dibanding tahun 2019, walaupun persentasenya kecil hanya 0,03% saja. Namun di tahun 2021 terjadi kenaikan angka kemiskinan dari 5,65% menjadi 6,16% atau meningkat sebesar 0,51%. Ini akan tetap menjadi tantangan pada tahun-tahun berikutnya, karena pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan tetap berlangsung.

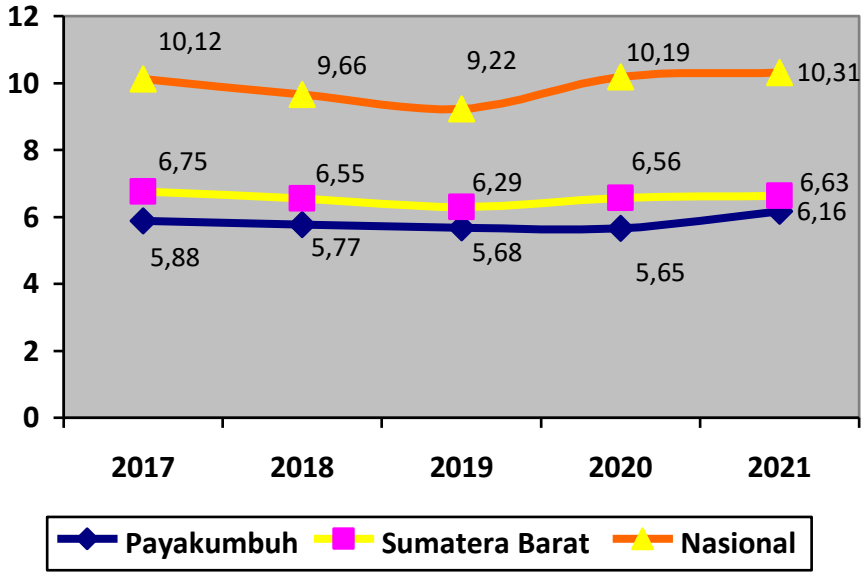

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Diagram IV-5
Tingkat Kemiskinan Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional

6. Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam beberapa tahun terakhir nilai IPM Kota Payakumbuh menunjukkan trend peningkatan, namun pada tahun 2020 IPM Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 78,95 pada tahun 2019 menjadi 78,90. Angka ini menurun sebesar 0,05 poin atau lebih rendah sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 IPM kembali naik dan mencapai level tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu berada pada angka 79,08 atau naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,61%. Dibandingkan dengan tahun 2020, baik dari indikator pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup (pengeluaran perkapita) sebetulnya terjadi peningkatan, namun dari indikator pengeluaran perkapita jika dibandingkan kondisi tahun 2019 masih lebih rendah, sebagaimana Tabel IV-1.

Tabel IV-1
Perbandingan Nilai IPM Kota Payakumbuh Tahun 2020 dengan 2019 dan Tahun 2021 dengan 2020

Tahun	Indikator				Capaian
	UHH (tahun)	HLS (tahun	RLS (tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)	
2019	73,61	14,25	10,72	13.464	78,95
2020	73,74	14,26	10,73	12.281	78,90
Persentase	***0,18***	***0,07***	***0,09***	***-8,79***	***-0,06***
2020	73,74	14,26	10,73	12.281	78,90
2021	73,84	14,27	10,81	13.322	79,08
Persentase	***0,14***	***0,07***	***0,75***	***8,48***	***0,61***

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Keterangan,
UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Dari Tabel IV-1 dapat dilihat bahwa indikator pengeluaran perkapita mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar -8,79%. Ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan aktifitas ekonomi. Pada tahun 2021 pun sebetulnya indikator ini belum kembali pada kondisi normal di tahun 2019, karena masih rendah sebesar 0,31%. Inipun sebetulnya disebabkan masih berlanjutnya kondisi ketidakpastian dalam perekonomian sebagai akibat dampak wabah Covid-19 di tahun 2021, sehingga masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan asetnya. Walaupun nilai IPM Kota Payakumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Sumatera Barat dan Nasional, namun tantangan pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini, tetap memberikan tekanan pada komponen indikator pengeluaran penduduk ini.

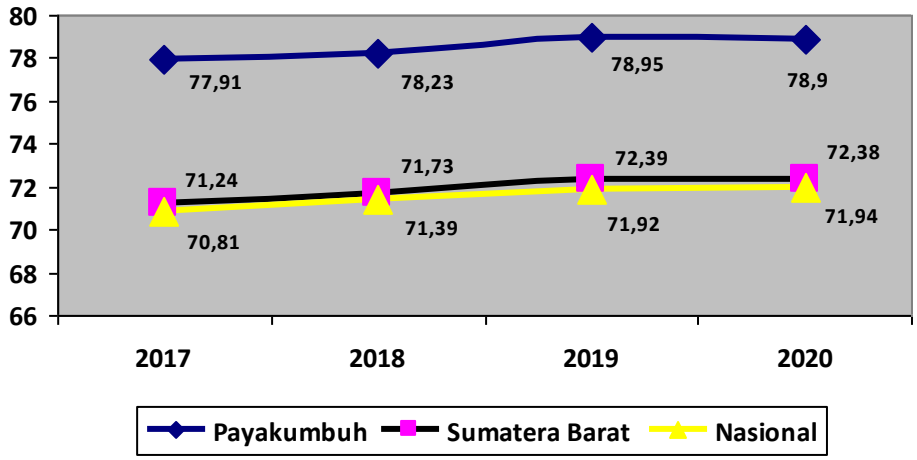

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2021

Diagram IV-6
Nilai IPM Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional

Aspek pendidikan dan kesehatan adalah indikator utama dalam pembangunan manusia yang merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus disediakan oleh pemerintah, sehingga kedua aspek ini masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi dan menjadi prirotas utama pembangunan. Layanan pendidikan di Kota Payakumbuh masih belum optimal dimana jumlah SD dan SMP yang terakreditasi A masih 79%. Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung di beberapa sekolah belum memenuhi standar, kekurangan Guru ASN dan adanya sekolah negeri yg kekurangan siswa juga ikut memicu rendahnya kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri. Sementara itu, ternyata siswa sekolah swasta justru sangat banyak, bahkan ada yang tidak dapat diterima saat pendaftaran. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri, walaupun dari segi biaya lebih murah. Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan menjadi kewajiban yang senantiasa harus menjadi prioritas daerah, sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan peluang rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang akan berdampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh.

Apalagi semenjak tahun 2020 kita dihadapkan dengan masalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya proses belajar dan mengajar, walaupun ada alternatif melalui belajar online, tapi itu tidaklah maksimal. Mudah-mudahan mulai tahun 2022 ini, proses belajar ini dapat berjalan secara normal kembali, sehingga tantangan ke depan adalah mengejar dan mengatasi mutu pelajaran yang tidak optimal selama pandemi di tahun 2020 dan 2021.

Demikian halnya dengan sektor kesehatan yang ditandai dengan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang dipicu oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS, pergeseran gaya hidup masyarakat ke pola yang tidak sehat sehingga berdampak pada peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diderita masyarakat seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain. Kemudian faktor lain yang memicu rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh adalah meningkatnya jumlah penderita HIV serta belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.

Termasuk yang menjadi perhatian adalah ancaman stunting pada masyarakat miskin. Karena stunting saat ini telah menjadi isu nasional, dimana Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai lokasi penanganan stunting secara nasional, walaupun angka stunting Kota Payakumbuh tidak signifikan, namun kecenderungannya perlu menjadi perhatian. Di samping itu, ancaman balita gizi buruk, lanjut usia yang terlantar serta masyarakat yang mengalami disabilitas yang terutama disebabkan oleh dampak kemiskinan juga menjadi persoalan, karena adanya kecenderungan peningkatan persentase balita yang mengalami gizi buruk dan lanjut usia terlantar. Dari data yang tersedia, pada tahun 2020 terjadi peningkatan balita gizi buruk dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020 balita gizi buruk mencapai 0,02% dari seluruh balita yang ada di Kota Payakumbuh, sedangkan tahun 2019 hanya 0,1% saja. Walaupun tingkat kemiskinan turun, namun persentase balita gizi buruk malah naik. Meskipun persentasenya relatif kecil, namun ini menjadi persoalan serius karena bersamaan dengan dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun-tahun ke depan.

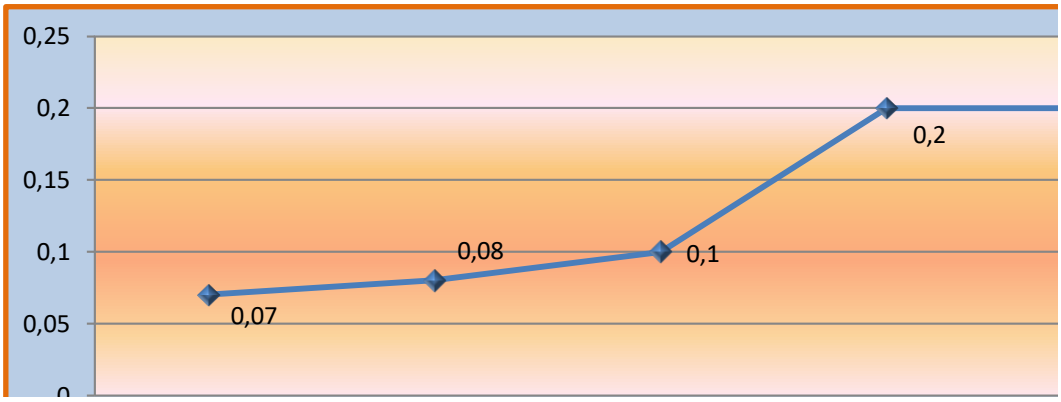

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

Diagram IV-7
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017-2021

7. Meningkatnya Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 4,11% menjadi 6,68%. Sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 6,47%, namun angkanya masih relatif tinggi dibandingkan sebelum wabah Covid-19. Hal ini dipicu oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor-sektor ekonomi menurunkan kapasitas produksi dan ada yang gulung tikar. Di samping itu rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan para pencari kerja. Angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya akhirnya menjadi pengangguran, karena untuk bekerja pun mereka belum memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja atau spesifikasi pendidikannya belum sesuai kebutuhan yang ada. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Tabel IV-2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Angkatan Kerja	**66.919**	**67.083**	**65,892**	**69.808**	**74.303**
Bekerja	64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
Penganggur	2.307	2.538	2.710	4.664	4.805
Bukan Angkatan Kerja	**26.780**	**28.083**	**30.919**	**31.830**	**29.279**
Sekolah	9.739	11.219	8.708	9.734	10.220
Mengurus Rumah Tangga	13.720	15.030	18.403	16.937	17.783
Lainnya	3.321	1.834	3.808	5.159	1.276
Penduduk Usia Kerja	**93.699**	**95.166**	**96.811**	**101.638**	**103.582**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,42	70,49	68,06	68,68	71,73
Tingkat Pengangguran (%)	3,45	3,78	4,11	6,68	6,47

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022
*) Angka perkiraaan

8. Belum Optimalnya Realisasi Investasi Dalam Mendukung Perekonomian Daerah

Investasi masih memiliki kendala baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama di Sumatera Barat termasuk di Kota Payakumbuh. Tiga masalah besar yang mengganggu investasi adalah soal tenaga kerja, konflik komunal, dan sengketa tanah. Sementara pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga iklim usaha harus terjaga. Status tanah ulayat selalu jadi momok oleh investor, ini mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2020 realisasi investasi di Kota Payakumbuh Rp 178,3 milyar, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp 250,6 milyar, namun melihat upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang memadai baik dari sisi pelayanan dan perijinan termasuk kenyamanan dan keamanan bagi investor, nilai realisasi ini belum optimal khususnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena ternyata realisasi investasi di tahun 2020 tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh di Tahun 2020 justru mengalami kontraksi menyentuh angka -1,66%. Pada tahun 2021, telah terjadi kenaikan nilai investasi mencapai angka Rp 417,24 milyar dan ini diperkirakan dapat mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada angka 3,32%. Nilai realsasi investasi yang cukup besar ini belum dapat sepenuhnya mengembalikan kondisi perekonomian Kota Payakumbuh seperti sebelum adanya wabah Covid-19.

Tabel IV-3
Perkembangan Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai realisasi investasi	milyar	229,3	231,5	250,6	178,3	417,24
2	Pertumbuhan ekonomi	%	6,12	6,02	5,92	-1,65	3,58

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PMD dan PTSP Kota Payakumbuh, 2022

9. Stagnasi Perkembangan Sektor Perdagangan, Industri dan UMKM

Permasalahan perdagangan dan UMKM saat ini diantaranya adalah kesulitan untuk mendapatkan modal. Disamping itu masih ada UMKM yang belum mengurus izin usaha, terutama usaha rumah tangga dengan skala mikro dan kecil. Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak juga menjadi masalah UMKM yang dapat mempengaruhi dana transfer pusat ke daerah. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM sulit berkembang menjadi UKM dengan modal yang lebih besar. Masalah inovasi juga menjadi masalah tersendiri, sehingga produk UMKM yang ada sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Tampilan dan produksi cenderung monoton yang membuat pelanggan lebih cepat bosan, akibatnya UMKM yang ada terkesan berjalan di tempat.

Dari data pada tabel di bawah ini terlihat bahwa persentase UKM terhadap UMKM masih sangat rendah, yaitu berada pada angka 14,19%, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 13,68%. Namun dari sisi pertumbuhan usaha mikro justru cukup pesat, khususnya sejak tahun 2020. Namun sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perkembangan usaha mikro ini cenderung terjadi stagnasi, karena kurangnya permodalan dan terbatasnya diversifikasi produk.

Tabel IV-4
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2021

Jenis usaha	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	Unit	15.262	16.714	16.770	19.388	20.088
Usaha Kecil	Unit	5.471	2.565	2.615	2.615	2.865
Usaha Menengah-Besar	Unit	214	448	458	458	458
Persentase UKM terhadap UMKM	%	27,14	15,27	15,49	13,68	14,19
Total UMKM	**Unit**	**20.947**	**19.727**	**19.843**	**22.461**	**22.461**

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2022

UKM Kota Payakumbuh banyak yang bergerak di sektor usaha industri kecil yang dikelola secara tradisional. Sektor ini sejatinya merupakan potensi yang menopang pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Payakumbuh secara keseluruhan. Sebetulnya sektor ini dapat menjadi penopang jika diintegrasikan menjadi industri kepariwisataan yang saat ini sedang digiatkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat, khususnya industri yang memiliki kekhasan lokal Payakumbuh. Selama ini belum ada integrasi yang menyeluruh antara industri kepariwisataan dengan sektor-sektor yang mendukung khususnya sektor industri makanan (kuliner), kerajinan termasuk atraksi-atraksi seni dan budaya khas Payakumbuh yang dapat menjadi daya tarik wisata. Sebagaimana permasalahan UMKM secara umum telah disampaikan di atas seperti masalah permodalan, pemasaran dan diversifikasi produk juga membelit perkembangan sektor industri kecil ini. Apalagi Kota Payakumbuh dari sisi kepariwisataan tidak memiliki kekayaan wisata yang bisa dijadikan penopang perekonomian dan menjadi sektor ekonomi unggulan daerah selain dari industri wisata kuliner dan atraksi seni dan budaya lokal. Namun posisi strategis Payakumbuh yang terletak antara Kota Pekanbaru dan Kota Padang sebagai 2 (dua) ibukota provinsi di wilayah Sumatera Tengah tetap menjadikannya sebagai daerah penting dan strategis yang sejatinya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan wilayah.

10. Tantangan Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara itu, Pemerintah Kota Payakumbuh masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, diantaranya belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih. Sampai saat sekarang, tingkat layanan air bersih perpipaan sudah hampir 100%, namun kualitas layanan belum optimal selama 24 jam terutama pada jam-jam sibuk (*peak season*) masih ada kawasan yang tidak mendapatkan layanan air bersih. Kemudian permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan seperti drainase dan trotoar yang layak.

Dari sisi pengelolaan lingkungan hidup terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkut dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Di samping itu, armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Payakumbuh. Dengan adanya TPST, maka jumlah timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Regional semakin berkurang. TPA Regional yang berada di Kota Payakumbuh menampung sampah

dari Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Akibatnya timbulan sampah sudah melebihi ambang batas dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini berdampak kepada lahan pertanian penduduk yang berada pada sekitar lokasi TPA Regional. Diperkirakan dalam dua tahun ke depan, kapasitas TPA regional ini akan penuh dan tidak bisa dioperasionalkan lagi, sehingga ini akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari lokasi TPA baru. Kawasan kumuh yang beberapa tahun yang lalu juga menjadi permasalahan serius, saat ini tidak menjadi permasalahan karena cukup efektifnya berbagai program penanggulangan kekumuhan yang merupakan kolaborasi daerah dengan Program KOTAKU dari pemerintah pusat. Sekarang Kota Payakumbuh hanya perlu mempertahankan kondisi yang sudah baik, jangan sampai kembali menjadi kumuh serta peningkatan ketersediaan drainase di wilayah-wilayah yang masih berpotensi kumuh.

Prasarana jalan yang ada di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik, pada tahun 2021 ini panjang jalan dalam kondisi mantap sudah mencapai 79,84% dan kondisi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dari kondisi tahun 2021 tersebut, masih ada jalan yang belum berkondisi mantap sekitar 20% lagi. Ini tentunya menjadi permasalahan juga di Kota Payakumbuh, karena jalan yang belum mantap akan berakibat pada gangguan lalu lintas, apalagi dengan meningkatnya volume kendaraan dan pemakai jalan lainnya menuntut adanya ketersediaan prasarana dan sarana jalan yang memadai.

Pembangunan Mesjid Agung yang menjadi prioritas pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 masih sampai tahap pembebasan lahan. Kondisi tahun 2021 lahan untuk lokasi Masjid Agung telah dibebaskan. Dengan telah adanya ketersediaan lahan, rencana pembangunan Masjid Agung perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Normalisasi Batang Agam saat ini untuk kawasan Kecamatan Payakumbuh Barat sebagai langkah awal *water front city* sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Normalisasi ini sedang dilanjutkan ke kawasan Kecamatan Payakumbuh Selatan berupa pelaksanaan fisik. Untuk itu, normalisasi ini perlu dilanjutkan ke kawasan Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Timur dalam bentuk pembebasan lahan. Fasilitas umum dan utilitas publik, seperti lahan parkir yang terintegrasi juga sangat dibutuhkan, mengingat seringnya terjadi kemacetan di pusat kota terutama jalur jalan utama, khususnya pada jam-jam sibuk.

Tabel IV-5
Perkembangan Prasarana dan Sarana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan air minum	%	95,46	96,07	97,84	96,84	99,76
Sampah yang terangkut ke TPA	%	69,33	53,79	89,40	90,82	91,30
Jalan kota dalam kondisi mantap	%	67,22	69,21	72,25	75,90	79,84
Jalan yang memiliki trotoar	%	7,36	7,36	7,63	7,68	7,82
Jalan yang memiliki drainase	%	51,86	54,74	58,95	61,24	64,12
Irigasi dalam kondisi baik	%	73,43	77,96	80,6	87,62	89,09
Ketersediaan fasilitas umum perkotaan	%	66,67	66,67	68	69,84	70,87

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2022

11. Tuntutan Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan dan Layanan Publik.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal. SPIP dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Dengan adanya peralihan dan penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional pada tahun 2022 ini, maka diharapkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

Menghadirkan birokrasi bertaraf internasional atau *smart* ASN menuju birokrasi 4.0 yang adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat akurat dan efisien*/simple birokrasi good service/good government*, merupakan tantangan tersendiri yang harus dicapai sebelum berakhirnya tahapan RPJPD di tahun 2025. Kebijakan belanja pegawai 30% dari APBD, merupakan salah satu kebijakan agar ASN benar-benar tepat fungsi dan berdaya guna, sehingga lebih efisien dalam pembagian tugas dan kerja. Dengan anggaran yang dibatasi tersebut, daerah dapat melakukan perampingan birokrasi agar tidak ada lagi istilah ASN yang duduk di warung kopi, karena tidak ada yang akan dikerjakan.

Dari sisi pelayanan publik, Kota Payakumbuh sudah cukup baik dengan indeks pelayanan publik pada tahun 2021 sebesar 4,24 (A-) yang menandakan bahwa pelayanan publik masuk kategori “sangat baik”. Kondisi ini tentunya perlu ditingkatkan menjadi kategori “pelayanan prima” dengan indeks antara 4,51 s/d 5,00. Upaya ke arah itu sudah dilakukan pemerintah kota khususnya dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima termasuk penyediaan sarana dan prasarana termasuk SDM yang prima.

12. Degradasi Pemahaman dan Pengamalan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

Dalam bidang sosial budaya, khususnya yang berkaitan dengan falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* terjadi degradasi, baik dari sisi pemahaman maupun pelaksanaannya. Ini bisa terlihat pada generasi muda yang tidak mengetahui adat budaya, karena tergerus oleh perkembangan zaman. Mereka lebih sibuk dengan gadget masing-masing, sehingga lupa asal usulnya, tidak lagi memahami *kato malereng*, *kato mandata* dan *kato mandaki. Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* hanya tinggal menjadi slogan kata-kata indah semata. Dalam hal memandikan jenazah, khatib jum’at dan imam shalat 5 waktu, menunggu yang ‘ahlinya’ atau yang sudah biasa melakukannya. Generasi muda sebagai penerusnya belum terlihat. Dikhawatirkan jika ini berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi penelantaran jenazah, gagalnya shalat jum’at dan sepinya masjid dan mushalla karena ketiadaan jamaah di masa yang akan datang.

Dalam hal budaya saat ini juga sulit ditemukan generasi yang cakap dalam *'rundiang'*. Setiap prosesi adat selalu menunggu mereka yang sudah terbiasa berbicara mengenai petatah petitih adat. Selain itu generasi muda yang sadar akan asal usul dan sejarah Kota Payakumbuh juga sulit dicari. Dampak akhirnya adalah terjadinya kenakalan, meningkatnya kriminalitas, degradasi moral menimpa masyarakat, khususnya generasi muda. Sepanjang tahun 2021 terjadi lonjakan kasus pelanggaran asusila yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sebagaimana Tabel IV-6.

Tabel IV-6
Tingkat Pelanggaran Asusila Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Kategori Kasus	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	121	179	61	44	107
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	652	224	195	898	11.081
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	773	435	229	942	11.188

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2022

Salah satu yang berperan dalam pelestarian adat dan budaya serta bertanggung jawab untuk penanganan degradasi moral adalah lembaga adat dan keagamaan yang ada. Selama ini, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat di Kota Payakumbuh sudah berjalan dengan baik, dimana pemerintah memberikan dana stimulan untuk operasional lembaga tersebut serta memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan adat istiadat bagi pemangku adat dan tokoh masyarakat. Terdapat 10 lembaga adat yang ada dan semuanya cukup aktif dalam menjalankan fungsinya, walalupun belum optimal dan masih perlu ditingkatkan melalui konsensus dan berbagi peran yang jelas dengan pemerintah, sehingga permasalahan-permasalahan agama, adat, budaya dan kemerosotan moral dapat diminimalisir.

Untuk mengetahui peta permasalahan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dalam 4 (empat) tahun ke depan, maka perlu dibuat peta permasalahan sebagaimana tabel IV-7.

Tabel IV-7
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat	Masih terbatasnya investasi	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi
		Iklim investasi yang kurang kondusif
	Tingkat konsumsi rumah tangga masih rendah	Pendapatan masyarakat rendah
		Kecenderungan berbelanja di luar daerah
	Dominasi skala mikro pada usaha perdagangan dan industri	Keterbatasan modal usaha
		Keterbatasan pemasaran dan diversifikasi produk
		Pengelolaan usaha secara kekeluargaan
Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Faktor kultur yang malas bekerja
		Pendidikan yang rendah
		Faktor kesehatan dan keterbatasan fisik
		Pertumbuhan penduduk yang tinggi
	Keterbatasan sumber daya (alam dan modal)	Beban hidup keluarga
		Kurangnya akses terhadap modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketidakcukupan modal usaha
Tantangan pembangunan manusia	Tingkat pendidikan masih relatif rendah pada skala regional	Kesadaran masyarakat untuk bersekolah cenderung kurang
	PDRB Perkapita dan pengeluaran riil perkapita relatif rendah dibandingkan nasional	Masih tingginya tingkat pengangguran
	Degradasi moral di kalangan remaja dan anak-anak	Belum optimalnya peran orang tua, pemuka adat dan agama dalam perkembagan anak.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Permasalahan-permasalahan makro yang telah dikemukan di atas, perlu didetailkan dan dikelompokkan menurut urusan pemerintahan, sehingga lebih memudahkan dalam merumuskan arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan menurut urusan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Belum optimalnya pembelajaran di masa pendemi Covid-19;
b. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh, SD dan SMP yang terakreditas A masih sekitar 79%;
c. Adanya kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta;
d. Masih kurangnya kualitas serta terjadinya penurunan kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Belum meredanya pandemi Covid-19;
b. Cukup tingginya angka prevalensi stunting;
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan PHBS;
d. Terjadinya pergeseran gaya hidup berdampak pada pergeseran jenis penyakit yang sering muncul (dari Penyakit Menular menjadi Penyakit Tidak Menular); hipertensi, diabetes, TB, dll;
e. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah penderita HIV;
f. Masih kurangnya kompetensi SDM Kesehatan (belum sesuai standar);
g. Belum semua sarana pelayanan dasar dan rujukan sesuai standar;
h. Belum maksimalnya fungsi Puskesmas Non Rawat Inap dengan layanan PONED;
i. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar;
j. Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih;
b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan;
c. Masih rendahnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan;
d. Belum maksimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan;

e. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
f. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih diperlukan peningkatan pengelolaan menuju sanitasi aman;
b. Masih perlu mempertahankan kondisi ketidakkumuhan yang sudah ada;
c. Masih adanya rumah tidak layak huni;
d. Masih tingginya kebutuhan rumah (*backlog*).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Masih terjadinya pelanggaran PERDA;
b. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran.
c. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
d. Belum memadainya sarana prasarana penanganan kebakaran dan penyelamatan lainnya;
e. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam;
f. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana daerah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

a. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
b. Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas;
c. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
d. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Berkurangnya peluang kerja dan lapangan pekerjaan serta adanya pengurangan pekerja akibat dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran;
b. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
c. Masih kurangnya jiwa wirausaha sehingga jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja menjadi kurang;
d. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang muncul karena ketidaksesuaian antara spesifikasi lapangan kerja dengan ketersediaan sumber daya;
e. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja dan jaminan pensiun);
f. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerja sama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. Masih belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak anak;
c. Belum semua stakeholder memahami konsep PUG.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan**
   a. Rendahnya pola pangan harapan payakumbuh;
   b. Relatif tingginya pengeluaran belanja pangan masyarakat dibandingkan dengan belanja non pangan;
   c. Masih ditemukan kasus keamanan dan kesehatan makanan di tengah masyarakat.
4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**
   a. Banyak lahan Pemerintah Kota yang belum bersertifikat;
   b. Belum tuntasnya penyelesaian tanah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP).
5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
   a. Menurunnya kualitas udara akibat masih adanya pembakaran sampah dan emisi kendaraan bermotor;
   b. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air;
   c. Belum optimalnya pengelolaan RTH;
   d. Belum optimalnya cakupan pelayanan penanganan dan pengelolaan sampah;
   e. Belum memadainya sarana prasarana persampahan;
   f. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sehat dalam berbagai macam aktifitas pembangunan;
   g. Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah diberikan.
6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
   a. Belum optimalnya proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi kependudukan;
   b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.
7. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
   a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
   b. Belum terpenuhinya SPM di tingkat kelurahan.
8. **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
   a. *Contrasepsi Prevalens Rate* masih rendah;
   b. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh yang lebih dipengaruhi oleh migrasi masuk penduduk;
   c. Masih tingginya angka TFR (*total fertility rate*);
   d. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan keluarga berencana;
   e. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Petugas KB;
   f. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
9. **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**
   a. Belum tersedianya areal parkir baik penumpang maupun barang secara layak;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku berlalu lintas yang baik;
   c. Belum adanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan kenyamanan pengguna, keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah;
   d. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana perhubungan dan pengelolaan terminal penumpang;
   e. Belum tersedianya terminal angkutan barang.

10.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik;
b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pemerintahan;
c. Terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam mengelola informasi dan komunikasi;
d. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur informatika.
e. Belum optimalnya penetapan dan penguatan regulasi SPBE.

11.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Menurunnya kualitas dan aktifitas perkoperasian dan UMKM terutama akibat dampak wabah Covid-19;
b. Rendahnya jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas yang baik;
c. Belum optimalnya diversifikasi produk dan unit usaha koperasi-koperasi;
d. Lambatnya pertumbuhan skala usaha UMKM;
e. Belum terbangunnya kelembagaan UMKM yang kuat;
f. Kecenderungan menurunnya jumlah anggota koperasi karena koperasi sebagian besar belum berbasis syariah;
g. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
h. Masih terbatasnya partisipasi pengusaha pengolahan skala mikro melakukan promosi secara mandiri;
i. Masih kurangnya keinginan usaha pengolahan skala mikro untuk melakukan pemasaran secara online;
j. Masih kurangnya SDM pengelola usaha pengolahan skala mikro;
k. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha;
l. Masih terbatasnya akses permodalan dana CSR usaha pengolahan skala mikro ke BUMN dan pihak ketiga lainnya.

12.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran daerah khususnya potensi investasi;
b. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
c. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
d. Masih rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
e. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi;

13.Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Masih terbatasnya even-even olah raga dan kepemudaan sebagai akibat pandemi Covid-19;
b. Masih rendahnya prestasi atlet daerah;
c. Masih rendahnya peran organisasi olah raga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi;
d. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga;

e. Rendahnya aktifitas organisasi kepemudaan.

14.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah untuk memenuhi kepentingan perencanaan dan penelitian serta promosi daerah;
b. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah.
c. Belum memadainya kapasitas kelembagaan pengelolaan data statistik daerah.

15.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Masih rentannya serangan cyber attack terhadap aplikasi komunikasi dan informasi pemerintah;
b. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola persandian;
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi (persandian).

16.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya sebagai aset berharga daerah;
b. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya;
c. Masih kurangnya peran lembaga sosial keagamaan dan ninik mamak dalam membentuk karakter masyarakat;
d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemuda tentang nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.
e. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya.
f. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Payakumbuh.

17.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

a. Berkurangnya pengunjung dan aktifitas perpustakaan karena adanya pandemi Covid-19;
b. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku;
c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung.
d. Masih kurangnya tenaga pustakawan khususnya untuk kendaraan perpustakaan keliling yang menjangkau kelurahan dan sekolah-sekolah.
e. Belum tersedia gedung perpustakaan yang representatif.

18.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

a. Belum tersedianya depo arsip dan masih terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan;
b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
c. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya arsip serta proses dan alur pelaksanaan kearsipan sesuai dengan regulasi yang ada.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Menurunnya kunjungan wisata dan terhentinya even-even pariwisata akibat dampak pandemic *Covid-19*.
b. Rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan;

c. Masih kurangnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pariwisata;
d. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan serapan tenaga kerja;
e. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan daerah lain dalam mengembangkan pariwisata;
f. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM kepariwisataan lokal.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan, sehingga masuknya daging dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah;
b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
c. Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian tidak tergali;
d. Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian Kota Payakumbuh;
e. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian;
f. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha pertanian;
g. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani;
h. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh;
i. Belum optimalnya nilai produksi pertanian;
j. Terjadinya pengrusakan lahan yang berdampak pada lahan pertanian;
k. Terjadinya penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian (degradasi lahan);
l. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi anjuran.
m. Kurang optimalnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Menurunnya aktifitas dan omset perdagangan akibat pandemic *Covid-19*.
b. Daya saing bisnis perdagangan Payakumbuh masih rendah;
c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk;
d. Belum optimalnya Infrastruktur pasar yang representatif;
e. Masih belum optimalnya penataan pusat perdagangan;
f. Belum optimalnya usaha perdagangan besar yang punya gudang di area yang telah ditentukan di sepanjang jalan lingkar utara;
g. Belum adanya pasar tertib ukur;
h. Belum tertatanya pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi sektor lainnya;
i. Terdapatnya fluktuasi harga kebutuhan pokok di Kota Payakumbuh;
j. Terbatasnya pemanfaatan kerjasama perdagangan antar daerah untuk memperluas jaringan perdagangan pasar lokal.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Rendahnya produktifitas usaha industri;
b. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta diversifikasi produk industri;
c. Belum optimalnya pengemasan produk industri;
d. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk;
e. Limbah industri kecil belum terkelola dengan baik.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Manajemen skala usaha perikanan masih rendah;
b. Masih rendahnya produktifitas hasil perikanan;
c. Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung usaha perikanan;
d. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kecakapan petani ikan;
e. Rendahnya daya saing produk perikanan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Capaian realisasi target kinerja pembangunan daerah belum dapat tercapai secara maksimal;
c. Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;
d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
e. Masih belum semua target program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan.

2. Keuangan Daerah

a. Berkurangnya pendapatan daerah terutama dana transfer akibat wabah *Covid-19*;
b. Belum ada pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dan atau melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta;
c. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;
d. Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal;
e. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
f. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

3. Kepegawaian

a. Belum optimalnya sistem tunjangan berbasis kinerja;
b. Belum optimalnya pengukuran kinerja unit kerja dan individu secara komprehensif;
c. Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
d. Kurangnya pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas aparatur;
b. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan;
c. Belum adanya sertifikasi kompetensi pemerintahan pada setiap jenjang jabatan.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik;
b. Belum optimalnya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).

6. Pengawasan

a. Belum optimalnya penanganan terhadap TLHP baik internal maupun eksternal;
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan pemerataan secara optimal;

c. Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan pembangunan; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah.

E. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
b. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan.

F. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Masih relatif tingginya kasus Narkoba
b. Terdapatnya potensi konflik sosial di tengah masyarakat;
c. Masih rendahnya kualitas manajemen organisasi dalam pengelolaan parpol dan ormas.

4.2. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan otonomi yang menuntut kemandirian daerah dalam berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, telah memicu daerah untuk memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya dalam pembangunan. Namun, ketergantungan terhadap pemerintah pusat tetap sangat besar, khususnya daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Demikian halnya Kota Payakumbuh, yang tidak memliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai penggerak perekonomian masyarakatnya. Sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat sangat besar termasuk dengan wilayah sekitarnya. Untuk itulah, isu-isu strategis pembangunan sangat erat kaitannya dengan kondisi global serta kebijakan di tingkat nasional dan regional.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang besar, penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan sektoral, regional, nasional dan global.

4.2.1. Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing didunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Isu-Isu Strategis yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan dan Hukum: Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum dan HAM;
2. Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Peningkatan Kinerja Aparatur;
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam: Ekonomi, Sumber Daya Alam;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Tata Ruang, Prasarana dan Sarana;
6. Lingkungan Hidup;
7. Sosial Budaya.

Isu-isu strategis pada perencanaan jangka panjang, dikelompokkan dalam kaitannya untuk mencapai Kota Payakumbuh yang maju, dengan motor penggerak ekonomi difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikator Kota Maju ditetapkan melalui pengembangan SDM, pemantapan tata pemerintahan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan agama dan budaya dalam kesesuaian pola pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Masyarakat dan Pemerintah merupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan yang dilakukan sejatinya berpijak pada sektor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dengan memperhatikan kondisi ruang daerah. Pola ini dapat dipertimbangkan dalam merumuskan misi Kota Payakumbuh pada pembangunan strategis Kota Payakumbuh untuk tahun 2017–2022.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Periode Sebelumnya

Rencana pembangunan strategis Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005–2025. Sebagai bagian dari proses, maka RPD Tahun 2023–2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD Tahun 2017–2022, sehingga dengan memperhatikan perencanaan pembangunan strategis sebelumnya dapat dilihat target pembangunan yang belum dicapai, dan isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, yaitu ***"Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang"***

Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Isu-Isu Strategis yang dimuat dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 antara lain:

1. Kualitas Pendidikan;
2. Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;
3. Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender;
4. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan;
5. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi;
6. Iklim Usaha dan Investasi;
7. Kualitas dan Kuantitas Pemenuhan Infrastruktur;
8. Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi;
10. Nilai-Nilai Karakter dan Adat dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat;

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021–2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD). RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD serta perencanaan dan penganggaran

Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan untuk membantu Kabupaten/Kota mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dengan Provinsi Sumatera Barat.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan", dengan misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat ini diterjemahkan dalam 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Sumbar Sehat dan Cerdas

Keunggulan sumberdaya manusia menjadi pondasi pembangunan Sumatera Barat. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan dalam makna pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Sumbar sehat dan cerdas ditandai dengan : Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru, Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru, Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen, Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan, Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.

2. Sumbar Religius dan Berbudaya

Masyarakat Sumatera Barat memiliki keunggulan budaya dalam membangun konsensus sosial yang mampu memadukan antara adat dan budaya dalam filosofi Adaik Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah. Masyarakat Sumatera Barat dikenal pula sebagai masyarakat yang agamais. Keunggulan budaya ini dapat menjadi modal dasar yang kuat

sebagai pilar pembangunan yang berakar dari jati diri masyarakat. Sumatera Barat telah berkembang sebagai masyarakat yang majemuk secara suku, agama dan dan ras yang dapat hidup secara harmonis dan toleransi dengan tetap menguatkan jati diri budayanya masing-masing. Perkembangan globalisasi turut mempengaruhi budaya masyarakat yang membutuhkan ketahanan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai budaya masyarakat terutama bagi generasi muda saat ini dan masa mendatang

Sumbar religius dan berbudaya ditujukan untuk : Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (*education tourism*), Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

3. Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Pengembangan sektor perdagangan, UMKM dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk: Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif, Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital, Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, Membangun 3 (tiga) pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4. Sumbar Berkeadilan

Pembangunan di berbagai bidang mensyaratkan daya dukung infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat pergerakan orang dan barang untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyediaan infrastruktur memiliki keberlanjutan secara sosial dengan memperhatikan unsur keadilan. Infrastruktur berkeadilan meliputi dimensi antar ruang atau wilayah-wilayah dan daerah, dimensi waktu antar tahun dan antar generasi, serta keadilan antar sektor baik sektor ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Berkeadilan juga dalam penyediaan layanan pemerintah yang berkualitas dan menjangkau lapisan masyarakat secara luas.

Sumbar berkeadilan ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat dan komunitas, Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Visi Misi Presiden periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Gambar IV-1
Nawacita Kedua RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar IV-2
5 Arahan Utama Presiden

E. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Kabupaten Limapuluh Kota merupakan daerah tetangga yang secara keseluruhan mengelilingi Kota Payakumbuh. Pola hubungan dengan wilayah Kabupaten Limapuluh Kota ini sangat erat, baik hubungan yang terkait dengan ruang dan semua aktifitas masyarakat yang memenuhi ruang tersebut, seperti aktifitas ekonomi, sosial, budaya serta pemerintahan termasuk pola interaksi antar moda angkutan penumpang dan barang. Kabupaten ini kaya dengan sumber daya alam yang sebagian besar dipasarkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan warga dan kebutuhan industri Kota Payakumbuh.

Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah "*Mewujudkan Lima Puluh Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"* dengan mengusung misi berupa :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan,
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional,
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya,
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait langsung dengan Kota Payakumbuh adalah masih ada sekitar 22% perkantoran mereka yang berada di Kota Payakumbuh. Sebetulnya ini sudah menjadi isu yang santer sejak lama, karena adanya roda pemerintahan di luar Kota Payakumbuh yang dijalankan di wilayah Kota Payakumbuh. Ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai objek kerja sama antar daerah yang bisa dimanfaatkan bersama dan saling menguntungkan, namun Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum sepenuhnya bisa mengerjasamakan aset-aset mereka yang berada di Kota Payakumbuh, mungkin karena belum tersedianya prasarana perkantoran yang baru di lokasi wilayahnya.

Kemudian isu lingkungan hidup yang mengemuka dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota berikutnya adalah kerja sama dalam pemanfaatan TPA Regional Payakumbuh. Kerjasama ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pemanfaatan TPA Regional Payakumbuh oleh beberapa daerah termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, melihat Kondisi TPA Regional yang sudah mengkhawatirkan kapasitasnya, maka terbuka peluang bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berkontribusi dalam penyediaan lahan dan pembangunan fisiknya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentunya akan terjadi pemindahan TPA Regional Payakumbuh ke TPA Regional Lima Puluh Kota, jika TPA Regional Payakumbuh sudah *over capacity* dan tidak dapat menampung timbulan sampah lagi.

F. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis yaitu terdiri atas:

1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum
4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial.

PP Nomor 2 Tahun 2018 ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur lebih rinci dalam penerapan SPM oleh Pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 Perarturan Menteri Dalam Negeri ini keenam jenis SPM dirinci lagi kepada bentuk-bentuk pelayanan yang diprioritaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan

Mutu dan pelayanan dasar terkait dengan bidang pendidikan yaitu:

a. Pendidikan anak usia dini;
   Untuk pendidikan anak usia dini ini pelayanan diberikan pada warga Negara usia 5 - 6 tahun
b. Pendidikan dasar;
   Untuk warga Negara usia 7-15 Tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan
c. Pendidikan kesetaraan;
   Untuk warga Negara usia 7–18 tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

2. Kesehatan

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan adalah:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; untuk ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; untuk ibu melahirkan
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; untuk bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita; untuk balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; untuk usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; untuk usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; untuk usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; untuk penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; untuk penderita diabetes melitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; untuk orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; untuk orang terduga tuberkulosis
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); untuk orang beresiko HIV

Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum terkait pada :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;untuk seluruh warga negara
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah omestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat; untuk seluruh warga negara

Mutu pelayanan dasar pada SPM PUPR meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

4. Perumahan Rakyat

Mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; untuk Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah; untuk Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; untuk
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima layanan dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
b. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
c. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

Mutu pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

6. Sosial

Jenis pelayanan minimum bidang sosial yaitu :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Penerima layanan dasar SPM Sosial adalah Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut usia telantar, Gelandangan dan pengemis, Korban bencana di tingkat provinsi, Korban bencana di tingkat kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Sosial meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri ini juga diatur tahapan Penerapan SPM dengan empat tahapan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data;
2. Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Tahap penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. Tahap pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

G. *Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) adalah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, dengan masa berlakunya 2015–2030, yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara diseluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah, sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Secara garis besar SDGs 2045 berjalan dengan memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya yakni *MDGs* 2030 dimana diharapkan kaum millennial mampu berperan banyak dalam memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting termasuk alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal yakni technology agar tidak tertinggal jauh dengan negara yang sudah lebih maju.

Gambar IV-3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berikut penjelasan setiap tujuan dalam SDGs beserta logonya:

Tujuan 1
Tanpa kemiskinan *(No Poverty)*. Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.

Tujuan 2
Tanpa kelaparan *(Zero Hunger)*. Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi.

Tujuan 3
Kehidupan sehat dan sejahtera *(Good Health and Well-Being)*. Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia

Tujuan 4
Pendidikan berkualitas *(Quality Education)*. Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa di akses oleh semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat

Tujuan 5

Kesetaraan gender *(Gender Equality)*. Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan.

Tujuan 6

Air bersih dan sanitasi layak *(Clean Water and Sanitation)*. Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih di dunia ini dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia akibat banyak nyawa melayang setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.

Tujuan 7

Energi bersih dan terjangkau *(Affdorable and Clean Energy)*. Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tujuan 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi *(Decent Work and Economy Growth)*. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan.

Tujuan 9

Industri, inovasi dan infrastruktur *(Industry, Innovation, and Infrastructure)*. Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan.

Tujuan 10

Berkurangnya kesenjangan *(Reduce Inequality)*. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi.

Tujuan 11

Kota dan komunitas berkelanjutan *(Sustainable Cities and Communities)*. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab *(Responsible Consumption and Production)*. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Penanganan perubahan iklim *(Climate Action)*. Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama.

Tujuan 14

Ekosistem laut *(Life Below Water)*. Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal.

Mengingat Kota Payakumbuh, tidak memiliki kawasan laut maka goals tidak dilaksanakan di Kota Payakumbuh

Tujuan 15

Ekosistem darat *(Life On Land)*. Selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama.

Tujuan 16

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh *(Peace, Justice, and Strong Institution)*. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

Tujuan 17

Kemitraan untuk mencapai tujuan *(Partnership for The Goals)*. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan *MDGs*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang; memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – *no one left behind;* pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, Organisasi Masyarakat dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi*; MDGs* hanya menargetkan pengurangan "setengah", sedangkan *SDGs* menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator "*Zero Goals*"*;* tidak hanya memuat *Goals* tetapi juga Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Filantropi menjadi salah satu dari empat pilar pendukung SDGs dari sisi dunia usaha, tiga pilar lainnya adalah pemerintah, Organisasi Masyarakat dan media, serta pakar dan akademisi. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama filantropi karena filantropi memiliki jangkauan yang luas. Hal ini disebabkan karena filantropi biasanya digerakkan oleh orang-orang dermawan yang suka memberi dan memiliki nilai-nilai untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Melalui RPJMD ini pada dokumen jabarannya akan ditindaklanjuti serius oleh masing-masing perangkat daerah agar bersama-sama bergerak dengan filantropi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sekaligus percepatan tujuan pembangunan nasional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan.

H. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan terkait dengan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang dikembangkan untuk mempercepat terjadinya pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur.

G.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota. Berikut Penjabaran rencana struktur ruang dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 :

G.1.1. Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota

Rencana pusat-pusat pelayan Kota Payakumbuh meliputi:

A. Pusat Pelayanan Kota.

Pusat Pelayanan Kota mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa regional Kota Payakumbuh, dengan pusat terletak di Kawasan Pusat Kota.

B. Sub pusat pelayanan kota.

Sub pusat Pelayanan Kota (SPPK) terdiri dari:

1. SPPK I mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan kawasan permukiman, yang melayani sebagian wilayah kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Payakumbuh Selatan, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Padang Tangah payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur;
2. SPPK II mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan agroindustri yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Timur;
3. SPPK III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan Pertanian, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara;
4. SPPK IV mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri kecil dan menengah Kota Payakumbuh yang melayani Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat , dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
5. SPPK V mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan pariwisata yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat.

C. Pusat Lingkungan (PL) merupakan pusat pelayanan yang terdekat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hirarki struktur ruangnya, maka PL yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. PPK yang terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 1-1, dengan pusat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo;
   2. PL 1-2, dengan pusat di Kelurahan Balai Tongah Koto;
   3. PL 1-3, dengan pusat di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo; dan
   4. PL 1-4, dengan pusat di pada Kelurahan Ibuh.

b. SPPK I terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 2-1, dengan pusat di Kelurahan Sicincin;
   2. PL 2-2, dengan pusat di Kelurahan Padang Tiakar;
   3. PL 2-3, dengan pusat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
   4. PL 2-4, dengan pusat di Kelurahan Balai Jaring.

c.SPPK II terdiri 3 (tiga) PL, yang meliputi:
   1. PL 3-1, dengan pusat di Kelurahan Payobasung;
   2. PL 3-2, dengan pusat di Kelurahan Tiakar; dan
   3. PL 3-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Baru.

d. SPPK III terdiri 3 (tiga) PL, yang meliputi:
   1. PL 4-1, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
   2. PL 4-2, dengan pusat di Kelurahan Taratak Padang Kampuang; dan

3. PL 4-3, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Diateh.

e. SPPK IV terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 5-1, dengan pusat di Kelurahan Sungai Durian;
   2. PL 5-2, dengan pusat di Kelurahan Koto Panjang Padang;
   3. PL 5-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Tangah; dan
   4. PL 5-4, dengan pusat di Kelurahan Napar.

f. SPPK V terdiri dari 3 (tiga) PL, yang meliputi:
   1. PL 6-1, dengan pusat di Kelurahan Pakan Sinayan;
   2. PL 6-2, denga pusat di Kelurahan Padang karambia; dan
   3. PL 6-3, dengan pusat di Kelurahan Payolansek.

G.1.2. Rencana Sistem Prasarana Utama Wilayah Kota

Arahan Pengembangan sistem jaringan transportasi adalah bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal. Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah terutama pada wilayah pengembangan baru dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Oleh sebab itu, rencana struktur prasarana jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Selain itu untuk mengembangkan sistem jaringan jalan eksternal, dalam rangka pengembangan sistem transportasi terhadap kawasan di sebelah utara Kota Payakumbuh menuju arah Kota Pekanbaru dan meningkatkan potensi ekonomi (perdagangan dan jasa) serta wisata di Kota Payakumbuh maka dikembangkan sistem jaringan jalan arteri primer yang sering disebut *Ring Road Utara* Kota Payakumbuh.

Di samping rencana sistem jaringan jalan juga direncanakan sistem jaringan Perkeretaapian. Fungsi jalur kereta api terhadap sistem jaringan transportasi Kota Payakumbuh dalam lingkup regional Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai salah satu alternatif angkutan moda transportasi darat, baik untuk mengangkut orang maupun barang inter dan intra regional, yaitu dengan mendorong percepatan realisasi dari pengoperasian jaringan jalur kereta api dengan terkoneksi dalam sistem jaringan kereta api Sumatera (*Sumatera Railway*). Untuk Kota Payakumbuh, jalur kereta api antara Padang Panjang-Payakumbuh eksisting sudah ada hingga Kelurahan Parik Rantang (stasiun), namun jalur ini sebagian besar sudah ditutup untuk badan jalan dan masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati). Pengembangan jalur kereta api yang direncanakan adalah dari batas kota Balai Panjang sampai kawasan Ngalau Sampik saja, dimana lokasi stasiun kereta api kelas kecil akan ditetapkan di Kawasan Ngalau Sampik ini. Dalam rangka rencana aktifasi jalur kereta api yang melalui Kota Payakumbuh, maka dilakukan pengalihan trase jalur ruas Padang Panjang-Payakumbuh-Limbanang yakni melalui jalan lingkar utara yang meliputi : Kawasan Balai Panjang-Pakan Sinayan-Kubu Gadang-Bulakan Balai Kandi-Payolansek-Talang-Sungai Durian-Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

G.1.3 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah. Pembangkit tenaga listrik yang dimanfaatkan di Kota Payakumbuh bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau, PLTA Batang Agam, PLTA Ombilin, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Salak, dan PLTA Koto Panjangyang didistribusikan melalui gardu induk/kubikel dengan kapasitas tegangan 20 KV dan berdaya 200 KVA. Jaringan listrik sudah menyebar hampir keseluruh bagian wilayah Kota Payakumbuh.

Secara umum jaringan listrik yang ada di Kota Payakumbuh pada saat ini sudah merata penyebarannya disetiap kecamatan yang ada di Payakumbuh, terutama pada pusat-pusat kegiatan dan lingkungan perumahan penduduk. Dari data yang ada diketahui bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebesar 23.529 kilowatt dan dari hasil analisa yang telah dilakukan terlihat bahwa jumlah kebutuhan listrik Kota Payakumbuh sampai pada akhir tahun rencana adalah sebesar 54.852 kilowatt. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat akan kebutuhan energi listrik dan dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa permintaan masyarakat terhadap sambungan listrik masih memerlukan tambahan daya energi listrik dari pihak PLN.

Tabel IV-8

Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Kota Payakumbuh Tahun 2030

No	Kecamatan	Kebutuhan Tahun 2030 (Watt)				
		Rumah Tangga	Komersil dan Jasa	Fasum & Sosial	PJU	Total Kebutuhan
1.	Payakumbuh Barat	16.152.760	2.485	3.230.522	1.615.276	21.001.073
2.	Payakumbuh Timur	9.757.800	1.501	1.951.560	975.780	12.686.641
3.	Payakumbuh Utara	9.354.200	1.439	1.870.856	935.428	12.162.003
4.	Payakumbuh Selatan	3.538.860	544	707.772	353.886	4.602.062
5.	Lamposi Tigo Nagari	3.501.420	539	700.284	350.142	4.552.385
	Kota Payakumbuh	42.189.420	6.491	8.437.884	4.218.942	54.852.737

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

Perkiraan kebutuhan listrik pada tahun 2030 pada Kota Payakumbuh meningkat yaitu sebesar 54.852 kilowatt. Jumlah kebutuhan listrik tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga penerangan jalan. Kebutuhan listrik lebih didominasi untuk kebutuhan rumah tangga dimana jumlah energi listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 42.189 kilowatt pada tahun 2030.

b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam mendukung perkembangan Kota Payakumbuh terutama sebagai daerah permukiman, perdagangan dan perkantoran, maka kebutuhan prasarana telekomunikasi sudah merupakan suatu keharusan yang perlu dipenuhi dalam menunjang perkembangan daerah. Perkiraan kebutuhan sambungan telepon (SST) di Kota Payakumbuh dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Untuk sambungan langsung Rumah Tangga, kebutuhan telepon rumah adalah sebesar 1 SST untuk 50 jiwa penduduk.

2. Untuk sarana umum/sosial diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 250 jiwa penduduk.
3. Untuk sarana komersial dan lainnya diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 150 jiwa penduduk.
4. Untuk melayani kebutuhan fasilitas telepon umum, maka diasumsikan 1 SST untuk 1000 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk terkini dan standar teknis bahwa 1 unit rumah dihuni oleh 5 jiwa, maka diperkirakan pada Tahun 2030 dibutuhkan jumlah sambungan telepon rumah (dari Telkom) sebesar 5.684 SST untuk melayani 25.261 unit rumah dengan dibagi kedalam beberapa tipe perumahan, dari mulai tipe rumah berukuran kecil, sedang, hingga tipe rumah berukuran besar di seluruh Kota Payakumbuh. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel proyeksi kebutuhan telekomunikasi Kota Payakumbuh.

Tabel IV-9
Proyeksi Kebutuhan Jaringan telepon (Kabel) di Kota Payakumbuh Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Jaringan Telepon						Total Kebutuhan
			Rumah Kecil	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Sedang	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Besar	Kebutuhan Telepon (SST)	
1.	Payakumbuh Barat	62.126	5.907	886	2.954	886	985	443	2.215
2.	Payakumbuh Timur	37.530	3.170	475	1.585	475	528	238	1.189
3.	Payakumbuh Utara	35.978	3.815	572	1.908	572	636	286	1.431
4.	Payakumbuh Selatan	13.611	1.125	169	563	169	188	84	422
5.	Lamposi Tigo Nagari	13.467	1.140	171	570	171	190	85	427

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

c. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air, meliputi : a) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada diwilayah kota, b) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota, dan c) Sistem jaringan sumber daya air kota. Sumber daya air yang terdapat di Kota Payakumbuh salah satunya adalah dari sungai yang mengalir atau yang melalui Kota Payakumbuh. Sungai merupakan sumber daya air permukaan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk Pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wilayah sungai terbagi atas lima, yakni :

1. Wilayah sungai lintas Negara;
2. Wilayah sungai lintas provinsi;
3. Wilayah sungai strategis nasional;
4. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
5. Wilayah sungai dalam satu kabupaten.

Penetapan wilayah sungai tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu yakni :

a. Efektifitas pengelolaan sumber daya air

Efektifitas ini diterjemahkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya air dan juga ketersediaan prasarana sumber daya air. Efektifitas ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah tersebut memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
2. Keberadaan prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan aliran sungai yang lain.

b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air

Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan penetapan wilayah sungai strategis nasional ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%.
2. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk provinsi.
3. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional

c. Sosial

1. Tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi.
2. Wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain.

d. Lingkungan hidup

1. Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional
2. Perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75
3. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5
4. Seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian/cacat tetap dalam jumlah besar.

e. Ekonomi

1. Terdapatnya paling kurang satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha
2. Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi.
3. Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.

Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Kota Payakumbuh secara perwilayahan dialiri oleh tiga aliran sungai besar yakni Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar. Dari ketiga sungai

tersebut, sungai terbesar merupakan sungai Batang Agam dengan lebar 20 m, panjang 14,6 km yang melintasi Kota Payakumbuh pada bagian selatan dan utara Kota. Berdasarkan kriteria penetapan wilayah sungai maka sungai-sungai yang mengalir di Kota Payakumbuh tidak dapat diklasifikasikan ke dalam wilayah sungai strategis nasional. Wilayah sungai di Kota Payakumbuh tergolong pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai Dalam Satu Kota, yang kedepannya perlu dilakukan pengawasan secara ketat dalam peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air untuk peningkatan hasil-hasil produkstivitas pertanian dan perkebunan Kota Payakumbuh.

Kegiatan usaha pertanian masih merupakan usaha yang digeluti sebagian besar masyarakat Kota Payakumbuh. Hal ini didukung dengan perkembangan fisik kawasan yang sebahagian besar merupakan kawasan pertanian dan kawasan pedesaan. Perkembangan Kota Payakumbuh sebagai salah satu Kota Pertanian mengingat masih besarnya penduduk yang bekerja di sektor ini ± 22,46% dan hampir setengah lahan kota adalah lahan pertanian.

Jaringan Irigasi sangat berperan dalam meningkatkan produksi pertanian pada suatu wilayah, di Kota Payakumbuh sudah menggunakan beberapa jenis irigasi sebagai pengairan sawah, seperti irigasi teknis, semi teknis, dan juga irigasi sederhana yang masih digunakan. Sumber air dari irgasi tersebut berasal dari Batang Lampasi, Sungai Beringin, Batang Agam, Sungai Dareh, dan Batang Tabik. Kelima sumber pengairan tersebut berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lahan pertanian merupakan lahan cadangan untuk pengembangan kawasan permukiman. Jika terjadi pengembangan kawasan permukiman maka lahan utama yang tetap dipertahankan adalah lahan pertanian beririgasi.

d. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan didalam RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dijabarkan kedalam beberapa sistem, yaitu :

a. Sistem Jaringan Air Baku;
b. Sistem Penyediaan Air Minum;
c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota;
d. Sistem Persampahan Kota;
e. Sistem Jaringan Drainase Kota;
f. Rencana Sistem Proteksi Kebakaran;
g. Rencana Sistem Perparkiran;
h. Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki;
i. Jalur Evakuasi Bencana.

Pendekatan pembangunan kota saat ini adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Artinya, bagaimana penataan kota tersebut dapat meminimalkan korban jika terjadi bencana. Untuk konteks Kota Payakumbuh, bencana yang dialami adalah bencana alam angin puting beliung dan kawasan yang terkena dampak dari gempa bumi (Kota Payakumbuh tidak merupakan jalur sesar yang menimbulkan gempa atau gerakan tanah).

Ruang Evakuasi dan jalur penyelamatan *(Escape Road)* adalah ruang terbuka dan jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke titik kawasan

penyelamatan dan wilayah yang aman lainnya. Jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Pemanfaatan RTH sebagai salah satu kawasan evakuasi. Dalam hal ini titik utama evakuasi bencana adalah Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu Gadang.
2. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum.
3. Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara : pelebaran jalan, perbaikan *agliment* jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota.
4. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam.
5. Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik (pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi, dan sebagainya).
6. Penanaman pohon-pohon besar sebagai peneduh jalan dan taman secara teratur memberikan keteduhan kota dan jiwa warga kota. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis tanaman lokal. Pohon-pohon besar tersebut akan dirancang sebagai pohon penyelamatan di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya.
7. Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan (*Escape Road*) di Kota Payakumbuh antara lain : Jalan Sudirman dan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan-jalan disekitar Lapangan Kapten Tantawi dan Kawasan Kubu Gadang dan jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.

G.1.4. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kota adalah bentuk pengaturan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar 13 sektor pembangunan kota.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dengan batasan sebagai berikut :

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Konsep pengembangan pola ruang kawasan Perkotaan Payakumbuh pada dasarnya diarahkan berdasarkan evaluasi kesesuaian lahan dan kondisi eksisting

penggunaan dan pemanfaatan lahan yang ada serta indikasi arah dan kebijakan pengembangan pemanfaatan lahan yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang berdasarkan struktur ruang yang diinginkan berdasarkan dinamika pembangunan Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan perkotaan dibagi atas penetapan 2 kawasan utama yang terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

H. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

Secara geografis, Kota Payakumbuh merupakan daerah yang secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga secara langsung dan tidak langsung membutuhkan interaksi yang intens dengan daerah *hinterland*-nya itu. Sebagian besar sumber daya alam dan kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan juga berasal dari wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga pola hubungan interaksi ekonomi dan penduduk antar wilayah sangat dominan. Bagi kabupaten Limapuluh Kota sendiri, Kota Payakumbuh merupakan pasar yang potensial dalam menyerap produksi sumber daya alam khususnya produk pertanian dan peternakan yang memang menjadi potensi utama wilayahnya.

Pola hubungan simbiosis antar wilayah ini telah disadari oleh kedua daerah, sehingga berbagai kesepakatan kerja sama antar daerah disusun yang terakhir adalah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota di Balaikota Payakumbuh yang dihadiri oleh kedua Kepala Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 lalu. Ini merupakan lompatan besar karena hal ini sudah direncanakan sejak tahun 2016, baru terwujud pada tahun 2021. Ini diharapkan menjadi kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kedua daerah semakin baik.

Sedangkan pola pembangunan pembangunan kewilayahan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mencakup wilayah Kota Payakumbuh sesuai dengan potensinya antara lain adalah :

1. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Sesuai dengan SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan pengembangan peternakan provinsi, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi, ayam buras dan itik, sebagaiman Tabel IV-10.

Tabel IV-10
Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan/Komoditi Peternakan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan
1.	Kawasan Sentra Produksi		
	Sapi potong/klaster tri arga	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh*** dan Kota Padang Panjang	Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Sapi Potong/ simenthal	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh*** dan Kab. Solok	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Kerbau	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung	

No	Kawasan/Komoditi Peternakan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan
	Unggas	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina)
	Ayam Buras	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kota Sawahlunto	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Itik	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kab. Solok	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan		
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan	
	Sapi dan Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok	

Sumber : SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016

Pengembangan unggas yang menonjol terdapat pada 2 kecamatan di kota Payakumbuh yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Namun demikian peternakan unggas dalam skala kecil dengan populasi di bawah 5.000 ekor masih dibudidayakan pada 3 kecamatan lain yaitu itik di kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan, ayam dan puyuh di kecamatan Payakumbuh Barat.

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

Sesuai dengan SK Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019 tentang penetapan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan untuk komoditas tanaman hias sebagaimana yang tercantum dalam tabel IV-11

Tabel IV-11
Kawasan Pertanian Holtikultura di Provinsi Sumatera Barat

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Tanaman Jeruk	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan	
2	Tanaman Pisang	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai Kabupaten Dharmasraya, Kota Pariaman	
3	Tanaman Manggis	Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan	
4	Tanaman Durian	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok,	

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
		Kabupaten Pasaman, Kota Solok	
5	Tanaman Buah Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman	
6	Tanaman Aneka Cabai	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman	
7	Tanaman Aneka Bawang	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota	
8	Tanaman Hias	Kota Padang, Kota Padang Panjang, ***Kota Payakumbuh,*** Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Solok	Kawasan Koto Tangah Kawasan Tigo Koto Diateh
9	Tanaman Sayur Lainnya	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat	

Sumber : SK Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019

Kawasan Agribisnis

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah sebagai kawasan pengembangan Agribisnis, sebagaimana Tabel IV-12, dengan lokus berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Tabel IV-12
Kawasan Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sumatera Barat

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, ***Kota Payakumbuh***	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar	
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh,*** Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman	Kelurahan kapalo koto Ampangan kec. Payakumbuh Selatan

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Kawasan dan Sentra Industri

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah sebagai kawasan dan sentra industri tekstil, industri makanan ringan, Industri Pengolahan Kakao, dan Industri Alsintan, sebagaimana Tabel IV-13.

Tabel IV-13
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

No	Sentra Industri	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1 .	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Piladang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat	Kelurahan Balai Panjang kecamatan Payakumbuh Selatan Tenun Balai Panjang) Kelurahan koto kociak kubu tapak rajo (lilit songkok)
2.	Industri Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung	Kelurahan Payolansek, Padang tinggi, padang Tangah, Sungai Durian
3.	Industri Pengolahan Kakao	Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan
4.	Industri Semen dan Turunannya	Kota Solok, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, ***Kota Payakumbuh***, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang	
5.	Industri Alsintan	Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya Kabuapten Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kepulauan Mentawai	Kelurahan Tanah mati, kecamatan Payakumbuh Barat
6.	Industri Minyak Atsiri dan Turunannya	Kota Solok, Kab. Agam, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang	
7.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar	
8.	Industri Pengolahan Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam	
9.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota	
10.	Industri Maritim	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang.	

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Tabel IV-14
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 di Kota Payakumbuh

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
Kabupaten/Kota				
1	Kota Payakumbuh	1. Industri pengolahan kakao	1.1.Fermentasi biji kakao	
			1.2.Pasta, bubuk dan konsentrat kakao	

No	Kabupaten /Kota	Jenis industri	Sentra Produksi	Sentra Bahan Baku
			1.3. Makanan ringan berbahan baku kakao	
		2. Industri pengolahan makanan	Pengolahan daging dan kulit sapi	Daging sapi
				Kulit sapi
		3. Industri tekstil dan produk tekstil	3.1. Sulaman	
			3.2. Bordiran	

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah pengembangan Pariwista, untuk pengembangan Wilayah II Bukittinggi dengan lokus adalah kawasan Ngalau Indah di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana Tabel IV-15. Disamping itu daya tarik wisata unggulan Kota Payakumbuh adalah terkait gastrowisata (wisata kuliner).

Tabel IV-15
Wilayah Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Wilayah I Padang dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kab. Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondariah, Pulau Angso Duo)	
2	Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Bukittinggi (kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Agam, (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kab. Limapuluh Kota, (Kawasan Harau) c. KPPP Kab. Pasaman, (Kawasan Equator) d. KPPP Kab. Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) *e.* KPPP ***Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)***	Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan
3	Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya	1.Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Kab. Tanah Datar, (Istano Basa Pagaruyuang sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kota Padang Panjang, (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kab. Solok, (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kab. Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)	
4	Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya	1.Kawasan yang dikembangkan : KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua)	

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
		2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan berikutnya, sebagai berikut: a. KSPP Kab. Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)	
5	Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan: KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat, 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Teluk Katurai, b. KSPP Katiet, c. KSPP Tua Pejat, d. KPPP Desa Silabu	

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Keterangan:

KUPP = Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata
KSPP = Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata
KPPP = Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

Tabel IV-16
Daya Tarik Wisata Unggulan

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA UNGGULAN	PERWILAYAHAN
1.	Kota Bukittinggi	Kawasan Ngarai Sianok	KSPP Bukittinggi dskt.
2.	Kota Padang	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	KPPP Pantai Padang Kota Tua dskt.
3.	Kota Sawahlunto	Kawasan OCMH (Wisata Kandih)	KSPP Sawahlunto dskt.
4.	Kota Padang Panjang	Kawasan PDIKM	KPPP Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dskt.
5.	**Kota Payakumbuh**	**Kawasan Wisata Kuliner Dan Kota Randang**	**Gastrowisata Payakumbuh dskt.**
6.	Kota Solok	Kawasan Pulau Belibis	KPPP Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dskt.
7.	Kota Pariaman	Kawasan Pulau Angso Duo	KPPP Pantai Gandoriah – Tiram – dskt.
8.	Kab. Agam	Kawasan Wisata Danau Maninjau	KSPP Maninjau dskt.
9.	Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Kesultanan Indrapura	KSPP Mandeh dskt.
10.	Kab. Lima puluh Kota	Kawasan Geopark Harau	KPPP Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dskt.
11.	Kab. Solok	Kawasan Geopark Singkarak (Geosite Gunung Talang)	KSPP Danau Kembar dskt.
12.	Kab. Padang Pariaman	Kawasan Wisata Lubuk Nyarai	KPPP Malibo Anai – Nyarai dskt.
13.	Kab. Sijunjung	Kawasan Geopark Silokek	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
14.	Kab. Tanah Datar	Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyuang)	KSPP Singkarak dskt
15.	Kab. Solok Selatan	Kawasan Saribu Rumah Gadang	KPPP Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dskt.
16.	Kab. Dharmasraya	Kawasan Wisata Sehiliran batang hari	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
17.	Kab. Pasaman	Kawasan Wisata Equator Bonjol	KPPP Taman Equator – Rimbo Panti dskt.

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA UNGGULAN	PERWILAYAHAN
18.	Kab. Pasaman Barat	Kawasan Gunung Talamau	KPPP Pantai Sasak – Talamau dskt.
19.	Kab. Mentawai	Kawasan wisata 3M1K	KSPP Siberut dskt.

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Kawasan Perikanan Budidaya

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Kota Payakumbuh juga menjadi salah satu kawasan pengembangan perikanan budidaya, terutama untuk jenis ikan mas dan ikan gurami, sebagaimana Tabel IV-17.

Tabel IV-17
Kawasan Pengembangan dan komoditi Perikanan Budidaya

NO	KOMODITI PERIKANAN	LOKASI KAWASAN PENGEMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA
1	Ikan Nila	Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung , Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman
2	Ikan Mas	Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar**, Kota Payakumbuh**
3	Ikan Lele	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh
4	Ikan Kerapu	Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
5	Lobster	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mentawai
6	Ikan Bandeng	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
7	Kerang Mutiara	Kabupaten Pesisir Selatan
8	Ikan Gurami	Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab.Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 yaitu Ikan Gurami Sago)
9	Ikan Sidat	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Ikan Gurami	**Kota Payakumbuh**

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Rencana Penumbuhan Kewirausahaan

Dalam rangka penumbuhan kewirausahaan, sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, target penumbuhan *Milenial Entrepreneur* dan *Women Entrepreneur* untuk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel IV-18.

Tabel IV-18
Rencana Penumbuhan *Milenial Entrepreneur* dan *Women Entrepreneur*

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kep Mentawai	324	315	363	421	486	560	637
Kab. Pesisir Selatan	5.827	7.523	8.676	10.054	11.609	13.385	15.228
Kab. Solok	4.070	5.278	6.087	7.054	8.145	9.391	10.684
Kab. Sijunjung	5.602	4.562	5.261	6.097	7.040	8.117	9.235

Kab/Kota	Kondisi Awal		Target (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Tanah Datar	4.192	4.784	5.517	6.394	7.383	8.513	9.685
Kab. Padang Pariaman	4.272	5.508	6.352	7.361	8.499	9.800	11.150
Kab. Agam	7.182	7.607	8.773	10.167	11.739	13.535	15.399
Kab. Lima Puluh Kota	10.583	10.499	12.108	14.032	16.202	18.681	21.253
Kab. Pasaman	3.839	3.616	4.170	4.833	5.580	6.434	7.320
Kab. Solok Selatan	2.426	2.056	2.371	2.748	3.173	3.659	4.163
Kab. Dharmasraya	4.833	4.845	5.587	6.475	7.476	8.620	9.807
Kab. Pasaman Barat	9.065	9.307	10.733	12.438	14.361	16.558	18.838
Kota Padang	15.641	15.815	18.238	21.136	24.404	28.138	32.013
Kota Solok	1.145	1.831	2.112	2.448	2.826	3.258	3.707
Kota Sawahlunto	558	989	1.141	1.322	1.526	1.760	2.002
Kota Padang Panjang	1.568	1.504	1.734	2.009	2.320	2.675	3.043
Kota Bukittinggi	4.499	3.974	4.583	5.311	6.132	7.070	8.044
Kota Payakumbuh	***4.936***	***5.825***	***6.718***	***7.785***	***8.989***	***10.364***	***11.791***
Kota Pariaman	2.071	1.795	2.070	2.399	2.770	3.194	3.634
Jumlah	***92.633***	***97.633***	***112.594***	***130.482***	***150.658***	***173.711***	***197.633***

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

4.2.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, dimana identifikasi dan klasifikasi isu-isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis. Dalam RPD ini, isu-isu strategis lebih banyak mengadopsi kepada isu skala regional Sumatera Barat yang disesuaikan dengan kondisi Kota Payakumbuh, karena acuan utama penyusunan RPD ini adalah dokumen perencanaan pemerintah tingkat atas di samping RPJPD Kota Payakumbuh sendiri serta isu-isu yang tertuang dalam RPJMD sebelumnya. Untuk itu, isu ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu isu utama dan isu strategis sebagaimana Tabel IV-19

Tabel IV-19
Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	• Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan kualitas kesehatan • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta gender
2	Isu Pembangunan Ekonomi	• Tingkat pengangguran dan kemiskinan • Pengembangan sektor ekonomi strategis • Tingkat investasi
3	Isu Tata Kelola Pemerintahan	• Reformasi birokrasi dan tata kelola

No	Isu Utama	Isu Strategis
		pemerintahan. • Pelayanan publik yang prima
4	Isu Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	• Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Pengendalian dan pemanfaatan ruang
5	Isu Agama, Adat dan Budaya	• Penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya

Penjabaran isu strategis sebagaimana telah dituangkan pada Tabel IV-19 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Payakumbuh telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terutama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Payakumbuh, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Payakumbuh. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Payakumbuh *(multiplier effect)* baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Kemudian proses penyelenggaran pendidikan semenjak adanya pandemi Covid-19 tidak bisa terlaksana seperti biasa dalam kondisi normal. Siswa belajar dari rumah dengan sistem online, akan tetapi tidak bisa berjalan optimal karena keterbatasan jaringan dan alat komunukasi serta tenaga pendidik yang belum siap memberikan bahan ajar

melalui media online. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sangat mempengaruhi pelaksanaan dunia pendidikan karena terjadi perubahan mendasar dalam proses pendidikan, jadi diperlukan peningkatan kapasistas guru dan tenaga pendidikan, percepatan digitalisasi pendidikan dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di fasilitas pendidikan.

Isu peningkatan kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pembangunan manusia yang menjabarkan bahwa perlunya peningkatan partisipasi pendidikan pada setiap jenjang di wilayah Sumatera Barat yang juga menjadi jawaban atas isu nasional berupa pembangunan manusia indonesia.

Sejalan dengan itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mencanangkan konsep pendidikan "Merdeka Belajar". Yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas siswa yang lebih baik dan tidak lagi hanya jago menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri. Konsep ini menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan pendidikan yang diarahkan tidak hanya terkait pelayanan dan infratsruktur fisik, perlu juga diperhatikan peningkatan kualitas pendidikan non infrastruktur. Kebijakan terkait bagaimana pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata saat ini menjadi salah satu permasalahan di RPJMN, dan ini perlu kita perhatikan di daerah. Terutama adaptasi terhadap situasi pembelajaran pasca pandemi COVID-19, seperti peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kapasitas pedagogi guru yang sesuai keberagaman anak, pola-pola inovasi pembelajaran pasca pandemi, dan lainnya sepertinya sangat perlu dirumuskan.

Demikian juga dengan digantinya kebijakan UN/USBN menjadi penerapan Asesmen Nasional mulai tahun 2021. Asesmen ini akan dimungkinkan masih akan berlangsung sampai periode RPD ini berlangsung, tentu perlu disikapi dengan kebijakan lokal dan memperhatikan keberagaman potensi siswa dan lingkungan belajar di Kota Payakumbuh, namun perlu diperhatian indikator yang relevan mengakomodir ini. Diantaranya ada dua indinator baru di tingkat nasional, yaitu Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum dan Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum.

Selanjutnya penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kiranya dipertimbangkan dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai zona. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Sistem zonasi dalam PPDB diharapkan mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

Berikutnya adalah adanya dukungan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak dalam mengakselarasi implementasi merdeka belajar sebagai ekosistem pendukung penting bagi proses pembelajaran siswa menuju merdeka belajar. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang dimulai tahun 2022 ini dan implementasi menyeluruh pada tahun 2024, menjadikannya tantangan bagi Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Tuntutan integrasi digital dalam proses pembelajaran juga perlu menjadi perhatian ke depannya, karena kemajuan media telekomunikasi dan informasi perlu diadopsi dalam proses pembelajaran. Tuntutan ini tidak hanya persoalan sarana prasarana digitalisasi pendidikan, namun juga literasi digital tenaga pendidikan, peserta didik dan orang tua.

Sejalan dengan literasi digital di atas, maka salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah "literasi menuju kesejahteraan" yang menuntut literasi itu bukan hanya sekedar membaca, namun sudah memproduksi barang dan jasa. Literasi yang dituntut adalah mulai dari kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bacaan, memahami yang tersirat dari yang tersurat dan mengemukan ide, teori, kreativitas dan inovasi baru. Untuk itu, dengan adanya perpustakaan daerah Kota Payakumbuh dan adanya taman bacaan masyarakat di kelurahan dapat mewadahi perubahan paradigma literasi ini.

Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Payakumbuh masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekruitmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

2. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan merupakan salah satu layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah melalui : (a) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang optimal (Puskesmas dan Rumah Sakit), (b) tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, dan (c) ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, Kota Payakumbuh memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Payakumbuh sendiri dan sebagian penduduk dari Kabupaten Limapuluh Kota. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan pelayanan kesehatan sedikit terganggu dengan adanya pandemi covid-19, layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta sempat terhenti karena adanya beberapa pegawai rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terpapar covid-19, untuk

memutus rantai penyebaran covid-19. Klinik swasta atau tempat praktek pribadi beberapa dokter ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan yang diterima masyarakat menjadi tidak optimal.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi-kondisi tersebut tentu menjadi penghambat terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kota Payakumbuh. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

Isu Optimalisasi kualitas dan layanan kesehatan masyarakat ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu nasional berupa peningkatan akses pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas di semua lini pelayanan kesehatan. Sejalan dengan isu tersebut, permasalahan yang mendapatkan perhatian meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat dari sektor hulu akan memperkuat capaian kualitas SDM. Kemudian upaya preventif melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat, seingga perlu semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat.

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah ditetapkannya Kota Payakumbuh sebagai daerah Intervensi Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Indonesia pada tahun 2022. Stunting merupakan kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan anak-anak lain seusianya, mengalami gangguan pertumbuhan, dan mempengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar. Indikasi lainnya pada anak stunting adalah daya tahan tubuhnya lemah, berat badan cendrung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Stunting ini bisa terjadi sejak dari usia dalam kandungan. Kemudian rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak dengan kelahiran sehat lainnya.

Walaupun terdapat perbedaan data angka stunting Kota Payakumbuh antara pemerintah pusat dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dimana berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Balita Indonesia) tahun 2021 angka stunting Kota Payakumbuh mencapai 20% sedangkan data Dinas Kesehatan hanya sekitar 5% saja. Terlepas dari itu, stunting tetap menjadi isu yang perlu menjadi perhatian dan kerja sama berbagai pihak dalam mengatasinya.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender

Isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kota Payakumbuh masih perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data yang ada, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan dibandingkan dengan daerah lain.

Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender juga merupakan isu nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Terlebih lagi dengan adanya pandemic covid-19 timbul permasalahan baru dalam pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender. Dalam masa pandemi ini anak-anak harus dirumah saja untuk menghindari terpapar covid-19, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak karena ruang gerak yang terbatas sehingga anak-anak tidak bebas untuk menyalurkan potensinya. Keterbatasan dalam beraktifitas berdampak kepada aktifitas ekonomi yang terganggu, berkurangnya pendapatan rumah tangga sedangakn pengeluaran rumah tangga tidak bisa dikurangi yang menyebabkan permasalahan di dalam keluarga terkadang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender harus terus diupayakan dan dijaga agar tetap berkelanjutan. Di samping itu peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak harus terus diupayakan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah ke depan. Sebetulnya prestasi Kota Payakumbuh dalam anugerah Kota Layak Anak (KLA) sangat baik. Pada tahun 2021 Kota Payakumbuh meraih penghargaan KLA kategori Madya, ini merupakan anugerah kelima sejak tahun 2013. Prestasi ini terwujud atas capaian pembangunan dalam memenuhi 31 Hak Anak melalui 5 klaster Hak Anak dan 24 indikator Kota Layak Anak yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ke depannya diharapkan konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh serta berkelanjutan.

Dalam bidang kesetaraan dan keadilan gender juga diraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori utama pada tahun 2021. Ini menunjukkan program-program pembangunan sudah mengakomodir kesetaraan dan keadilan gender, inipun perlu ditingkatkan dan dipertahankan melalui perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

4. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Yang Masih Relatif Tinggi

Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi seharusnya dapat menekan angka pengangguran di Kota Payakumbuh. Namun, pada kenyataannya angka pengangguran masih tinggi seiring dengan masih tingginya angka kemiskinan.

Hal ini menunjukkan rendahnya elastisitas perekonomian terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Pada persoalan ini, ada kemungkinan ketersediaan tenaga kerja di Kota Payakumbuh tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada serta rendahnya keterampilan penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh. Rendahnya penciptaan lapangan kerja bidang jasa dan lapangan kerja berbasis produk lokal sehingga belum

mampu menampung tenaga kerja yang ada. Untuk itu, isu ini perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah ke depannya.

Pandemi covid-19 berperan serta, menambah jumlah pengangguran dimana pada masa ini tenaga kerja yang bekerja pada sektor non formal seperti pedagang, penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan *(*wedding *organizer)*, penyedia jasa fotografi akan banyak kehilangan pelanggan. Omset pedagang menurun karena sepinya pembeli, penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan *(wedding organizer)* dan penyedia jasa fotografi terpaksa tutup karena penyelenggaran pernikahan dan membuat keramaian dengan melibatkan banyak orang dilarang demi mencegah penyebaran Covid-19. Secara otomatis hal ini berdampak kepada menurunnya pendapatan masyarakat dan bahkan menimbulkan pengangguran baru.

Secara Nasional isu ini juga muncul dan bersesuaian, sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024 bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pengangguran.

Selain itu PMKS menjadi isu tersendiri yang perlu menjadi perhatian. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Penurunan angka pengangguran juga diarahkan dalam upaya penyelesaian isu nasional terkait mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana disebutkan di atas telah menjadi Isu nasional, namun belum tereksplorasi dengan matang di daerah, termasuk Kota Payakumbuh.

5. Belum Terintegrasinya Sektor Strategis Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diukur dari pertumbuhan nilai PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh mengalami kontraksi tercatat sebesar -1,65 persen sebagai akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi sangat memukul sektor-sektor ekonomi strategis Kota Payakumbuh, khususnya sektor UMKM yang selama ini menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Meredanya pandemi Covid-19 pada tahun-tahun mendatang menjadi harapan tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi strategis. Namun, ada persoalan mendasar terhadap potensi sektor strategis selama ini, yaitu belum terpetakannya sektor ekonomi strategis secara tepat. Jika ini dapat diwujudkan, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat ditingkatkan. Pada kenyataannya masih banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan potensi sumber daya lokal yang belum termanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta belum terintegrasinya pengembangan masing-masing sektor tersebut.

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRB, sektor perdagangan, industri, pertanian dan pariwisata adalah sektor pengungkit perekonomian Kota Payakumbuh yang masih belum optimal dikembangkan. Rendahnya daya saing produk, lemahnya pemasaran, kurangnya inovasi dan permodalan adalah fenomena yang hampir ditemukan pada pengembangan setiap sektor strategis. Perlu terobosan baru untuk menggerakkan keempat sektor di atas secara terintegrasi sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam empat tahun periode RPD, diharapkan sektor strategis ini dapat dikelola secara terintegrasi melalui pendekatan cluster industri dengan memperkuat pasokan bahan baku hasil pertanian dihilir seperti padi, bawang, cabe, mendorong peningkatan produksi sub sektor perkebunan melalui produksi perkebunan unggulan kakao, dan pada sub sektor peternakan dapat dijadikan fokus utama dengan pengembangan peternakan sapi yang berskala cukup besar. Peternakan sapi mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan karena bebera sarana dan prasarana pendukung sudah ada seperti keberadaan Balai Benih Ternak Unggul (BBTU) di Padang Mangateh, didukung juga dengan adanya Rumah Potong Hewan Modern di Payobasung serta diperkuat dengan adanya Jurusan Peternakan Universitas Andalas (UNAND) yang berada di Kota Payakumbuh sebagai pencetak sumber daya yang unggul di bidang peternakan. Dengan terjaminya bahan baku maka dapat memperkuat kapasitas sproduksi industri pengolahan makanan seperti rendang, dan makanan ringan serta olahan kuliner lainnya. Pembangunan *city branding* Kota Payakumbuh sebagai produsen rendang terbesar di dunia dapat dilakukan dengan terjaminnya bahan baku daging dan penerapan teknologi dalam proses produksi. Hal ini semakin diperkuat dengan rencana pembukaan program studi kuliner rendang oleh Universitas Negeri Padang di Kota Payakumbuh.

Seiring dengan penguatan di sektor hulu (bahan baku dan industri) perlu dilakukan juga penguatan pada sektor hilir yaitu adanya usaha untuk perluasan pangsa pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat disinergikan dengan penguatan pada sektor wisata dengan strategi menjadikan Kota Payakumbuh menjadi destinasi wisata kuliner dan wisata event berskala lokal, nasional bahkan internasional. Kondisi saat ini wisatawan di siang hari hanya melewati kota Payakumbuh, malam hari untuk menikmati kuliner malam, sedangkan menginap di Bukittinggi atau Batusangkar. Tidak tersedianya hotel yang representatif sebagai sarana pendukung pariwisata menjadikan Kota Payakumbuh belum masuk dalam kalender biro perjalanan wisata di Sumatera Barat, hanya menjadi persinggahan untuk kuliner malam saja.

Faktor penghambat yang paling mendasar dalam meningkatkan produktivitas sektor strategis ini adalah pendampingan pengembangan usaha oleh pihak terkait yang belum terintegrasi. Agar dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada dibutuhkan upaya yang terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat. Pengembangan sektor strategis harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak sektoral untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengembangan industri adalah melalui konsep "*one village one product*". Ini sebetulnya sudah lama dicanangkan, namun Kementerian Perindustrian kembali menggunakan konsep ini. Sebetulnya Kota Payakumbuh sudah menerapkan ini melalui penetapan beberapa kawasan yang potensial dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki, seperti adanya kampung rendang, kampung makanan ringan, kampung bambu dan sebagainya. Namun masih perlu peningkatan dan penataan yang komprehensif dengan sektor-sektor lain yang saling berkaitan, sehingga keberlanjutannya dapat terjamin.

6. Masih Rendahnya Iklim Usaha dan Investasi

Permasalahan mendasar terkait rendahnya iklim usaha dan investasi antara lain masih rendahnya kualitas dan daya saing IKM dan UMKM; struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas; minimnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi peluang investasi yang terbatas; belum tersedianya informasi kelayakan usaha unggulan bagi calon investor; terbatasnya kepastian hukum dan pendukung usaha terutama tentang pajak dan tanah; belum efektifnya pemberian insentif; belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah kedepannya dalam hal mengoptimalkan penguatan kelembagaan ekonomi yaitu koperasi, IKM, dan UMKM melalui pendampingan dan pembinaan yang intensif.

Isu terkait pengembangan sektor strategis daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dalam penguatan kelembagaan ekonomi di daerah juga sejalan dengan isu Nasional bahwa populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%) dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Salah satu soko guru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Payakumbuh adalah melalui koperasi, namun bersamaan dengan persoalan nasional bahwa Koperasi-koperasi juga masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Secara umum pelayanan perizinan di Kota Payakumbuh melalui pelayanan satu pintu sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan reputasinya dua kali mendapat anugerah *investment award* tingkat nasional. Akan tetapi pelayan yang perizinan yang baik belum mampu menarik minat investor terutama yang berskala besar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

7. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Pada dasarnya kondisi infrastruktur dasar di Kota Payakumbuh sudah memadai. Namun, kondisi yang sudah ada perlu terus dijaga dan dioptimalkan sesuai dengan SPM Perkotaan yang lengkap. Pemenuhan infrastruktur dasar ditekankan pada terpenuhinya cakupan pelayanan air minum, jalan status kota dalam kondisi sedang dan mantap, drainase kota yang mampu mencegah timbulnya genangan air, dan infrastruktur penunjang pertanian berupa irigasi primer yang berkinerja baik.

Ketersediaan air baku di Kota Payakumbuh saat ini masih bergantung pada sumber air dari Kabupaten Limapuluh Kota. Permasalahan ini menimbulkan dampak kurangnya pelayanan PDAM Kota Payakumbuh. Mulai tahun 2021 lalu Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kerja sama dengan Kabupaten Limapuluh Kota untuk pengembangan SPAM Regional yang difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat dan diharapkan jika SPAM regional ini dapat terwujud, maka kebutuhan terhadap ketersediaan air baku dapat teratasi, namun ini tergantung dengan pola kerja sama yang akan dibangun nantinya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kota Payakumbuh merupakan satu dari tujuh kabupaten/kota yang termasuk koridor pertumbuhan RPJMN 2020-2024. Hal ini antara lain melalui rencana pembangunan Jalan Trans Sumatera Koridor Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi. Dalam rencana pembanguna jalan tol tersebut Kota Payakumbuh tidak dilalui secara langsung oleh trase Jalan Tol, namun Pemerintah Kota Payakumbuh berharap adanya *entry* dan *exit point* (gerbang tol) di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Payakumbuh. Demikian pula perlunya peningkatan kualitas jalan penghubung antar kabupaten/kota yang melalui Kota Payakumbuh, seperti koridor Payakumbuh-Setangkai yang saat ini kualitasnya sangat tidak baik. Padahal koridor ini dapat cukup strategis untuk menghubungkan Kota Payakumbuh ke arah selatan menuju jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.

Terkait dengan fungsi drainase kota, diidentifikasi luas lokasi genangan air setelah hujan meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan yang serius pada pembangunan ke depan.

Menyangkut dengan kelengkapan fasilitas umum yang harus ada dalam sebuah kota, Kota Payakumbuh perlu melengkapi tersebut seperti luas RTH minimal disebuah kota adalah 30% dari luas wilayah perkotaan. Proporsi 30% merupakan ukuran minima untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal di wilayah perkotaan.

Berkaitan dangan masjid sebagai fasilitas umum peribadatan yang berskala kota perlu diwujudkan di Kota Payakumbuh. Masjid terbagi menjadi beberapa kelas atau strata. Kelas atau strata masjid ini ditentukan berdasarkan fungsi masjid, fasilitas masjid dan fungsi sosial yang diamanahkan dalam ketetapan Dewan Mesjid Indonesia. Untuk sebuah kota ditetapkan statusnya sebagai mesjid agung yang berperan sebagai suatu institusi yang sangat penting untuk membina masyarakat muslim juga sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam, tempat pendidikan dan pusat urusan keagamaan masyarakat.

Fasilitas umum lainnya adalah berupa Stadion. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk even olahraga, dimana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Bangunan stadion olahraga merupakan jenis bangunan teater besar untuk mempertunjukan berbagai macam pertandingan di dalamnya.

Beberapa pertandingan olahraga yang dapat digelar di stadion antaranya olah raga basket, voley, badminton, bola kaki dan lain-lain. Umumnya stadion memiliki tempat duduk penonton yang disebut tribun. Sebagai sebuah kota menengah sudah selayaknya Kota Payakumbuh memiliki stadion yang representatif yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olah raga Kota Payakumbuh.

8. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, bengkel dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan.

Kondisinya saat ini ketersediaan regulasi terkait pengelolaan lingkungan belum optimal, salah satunya regulasi pemanfaatan air tanah. Akibatnya pelanggaran terkait kelestarian lingkungan pun masih cenderung tinggi diantaranya pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam dan pelanggaran aturan pengelolaan limbah berbahaya beracun yang masih tinggi. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan juga relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga belum memahami pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan prinsip 3R *(reuse, reduce, recycle)*. Disamping itu, TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh perlu mejadi perhatian khusus dari pemerintah, karena dengan proses pengolahan *sanitary landfill*, keterbatasan lahan dan peningkatan timbulan sampah yang seimbang dengan pertambahan penduduk, maka perlu adanya manajemen pengolahan sampah, baik dalam proses sosialisasi konsep 3R, atau melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Disamping itu Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan keberadaan TPA Regional yang berada di Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diperkirakan akan penuh dan tidak akan dapat dioperasionalkan sekitar 2-3 tahun ke depan, ini perlu menjadi perhatian pemerintah kota serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari lokasi TPA baru sebagai tempat pembuangan dan pengolahan sampah nantinya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang. Perbaikan kawasan kumuh dapat dilakukan secara swadaya dengan memanfatkan modal sosial di daerah. Selain itu untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi perlu juga untuk diperhatikan.

Belum optimalnya kenyamanan kota sebagai tempat tinggal, dan wadah aktifitas manusianya, juga dipengaruhi oleh pemanfatan ruang. Dimana proses penataan ruang dalam prakteknya harus disesuaikan dengan rencana tata ruang (RTRW), pada kenyataannya masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30%

dilakukan dengan membangun taman kota, jalur hijau, permakaman, dan inisiasi rasionalisasi sempadan sungai. Kondisi ini, perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dimana 10% dari kebutuhan RTH tersebut dipenuhi oleh pribadi. Ruang kota yang nyaman juga dapat muncul dari kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam maupun bencana kebakaran.

9. Belum Optimalnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan untuk menjamin pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan penataan ruang. Adapun beberapa instrumen yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain terdiri atas: peraturan zonasi, arahan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penjatuhan sanksi.

Peraturan Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038. Peraturan ini memuat uraian zonasi pada setiap zona peruntukan, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan, dan sebagainya, termasuk ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk menampung perubahan-perubahan dan penyesuaian dengan RDTR ini, RTRW Kota Payakumbuh pun sudah dilakukan revisi pada tahun 2020 lalu.

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standard pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; serta melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, seringkali ditemukan adanya pelanggaran. Terkait hal tersebut, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai rencana tata ruang atau izin yang diberikan. Penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung di Kota Payakumbuh terdiri atas penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel, penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan pembongkaran bangunan gedung yang melanggar.

Dalam praktek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum adanya peraturan dan instrumen yang mengatur tentang insentif dan disinsentif dari Pemerintah, keterbatasan data dan informasi, serta belum efektifnya kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Keterbatasan data/informasi, dokumen, dan peta terkait kondisi di lapangan seringkali menyulitkan upaya-upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, selain diperlukan adanya peraturan dan panduan yang implementatif, juga diperlukan dukungan sistem informasi

yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan. Selain itu, adanya keterbatasan SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10.Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya transaparansi pada proses ini akan meningkatkan kepuasan masayarakat. Pengoptimalan *E-Government* melalui *E-Budgeting* dan *E-Planning* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi ini dilakukan dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi proses penyaringan aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan dilaksanakan dari tingkat RT. RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Diharapkan dengan inovasi pada proses perencanaan pembangunan daerah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Reformasi kedua terkait dengan sumber daya aparatur daerah, dimana profesionalisme aparatur daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai pada isu strategis ini, profesionalisme dipahami sebagai proses rekrutmen dan penempatan pegawai disesuaikan dengan bidang keahlian, disamping penilaian kepegawaian dilakukan berdasarkan kinerja. Hal lain yang patut untuk dipertimbangkan adalah berkaitan dengan penempatan aparatur dengan membuat sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang mumpuni.

11.Tuntutan Optimalisasi Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek pokok dalam pelaksanaan *Good Governance*. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang prima tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dengan warganya secara individual, tetapi juga menyangkut pelayanan terhadap masyarakat luas beserta kelembagaan yang ada. Optimalisasi pelayanan publik perlu perubahan yang signifikan baik dari sisi kelembagaan dan praktek penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri juga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih.

Pelayanan publik yang prima memiliki *high stake* dan menjadi pertaruhan yang penting terhadap eksistensi sebuah pemerintahan ke depannya baik di level regional, nasional bahkan internasional. Bahkan nasib pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Reformasi pelayanan publik sebagai sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi birokrasi

secara keseluruhan. Pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inovatif serta dapat memuaskan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakkan integritas untuk merealisasikan pelayanan publik yang prima membutuhkan kerjasama yang sangat terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran Pemerintah Kota.

Salah satu wujud upaya pemeritahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah terbentuknya kerja sama antar daerah dan optimalisasi kerja sama wilayah yang selama ini sudah berjalan selama ini, diantaranya adalah optimalisasi pengembangan kawasan Bukapalipatar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, optimalisasi sinkronisasi kebijakan dan pembangunan daerah serta peningkatan daya daya saing daerah.

12.Lunturnya Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat

Permasalahan sosial yang muncul ditengah masyarakat adalah menurunnya nilai-nilai karakter pada masyarakat terutama remaja dan anak-anak. Karakter masyarakat Payakumbuh sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau mengedepankan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Hal ini menunjukkan bahwa adat budaya dan agama merupakan dua panduan dalam hidup dan menjadi karakter masyarakat Minangkabau.

Faktanya penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah semakin lama mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari makin tingginya tingkat perceraian dan kenakalan remaja, implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mengalami degradasi, jumlah pengguna narkoba meningkat, penderita HIV/AIDS dan jumlah penduduk LGBT meningkat. Pengamalan agama ditengah masyarakat masih kurang dan pelestarian adat masih belum maksimal. Peranan pemerintah bekerjasama dengan ninik mamak dan lembaga adat dan agama yang ada diharapkan lebih optimal ke depannya. Disamping itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi memudahkan masuknya pengaruh budaya asing. Kurangnya peran Lembaga Agama dan Adat dalam menyaring pengaruh budaya asing tersebut mengakibatkan menurunnya nilai-nilai karakter di tengah masyarakat.

Sebagai perwujudan sinkronisasi isu strategis RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPD Kota Payakumbuh, yang bertujuan untuk percepatan pembangunan melalui sinergitas isu strategis yang dapat ditelaah dalam penyusunan arah kebijakan daerah nantinya, sehingga dapat diimplementasikan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Isu strategis yang dirumuskan dalam RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini juga dilahirkan dari isu-isu yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi, sehingga dapat diterjemahkan selaras dengan isu strategis yang ada di Kota Payakumbuh. Secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel IV-20.

Tabel IV-20
Persandingan Keselarasan Isu Strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPD Kota Payakumbuh

RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPD Kota Payakumbuh
• Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan • Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk • Pemenuhan Layanan Dasar • Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	• Pembangunan Manusia	• Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat • Peningkatan kualitas pendidikan • Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender
• Keberlanjutan Sumber Daya Alam • Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi • Ketimpangan antar wilayah • Pengentasan Kemiskinan • Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing • Transformasi Struktural Berjalan Lambat • Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	• Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan • Berkembangnya perdagangan Komersial dan tumbuhnya wirausahawan muda • Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	• Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi • Belum terintegrasinya pengembangan sektor strategis daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi • Masih rendahnya iklim usaha dan investasi
• Membangun lingkungan hidup • Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Infrastruktur yang handal dan berkualitas	• Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
• Penguatan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar		• Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
• Penguatan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	• Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	• Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi • Tuntutan optimalisasi pelayanan publik yang prima
• Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa • Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia • Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti • Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama • Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan • Belum Optimalnya Peran Keluarga	• Pembangunan kebudayaan	• Menurunnya nilai-nilai agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat

RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPD Kota Payakumbuh
• Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas		

BAB 5
TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti yang dituangkan pada BAB IV. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga. Keselarasan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel V-1

Tabel V-1
Keselarasan Tujuan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005–2025

TUJUAN RPD 2023-2026	MISI RPJPD 2005-2025
Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Misi 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Misi 4 : Mewujudkan sentra *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
Tujuan 3: Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Misi 2 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Misi 5 : Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
	Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya	Misi 1 : Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*;

Sumber: hasil analisa, 2022

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun.

5.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

5.2. Sasaran

Selanjutnya tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 tersebut di rumuskan menjadi sasaran strategis daerah sebagai berikut:

A. Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Payakumbuh antara lain adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu dan peningatan dejarat kesehatan masyarakat.

Tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas						
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
Sasaran	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender		
Indikator Sasaran	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata – Rata Lama sekolah	Angka Usia Harapan Hidup	Prevalansi stunting	Indeks Pemberdayaan Gender		
Program Prioritas	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul		Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif		Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal		
Program PMDN 90	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pendidikan dan tenaga kependidikan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program Pengendalian Penduduk Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program perlindungan perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak
Perangkat Daerah Penaggungjawab	Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kerasipan		Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PKP,	Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Diknas, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial	DP3AP2KB dan Dinas Sosial		

Gambar V-1
Pencapaian Tujuan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas

B. **Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh untuk empat tahun periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian kota Payakumbuh diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat kota Payakumbuh. Oleh sebab itu, salah satu penekanan dalam misi ini adalah upaya pembangunan perekonomian melalui gerakan ekonomi bersama dalam hal ini melalui kelembagaan koperasi yang sudah teruji sebagai suatu kelembagaan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Tujuan terwujudnya perekonomian yang berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

a. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
b. Meningkatnya sektor strategis
c. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Tujuan	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				
Indikator Tujuan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			Rasio Gini	
Sasaran	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran		Meningkatnya sektor unggulan		Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
Indikator Sasaran	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Penganggura n	PDRB Sektor industry	PDRB Sektor perdagangan	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)
Program Prioritas	Percepatan pengurangan / penurunan kemiskinan	Pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja	Penguatan sektor perdagangan, industry dan UMKM		
Program PMDN 90	Program rehabilitasi jaminan sisoal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program pengembangan ekspor		Program Promosi Penanaman Modal
	Program perlindungan jaminan social	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program pemberdaya an social		Program pengembangan usaha, mikro, kecil dan menengah		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Perangkat Daerah Penaggun g jawab	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Setdako, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PKP	Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Perindustria n dan Tenaga Kerja, DPM & PTSP	Dinas Koperasi & UKM	Dinas Penanaman Modal & PTSP

Gambar V-2
Pencapaian Tujuan Terwujudnya Perekonomian Yang Berkualitas

C. Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah

masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Selain itu perlu penguatan terhadap pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM). Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Tujuan terwujudnya pemerintaha yang efektif, efesien dan akuntabel didukung sasaran yaitu :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

<table>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="4">Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</td></tr>
<tr><td>Indikator Tujuan</td><td colspan="4">Indeks RB</td></tr>
<tr><td>Sasaran</td><td colspan="2">Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td colspan="2">Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima</td></tr>
<tr><td>Indikator Sasaran</td><td>Nilai Evaluasi AKIP Kota</td><td>IPKD</td><td>Indeks SPBE</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat</td></tr>
<tr><td>Program Prioritas</td><td colspan="4">Pemantapan transformasi digital dan Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Program PMDN 90</td><td>Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</td><td>Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</td><td rowspan="3">Program informasi dan komunikasi publik</td><td rowspan="3">Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</td><td>Program penyelenggaraan pengawasan</td></tr>
<tr><td>Program pengelolaan keuangan daerah</td></tr>
<tr><td>Perangkat Daerah Penanggung jawab</td><td>Bappeda, Setdako, Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah</td><td>BKD, Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah</td><td>Dinas Komunikasi dan Informatika dan Semua Perangkat Daerah</td><td>Setdako dan Semua Perangkat Daerah</td></tr>
</table>

Gambar V.3
Pencapaian Tujuan Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

D. Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada.

Selain itu pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Oleh karenanya kondisi infrastruktur yang baik harus pula diimbangi dengan penciptaan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi faktor daya tarik untuk menarik investor dalam melakukan penanaman modal di sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan daerah tersebut.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

a. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
c. Meningkatnya kualitas penataan kota

Tujuan	**Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan**			
Indikator Tujuan	Indeks kualitas lingkungan Hidup			
Sasaran	**Meningkatnya infrastruktur perkotaan**		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**Meningkatnya kualitas penataan kota**
Indikator Sasaran	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Program Prioritas	Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan			
Program PMDN 90	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Program penataan bangunan gedung	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program penataan bangunan gedung
	Program Penyelenggaraan jalan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program penataan bangunan dan lingkungan
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengelolaan Persampahan	Program penyelenggaraan penataan ruang
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
Perangkat Daerah Penanggungjawab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Parpora, Dinas LH, Dinas Koperasi & UKM, dan Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Dinas PKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambar V.4
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

E. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya

Pembangunan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, Pembangunan karakter dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Pada era reformasi sekarang banyak sekali dijumpai perilaku masyarakat yang sudah menyimpang dari norma-norma yang menggambarkan kepatutat sosial.

Perubahan sistem nilai sebagai dampak pertemuan dengan budaya lain dengan system nilai yang berbeda dapat menimbulkan krisis nilai. Semakin dominannya nilai

ekonomis dalam masyarakat atau semakin kuatnya arus komersialisasi diberbagai bidang kehidupan membuat semakin berkurangnya nilai-nilai karakter di tengah masyarakat.

Pendidikan karakter menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini, hal ini berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi ditengah – tengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Kriminalitas, ketidak adilan, korupsi, kekerasan pada anak, pelangggaran HAM, menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia.

Budi pekerti luhur, kesantunan, dan religiusitas yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi terasa asing dan jarang ditemui ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih parah lagi jika pemerintah tidak segera mengupayakan program-program perbaikan baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Pendidikan karakter menjadi sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan yang telah disebut di atas dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang mampu mewujudkan misi dari pendidikan karakter tersebut.

Pada intinya masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya adalah masyarakat yang mampu mensinkronkan antara pengetahuan yang didapat dari lingkungan keluarga, sekolah dan dapat diterapkan ditengah masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada.

Tujuan meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya didukung oleh satu sasaran yaitu : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK.

Tujuan	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkataker dan Berbudaya	
Indikator Tujuan	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	
Sasaran	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	
Indikator Sasaran	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik
Program Prioritas	Pengembangan budaya dan karakter siswa	
Program PMDN 90	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pengembangan Kurikulum
Perangkat Daerah Penanggung jawab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pendidikan

Gambar V.5
Pencapaian Tujuan Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya

Tabel V-2

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi	Awal	Target				Kondisi Akhir
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		-		Nilai	79,08	79,52	79,96	80,41	80,87	81,22	81,22
			1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,32
					2	Rata – Rata Lama sekolah	Tahun	10,81	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	11,51
			2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,84	74,03	74,18	74,32	74,47	74,61	74,61
					4	Prevalensi Stunting	Persen	20,00	18,00	16,00	14,00	13,00	12,00	12,00
			3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,01	71,51	72,01	72,51	73,01	73,51	73,51
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-		-		Persen	3,58	3,07	4,36	4,71	4,81	4,94	4,94
		3. Rasio Gini	-		-		Nilai	0,316	0,277	0,277	0,276	0,274	0,272	0,272
			4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,16	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16	5,16
					7	Tingkat Pengangguran	Persen	6,47	6,30	6,05	5,81	5,52	5,21	5,21
			5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor industry	Persen	2,66	2,75	2,85	2,94	3,04	3,15	3,15
					9	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	3,58	3,80	4,03	4,28	4,55	4,83	4,83
			6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	Milyar	417,24	203,8	220	225	230	240	915

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	4. Indeks RB					Indeks	62,42	64	66	68	70	71	71
			7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A	A
					12	Indeks Pengelolaan Keuanga n Daerah (IPKD)	Scor	70,404*	74,000	75,000	76,000	78,000	79,000	79,000
			8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	13	Indeks SPBE	Indeks	2,42	2,5	2,5	2,7	3	3,2	3,2
					14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,60	88,31	88,41	88,50	88,60	88,80	88,80
4	Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	5. Indeks kualitas lingkungan Hidup		-		-	Indeks	58,00	58,59	58,00	58,26	58,27	58,28	58,28
			9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	persen	83,12	84,00	84,88	85,76	86,64	87,52	87,52
					16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persen	70,87	71,98	73,09	74,20	75,31	77,78	77,78
			10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,00	58,59	58,00	58,26	58,27	58,28	58,28
			11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	79,97	80,10	80,23	80,36	80,49	80,62	80,62
5	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamais, Berkarakter dan Berbudaya	6. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya		-		-	persen	100	100	100	100	100	100	100
			12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	19	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target				Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			yang berlandaskan ABS SBK	20	Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter Berkategori baik	persen	75,49	51,06	51,06	52	52,50	53	53

Sumber : data diolah, 2022

BAB 6
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPDT ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Payakumbuh yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan.

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah selama 4 (empat) Tahun 2023-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

6.1 Strategi

6.1.1 Strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Tabel VI-1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran		Strategi	
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas			
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)
		2	Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan.
		3	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4	Peningkatan Ketahanan Keluarga
		5	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
		6	Menurunkan Prevalensi Stunting
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	7	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak
Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	8	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi
		9	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran
5	Meningkatnya sektor strategis	10	Meningkatan kontribusi sektor industri
		11	Meningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
		12	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
		13	Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya
		14	Meningkatkan kualitas UMKM
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota payakumbuh	15	Meningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	16	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		17	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
		18	Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah .
		19	Meningkatnya kinerja Pengembangan SDM Aparatur
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	20	Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan
		21	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan.			
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	22	Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan
10	Meningkatnya kualitas penataan kota	23	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	24	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup
		25	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya			
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	26	Meningatkan pengembangan kebudayaan
		27	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan

6.1.2 Strategi Untuk Mendukung Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester I tahun 2020 telah membawa dampak pada segala aspek, baik sosial maupun ekonomi. Selama tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan dengan strategi :

- Penerapan Protokol Kesehatan melalui 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
- Pengoptimalan pelaksanaan vaksinasi serta meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment).
- Optimalisasi fungsi dan peran Kampung Tangguh Kota Payakumbuh.

Penerapan strategi tersebut diharapkan menjadikan kondisi Pandemi Covid-19 akan segera berubah menjadi endemi, sehingga walaupun Covid-19 masih ada namun dengan frekuensi dan jumlah kasus yang rendah. Dengan berubahnya Covid-19 menjadi penyakit endemi, stategi yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan upaya promotif preventif terhadap penyakit menular dengan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan.
2. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah Kota Payakumbuh dengan mempertimbkangan kapasitas penanganan wabah melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.
3. Peningkatan cakupan vaksinasi dan ketersediaan obat serta bahan habis pakai dalam penanganan Covid-19 melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.

4. Kesiapsiagaan bencana dengan penguatan dari tingkat Kampung melalui optimalisasi fungsi dan peran Kampung Tangguh pada Program Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulanan Bencana Daerah.

6.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ada pada BAB V.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam empat tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPDT Kota Payakumbuh didasarkan pada strategi sebagaimana pada Tabel VI-2 :

Tabel VI-2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)	Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar	√	√	√	√
		Penguatan digitalisasi sekolah	√	√	√	√
		Penyediaan sarana pendidikan (TIK)	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimun	√	√	√	√
		Sekolah penggerak dan guru penggerak	√	√	√	√
2	Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan.	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	√	√	√	√
		Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	√	√	√	√
		Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
4	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	√	√	√	√
		Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan	√	√	√	√
5	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dan rujukan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	√	√	√	√
		Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	√	√	√	√
		Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	√	√	√	√
		Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat	√	√	√	√
6	Menurunkan Prevalensi Stunting	Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	√	√	√	√
		Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertma kelahiran	√	√	√	√
		Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan	√	√	√	√
		Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	√	√	√	√
7	Meningkatkan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak dan anak	Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	√	√	√	√
		Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√
		Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	√	√	√	√
		Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga	√	√	√	√
		Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreaning terhdap calon pengantin	√	√	√	√
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
8	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Peningkatan penanggulangan PMKS	√	√	√	√
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	√	√	√	√
		Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social	√	√	√	√
		Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	√	√	√	√
9	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	√	√	√	√
		Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	√	√	√	√
		Mengembangkan klaster industri,kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja	√	√	√	√
		Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi	√	√	√	√
		Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor	√	√	√	√
10	Meningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif	√	√	√	√
		Mewujudkan penataan lokasi sektor informal	√	√	√	√
11	Meningkatan kontribusi sektor industri	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local	√	√	√	√
		Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil	√	√	√	√
12	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan produksi hasil pertanian strategis	√	√	√	√
		Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis	√	√	√	√
		Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
13	Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya	Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pendemi covid-19)	√	√	√	√
14	Meningkatkan kualitas UMKM	Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	√	√	√	√
		Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur	√	√	√	√
		Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur	√	√	√	√
		Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi	√	√	√	√
		Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik	√	√	√	√
15	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	√	√	√	√
		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√
		Peningkatan Upaya Promosi Investasi	√	√	√	√
16	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	√	√	√	√
		Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	√	√	√	√
		Peningatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√
		Peningkatan implementasi SPIP	√	√	√	√
		Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum	√	√	√	√
		Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	√	√	√	√
17	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangiunan daerah	√	√	√	√
		Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan daerah	√	√	√	√
		Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√
18	Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual	√	√	√	√
		Optimalisasi pengelolaan asset asset daerah	√	√	√	√
		Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	√	√	√	√
		Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√
		Optimalisasi asistensi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√
19	Meningkatnya kinerja Pengembangan SDM Aparatur	Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa	√	√	√	√
		Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	√	√	√	√
		Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif	√	√	√	√
20	Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan	Peningkatan implementasi SPBE	√	√	√	√
		Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	√	√	√	√
		Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	√	√	√	√
		Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)	√	√	√	√
21	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	√	√	√	√
		Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan	√	√	√	√
		Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perizinan	√	√	√	√
		Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana	√	√	√	√
		Pengoptimalan layanan publik masyarakat	√	√	√	√
		Penguatan kelembagaan dan kopetensi pengelola organisasi masyarakat dan parpol	√	√	√	√
22	Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	√	√	√	√
		Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai	√	√	√	√
23	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	√	√	√	√
24	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup	Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	√	√	√	√
		Meningkatkan ruang terbuka hijau	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	√	√	√	√
		Meningkatkan akses sanitasi aman	√	√	√	√
		Pencegahan kawasan kumuh perkotaan	√	√	√	√
25	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman	√	√	√	√
26	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	√	√	√	√
27	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa	√	√	√	√

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPDT setiap tahun. Selain itu perumusan program pembangunan yang kongkrit sangat diperlukan yang akan menghasilkan program prioritas daerah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel VI-3 :

Tabel VI-3
Keterkaitan Strategi dan Program Pembangunan Daerah pada RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program pengembangan kurikulum
		Program pendidik dan tenaga kependidian
		Program pengendalian perijinan pendidikan
2 Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
3 Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga		Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4 Peningkatan Ketahanan Keluarga		Program pengendalian Penduduk
		Program pembinaan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
		Program Penanganan kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6	Menurukan prevalensi stunting	Penurunan Prevalensi Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Program pembinaan Keluarga Berencana
			Program pengendalian penduduk
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
			Program perlindungan dan jaminan sosial
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
			Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7	Meningkatkan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak dan anak	Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Program pengelolaan sistim data gender dan anak
			Program pemenuhan hak anak
			Program perlindungan perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Perlindungan Khusus Anak
8	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Percepatan pengurangan/ penurunan kemiskinan	Program rehabilitasi sosial
			Program perlindungan jaminan social
			Program pemberdayaan social
			Program pengelolaan pendidikan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan UKM

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program pengelolaan sumber daya air
		Program pengembangan permukiman
		Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah
		Program Pengembangan jasa konstruksi
		Program kawasan permukiman
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program penanganan kerawanan pangan
		Program Pencatatan sipil
		Program pendaftaran penduduk
		Program Pengendalian Penduduk
		Program pembinaan KB
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Program pemberdayaan UMKM
		Program pengembangan UMKM
		Program iklim pengembangan penanaman modal
		Program pelayanan penanaman Modal
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		Program pengembangan pariwisata dan ekraf
		Program pengelolaan perikanan budidaya
		Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program penyediaan dan pengembangan pra sarana pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negri
			Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
9	Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
10	Meningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Penguatan sektor perdagangan, industry dan UMKM	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
			Program standarisasi dan perlindungan konsumen
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
11	Meningkatkan kontribusi sektor industri		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program Pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional
12	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian		Program Penyuluhan Pertanian
			Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			program perizinan usaha pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program penanganan kerawanan pangan
			Program pengawasan keamanan pangan
13	Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Intelektual
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Kebudayaan
14	Meningkatkan kualitas UMKM		Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
15	Meningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi		Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
16	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan transformasi digital dan Reformasi Birokrasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Program pengelolaan arsip
			Program perlindungan dan penyelamatan arsip
			Program perijinan penggunaan arsip
17	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Program penelitian dan pengembangan daerah.
			Program penyelenggaraan pengawasan
			Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi
18	Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan		Program pengelolaan keuangan daerah

	Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
	serta aset daerah		Program pengelolaan barang milik daerah
			Program pengelolaan pendapatan daerah
			Program penyelenggaraan pengawasan
19	Meningkatnya Kinerja pengembangan SDM Aparatur		Program perekonomian dan pembangunan
			Program pengembangan sumber daya manusia
			Program kepegawaian daerah
20	Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			Program penyelenggaraan statistik sektoral
			Program pengelolaan aplikasi informatika
			Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
21	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
			Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Program pendaftaran penduduk
			Program pencatatan sipil
			Program pengelolaan profil kependudukan
			Program penanggulangan bencana
			Program Penanganan Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Program penyelenggaraan pemerintahan & pelayanan publik

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
			Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan Etika serta budaya politik
			Program pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
			Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial
22	Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Penyelenggaraan jalan
			Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
			Program Pengembangan Pemukiman
			Program Pengembangan jasa konstruksi
			Program penataan bangunan gedung
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
23	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang		Program penyelenggaraan penataan ruang

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program penatagunaan tanah
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan
24	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
			Program pengendalian B3 dan Limbah B3
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
25	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		Program Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Peningkatan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
26	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pendidikan karakter	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pengelolaan Permuseuman

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
27 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan		Program pengembangan kurikulum
		Program Pengelolaan pendidikan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

BAB 7
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka untuk penyusunan RPDT 20223-2026 tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah. Penjabarkan perencanaan diawali dengan penentuan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun. Nomenklatur Program pembangunan tersebut merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Program dan indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 16 Urusan Wajib non pelayanan dasar, 7 Urusan Penunjang , 2 Urusan Pendukung, 5 Urusan Pilihan dan 1 Urusan Kewilayahan. Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non pelayanan dasar terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasar, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian. Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan DPRD. Sedangkan Urusan Kewilayahan

menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah. Pada target kinerja diperkirakan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program.

Selanjutnya program dan kinerja program tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan hingga level kegiatan.

Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah kota payakumbuh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel VII-1 dan Indikasi rencana program prioritas yang disetai kebutuhan pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel VII-2

Tabel VII-1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023 - 2026

Kode	Kapasitas Riil/ Belanja	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
5	**Belanja Daerah**	**634.913.401.123**	**597.733.509.163**	**588.548.900.478**	**586.880.599.618**
5.1	**Belanja Operasi**	**497.199.951.193**	**494.240.328.284**	**486.645.967.348**	**485.266.520.568**
5.1.01	Belanja Pegawai	279.050.245.781	279.417.248.864	275.200.628.901	274.434.718.131
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.649.705.412	209.930.464.468	206.704.730.695	206.118.805.414
5.1.05	Belanja Hibah	8.500.000.000	4.892.614.952	4.740.607.752	4.712.997.023
5.1.06	Belnaja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	**Belanja Modal**	**137.188.449.930**	**102.968.180.879**	**101.377.933.130**	**101.089.079.050**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.237.580.962	20.244.002.344	19.931.352.563	19.874.562.567
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.492.079.628	15.496.995.262	15.257.658.589	15.214.185.253
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.897.944.670	19.480.799.163	19.179.936.345	19.125.287.343
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.595.232.508	46.674.682.604	45.953.835.559	45.822.900.231
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	965.612.162	1.071.701.506	1.055.150.074	1.052.143.656
5.3	Belanja Tidak Terduga	**525.000.000**	**525.000.000**	**525.000.000**	**525.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	525.000.000	525.000.000	525.000.000	525.000.000

TABEL VII-2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
1	**URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**					**404.999.525.661**		**363.074.704.844**		**358.268.188.450**		**357.290.399.691**		**1.483.632.818.646**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**					**112.933.959.989**		**108.640.966.768**		**108.599.819.618**		**108.590.690.416**		**438.765.436.791**	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	A	A	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	97.374.008.883	A	389.496.035.532	DINAS PENDIDIKAN
		Nilai IKM	89,64	92,00	88,50		88,50		88,50		88,50		88,50		
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	44,63%	76.30%	65,00%	15.285.851.326	67,00%	11.181.258.105	69,00%	11.128.110.955	71,00%	11.118.981.753	71,00%	48.714.202.139	
		APK SD/MI/Paket A	110,14%	132,75%	112,00%		114,00%		115,00%		116,50%		116,50%		
		APK SMP/MTs/Paket B	92,03%	162,10%	94,00%		97,00%		98,00%		100,00%		100,00%		
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	75,49%	51,06%	51,06%	221.699.780	52,00%	21.699.780	52,50%	21.699.780	53,00%	21.699.780	53,00%	286.799.120	
01.01.04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	65,00%	65,00%	65,00%	42.400.000	66,00%	54.000.000	66,00%	66.000.000	67,00%	66.000.000	67,00%	228.400.000	
01.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh NPSN	n/a	n/a	95,00%	10.000.000	95,00%	10.000.000	95,00%	10.000.000	95,00%	10.000.000	95,00%	40.000.000	
1.02	**URUSAN PEMERINTA BIDANG KESEHATAN**					**149.526.829.039**		**151.650.630.992**		**151.194.624.128**		**151.093.451.171**		**603.465.535.330**	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	80,00	82,00	85,00	129.948.959.171	87,00	132.072.761.124	89,00	129.948.959.171	91,00	129.948.959.171	91,00	521.919.638.637	DINA
		Nilai Evaluasi AKIP Dinkes oleh Inspektorat	A	A	A		A		AA		AA		AA		
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan UKP sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	18.670.000.000	100,00%	18.670.000.000	100,00%	20.337.795.089	100,00%	20.236.622.132	100,00%	77.914.417.221	
		Persentase layanan UKM sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
1.02.03	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Persentase SDM kesehatan sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	192.870.208	100,00%	192.870.208	100,00%	192.870.208	100,00%	192.870.208	100,00%	771.480.832	S K E S E H A T A N
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan)	100,00%	100,00%	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	140.000.000	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan makanan dan minuman	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kelurahan yang menerapkan germas	100,00%	100,00%	100,00%	679.999.660	87,00	679.999.660	89,00	679.999.660	91,00	679.999.660	9100,00%	2.719.998.640	
1.03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM**					**118.263.470.423**		**77.476.537.743**		**73.804.755.240**		**73.017.380.376**		**342.562.143.782**	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP DPUPR oleh Inspektorat	90,22	92,50	93,00	15.313.125.484	93,50	12.399.777.700	94,00	12.280.188.848	95,50	12.653.196.164	95,50	52.646.288.196	D I N A S P U P R
		Nilai IKM	88,51	87,00	89,00		91,00		93,00		94,00		94,00		
1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik	85,81%	89,59%	90,67%	22.539.068.000	91,75%	14.875.784.880	92,85%	14.131.995.636	93,97%	15.432.653.132	93,97%	66.979.501.648	
		Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik	89,00%	89,49%	90,48%		91,03%		91,87%		92,65%		92,65%		
		Persentase Debit Air Baku yang Tersedia	55,93%	56,98%									-		
1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	99,76%	97,22%	90,00%	1.100.000.000	91,00%	726.000.000	92,00%	689.700.000	93,00%	62.010.300	93,00%	2.577.710.300	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Prasaran Pengolahan Persampahan	n/a	n/a	66,67%	1.815.000.000	88,89%	500.000.000	88,89%	500.000.000	100,00%	300.000.000	100,00%	3.115.000.000	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	n/a	n/a	22,55%	3.234.883.423	23,98%	1.634.883.423	25,41%	1.511.383.603	26,84%	1.511.383.603	26,84%	7.892.534.052	P K

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	96,92%	98,18%	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		P
1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	64,18%	64,44%	65,44%	15.245.254.500	66,44%	9.528.867.970	67,44%	9.362.424.572	68,44%	9.904.487.902	68,44%	44.041.034.944	
1.03.07	Program pengembangan pemukiman	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik	41,31%	45,00%	45,28%	8.735.093.800	46,79%	5.765.161.908	48,27%	5.476.903.813	49,67%	5.916.657.872	49,67%	25.893.817.393	
1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	79,26%	83,15%	84,18%	2.151.000.000	85,15%	2.451.432.019	86,08%	2.328.860.418	87,02%	2.303.242.954	87,02%	9.234.535.391	
		Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota	n/a	36,00	36,50		37,00		37,50		38,00		38,00		
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak)	37,83%	40,00%	44,80%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		
		Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif	78,04%	79,38%	80,14%		81,02%		81,90%		82,84%		82,84%		
1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi	53,13%	50,01%	53,56%	45.350.045.216	53,93%	27.109.829.843	54,31%	25.977.588.350	54,68%	22.760.541.259	54,68%	121.198.004.668	
1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik	92,52%	90,00%	90,50%	630.000.000	91,00%	465.800.000	91,50%	411.160.000	92,00%	406.637.240	92,00%	1.913.597.240	
1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang	35,33%	36,18%	37,30%	2.150.000.000	38,27%	2.019.000.000	39,25%	1.134.550.000	40,22%	1.766.569.950	40,22%	7.070.119.950	
1.04	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**					**6.215.309.315**		**5.987.078.997**		**5.704.993.750**		**5.659.381.170**		**23.566.763.232**	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perkim oleh Inspektorat	A	A	A	4.036.570.669	A	3.808.340.351	A	3.676.255.104	A	3.720.642.524	A	15.241.808.648	
		Nilai IKM	83,00	84,00	85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		

PUPR

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penurunan angka backlog	n/a	n/a	6.361	640.979.290	5.761	640.979.290	5.161	640.979.290	4.561	640.979.290	4.561	2.563.917.160	
		Persentase penurunan angka Backlog kebutuhan rumah)	13,54%	13,97%	n/a		n/a		n/a		n/a				
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	95,85%	96,27%	96,95%	1.344.333.240	97,24%	1.344.333.240	97,53%	1.194.333.240	97,81%	1.104.333.240	97,81%	4.987.332.960	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah	20,59%	18,62%	19,75%	193.426.116	22,93%	193.426.116	26,11%	193.426.116	29,30%	193.426.116	29,30%	773.704.464	
1.05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN RAKYAT**					**14.450.940.405**		**14.989.331.863**		**14.888.519.847**		**14.866.152.969**		**59.194.945.084**	
1.05	**SATPOL PP**					**10.337.717.418**		**10.653.239.668**		**10.590.012.689**		**10.575.984.697**		**42.156.954.472**	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	80,00	89,00	90,00	5.319.109.208	90,00	5.331.406.282	90,00	5.319.109.208	90,00	5.319.109.226	90,00	21.288.733.924	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.767.605.190	100,00%	3.922.830.436	100,00%	3.871.900.531	100,00%	3.857.872.521	100,00%	15.420.208.678	
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	1.251.003.020	100,00%	1.399.002.950	100,00%	1.399.002.950	100,00%	1.399.002.950	100,00%	5.448.011.870	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		
1.05	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					**4.113.222.987**		**4.336.092.195**		**4.298.507.158**		**4.290.168.272**		**17.037.990.612**	
1.05.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	87,91	89,00	90,00	2.074.118.534	90,00	2.583.913.965	90,00	2.049.665.841	90,00	2.045.689.594	90,00	8.753.387.934	

SATPOL PP

B

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	100,00%	100,00%	100,00%	2.039.104.453	100,00%	1.752.178.230	100,00%	2.248.841.317	100,00%	2.244.478.678	100,00%	8.284.602.678	PBD
1.06	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**					**3.609.016.490**		**4.330.158.481**		**4.075.475.867**		**4.063.343.589**		**16.077.994.427**	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	90,00	91,00	92,00	3.214.433.456	93,00	3.214.433.456	94,00	3.214.433.456	95,00	3.214.433.456	95,00	12.857.733.824	DINAS SOSIAL
		Nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	65,00%	70,00%	70,00%	91.881.560	70,00%	353.732.310	70,00%	353.732.310	70,00%	341.600.032	70,00%	1.140.946.212	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terlayani	n/a	n/a	85,00%	51.026.480	85,00%	256.131.040	85,00%	200.822.211	85,00%	200.822.211	85,00%	708.801.942	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	100,00%	100,00%	100,00%	172.779.074	100,00%	427.965.755	100,00%	228.591.970	100,00%	228.591.970	100,00%	1.057.928.769	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	48.859.230	100,00%	47.859.230	100,00%	47.859.230	100,00%	47.859.230	100,00%	192.436.920	
1.06.07	Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawanan	Persentase TMP yang terpelihara	100,00%	100,00%	100,00%	30.036.690	100,00%	30.036.690	100,00%	30.036.690	100,00%	30.036.690	100,00%	120.146.760	
2	**URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR**					**65.219.681.644**		**61.966.936.229**		**61.670.780.337**		**61.745.309.551**		**250.596.707.760**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**					**3.322.089.934**		**3.546.274.089**		**4.058.010.356**		**4.049.520.889**		**14.969.895.268**	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	89,00	90,00	90,00	3.102.885.182	91,00	3.327.069.337	92,00	3.838.805.604	93,00	3.830.316.137	93,00	14.099.076.260	DIN
		Nilai Evaluasi AKIP Disnakerin oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	n/a	n/a	0,80%	2.000.000	0,81%	2.000.000	3,20%	2.000.000	4,80%	2.000.000	4,80%	2.000.000	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,82%	3,98%	3,92%	76.000.000	3,95%	76.000.000	3,97%	76.000.000	4,00%	76.000.000	4,00%	304.000.000	ASNAKER PERIN
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	46,24%	46,30%	46,35%	119.586.952	46,45%	119.586.952	46,50%	119.586.952	46,60%	119.586.952	46,60%	478.347.808	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,23%	3,23%	4,03%	21.617.800	4,03%	21.617.800	4,03%	21.617.800	4,03%	21.617.800	4,03%	86.471.200	
2.08	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**4.198.822.731**		**4.330.451.085**		**4.274.988.051**		**4.258.245.280**		**17.062.507.147**	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90,00	90,50	90,50	3.713.320.525	90,60	3.824.948.879	90,60	3.789.485.845	90,70	3.772.743.074	90,70	15.100.498.323	DINAS P3
		Nilai Evaluasi AKIP DP3AP2KB oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif	16,00%	16,00%	16,00%	38.613.950	16,00%	38.613.950	16,00%	38.613.950	16,00%	38.613.950	16,00%	154.455.800	
		Persentase ARG belanja langsung APBD	3,62%	3,72%	3,82%		3,92%		4,02%		4,12%		4,12%		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100,00%	100,00%	100,00%	37.405.530	100,00%	37.405.530	100,00%	37.405.530	100,00%	37.405.530	100,00%	149.622.120	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,250	0,250	0,250		0,249		0,248		0,247		0,247		
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	33 organisasi	33 organisasi	33 organisasi	326.938.216	33 organisasi	326.938.216	34 organisasi	326.938.216	35 organisasi	326.938.216	35 organisasi	1.307.752.864	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak	2	3	1	9.391.620	1	19.391.620	1	9.391.620	1	9.391.620	4	47.566.480	APP2KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	650	700	725	60.731.010	750	60.731.010	750	60.731.010	800	60.731.010	800	242.924.040	
		Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat	-	-	9		9		9		8		35		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	0,056	0,026	0,025	12.421.880	0,024	22.421.880	0,023	12.421.880	0,022	12.421.880	0,022	59.687.520	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2.09	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN**					**2.804.647.926**		**2.893.447.768**		**2.877.998.377**		**2.874.570.665**		**11.450.664.736**	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	85,04	85,00	85,00	2.531.309.900	85,50	2.543.669.900	86,00	2.540.220.509	86,50	2.538.620.509	86,50	10.153.820.818	DINAS KETAHANAN PAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masyarakat + pemda)	40,51%	50,00%	51,00%	5.000.000	52,00%	15.000.000	53,00%	20.000.000	54,00%	19.000.000	54,00%	59.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	60,00%	60,00%	61,00%	190.871.834	61,50%	227.911.676	62,00%	213.911.676	62,50%	212.711.676	62,50%	845.406.862	
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	55,55%	56,00%	57,00%		57,50%		58,00%		58,50%		58,50%		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	88,77	89,00	89,00	38.900.000	89,10	62.900.000	89,20	61.900.000	89,30	63.272.288	89,30	226.972.288	G A N
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	87,50%	90,00%	90,00%	38.566.192	90,00%	43.966.192	90,00%	41.966.192	90,00%	40.966.192	90,00%	165.464.768	
2.10	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**					**300.000.000**		**198.000.000**		**188.100.000**		**186.030.900**		**872.130.900**	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi	28,57%	21,83%	22,00%	100.000.000	25,00%	66.000.000	27,27%	62.700.000	27,50%	62.010.300	27,50%	290.710.300	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	133,29%	100,00%	100,00%	200.000.000	100,00%	132.000.000	100,00%	125.400.000	100,00%	124.020.600	100,00%	581.420.600	
2.11	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**13.593.125.533**		**13.969.234.897**		**13.886.914.027**		**13.868.649.728**		**55.317.924.185**	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	87,90	89,00	89,00	4.500.532.953	89,00	4.501.532.953	89,00	4.565.532.953	89,00	4.564.532.953	89,00	18.132.131.812	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	210.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	390.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,59	58,00	58,26	650.892.854	58,27	650.892.854	58,28	650.892.854	58,29	700.892.764	58,29	2.653.571.326	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH Publik	14,87%	14,87%	14,88%	1.864.802.920	14,89%	1.914.802.920	14,90%	1.864.802.920	14,91%	1.864.802.920	14,91%	7.509.211.680	D

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	n/a	n/a	50,00%	32.998.320	50,00%	32.998.320	50,00%	32.998.320	50,00%	32.998.320	50,00%	131.993.280	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	72,00%	35.299.310	73,00%	35.299.310	74,00%	35.299.310	75,00%	60.000.000	75,00%	165.897.930	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan	59,55%	20,00%	20,00%	51.115.070	20,00%	51.115.070	20,00%	54.115.070	20,00%	54.115.070	20,00%	210.460.280	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	3 penghargaan	3 penghargaan	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	44.565.770	4 penghargaan	178.263.080	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	n/a	n/a	10 kasus	20.000.000	10 kasus	20.000.000	10 kasus	20.000.000	10 kasus	45.000.000	40 kasus	105.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	99,56%	95,34%	95,50%	6.332.918.336	95,75%	6.658.027.700	96,00%	6.408.706.830	96,25%	6.441.741.931	96,25%	25.841.394.797	
2.12	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**3.400.247.078**		**3.753.718.553**		**3.694.707.027**		**3.681.614.306**		**14.530.286.964**	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi AKIP Disdukcapil oleh Inspektorat	A	A	A	3.016.669.818	A	3.186.161.953	A	3.147.250.427	A	3.134.157.706	A	12.484.239.904	DIN
		Nilai IKM	93,02	92,00	93,10		93,20		93,30		93,40		93,40		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95,00%	95,00%	95,00%	153.070.904	96,00%	212.567.324	97,00%	212.567.324	98,00%	212.567.324	98,00%	790.772.876	ASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	97,60%	97,80%	98,00%	229.506.356	98,20%	272.345.636	98,30%	272.345.636	98,40%	272.345.636	98,40%	1.046.543.264	
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	56,67%	50,00%	53,33%	800.000	56,67%	45.982.460	60,00%	35.882.460	63,30%	35.882.460	63,30%	118.547.380	
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Kota dalam satu tahun	100,00%	100,00%	100,00%	200.000	100,00%	36.661.180	100,00%	26.661.180	100,00%	26.661.180	100,00%	90.183.540	
2.14	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KB**					**315.241.590**		**642.241.590**		**622.241.590**		**622.241.590**		**2.201.966.360**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko payakumbuh	100,00%	100,00%	100,00%	42.234.850	100,00%	42.234.850	100,00%	42.234.850	100,00%	42.234.850	100,00%	168.939.400	DINAS P3AP2KB
		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,35	2,71	2,69		2,67		2,65		2,63		2,63		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,16%	15,00%	14,50%	238.836.870	14,00%	258.836.870	13,50%	238.836.870	13,00%	238.836.870	13,00%	975.347.480	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69,44%	39,60%	40,60%		41,60%		42,60%		43,60%		43,60%		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan	22,4 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun	34.169.870	22,5 tahun	341.169.870	22,5 tahun	341.169.870	22,5 tahun	341.169.870	22,5 tahun	1.057.679.480	
		Persentase pelaksanaan pembangunan keluarga yang efektif	n/a	n/a	71,67%		72,67%		73,67%		74,67%		74,67%		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.15	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN**					**6.354.799.132**		**6.594.030.533**		**6.553.250.293**		**6.544.202.496**		**26.046.282.454**	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	88,58	94,00	85,00	4.213.574.008	87,00	2.278.609.668	89,00	1.248.838.522	90,00	4.437.140.345	90,00	12.178.162.543	DINAS PERHUBUNGAN
		Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	78,15%	80,21%	82,00%	2.141.225.124	84,00%	4.315.420.865	86,00%	5.304.411.771	88,00%	2.107.062.151	88,00%	13.868.119.911	
2.16	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**					**6.173.159.968**		**7.492.135.346**		**7.350.340.068**		**7.323.622.147**		**28.339.257.529**	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi AKIP Diskominfo oleh Inspektorat	A	A	A	3.164.640.116	A	3.104.018.998	A	3.095.796.091	A	2.989.177.538	A	12.353.632.743	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Nilai IKM	90,30	92,00	92,00		92,00		92,00		92,00		92,00		
02:16:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media.	100,00%	100,00%	100,00%	1.039.072.002	100,00%	1.198.087.965	100,00%	1.196.166.392	100,00%	1.152.645.472	100,00%	4.585.971.831	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	64,52%	65,00%	65,00%	1.969.447.850	65,00%	3.190.028.383	65,00%	3.058.377.585	65,00%	3.181.799.137	65,00%	11.399.652.955	
		Persentase pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	50,00%	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2.17	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM**					**9.295.756.308**		**7.634.786.028**		**7.583.478.696**		**7.572.095.283**		**32.086.116.314**	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai IKM	86,35%	89,00%	90,00%	8.685.791.876	91,00%	7.133.810.339	92,00%	7.085.869.667	93,00%	7.075.233.205	93,00%	29.980.705.087	DINAS KOPERASI DAN UKM
		Nilai evaluasi AKIP Dinas Koperasi dan UKM oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	60,00%	22.093.725	60,00%	18.146.007	60,00%	18.024.062	60,00%	17.997.007	60,00%	76.260.801	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan willayah keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	n/a	70,00%	70,00%	16.570.456	70,00%	13.609.639	70,00%	13.518.180	70,00%	13.497.888	70,00%	57.196.163	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	65,00%	65,00%	505.759.017	65,00%	415.389.748	65,00%	412.598.244	65,00%	411.978.901	65,00%	1.745.725.910	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)	n/a	n/a	0,30%	18.207.095	0,30%	14.953.842	0,30%	14.853.349	0,30%	14.831.053	0,30%	62.845.340	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	n/a	n/a	0,20%	47.334.139	0,20%	38.876.452	0,20%	38.615.194	0,20%	38.557.229	0,20%	163.383.013	
2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**					**4.696.638.724**		**4.836.651.480**		**4.810.413.581**		**4.804.592.252**		**19.148.296.037**	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	96,63	95,03	96,63	3.657.764.574	97,03	3.834.492.035	98,03	3.813.690.658	99,03	3.811.855.548	99,03	15.117.802.815	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
	Daerah Kab/Kota	Nilai evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	417,2 milyar	203,8 milyar	204 milyar	220.610.341	206 milyar	225.896.596	208 milyar	224.671.151	210 milyar	223.772.618	210 milyar	894.950.706	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Jumlah Investor	n/a	10,00%	10,00%	160.443.884	10,00%	82.144.217	10,00%	81.698.600	10,00%	81.371.861	10,00%	405.658.562	DINAS PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100,00%	100,00%	100,00%	320.887.768	100,00%	328.576.867	100,00%	326.794.401	100,00%	325.487.444	100,00%	1.301.746.480	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	28,00%	28,00%	28,00%	276.765.700	28,00%	303.933.602	28,00%	302.284.821	28,00%	301.075.885	28,00%	1.184.060.008	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100,00%	100,00%	100,00%	60.166.457	100,00%	61.608.163	100,00%	61.273.950	100,00%	61.028.896	100,00%	244.077.466	
2.19	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**6.405.047.384**		**2.569.544.829**		**2.325.564.846**		**2.521.471.618**		**13.821.628.677**	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,32%	4,32%	4,32%	1.133.320.059	4,32%	423.498.841	4,50%	414.080.852	4,50%	411.840.307	4,50%	2.382.740.059	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	43,16%	35,20%	35,20%		35,20%		40,16%		40,16%		40,16%		DINAS PARPO
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah)	45 medali	170 medali	55 medali	4.954.126.013	55 medali	2.027.364.785	55 medali	1.795.442.086	55 medali	1.994.217.293	220 mendali	10.771.150.177	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peringkat pramuka Tingkat Propinsi	5	2	2	317.601.312	2	118.681.203	2	116.041.908	2	115.414.018	2	667.738.441	RA
2.20	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK**					**51.306.090**		**43.589.175**		**43.519.264**		**41.935.874**		**180.350.403**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	83,87%	100,00%	100,00%	51.306.090	100,00%	43.589.175	100,00%	43.519.264	100,00%	41.935.874	100,00%	180.350.403	DISKOMINFO
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	83,87%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2.21	**URUSAN PERSANDIAN**					**103.860.892**		**88.239.245**		**88.097.721**		**84.892.403**		**365.090.261**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	85,00%	85,00%	85,00%	103.860.892	85,00%	88.239.245	85,00%	88.097.721	90,00%	84.892.403	90,00%	365.090.261	DISKOMINFO
		Persentase penanganan cyber attack	85,00%	85,00%	85,00%		85,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
2.22	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**					**1.630.722.872**		**617.025.099**		**610.789.958**		**614.931.119**		**3.473.469.048**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan dilestarikan	20,00%	23,00%	27,00%	1.466.102.375	29,00%	497.852.878	31,00%	485.669.439	33,00%	482.770.992	33,00%	2.932.395.684	DINAS PARPO
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/ pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya	n/a	n/a	n/a	-	5,00%	50.000.000	5,00%	50.000.000	5,00%	50.000.000	15,00%	150.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/ terpelihara	26 cb	28 cb	28 cb	62.168.313	28 cb	23.231.044	28 cb	22.714.420	28 cb	22.591.515	28 cb	130.705.292	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi permuseuman yang dipelihara		100,00%	100,00%	102.452.184	100,00%	45.941.177	100,00%	52.406.099	100,00%	59.568.612	100,00%	260.368.072	RA
2.23	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN**					**2.347.937.746**		**2.439.222.708**		**2.390.395.176**		**2.384.421.037**		**9.561.976.667**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai IKM	86,50	90,00	87,25	2.038.337.020	87,50	2.191.958.381	87,75	2.148.080.502	88,00	2.141.872.835	88,00	8.520.248.738	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
		Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,48	50,00	60,00	308.812.956	65,00	246.420.447	70,00	241.487.686	75,00	241.720.417	75,00	1.038.441.506	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	n/a	n/a	15 eksemplar	787.770	20 eksemplar	843.880	25 eksemplar	826.988	30 eksemplar	827.785	30 eksemplar	3.286.423	
2.24	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**					**226.277.736**		**318.343.804**		**311.971.306**		**312.271.964**		**1.168.864.810**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	55,43%	66,53%	71,36%	117.496.109	75,48%	193.375.297	79,60%	189.504.376	81,21%	189.687.008	81,21%	690.062.790	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	86,66%	89,16%	90,00%	77.270.810	91,66%	91.213.301	92,50%	89.387.424	94,16%	89.473.570	94,16%	347.345.105	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif	n/a	n/a	70,00%	31.510.817	75,00%	33.755.206	80,00%	33.079.506	85,00%	33.111.386	85,00%	131.456.915	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**30.639.412.812**		**22.243.751.671**		**22.102.989.873**		**21.816.196.993**		**96.802.351.349**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**467.508.299**		**455.341.517**		**410.438.371**		**373.356.997**		**1.706.645.184**	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan	551,87 ton	560 ton	560 Ton	396.788.459	560 Ton	386.462.142	560 Ton	348.351.482	560 Ton	316.879.396	2240 ton	1.448.481.479	
		Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Menerapkan Teknologi Anjuran	36,00%	40,00%	40,00%		42,00%		45,00%		50,00%		50,00%		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	7 Ton	7 Ton	7 Ton	70.719.840	7 Ton	68.879.375	7 Ton	62.086.889	7 Ton	56.477.601	28 ton	258.163.705	
		Angka Konsumsi Ikan	33,67 kg/kapita/th	33,30 kg/kapita/th	33,30 kg/kapita/th		33,35 kg/kapita/th		33,40 kg/kapita/th		33,50 kg/kapita/th		33,50 kg/kapita/th		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**14.312.787.453**		**5.164.635.196**		**5.216.030.324**		**4.971.870.759**		**29.665.323.732**	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	86,00	89,00	90,00	11.392.451.889	90,00	4.073.364.715	90,00	4.149.028.086	90,00	3.910.641.950	90,00	23.525.486.640	DINAS PARPORA
		Nilai Evaluasi AKIP Disparpora oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik	45,00%	50,00%	50,00%	2.603.389.978	50,00%	922.834.310	50,00%	901.199.912	55,00%	896.053.077	55,00%	5.323.477.277	
		Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	1 ow	1 ow	1 ow		1 ow		1 ow		1 ow		4 ow		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	75,00%	80,00%	80,00%	129.087.847	80,00%	48.237.524	80,00%	47.164.793	81,00%	46.909.589	81,00%	271.399.753	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah karya kreatif yang mendapatkan pengakuan HAKI	n/a	n/a	n/a	-	6 buah	50.000.000	8 buah	50.000.000	10 buah	50.000.000	10 buah	150.000.000	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	187.857.739	1 fasilitasi	70.198.647	1 fasilitasi	68.637.533	1 fasilitasi	68.266.143	4 fasilitasi	394.960.062	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**13.908.301.505**		**14.884.833.274**		**14.744.124.273**		**14.740.024.403**		**58.277.283.455**	
3.27.01	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	86,28	86,00	86,00	9.429.123.964	87,00	10.084.422.439	88,00	9.983.010.111	89,00	9.974.695.749	89,00	39.471.252.263	DINAS PERTANIAN
		Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pertanian oleh inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16,58%	16,58%	16,50%	904.207.545	17,45%	968.743.357	18,34%	960.532.641	19,21%	961.127.830	19,21%	3.794.611.373	
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan	90,00%	90,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	55,50%	58,50%	58,50%	2.308.360.706	59,00%	2.474.656.755	59,20%	2.455.072.326	59,70%	2.457.857.891	59,70%	9.695.947.678	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	0,35%	0,30%	0,30%	952.885.975	0,30%	1.020.896.102	0,30%	1.012.243.358	0,30%	1.012.870.590	0,30%	3.998.896.025	
		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan	35,00%	35,00%	35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	44,00%	40,00%	50,00%	60.696.596	55,00%	65.028.681	60,00%	64.477.522	60,00%	64.517.475	60,00%	254.720.274	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	45,00%	30,00%	30,00%	52.535.898	35,00%	56.285.531	40,00%	55.808.476	45,00%	55.843.057	45,00%	220.472.962	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	40,00%	40,00%	40,00%	200.490.821	42,00%	214.800.409	45,00%	212.979.839	50,00%	213.111.811	50,00%	841.382.880	
		Persentase Kelompok Tani Ternak yang menerapkan teknologi tepat guna	20,00%	20,00%	20,00%		21,00%		23,00%		25,00%		25,00%		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**1.185.769.486**		**973.895.615**		**967.350.836**		**965.898.765**		**4.092.914.702**	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	20,00%	25,00%	25,00%	21.740.364	27,00%	17.855.785	29,00%	17.735.790	31,00%	17.709.167	31,00%	75.041.106	DINAS KOPERASI DAN UKM
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	90,00%	90,00%	90,00%	875.731.280	91,00%	719.255.187	92,00%	714.421.644	93,00%	713.349.240	93,00%	3.022.757.352	
		Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik	80,00%	80,00%	80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		80,00%		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	5,00%	5,50%	2,00%	37.973.212	2,50%	31.188.140	3,00%	30.978.549	3,50%	30.932.048	3,50%	131.071.949	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	20,00%	20,00%	20,00%	68.841.863	25,00%	56.541.165	27,00%	56.161.197	30,00%	56.076.894	30,00%	237.621.119	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan	2 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	181.482.767	4 kerjasama	149.055.338	5 kerjasama	148.053.655	5 kerjasama	147.831.415	19 kerjasama	626.423.175	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**765.046.069**		**765.046.069**		**765.046.069**		**765.046.069**		**3.060.184.276**	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	2,10%	3,35%	0,10%	735.816.299	0,10%	735.816.299	0,10%	735.816.299	0,10%	735.816.299	0,10%	2.943.265.196	DINAS N
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tetata	40,00%	60,00%	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,20%	2,75%	2,40%	26.229.770	2,50%	26.229.770	2,60%	26.229.770	2,70%	26.229.770	2,70%	104.919.080	AKER PERIN
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINas	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	3.000.000	1 perusahaan	3.000.000	1 perusahaan	3.000.000	1 perusahaan	3.000.000	4 perusahaan	12.000.000	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**40.934.463.271**		**50.952.455.259**		**49.205.465.271**		**48.817.865.525**		**189.910.249.326**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**20.452.563.087**		**22.756.466.036**		**22.223.914.620**		**22.105.758.938**		**87.538.702.681**	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	86,60	88,31	88,41	20.450.763.087	88,50	19.901.606.258	88,60	19.556.914.830	88,80	19.438.759.148	88,80	79.348.043.323	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspekptorat	A	A	A		A		A		A		A		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	3,1238	3,1600	3,1700	1.100.000	3,1800	2.149.859.808	3,1900	2.016.999.820	3,2000	2.016.999.820	3,2000	6.184.959.448	
		Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/a	72,00		73,00		74,00		75,00		75,00		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	n/a	n/a	75,00	700.000	76,00	704.999.970	77,00	649.999.970	78,00	649.999.970	78,00	2.005.699.910	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**20.481.900.184**		**28.195.989.223**		**26.981.550.651**		**26.712.106.587**		**102.371.546.645**	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	80,99	84,00	84,00	17.463.618.944	84,00	18.299.464.432	85,00	18.179.464.432	85,00	18.179.464.432	85,00	72.122.012.240	SEKRETARIAT DPRD
		Nilai AKIP Setwan oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ranperda yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.018.281.240	100,00%	9.896.524.791	100,00%	8.802.086.219	100,00%	8.532.642.155	100,00%	30.249.534.405	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**38.223.320.276**		**41.322.930.578**		**40.809.256.255**		**40.757.067.684**		**161.112.574.793**	
5.01	**PERENCANAAN**					**12.719.520.757**		**13.326.781.603**		**12.983.442.343**		**12.967.875.019**		**51.997.619.722**	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM	87,82	89,00	89,50	11.400.414.193	90,75	11.944.697.685	91,00	11.636.965.196	91,25	11.623.012.317	91,25	46.605.089.391	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
	Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	AA	A	A		A		A		A		A		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	24,04	29,00	25,00	967.490.654	25,50	1.013.681.010	26,00	987.565.441	26,50	986.381.336	26,50	3.955.118.441	BAPPEDA
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	11,51	20,00	13,00		13,50		14,00		14,50		14,50		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD	108,11%	98,80%	100,00%	351.615.910	100,00%	368.402.908	100,00%	358.911.706	100,00%	358.481.366	100,00%	1.437.411.890	
5.02	**KEUANGAN**					**17.311.071.166**		**19.515.789.185**		**19.401.807.771**		**19.376.519.035**		**75.605.187.157**	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai IKM	87,23	85,00	87,30	11.089.720.318	87,50	10.983.761.070	87,50	12.343.635.740	88,00	12.187.058.165	88,00	46.604.175.293	BKD
		Nilai evaluasi AKIP BKD oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	95,00%	95,00%	95,00%	3.988.190.561	95,00%	3.863.573.657	95,00%	4.611.094.194	95,00%	4.734.801.764	95,00%	17.197.660.176	
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	ADA	ADA	ADA		ADA		ADA		ADA		ADA		
		Penetapan APBD tepat waktu	28 des	20 des	27 des		27 des		27 des		27 des		27 des		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	100,00%	83,87%	87,09%	1.295.980.448	90,32%	3.716.516.156	93,54%	1.325.158.289	100,00%	1.307.731.911	100,00%	7.645.386.804	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,43%	12,00%	13,44%	937.179.839	13,45%	951.938.302	13,50%	1.121.919.548	13,75%	1.146.927.195	13,75%	4.157.964.884	
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**7.945.079.543**		**7.945.079.543**		**7.945.079.543**		**7.945.079.543**		**31.780.318.172**	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM	105,55%	85,00	89,00	7.323.170.431	89,50	7.323.170.431	90,00	7.323.170.431	91,00	7.323.170.431	91,00	29.292.681.724	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
		Nilai evaluasi AKIP BKPSDM oleh Inspektorat	100,00%	A	A		A		A		A		A		BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	0,67	0,80	0,82	621.909.112	0,84	621.909.112	0,86	621.909.112	0,88	621.909.112	0,88	2.487.636.448	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**2.000.000**		**277.903.566**		**228.180.739**		**217.148.875**		**725.233.180**	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme ASN	60,79	60,79	60,79	2.000.000	60,82	277.903.566	60,85	228.180.739	60.90	217.148.875	60.90	725.233.180	BKPSDM
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**245.648.810**		**257.376.681**		**250.745.859**		**250.445.212**		**1.004.216.562**	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	90,00%	95,00%	95,00%	245.648.810	95,00%	257.376.681	95,00%	250.745.859	95,00%	250.445.212	95,00%	1.004.216.562	BAPPEDA
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**8.252.275.478**		**8.604.772.667**		**8.546.384.177**		**8.533.429.688**		**33.936.862.010**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**8.252.275.478**		**8.604.772.667**		**8.546.384.177**		**8.533.429.688**		**33.936.862.010**	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat oleh tim	A	A	A	8.016.428.810	A	8.016.428.810	A	8.016.428.810	A	8.016.428.810	A	32.065.715.240	INSPEKTORAT DAERAH
		Nilai IKM	n/a	n/a	88,50		88,75		89,00		89,25		89,25		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	68,42	65,00	65,00	235.646.668	66,00	448.343.857	66,00	404.955.367	67,00	395.000.878	67,00	1.483.946.770	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata - Rata Nilai AKIP PD hasil evaluasi Inspektorat	A	A	A	200.000	A	140.000.000	A	125.000.000	A	122.000.000	A	387.200.000	
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**44.303.608.249**		**45.672.551.628**		**44.351.812.517**		**44.337.442.157**		**178.665.414.551**	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
7.01	**KECAMATAN**					**44.303.608.249**		**45.672.551.628**		**44.351.812.517**		**44.337.442.157**		**178.665.414.551**	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT					**13.894.965.550**		**14.108.477.750**		**13.849.229.909**		**13.847.442.982**		**55.700.116.191**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	90,89	91.00	91.00	11.646.017.068	91.00	11.859.529.268	91.00	11.600.281.427	91.00	11.598.494.500	91.00	46.704.322.263	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
		Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	87.779.878	85,00%	87.779.878	85,00%	87.779.878	85,00%	87.779.878	85,00%	351.119.512	
		Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kelurahan	90,89	91,00	91,00	2.066.447.684	91,00	2.066.447.684	91,00	2.066.447.684	91,00	2.066.447.684	91,00	8.265.790.736	
		Persentase lembaga kemaysarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	12.358.580	100,00%	12.358.580	100,00%	12.358.580	100,00%	12.358.580	100,00%	49.434.320	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan kemasyarakatan difasilitasi	n/a	n/a	100,00%	82.362.340	100,00%	82.362.340	100,00%	82.362.340	100,00%	82.362.340	100,00%	329.449.360	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR					**8.988.702.715**		**9.227.154.964**		**8.968.728.426**		**8.967.123.719**		**36.151.709.824**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	91,74	91,00	91,00	7.716.168.364	91,00	7.827.367.178	91,00	7.696.194.075	91,00	7.694.589.368	91,00	30.934.318.985	KEC
		Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah	70,00%	70,00%	70,00%	68.712.540	70,00%	75.583.794	70,00%	68.712.540	70,00%	68.712.540	70,00%	281.721.414	AMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
		Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM Kelurahan	91,74	91,00	91,00	1.105.091.281	91,00	1.215.600.409	91,00	1.105.091.281	91,00	1.105.091.281	91,00	4.530.874.252	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang (LPM, PKK, RT/RW) aktif	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	19.430.740	100,00%	21.373.814	100,00%	19.430.740	100,00%	19.430.740	100,00%	79.666.034	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyrakatan yang difasilitasi	n/a	n/a	100,00%	79.299.790	100,00%	87.229.769	100,00%	79.299.790	100,00%	79.299.790	100,00%	325.129.139	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA					**9.107.683.517**		**9.426.481.702**		**9.154.134.822**		**9.149.441.648**		**36.837.741.689**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	90,89	91,00	91,00	7.468.352.324	91,00	7.787.150.509	91,00	7.514.803.629	91,00	7.510.110.455	91,00	30.280.416.917	KECAMATAN PAYAKUMBU
		Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Utara yang diterima Perangkat Daerah	75,00%	75,00%	75,00%	63.353.181	75,00%	63.353.181	75,00%	63.353.181	75,00%	63.353.181	75,00%	253.412.724	
		Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%	1.442.490.184	100,00%	1.442.490.184	100,00%	1.442.490.184	100,00%	1.442.490.184	100,00%	5.769.960.736	
		IKM Kelurahan	90,89	91,00	91,00		91,00		91,00		91,00		91,00		

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	20.433.631	100,00%	20.433.631	100,00%	20.433.631	100,00%	20.433.631	100,00%	81.734.524	H U T A R A
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	n/a	n/a	100,00%	113.054.197	100,00%	113.054.197	100,00%	113.054.197	100,00%	113.054.197	100,00%	452.216.788	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN					**6.345.371.588**		**6.647.878.962**		**6.381.148.448**		**6.377.701.362**		**25.752.100.360**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Kecamatan	89,67	90,00	90,00	5.417.935.495	90,00	5.720.442.869	90,00	5.453.712.355	90,00	5.450.265.269	90,00	22.042.355.988	K E C A M A T A N P A Y A K U M B U H S E L A T A N
		Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	33.809.225	85,00%	33.809.225	85,00%	33.809.225	85,00%	33.809.225	85,00%	135.236.900	
		Persentase usulan musrenbang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah	70,00%	75,00%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%	806.421.288	100,00%	806.421.288	100,00%	806.421.288	100,00%	806.421.288	100,00%	3.225.685.152	
		IKM Kelurahan	89,67	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	5.080.320	100,00%	5.080.320	100,00%	5.080.320	100,00%	5.080.320	100,00%	20.321.280	
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	n/a	n/a	100,00%	82.125.260	100,00%	82.125.260	100,00%	82.125.260	100,00%	82.125.260	100,00%	328.501.040	
	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI					**5.966.884.879**		**6.262.558.250**		**5.998.570.912**		**5.995.732.446**		**24.223.746.487**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Kecamatan	86,50	89,00	90,00	5.105.147.129	90,00	5.327.161.664	90,00	5.136.833.162	90,00	5.133.994.696	90,00	20.703.136.651	K E

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
	Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Latina oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		CAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah	70,00%	70,00%	70,00%	24.725.780	70,00%	25.009.160	70,00%	24.725.780	70,00%	24.725.780	70,00%	99.186.500	
		Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		85,00%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%	755.849.870	100,00%	800.159.326	100,00%	755.849.870	100,00%	755.849.870	100,00%	3.067.708.936	
		IKM Kelurahan	86,50	89,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	15.997.160	100,00%	27.137.160	100,00%	15.997.160	100,00%	15.997.160	100,00%	75.128.640	
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	n/a	n/a	100,00%	65.164.940	100,00%	83.090.940	100,00%	65.164.940	100,00%	65.164.940	100,00%	278.585.760	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**2.341.113.732**		**3.895.406.288**		**3.594.023.598**		**3.582.888.330**		**13.413.431.948**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**2.341.113.732**		**3.895.406.288**		**3.594.023.598**		**3.582.888.330**		**13.413.431.948**	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90,22	87,00	88,00	1.544.059.872	88,00	1.651.344.101	89,00	1.651.344.101	89,00	1.640.208.833	89,00	6.486.956.907	
		Nilai Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat	A	A	A		A		A		A		A		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan	25,06%	25,06%	100,00%	52.988.770	100,00%	153.588.530	100,00%	103.588.530	100,00%	103.588.530	100,00%	413.754.360	

No. Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja akhir periode RPD		
			Capaian	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(12)	(14)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif	90,20%	90,64%	90,64%	247.841.950	90,64%	1.127.454.563	90,64%	1.049.154.563	90,64%	1.049.154.563	90,64%	3.473.605.639	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	n/a	n/a	86,11%	78.300.000	86,11%	78.300.000	86,11%	78.300.000	86,11%	78.300.000	86,11%	313.200.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penangaanan konflik antar agama	100,00%	100,00%	100,00%	155.607.740	100,00%	356.907.740	100,00%	255.007.740	100,00%	255.007.740	100,00%	1.022.530.960	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	262.315.400	100,00%	527.811.354	100,00%	456.628.664	100,00%	456.628.664	100,00%	1.703.384.082	
TOTAL						**634.913.401.123**		**597.733.509.163**		**588.548.900.478**		**586.880.599.618**		**2.408.070.410.383**	

BAB 8
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Dilakan untuk mendapatkan gambaran target keberhasilan pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2022*	Target Capaian				
				2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode RPD
1	2		3	4	5	6	9	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,52	79,96	80,41	80,87	81,22	81,22
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16	5,16
3	Tingkat Pengangguran	%	6,30	6,05	5,81	5,52	5,21	5,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,07	4,36	4,71	4,81	4,94	4,94
5	PDRB (ADHB) Perkapita	(Rp /juta)	53,75	56,16	59,41	61,94	65,26	65,26
6	PDRB (ADHK) Perkapita	(Rp /juta)	32,60	33,53	34,60	35,75	36,99	36,99
7	Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	Nilai	0,277	0,277	0,276	0,274	0,272	0,272

8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih Indikator capaian Kinerja Utama daerah (IKU). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi

pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Tabel VIII.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2022*	Target Capaian				
				2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode RPD
1	2		3	4	5	6	9	11
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,32
2	Rata – Rata Lama sekolah	Tahun	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	11,51
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,03	74,18	74,32	74,47	74,61	74,61
4	Prevalensi Stunting	%	18,00	16,00	14,00	13,00	12,00	12,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	71,51	72,01	72,51	73,01	73,51	73,51
6	Tingkat Kemiskinan	%	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16	5,16
7	Tingkat Pengangguran	%	6,30	6,05	5,81	5,52	5,21	5,21
8	Pertumbuhan PDRB Sektor industry	%	2,75	2,85	2,93	3,04	3,15	3,15
9	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,80	4,03	4,28	4,55	4,83	4,83
10	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	milyar	203,8	220	225	230	240	915
11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori	BB	BB	A	A	A	A
12	Indeks Pengelolaan Keuanga n Daerah (IPKD)	scor	74,000	75,000	76,000	78,000	79,000	79,000
13	Indeks SPBE	Indek	2,5	2,5	2,7	3	3,2	3,2
14	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	88,31	88,41	88,50	88,60	88,80	88,80
15	Persentase Panjang Jalan status kota dalam Kondisi Mantap	%	84,00	84,88	85,76	86,64	87,52	87,52
16	Perentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	%	71,98	73,09	74,20	75,31	77,78	77,78
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	58,59	58,00	58,26	58,27	58,28	58,28
18	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80,10	80,23	80,36	80,49	80,62	80,62
19	Persentase	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2022*	Target Capaian				
				2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode RPD
1	2		3	4	5	6	9	11
	lembaga Adat yang Aktif dalam melestarikan nilai budaya							
20	Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karekter Berkategori Baik	%	51,06	51,06	52	52,50	53	53

**target*

8.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja daerah dan indicator kinerja kunci ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial yang meliputi indikator kesejahteraan, pemerataan Ekonomi, dan kesejahteraan Sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel VIII.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.	Laju Inflasi	%	1,69	1,98	1,70	1,94	1,67	1,90	1,90	IKD
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51	11,51	11,51	IKD
3.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,32	IKD
4.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,84	74,03	74,18	74,32	74,47	74,61	74,61	IKD
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
I.	**Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1.	**Urusan Pendidikan**									
1.1	**Angka Partisipasi Kasar**									
1.1.1	APK PAUD	%	44,63	76,30	65,00	67,00	69,00	71,00	71,00	IKD
1.1.2	APK SD/MI/Paket A	%	110,14	132,75	112,00	114,00	115,00	116,50	116,50	IKD
1.1.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	92,03	162,10	94,00	97,00	98,00	100,00	100,00	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2	**Angka Partisipasi Murni**									
1.2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,97	113,80	100	100	100	100	100	IKD
1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,93	124,15	80	82	84	86	86	IKD
1.2.3	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	%	75,49	51,06	51,06	52	52,50	53	53	IKD
1.2.4	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A	%	74	82	73,26	74,26	75,26	76,24	76,24	IKD
1.2.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	115,2	76,30	65	67	69	71	71	IKK
2	**Urusan Kesehatan**									
2.1	Indek Keluarga Sehat	Nilai	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	IKD
2.2	Prevalensi stunting pada balita	%	5,56	5,55	5,54	5,52	5,51	5,50	5,50	IKD
2.3	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	*IKK*
2.4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	*IKK*
2.5	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	89,76	90	92	94	96	100	100	*IKK*
2.6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87,59	87	90	93	97	100	100	*IKK*
2.7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	89,27	92	93	93	97	100	100	*IKK*
2.8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	73,71	80	82	84	86	90	90	*IKK*
2.9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	67,12	85	88	90	92	95	95	*IKK*
2.10	Persentase orang usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	54,22	92	93	94	95	95	95	*IKK*
2.11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	%	14,513	60	65	70	75	80	80	*IKK*

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	(lansia) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar									
2.12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	45,03	83	85	87	90	95	95	*IKK*
2.13	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	107,76	100	100	100	100	100	100	*IKK*
2.14	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	86,21	100	100	100	100	100	100	*IKK*
2.15	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	30,39	20	30	50	60	70	70	*IKK*
2.16	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	60,68	77	78	79	80	81	81	*IKK*
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1	Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan	%	99,76	100	100	100	100	100	100	IKD
3.2	Persentase Pelayanan Air Minum	%	99,76	100	100	100	100	100	100	IKD
3.3	persentase irigasi dengan berkinerja baik	%	84,40	89,49	92,04	93,31	93,94	94,26	94,26	IKD
3.4	persentase irigasi dengan kondisi baik	%	89,00	89,49	90,00	91,00	91,80	92,50	92,50	IKD
3.5	Persentase Penataan sungai	%	24,83	26,37	27,91	29,45	30,99	32,53	32,53	IKD
3.6	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	%	83,12	84,00	84,88	85,76	86,64	87,52	87,52	IKD
3.7	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	64,18	64,44	65,00	66,44	67,44	68,44	68,44	IKD
3.8	Persentase Sistem drainase Skala Kota	%	61,54	64,40	67,26	70,12	72,98	75,84	75,84	IKD
3.9	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	35,33	36,18	37,30	38,27	39,25	40,22	40,22	IKD
3.10	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	%	70,87	71,98	73,09	74,20	75,31	77,78	77,78	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	79,97	80,10	80,23	80,36	80,49	80,62	80,62	IKD
3.12	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	89	89,49	90.48	91,03	91,87	92,65	92,65	IKK
3.13	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	97,39	100	100	100	100	100	100	IKK
3.14	Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,55	96,00	96,56	96,89	97,00	97,55	97,55	IKK
3.15	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
3.16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	75,90	84,00	84,88	85,76	86,64	87,52	87,52	IKK
3.17	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,81	0,21	0,26	0,32	0,35	0,40	0,40	IKK
3.18	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	N/A	85	85	86	87	87	87	IKK
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,85	96,27	96,95	97,27	97,53	97,81	97,81	IKD
4.2	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman.	%	na	na	22,55	23,98	25,41	26,84	26,84	IKD
4.3	Persentase penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah	%	20,58	18,62	19,75	22,93	26,11	29,30	29,30	IKD
4.4	Persentase Kawasan pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	%	n/a	n/a	0,24	0,18	0,12	0,06	0,06	IKK
4.5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	n/a	n/a	3,76	3,40	3,05	2,70	2,70	IKK

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4.6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	n/a	n/a	126	126	132	135	135	IKK
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	%	31	25	25	25	25	25	25	IKD
5.2	Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
5.3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
5.4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	25%	50	50	75	75	75	75	IKK
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	org	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	IKK
5.6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	org	525	525	525	525	525	525	525	IKK
5.7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	org	200	200	200	200	200	200	200	IKK
5.8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
5.9	Waktu tanggap (response time) pananganan kebakaran	mnt	15	15	15	15	15	15	15	IKK
6	**Penanggulangan Bencana Daerah**									
6.1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
6.2	Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100,00	100	100	100	100	100	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6.3	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100,00	100	100	100	100	100	IKD
6.4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	20,26	100	100	100	100	100	100	IKD
6.5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	14,18	100	100	100	100	100	100	IKD
6.6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
7	**Urusan Sosial**									
7.1	Tingkat Kemiskinan	%	6,16	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16	5,16	IKD
7.2	Persentase PPKS yang terlayani	%	n/a	n/a	80	85	90	95	95	IKD
7.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	88,68	100	100	100	100	100	100	IKK
7.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	%	15	100	100	100	100	100	100	IKK
II	**Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar**									
1	**Urusan Ketenagakerjaan**									
1.1	Tingkat Pengangguran	%	6,47	6,30	6,05	5,81	5,52	5,21	5,21	IKD
1.2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	98,96	93,75	93,75	93,75	93,77	93,77	93,77	IKD
1.3	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
1.4	Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi	%	3,82	3,98	3,92	3,95	3,97	4,00	4,00	IKK
1.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	6.350,7	IKK

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.6	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	IKK
1.7	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	IKK
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2.1	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Nilai	98,46	98,78	98,50	98,52	98,54	98,56	98,56	IKD
2.2	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	IKD
2.3	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	IKD
2.4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,62	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	4,12	IKK
2.5	Persentase anak korban kekeransan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
2.6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,041	0,040	0,250	0,249	0,248	0,247	0,247	IKK
3	**Urusan Pangan**									
3.1	Ketersediaan Pangan Utama	ton	19.722	19.725	19.735	19.745	19.755	19.765	19.765	IKD
3.2	Skor PPH Konsumsi	skor	84,20	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	IKD
3.3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	IKD
3.4	Stabilisasi harga									IKD
	a. Beras	%	1,78	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	
	b. Cabe	%	18,85	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	
	c. Bawang	%	11,08	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	
3.5	Indek Ketahanan Pangan	Indeks	84,00	83,50	84	84,10	84,20	84,30	84,30	IKD
3.6	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	61,62	62	63	64	65	66	66	IKK
4	**Urusan Pertanahan**									
4.1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	16,83	17,46	18,52	20,63	22,75	24,87	24,87	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4.2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
4.3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	133,29	100	100	100	100	100	100	IKK
4.4	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
4.5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kasus	3	2	2	2	2	2	8	IKK
5	**Urusan Lingkungan Hidup**									
5.1	Persentase RTH Publik	%	14.87	14.87	14.88	14.89	14.90	14.91	14.91	IKD
5.2	Indeks Kualitas Air	Nilai	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	IKD
5.3	Indeks Kualitas udara	Nilai	92.66	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	IKD
5.4	Indeks Kualitas lahan	Nilai	25.78	25.45	25.50	25.55	25.60	25.65	25.65	IKD
5.5	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,56	95,34	95.50	95.75	96.00	96.25	96.25	IKD
5.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota	Nilai	58,59	58,60	58,26	58,27	58,28	58,29	58,29	IKK
5.7	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	99,56	95,34	95.50	95.75	96.00	96.25	96.25	IKK
5.8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.	%	43,36	60,01	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00	IKK
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
6.1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	93,02	92	93,10	93,20	93,30	93,40	93,40	IKD
6.2	Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan	%	98,50	92	98,50	98,55	98,60	98,65	98,65	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6.3	Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,14	99,00	99,80	99,40	99,50	99,60	99,60	IKK
6.4	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	35,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	50,00	IKK
6.5	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	97,15	95,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00	IKK
6.6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Nota kesepahaman	17,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	IKK
7	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
7.1	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	85	85	85	85	85	85	85	IKD
7.2	Persentase identifikasi keluarga beresiko stunting	%	na	85	85	85	85	85	85	IKD
7.3	TFR (Angka Kelahiran Tortal)	-	2,35	2,71	2,69	2,67	2,65	2,63	2,63	IKK
7.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,44	39,60	40,60	41,60	42,60	43,60	43,60	IKK
7.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,50	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	13,00	IKK
8	**Perhubungan**									
8.1	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	88,58	100,00	85	87	89	90	90	IKD
8.2	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	78,15	80,21	82	84	86	88	88	IKD
8.3	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	61,88	63,00	65,00	67,00	69,00	71,00	71,00	IKK
8.4	Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota	%	100	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	IKK
9	**Urusan Komunikasi dan Informatika**									
9.1	Indeks SPBE	nilai	2,42	2,5	2,5	2,7	3	3,2	3,2	IKD
9.2	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media	%	70	75	75	80	85	90	90	IKD
9.3	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9.4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,75	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	IKK
9.5	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
10	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**									
10.1	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	23,24	23,94	25,00	25,69	26,90	27,59	27,59	IKD/ IKK
10.2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	14,17	14,31	14,53	14,96	15,25	15,75	15,75	IKD/ IKK
11	**Urusan Penanaman Modal**									
11.1	Nilai Realisasi Investasi	(Miliar)	417,24	203,8	220	225	230	240	915	IKD
11.2	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	na	na	0,09	0,98	0,97	0,96	0,96	IKK
12	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**									
12.1	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Orang	8	20	2	2	2	2	2	IKD
12.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Organisasi	150	150	150	150	150	150	150	IKK
12.3	Peningkatan prestasi olahraga (nasional inetrnasional)	Medali	8	2	2	3	2	2	9	IKK
12.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,32	4,32	4,32	4,32	4,50	4,50	4,50	IKK
13	**Urusan Statistik**									
13.1	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	75	80	80	85	90	95	95	IKD
13.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	83,87	100	100	100	100	100	100	IKK
13.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	%	83,87%	100	100	100	100	100	100	IKK

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	pembangunan daerah									
14	**Urusan Persandian**									
14.1	Persentase penanganan cyber attack	%	85	85	85	85	85	90	90	IKD
14.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	85	85	85	85	85	90	90	IKD
15	**Urusan Kebudayaan**									
15.1	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya	%	81.82%	100	100	100	100	100	100	IKD
15.2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	n/a	na	4	4	4	4	4	IKd
15.3	Terlestarikan cagar Budaya	%	3,4	3,5	3,75	4	4,5	5	5	IKK
16	**Urusan Perpustakaan**									
16.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	na	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00	IKK
16.3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	27,69	28,00	28,30	28,60	29,00	29,30	29,30	IKD
17	**Urusan Kearsipan**									
17.1	Indek Pengawasan Kearsipan	Nilai	30,65	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	36,00	IKD
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	55,43	66,53	71,36	75,48	79,60	81,21	81,21	IKK
17.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	86,66	89,16	90,00	91,66	92,50	94,16	94,16	IKK
II	**Layanan Urusan Pilihan**									
1	**Urusan Kelautan**									

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dan Perikanan									
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota	Ton	562,02	560	560	560	560	560	560	IKK
1.2	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	551,87	560	560	560	560	560	560	IKD
2	**Urusan Pariwisata**									
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	-	1	1	1,5	2	2.5	2,5	IKD
2.2	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,07	1	1	1	1	1	1	IKK
2.3	persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota	%	11,66	11	11	11	11	11	11	IKK
2.4	Tingkat Hunian Akomodasi	%	14,47	15,00	18	20	25	30	30	IKK
2.6	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,40	0,41	0,45	0,5	0,8	1	1	IKK
3	**Urusan Pertanian**									
3.1	Produksi padi	Ton	43.905	41.200	41.200	41.225	41.250	41.275	41.275	IKD
3.2	Populasi sapi	Ekor	5995	6025	5400	5427	5454	5480	5480	IKD
3.3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi)	Ton/Ha	5,71	5,18	5,18	5,18	5,20	5,20	5,20	IKK
3.4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	1	1	1	1	1	1	IKK
4	**Urusan Perdagangan**									
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	24,53	25,03	25,13	25,23	25,43	25,5	25,5	IKD
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	17,27							
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	45,52	45,52	46,00	46,00	46,50	46,50	46,50	IKK
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	%	62,18	65,14	69,15	74,12	77,25	80,00	80,00	IKK

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.									
5	**Urusan Perindustrian**									
5.1	Persentase peningkatan nilai produksi	%	15,3	3,00	3,00	3,25	3,30	3,35	3,35	IKD
5.2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	1,37	1,38	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00	IKK
5.3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	43,86	10	10	10	10	10	10	IKK
5.4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	na	na	5	5	5	5	5	IKK
5.5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	Ada/tdk	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	IKK
III	**Fungsi Pendukung**									
1	**Kesekretariatan Daerah**									
1.1	Nilai LPPD	Nilai	3,1238	3,1600	3,1700	3,1800	3,1900	3,2000	3,2000	IKD
1.2	Nilai IKM	Nilai	86,60	88,31	88,41	88,50	88,60	88,80	88,80	IKD
1.3	Indeks Reformasi Hukum	Indek	na	na	72	73	74	75	75	IKK
1.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indek	na	na	75	76	77	78	78	IKK
1.5	Indeks kualitas kebijakan	Indek	na	na	72	73	74	75	75	IKK
1.6	Indeks Pelayanan Publik	Indek	na	na	4,24	4,26	4,28	4,30	4,30	IKK
1.7	Indeks pemerintahan daerah	Indek	na	na	6,20	6,25	6,30	6,35	6,35	IKK
1.8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	%	na	na	70%	70%	70%	70%	70%	IKK
1.9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	na	na	12%	13%	14%	15%	16%	IKK
2	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**									
2.1	Nikai IKM	Nilai	80,99	84	84	84	85	85	85	IKD
2.2	Persentase Ranperda	%	na	na	100	100	100	100	100	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Yang Ditetapkan									
IV	**Fungsi Penunjang**									
1	**Perencanaan**									
1.1	Indek Kualitas Perencanaan	%	-	-	90	90,5	91	91,5	91,5	IKD
2	**Keuangan**									
2.1	IPKD	scor	70,404*	74,000	75,000	76,000	78,000	79,000	79,000	IKD
2.2	Opini LKPD dari BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKK
2.3	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	31,58	31,58	30	30	30	30	30	IKK
2.4	Rasio PAD (thd APBD Non Migas)	%	12,50	12,50	12	12	12	12	12	IKK
2.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	82,92	82,92	80	80	80	80	80	IKK
2.6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	(9,30)	(9,30)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	IKK
2.7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	699,76	699,76	600	600	600	600	600	IKK
2.8	Manajemen Aset	Ada/tdk	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	IKK
2.9	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	10,63	10,63	10	10	10	10	10	IKK
3	**Kepegawaian**									
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	60,79	60,79	60,79	60,82	60,85	60,90	60,90	IKD
3.2	Indek Merit Sistem	%	0,67	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88	IKD
3.3	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	327,25	327,25	332,00	339,00	345,00	345,00	IKK
3.4	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	19,47	19,67	19,88	20,08	20,28	20,28	IKK
3.5	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	na	41,11	43,21	44,60	45,99	47,39	47,39	IKK
4	**Penelitian dan Pengembangan**									
4.1	Kategori tingkat Inovasi Daerah	Kategori	na	na	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	IKD
5	**Inspektorat**									
5.1	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	Indeks	68,42	65	65	66	66	67	67	IKD
5.2	Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Penyusunan RPD		Target				KINERJA AKHIR RPD	Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5.3	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	2+	2+	2+	3	3	3	3	IKK
5.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP)	Level	na	3	3	3	3	3	3	IKK
5.5	Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal	nilai	7,09	7,10	7,11	7,12	7,15	7,20	7,20	IKD
6	**Kewilayahan**									
6.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
7	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
7.1	Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	IKD
7.2	Persentase parpol dan ormas yang aktif	%	90,20	90,64	90,64	90,64	90,64	90,64	90,64	IKD
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1.	Produktivitas Total Daerah	Rp. Jt	59,84	96,25	96,84	97,20	97,20	98,40	98,40	IKD
2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1.549,51	1.638,36	1.768,06	1.908,02	2.059,07	2.222,07	2.222,07	IKD
3.	Rasio Ketergantungan	%	48,08	46,84	45,64	44,46	43,32	42,20	42,20	IKD
D.	**PENCAPAIAN PROGUL PROPINSI**									
1	Penumbuhan milenial entrepreneur dan woman enterpreneur	org	na	893	1.062	1.204	1.375	1.427	5.966	IKD

BAB 9
PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 di lakukan karena telah berakhirnya masa RPJMD 2017 – 2022 serta adanya Undang – undang No 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Maka pada tahun 2023 dan 2024 Kota Payakumbuh tidak memiliki dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Disamping itu adanya perubahan regulasi yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional, juga menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini.

Dampak pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi juga kehidupan sosial masyarakat, sehingga perubahan asumsi dilakukan terhadap beberapa bidang dan urusan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan teknokratis dengan memperhatikan input perencanaan yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, kebijakan nasional dan daerah serta isu global yang tertuang dalam isu strategis.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana pembangunan pembangunan daerah sehingga diharapkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

LAMPIRAN

Penyelarasan target indikator makro pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kota Payakumbuh Dalam RPD Kota Payakumbuh				Target Kota Payakumbuh Dalam RPJMD Provinsi Sumbar				Target Provinsi Sumbar				Target Nasional (RPJMN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2		4	5	6	9					4	5	6	9	4	5	6	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,96	80,41	80,87	81,22	79,96	80,41	80,87	81,22	73,23	73.70	74,16	74,6		75,54		
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,52	5,41	5,29	5,16	5,52	5,41	5,29	5,16	6,16	6,03	5,9	5,77		6,0-7,0		
3	Tingkat Penganggur an	%	6,05	5,81	5,52	5,21	6,05	5,81	5,52	5,21	6,45	6,31	6,13	5,94		3,4-4,3		
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	4,71	4,81	4,94	4,36	4,71	4,81	4,94	4,57	4,6	4,7	4,84	6,0-6,3	6,2-6,5		
5	PDRB (ADHB) Perkapita	(Rp /juta)	56,16	59,41	61,94	65,26	56,16	59,41	61,94	65,26	50,6	53,69	56,13	59,3				
6	PDRB (ADHK) Perkapita	(Rp /juta)	33,53	34,6	35,75	36,99	33,53	34,6	35,75	36,99	32,97	34,09	35,29	36,58				
7	Ketimpanga n Pendapatan (Gini Ratio)	Nilai	0,277	0,276	0,274	0,272	0,277	0,276	0,274	0,272	0,296	0,293	0,289	0,284		0,36-0,37		

LAMPIRAN 2

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
1																								
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8							
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8							
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9							
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/$m^3$)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Debit Air Baku yang Tersedia		55,93	55,93	55,93	55,93
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik		89	89,49	90,48	91,03
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20							
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian keterseedіaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		55,55 %	56,00 %	57,00 %	57,50%
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		60,00 %	60,00 %	61,00 %	61,50 %
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian keterseedіaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		55,55 %	56,00 %	57,00 %	57,50%
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		60,00 %	60,00 %	61,00 %	61,50 %
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian keterseedіaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		55,55 %	56,00 %	57,00 %	57,50%
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		60,00 %	60,00 %	61,00 %	61,50 %

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)					295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian keterseediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		55,55 %	56,00 %	57,00 %	57,50%
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		60,00 %	60,00 %	61,00 %	61,50 %
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian keterseediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan		55,55 %	56,00 %	57,00 %	57,50%
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		60,00 %	60,00 %	61,00 %	61,50 %
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)			22	24	27	28		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Stor PPH Ketersediaan			89,00	89,00	89,10
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		87,50 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11								
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44							
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)			45	50	55	60		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat guna		40,00 %	40,00 %	40,00 %	42,00 %
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani ternak yang yang menerapkan teknologi tepat guna		20,00 %	20,00 %	20,00 %	21,00 %
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	?80	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		#####	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi ikan konsumsi		551,87 ton	560 ton	560 ton	560 ton
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Kelompok pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran		36%	40%	40%	42%
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93							
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		80	82	84	86	90	92							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ProduksiOlahan Hasil Perikanan		7 ton	7 ton	7 ton	7 ton
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan		33,67 kg/kapita/th	33,30 kg/kapita/th	33,30 kg/kapita/th	33,35 kg/kapita/th
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		n/a	n/a	60%	60%
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69							
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)		n/a	n/a	0,30%	0,30%
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		87,50%	90%	90%	90%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		16,58%	16,58%	16,50%	17,45%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana Peternakan		90%	90%	75%	80%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian		55,50%	58,50%	58,50%	59%
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100								
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0,63	0,6	0,57	0,54		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian		44,00%	40,00%	50,00%	55,00%
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)		0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)		1.400	1.423	1.590	1.739	1.768	1.800							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)		3	3	3	3	3	3							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatanya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)		#####	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		#####	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19							
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44							
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang menerapkan teknologi tepat guna		2,10%	3,35%	0,10%	0,10%
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)			72	74	76	78		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk		2,20%	2,75%	2,40%	2,50%
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41.373	43.263	45.363	47.673		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Izin Usaha yang diawasi dari Jumalh izin yang dikeluarkan 2 tahun sebelumnya				25 izin usaha	25 izin usaha
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik		45,00%	50,00%	50,00%	50,00%
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah pengembangan destinasi pariwisatas		1 ow	1 ow	1 ow	1 ow

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan		75,00%	80,00%	80,00%	80,00%
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata		6 kerjasama	7 kerjasama	7 kerjasama	7 kerjasama
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan		1,40 hari	1,50 hari	1,50 hari	1,50 hari
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250							
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696							
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi		417,2 milyar	203,8 milyar	204 milyar	206 milya
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)		4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor		3.758	10,00 %	10,00 %	10,00 %
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))		4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi		28,00 %	28,00 %	28,00 %	28,00 %
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)		15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi perixinan dan non perizinan		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)		0	2	1	1	1	1							
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68							
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)		31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenagga kerja yang ditempatkan		215 orang	261 orang	192 orang	225 orang

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha		20 orang	50 orang	20 orang	25 0rang
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumla hproduk industri yang mendapat sertifikat produk		9 buah	1 buah	6 buah	10 buah
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)			20	20	25	25							
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17							
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88							
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)		0	50	100	150	200	250							
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)		196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi		1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)		2	4	6	8	10	12							
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US$)			1.420,99	1.449,41	1.478,40	1.507,97								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)			5,5	5,8	6,2	6,5		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP		90,00 %	90,00 %	90,00 %	91,00 %
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)			6	6	6	6		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan		5,00 %	5,50 %	2,00 %	2,50 %
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17							
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88							
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17							
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29							
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88							
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																						
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5							
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5							
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100						
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73,92	75	77	79	81	82	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi		53,13%	50,01%	53,56%	53,93%
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0																		
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan		90	95	95	95
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50							
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12							
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka harapan lama sekolah			14,77	12,2	12,25
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		65	65	65	66
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan		99,76	97,22	90	91

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak		97,62%	98,18%	98,41%	98,84%
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)		13,54%	13,97%	13,37%	12,77%
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)		77	79	81	83	85	87	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		75	77	79	81	83	85	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persenatase rumah tangga sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu (BDT)			60%	60%	60%
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana yang ditangani			100%	100%	100%
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																						
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26,66	40	50	60	70	80	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	cakupan kepemilikan KK)					
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97,16	97,75	98	98,25	98,5	99	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91,47	94	95	96	97	98	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase anak usia 0-17 tahun kurang yang memiliki KIA					
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu					
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	rata rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pendaftaran penduduk					
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun					
																		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase cakupan kepemilikan aktakematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
																		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan					
																		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan					
																		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pencatatan sipil tepat waktu					
																		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pencatatan sipil		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)		3	6	9	12	15	18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya tata kelola data kependudukan					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)		1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP El dalam kondisi baik 1)		92%			
																		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah nota kesepahaman kerjasam inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil 1)		28			
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)		3	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya penyajian data dan profil kependudukan				3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil	3 dokumen (agregat, laporan layanan) dan 1 buku profil
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)		80	80	85	90	90	90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko payakumbuh		100%	100%	100%	100%
																		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,35	2,71	2,69	2,67
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		15,16%	15%	14,50%	14%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
																		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		69,44%	39,60%	40,60%	41,60%
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan		22,4 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKB aktif		65%	70%	70%	70%
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS Aktif		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKL aktif		100%	70%	70%	70%
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos		70%	70%	70%	70%
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos		70%	70%	70%	70%
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)			25	25	25	25	25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS		100%	100%	100%	100%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)			100	100	100	100	100							
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)			30	35	40	50								
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		15,16	15	14,5	14

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
																		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		69,44	39,6	40,6	41,6
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		15,16	15	14,5	14
																		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		69,44	39,6	40,6	41,6
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)		54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		15,16	15	14,5	14
																		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		69,44	39,6	40,6	41,6
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan		22,4 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKB aktif		65%	70%	70%	70%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS Aktif		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKL aktif		100%	70%	70%	70%
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan		99,76	97,22	90	91
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak		97,62%	98,18%	98,41%	98,84%
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang		20,59%	18,62%	21,83%	25,35%
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persenatase rumah tangga sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu (BDT)			60%	60%	60%
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100							
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31								
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5								
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)			22	24	27	28								
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah LPM Mandiri (LPM)		0	7	15	25	37	50							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)		2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan		22,4 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun	22,5 tahun
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKB aktif		65%	70%	70%	70%
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKS Aktif		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
																		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase BKL aktif		100%	70%	70%	70%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media.		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742							
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44							
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5								
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68							
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0,63	0,6	0,57	0,54								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16							
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)			100	100	100	100		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD		108,11	98,8	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah		14,27	14,28	14,29	14,3
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah		14,27	14,28	14,29	14,3
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah		14,27	14,28	14,29	14,3
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah		14,27	14,28	14,29	14,3
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		60	60	60	61
																			Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik		75,49	51,06	51,06	52
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		65%	65%	65%	66%
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah satuang pendidikan yang memperoleh NPSN		n/a	n/a	95	95

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak		650	700	725	750
																		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat				9	9
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83,5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak		n/a	0,026	0,025	0,024
																		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak		100%	100%	100%	100%
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak		650	700	725	750
																		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat				9	9

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83,5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak		n/a	0,026	0,025	0,024
																		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak		100%	100%	100%	100%
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,212	91,278	91,279	91,335	91,386	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif		16	16	16	16
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah kelembagaan PUG		33	33	33	33
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan		n/a	57,68	68	68,5
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,245	73,501	73,741	73,966	74,177	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif		16	16	16	16
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah kelembagaan PUG		33	33	33	33
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan		n/a	57,68	68	68,5

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang duduk di legislatif		16	16	16	16
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah kelembagaan PUG		33	33	33	33
																		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan		n/a	57,68	68	68,5
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		84	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan		n/a	0,04	0,04	0,04
																		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)		69,5	70	70,5	71	71,5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah organisasi perempuan yang aktif		33	33	33	33

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)		14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif		30 buah	30 OKP	30 OKP	30 OKP
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda baru (orang)		230	268	348	348	348	1890	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berwirausaha		65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, laban	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos		70%	70%	70%	70%
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)			0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos		70%	70%	70%	70%
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	2E+06	2E+06	1E+06	1E+06	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26							
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		8E+06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		######	100%	100%	100%
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6E+06		0		6E+07	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		######	100%	100%	100%
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi		28,57%	21,83%	22%	25%
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		######	100%	100%	100%
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27							
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57							
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha		35 orang	75 orang	35 orang	40 orang
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68							
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																						
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)		2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan		25,06%	25,06%	100%	100%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)			8	8	8	8								
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)			21	23	23	23								
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)			11	16	21	26		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi		26 bcb	28 bcb	28 bcb	28 bcb
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)			15	15	15	15								
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)			15	15	15	15		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum			50 unit	60 unit	70 unit
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)			30000	35000	40000	45000								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16								
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14							
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)		N/A	3	6	9	12	15							
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30							
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)			1,41	1,52	1,62	1,72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			50	60	61
																		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota perpustakaan		2226	1810	2100	2200
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijkan		90	95	95	95

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50							
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12							
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																						
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)		13,54%	13,97%	13,37%	12,77%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)		13,54%	13,97%	13,37%	12,77%
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi		28,57%	21,83%	22%	25%
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak		97,62%	98,18%	98,41%	98,84%
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang		20,59%	18,62%	21,83%	25,35%
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang		20,59%	18,62%	21,83%	25,35%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)		75	75	75	75	75	75	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan hidup		20%	20%	20%	20%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP dan UKM		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga mandiri		100	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19							
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang		20,59%	18,62%	21,83%	25,35%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan		99,76	97,22	90	91
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)		13,54%	13,97%	13,37%	12,77%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,502	55,181	57,06	58,105	58,499	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Debit Air Baku yang Tersedia		55,93	55,93	55,93	55,93
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik		89	89,49	90,48	91,03
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Debit Air Baku yang Tersedia		55,93	55,93	55,93	55,93
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik		89	89,49	90,48	91,03
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229	115943	116143	116343	116343	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Debit Air Baku yang Tersedia		55,93	55,93	55,93	55,93
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik		89	89,49	90,48	91,03

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana		100%	100%	100%	100%
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan	4,27	11,433	11,433	11,433	11,433	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Debit Air Baku yang Tersedia		55,93	55,93	55,93	55,93
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik		89	89,49	90,48	91,03
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)		1	10	10	10	10	10	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH Publik		17%	17%	17%	17%
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		######	100%	100%	100%
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7			0																		
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0																		
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)		1	1	1	1	1	5							
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangka			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9							
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8							
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)		3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		50%	50%	50%	50%
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3											Persentase layanan yang terintegrasi TIK		65%	65%	65%	65%
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2	97,5	98	98,5	99	100																
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7																
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																						

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara		80	80	80	80
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air		75	75	75	75
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80							
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80							
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)		19	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH Publik		17%	17%	17%	17%
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1																

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak	0,34	0,59	0,81	1	1,15																
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana		100%	100%	100%	100%
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5							
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68							
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)			5	5	5	5								
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100							
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)		3	1,08	1,28	1,44	1,65	5,48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak		0,35 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)			0,63	0,6	0,57	0,54							
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)			5	7	8	10		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pemasatan hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan		45,00 %	30,00 %	30,00 %	
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)		3	3	3	3	3	15							
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26							
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20							
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Sungai yang Berfungsi Baik		85,81	85,89	90,67	91,35
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)		2	2	3	3	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pelayanan persampahan		95,34%	95,34%	95,34%	95,34%
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak		97,62%	98,18%	98,41%	98,84%
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km)		1	2	10	15	25	36	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase		64,18%	64,44%	65,44%	66,44%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%)			60	65	70	75		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pelayanan persampahan		95,34%	95,34%	95,34%	95,34%
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara		80	80	80	80
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		80,21%	80,21%	82%	84%
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000							
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
7		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan																						
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,3	75,35	75,4	75,45	75,5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)		3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	3,31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif		90,20%	90,64%	90,64%	90,64%
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67																
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dengan Indeks RB Baik	70	75	80	85	85																
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)		100	100	100	100	100	100							
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)		8	12	16	18	20	22							

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16							
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)		5	7	9	11	13	15							
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi		A	A	A	A
																		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal		100	100	100	100
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70																
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2																
			Global Terorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penangaanan konflik antar agama		100%	100%	100%	100%

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat		100%	100%	100%	100%
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penangaanan konflik antar agama		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat		100%	100%	100%	100%
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penangaanan konflik antar agama		100%	100%	100%	100%
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat		100%	100%	100%	100%